



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
dan  
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M19. Pemerintah ... A.

19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD ini dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan Daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua agar terarah, terpadu dan berkesinambungan
- (2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
  - a. memberikan gambaran tentang kondisi Daerah, gambaran keuangan Daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai Visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan Daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan Daerah tahunan, dan Renstra PD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun PD;
  - c. mewujudkan perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - d. sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

### BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
  - c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
  - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

M Pasal 5. . .

#### Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 20 Agustus 2025  
BUPATI SABU RAIJUA,



KRISMAN B. RIWU KORE

Diundangkan di Seba  
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTEMUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA :  
03/2025

MPENJELASAN...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

I. UMUM


Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah dimasa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah melantik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama Krisman Riwu Kore, SE, MM dan Ir. Thobias Uly, M.Si menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Periode Tahun 2025-2030. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya, penetapan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 dengan peraturan daerah paling lambat harus dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan tahap Pertama pembangunan jangka menengah pada periode RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2045.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan RPJPD Sabu Raijua

M 2025-2045. 

Oleh karena itu RPJMD 2025-2029 menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan untuk optimalisasi dan akselerasi yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. Optimalisasi dan akselerasi harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

1. Pendekatan holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-  
2029

ISI DAN URAIAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
TAHUN 2025-2029

BABI  
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah melantik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama Krisman Riwu Kore, SE, MM dan Ir. Thobias Uly, M.Si menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Periode Tahun 2025-2030. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya, penetapan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 dengan peraturan daerah paling lambat harus dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan tahap Pertama pembangunan jangka menengah pada periode RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-

M2045. 1:

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan RPJPD Sabu Raijua 2025-2045. Oleh karena itu RPJMD 2025-2029 menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan untuk optimalisasi dan akselerasi yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. Optimalisasi dan akselerasi harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Adapun muatan kebijakan, rencana dan program dalam perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 telah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan pentingnya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup guna memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:


1. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

1. Pendekatan holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
3. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

## 1.2. Dasar hukum penyusunan

Dasar hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Dasar Hukum materi muatan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua 2025-2029

adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
20. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6).

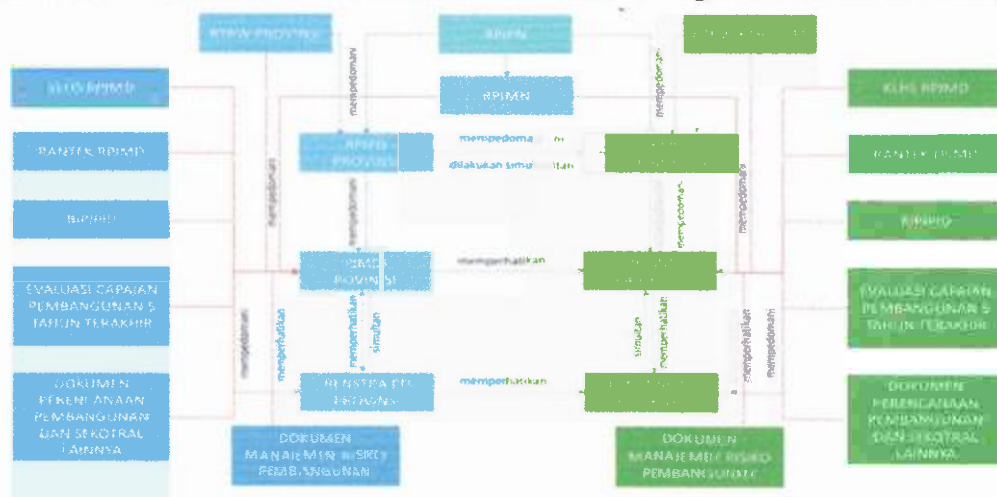
Selain itu terdapat dasar hukum lainnya yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Tahun 2025-2029.

### 1.3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.

Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Sabu Raijua dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen lainnya



Sumber: Inmendagri 2 Tahun 2025

Penjelasan keterkaitan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sabu Raijua  
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2045 terutama terkait dengan isu strategis, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD tahap ke-1 dalam dokumen RPJPD.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sabu Raijua  
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Raijua Tahun 2011-2031 terutama terkait dengan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang.

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD  
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua memperhatikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sabu Raijua, terutama memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan memastikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan Nasional telah terakomodir dalam target dan indikator RPJMD.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029  
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.
5. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2025-2029 setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2025 hingga tahun 2029 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

#### 1.4. Maksud dan tujuan

##### 1.4.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.


##### 1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. memberikan gambaran tentang kondisi daerah, Gambaran Keuangan Daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua
2. merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sabu Raijua

##### 4.1. Sistematika penulisan

#### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang; Dasar hukum penyusunan; Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya; Maksud dan tujuan; dan Sistematika penulisan. 

## BAB 2. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Keuangan Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.


## BAB 3. VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Bab ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

## BAB 4. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi tentang Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

## BAB 5. PENUTUP

Bab ini Menjelaskan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran Pembangunan di daerah. 

## BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

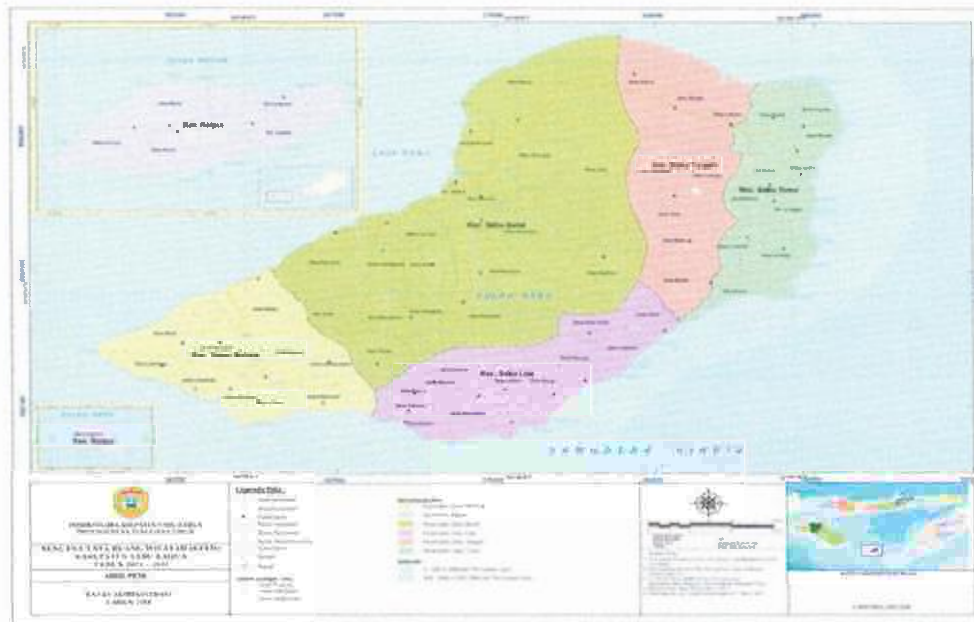
### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

#### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1. Geografi

##### 2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sabu Raijua memiliki luas wilayah sebesar 459,58 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari 4 pulau yaitu Pulau Sabu, Pulau Raijua, Pulau Dana dan Wadu Mea. Pulau Sabu dan Raijua merupakan pulau yang berpenghuni sedangkan Pulau Dana dan Wadu Mea merupakan pulau yang tidak berpenghuni.



Peta 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sabu Raijua

Sumber: RTRW Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2011-2031

Batas geografis Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Sawu
2. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
3. Sebelah Barat : Laut Sawu
4. Sebelah Timur : Laut Sawu

Jumlah kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 6 (enam) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 63 (enam puluh tiga) yang terdiri 58 desa dan 5 kelurahan. Pembagian Desa dan Kelurahan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Sabu Raijua 2024

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Distribusi Luas Wilayah
1	Raijua	Ledeunu	3	2	38,16	8,30 %
2	Sabu Barat	Seba	17	1	185,16	40,29 %
3	Hawu Mehara	Tanajawa	10	-	62,81	13,67 %
4	Sabu Timur	Bollou	8	2	37,21	8,09 %
5	Sabu Liae	Eilogo	12	-	57,62	12,54 %
6	Sabu Tengah	Eimadake	8	-	78,62	17,11 %
Jumlah			58	5	459,58	100,00 %

Sumber: BPS Kabupaten Sabu Raijua 2025

Pada tabel 2.1 terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Sabu Barat seluas 185,16 Km<sup>2</sup> atau sekitar 40,29 % dari total luas Kabupaten Sabu Raijua, memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 17 desa. Sabu Barat juga merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian di Kabupaten Sabu Raijua.

#### 2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Sabu Raijua terletak pada posisi geografis 10°25'7,12"LS sampai 10°49'45,83" LS dan di antara 121°16'10,78" BT sampai 122°0'30,26"BT. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Sabu Raijua, selain memiliki potensi daratan, juga terutama memiliki potensi bahari yang sangat besar. Kabupaten Sabu Raijua memiliki luas wilayah perairan laut cukup luas, dengan total panjang garis pantai kurang lebih 1.026,36 km. Kawasan pesisir terletak di seluruh kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua, hal ini dikarenakan Kabupaten Sabu Raijua merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 2 pulau besar yaitu Pulau Sabu dan Pulau Raijua serta 2 pulau kecil yaitu Pulau Dana dan Pulau Wadu Mea. Dimana Pulau Sabu memiliki panjang garis pantai paling besar yakni 991,18 km, sedangkan panjang garis pantai terkecil adalah Pulau Wadu Mea yakni 0,26 Km.

Kabupaten Sabu Raijua juga mempunyai wilayah laut di selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Negara Australia. Dengan Posisi tersebut, Kabupaten Sabu Raijua termasuk Kabupaten Perbatasan dan/atau wilayah terluar berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Pasal (5) ayat (5) huruf (h) menyebutkan "Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas: 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Hawu Mehara, dan Kecamatan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua".

#### Peran strategis daerah

Kabupaten Sabu Raijua secara strategis memainkan berbagai peran penting: sebagai kawasan **perbatasan laut nasional**, pusat ekonomi lokal berbasis laut dan darat, serta daerah yang secara aktif merencanakan pembangunan berkelanjutan melalui institusi pemerintahan yang terintegrasi. Program-program kemasyarakatan seperti kampung keluarga dan pendidikan inklusif mempertegas misinya membangun sumber daya manusia. Semua ini menjadikannya wilayah yang signifikan baik secara nasional maupun regional.

#### Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merupakan salah satu potensi ekonomi yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan suatu wilayah dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang mempunyai potensi sumber daya alam cukup beragam. Potensi sumber daya alam ini dapat berupa kondisi fisik wilayah maupun hasil alam (kelautan, perkebunan dan perikanan).

Kondisi morfologi Kabupaten Sabu Raijua didominasi oleh perbukitan dan dataran rendah dengan kemiringan lahan yang bervariasi. Wilayah ini memiliki jenis tanah alluvial, grumosol, litosol, dan mediteran, dengan beberapa gunung kapur.

#### 2.1.1.1.3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Daya dukung dan daya tampung Kabupaten Sabu Raijua mengacu pada kemampuan wilayah tersebut untuk menopang kehidupan dan aktivitas penduduk serta berbagai sektor ekonomi. Secara spesifik, daya dukung berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam seperti lahan, air, dan udara yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, daya tampung berkaitan dengan batas maksimal jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, dan

infrastruktur yang dapat ditanggung oleh suatu wilayah tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kualitas hidup.

Daya Dukung:

Kabupaten Sabu Raijua memiliki potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, dan pemukiman. Namun, perlu ada pengelolaan yang bijaksana agar lahan tidak mengalami degradasi akibat eksploitasi berlebihan.

Ketersediaan air bersih menjadi tantangan, terutama pada musim kemarau. Pengembangan sistem irigasi dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan daya dukung air.

Kualitas udara di Sabu Raijua umumnya masih baik karena minimnya industri berat. Namun, perlu ada upaya pencegahan pencemaran udara akibat aktivitas rumah tangga dan transportasi.

Daya Tampung:

Jumlah penduduk di Sabu Raijua terus meningkat, sehingga perlu ada perencanaan tata ruang yang matang untuk mengantisipasi kebutuhan tempat tinggal, fasilitas umum, dan lapangan pekerjaan. Data dari Perkim.id menunjukkan bahwa rata-rata anggota keluarga di Sabu Raijua pada tahun 2020 adalah 4,14, dan jumlah kepala keluarga pada tahun 2020 sebanyak 21.577 KK dan pada tahun 2021 sebanyak 24.836 KK.

Peningkatan aktivitas ekonomi, seperti pariwisata dan perikanan, perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Menurut data dari Pemkab Sabu Raijua, kabupaten ini memiliki enam kecamatan yang terbagi lagi menjadi 58 desa, 5 kelurahan, 244 dusun, 503 RW, dan 918 RT.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum perlu disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

#### 2.1.1.1.3.1. Daya Dukung Air

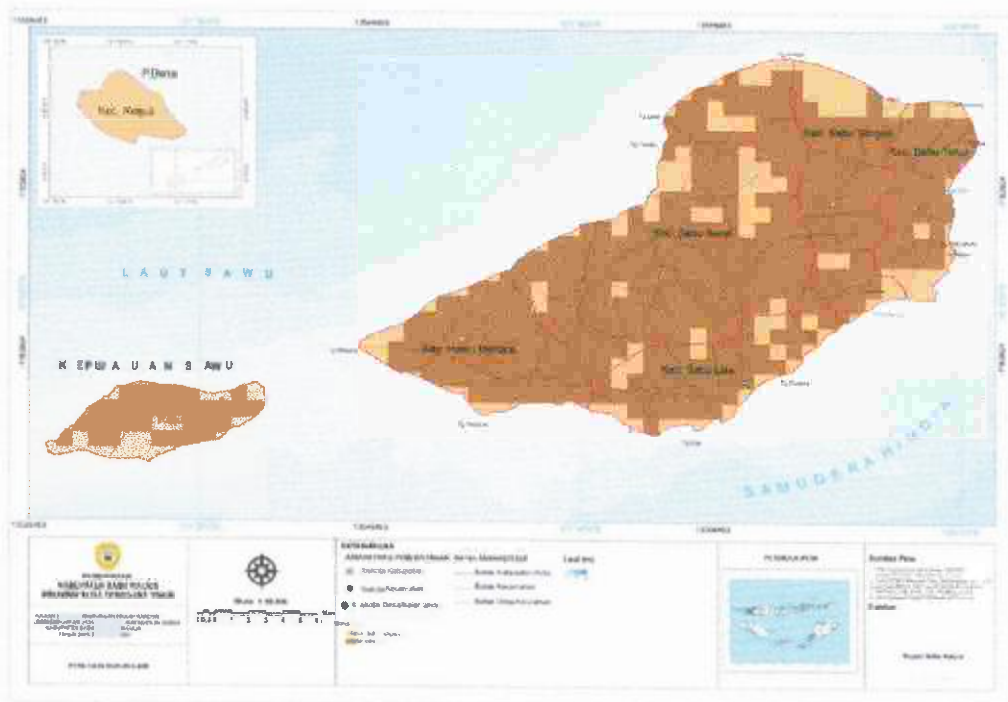
Daya dukung air dapat diketahui dengan melihat selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air. Selisih ketersediaan air dapat bernilai negatif maupun positif. Ketersediaan air bernilai negatif menunjukkan bahwa kebutuhan air suatu wilayah defisit atau telah terlampaui. Daya dukung defisit menunjukkan lingkungan hidup wilayah tersebut tidak mampu lagi mendukung kebutuhan air penduduk di wilayah tersebut. Sebaliknya, jika selisih ketersediaan air bernilai positif menunjukkan bahwa kebutuhan air suatu wilayah surplus.

Daya dukung dan Daya Tampung berdasarkan sistem grid di Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.146/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional dan pedoman Daya Dukung dan Daya Tampung Air. Daya dukung air Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Luas Status Daya Dukung Air Per Kecamatan Berdasarkan Sistem Grid

Kecamatan	Status		Total
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
	(Ha)	(Ha)	
Kec. Hawu	636,08	5.626,26	6.262,34
Kec. Raijua	1.354,24	2.551,96	3.906,21
Kec. Sabu Barat	3.052,66	15.572,4	18.625,0
Kec. Sabu Liae	1.351,93	4.325,20	5.677,12
Kec. Sabu Tengah	1.253,39	5.328,21	6.581,61
Kec. Sabu Timur	1.112,42	3.917,84	5.030,25
<b>Total</b>	<b>8.760,7</b>	<b>37.321,8</b>	<b>46.082,6</b>

Sumber: Pengolahan Data SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023



Sumber: Pengolahan Data SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023

### 2.1.1.1.3.2. Jasa Lingkungan

#### A. Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air

Jasa ekosistem penyedia air bersih berkaitan dengan kapasitas penyimpanan yang berasal dari tanah maupun sumber permukaan. Ekosistem menyediakan ketersediaan air bersih tidak hanya dari tanah maupun air permukaan tetapi juga dari air hujan yang dapat menjadi potensi yang besar jika dimanfaatkan dengan baik. Jasa ekosistem penyedia air bersih dipengaruhi oleh curah hujan di suatu wilayah dan kondisi lapisan bebatuan yang mendukung peresapan dan penyimpanan air dalam tanah. Kondisi ruang terbuka hijau dapat juga mempengaruhi penyimpanan air sehingga menjadi hal penting di suatu wilayah ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air.

Berdasarkan Hasil analisis secara spasial jasa ekosistem penyedia air bersih Kabupaten Sabu Raijua sebagian besar dalam kelas rendah dengan luas 38.703,14 Ha atau 83,99% dari luas Kabupaten Sabu Raijua. Pada total kelas tinggi sebesar 0,02% dari total luas wilayah. Tingginya tingkat penyediaan air bersih berkaitan dengan struktur ekoregion yang ada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Struktur geologi yang berbeda di setiap wilayah kecamatan dapat mempengaruhi daya serap air ke dalam tanah maupun mempengaruhi lama penyimpanan air sehingga dapat berpengaruh pada masing-masing kelas jasa ekosistem.

Tabel 2.3 Luas Per Kelas JL Penyedia Air Bersih Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan	Luas (Ha)				Total
	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Kec. Hawu		285,66	5.930,74	45,94	6.262,34
Kec. Raijua	4,89	59,33	2.750,59	1.091,40	3.906,21
Kec. Sabu Barat	2,45	31,07	15.833,14	2.758,41	18.625,06
Kec. Sabu Liae		76,60	5.231,05	369,48	5.677,12
Kec. Sabu Tengah			5.197,13	1.384,48	6.581,61
Kec. Sabu Timur		75,37	3.760,49	1.194,39	5.030,25
Total	7,33	528,03	38.703,14	6.844,10	46.082,60

Sumber: Pengolahan data DDDT, 2024

### B. Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Jasa ekosistem penyedia bahan pangan memiliki pengertian ekosistem secara alami memberikan manfaat pada keberlangsungan hidup dengan menyediakan segala sesuatu dari sumber hayati baik yang diolah maupun tidak melalui pengolahan. Penyediaan pangan secara alami ekosistem sangat bervariasi di setiap wilayah dapat berasal dari hasil pertanian, perkebunan maupun penyediaan bahan pangan dari hutan.

Berdasarkan Hasil analisis secara fisik jasa ekosistem penyedia pangan Kabupaten Sabu Raijua sebagian besar dalam kelas sedang dengan luas 43.048,56 Ha atau 93,42% dari luas Kabupaten Sabu Raijua. Pada total kelas sangat tinggi dan tinggi sebesar 0,58% dan 0,69% dari total luas wilayah. Jasa ekosistem penyedia pangan kelas tinggi tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Di Kecamatan Sabu Timur juga memiliki lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penyedia bahan pangan dengan adanya sumber air dengan didukung tekstur fisik wilayah ekoregion

Tabel 2.4 Luas Per Kelas JL Penyedia Pangan Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan	Luas (Ha)					Total
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Kec. Hawu Mehara	24,32	1,43	5.975,25	261,34		6.262,34
Kec. Raijua	59,33		3.572,71	111,32	162,85	3.906,21
Kec. Sabu Barat	31,07	219,17	17.318,7	636,83	419,27	18.625,06
Kec. Sabu Liae	76,60		5.302,36	298,17		5.677,12
Kec. Sabu Tengah		99,59	6.010,12	471,90		6.581,61
Kec. Sabu Timur	75,37		4.869,39	85,49		5.030,25
Total	266,69	320,18	43.048,5	1.865,04	582,12	46.082,60

Sumber: Pengolahan data DDDT, 2024

### C. Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air

Jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir berkaitan dengan siklus hidrologi dan struktur alami untuk penyimpanan air, pengendalian banjir dan pemeliharaan air. Siklus merupakan pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses evaporasi, kondensasi, presipitasi dan pengaliran. Siklus hidrologi yang baik berdampak pada pengaturan aliran air yang akan dipengaruhi oleh tutupan lahan dan fisik alam suatu wilayah tersebut.

Berdasarkan Hasil analisis secara spasial jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir Kabupaten Sabu Raijua sebagian besar dalam kelas sedang dengan luas 43.280,55 Ha atau 93,92% dari luas Kabupaten Sabu Raijua. Pada total kelas tinggi sebesar 0,58% dari total luas wilayah.

Tabel 2.5. Luas Per Kelas JL Pengaturan Air Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan	Luas (Ha)				Total
	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Kec. Hawu	261,34	5.999,57	1,43		6.262,34
Kec. Raijua	4,89	3.627,15	111,32	162,85	3.906,21
Kec. Sabu Barat	2,45	17.319,9	883,37	419,27	18.625,0
Kec. Sabu Liae		5.378,96	298,17		5.677,12
Kec. Sabu Tengah		6.010,12	571,49		6.581,61
Kec. Sabu Timur		4.944,77	85,49		5.030,25
Total	268,67	43.280,5	1.951,25	582,12	46.082,6

Sumber: Pengolahan data DDDT, 2024

### D. Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim merupakan kapasitas ekosistem dalam mengatur sistem kimia udara yang akan menjadi kualitas iklim yang baik. Iklim di suatu wilayah akan dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan di udara dengan beberapa faktor seperti arah angin, suhu, sinar uv dan curah hujan. Semakin tinggi intensitas dari pembangunan akan mempengaruhi kondisi iklim. Kerapatan vegetasi juga menjadi input jasa ekosistem pengaturan iklim dimana akan mempengaruhi suhu dan kelembapan suatu wilayah.

Tabel 2.6 Luas Per Kelas JL Pengaturan Iklim Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan	Luas (Ha)				Total
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	
Kec. Hawu	261,34		6.001,00		6.262,34
Kec. Raijua		100,49	3.642,86	162,85	3.906,21
Kec. Sabu Barat		430,79	17.775,0	419,27	18.625,0
Kec. Sabu Liae		298,17	5.378,96		5.677,12
Kec. Sabu Tengah		299,32	6.282,29		6.581,61
Kec. Sabu Timur		85,49	4.944,77		5.030,25
Total	261,34	1.214,26	44.024,8	582,12	46.082,6

Sumber: Pengolahan data DDDT, 2024

Berdasarkan Hasil analisis secara spasial jasa ekosistem pengaturan iklim Kabupaten Sabu Raijua sebagian besar dalam kelas sedang dengan luas 44.024,88 Ha atau 95,53% dari luas Kabupaten Sabu Raijua. Pada total kelas sangat tinggi 0,57% dan tinggi sebesar 2,63 % dari total luas wilayah. Jasa ekosistem pengaturan iklim kelas tinggi tersebar di beberapa kecamatan khususnya di Pulau Sabu.

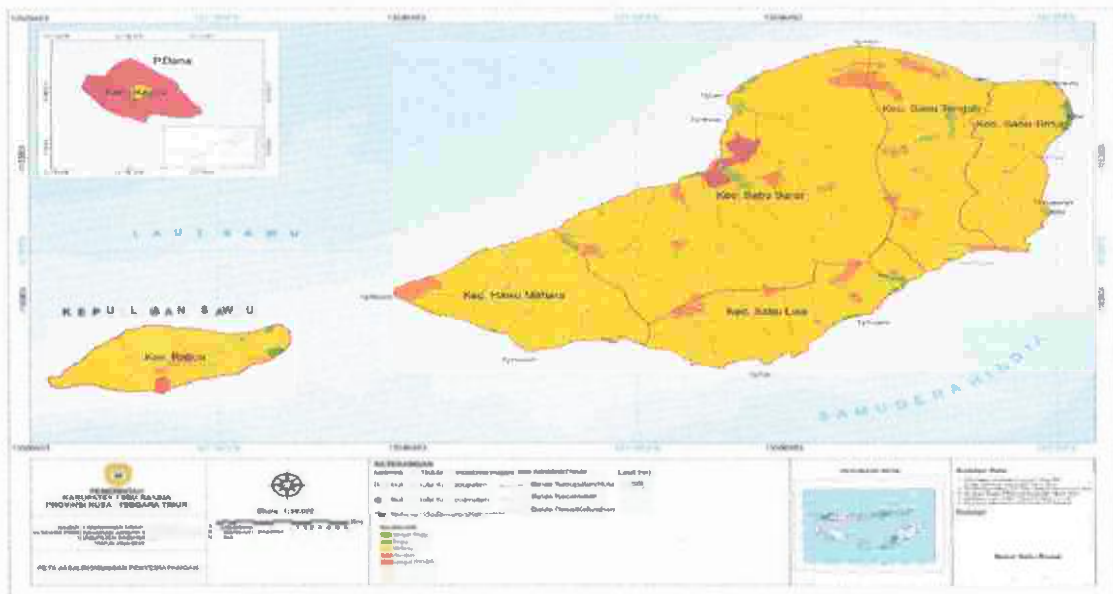
#### E. Kinerja Jasa Lingkungan Mitigasi Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Jasa ekosistem mitigasi perlindungan bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan kapasitas ekosistem dalam mengatur pencegahan terhadap bencana kebakaran. Mitigasi kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah akan dipengaruhi oleh interaksi antar lahan dan ekosistem. Berdasarkan Hasil analisis secara spasial jasa ekosistem mitigasi perlindungan bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Sabu Raijua sebagian besar dalam kelas tinggi dengan luas 44.617,56 Ha atau 96,82% dari luas Kabupaten Sabu Raijua.

Tabel 2.7 Luas Per Kelas JL Mitigasi Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan	Luas (Ha)				Total
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	
Kec. Hawu	287,09	5.975,25			6.262,34
Kec. Raijua	227,06	3.679,14			3.906,21
Kec. Sabu Barat	658,16	17.925,7	27,37	13,79	18.625,0
Kec. Sabu Liae	76,60	5.600,53			5.677,12
Kec. Sabu Tengah	99,59	6.482,02			6.581,61
Kec. Sabu Timur	75,37	4.954,88			5.030,25
Total	1.423,87	44.617,5	27,37	13,79	46.082,6

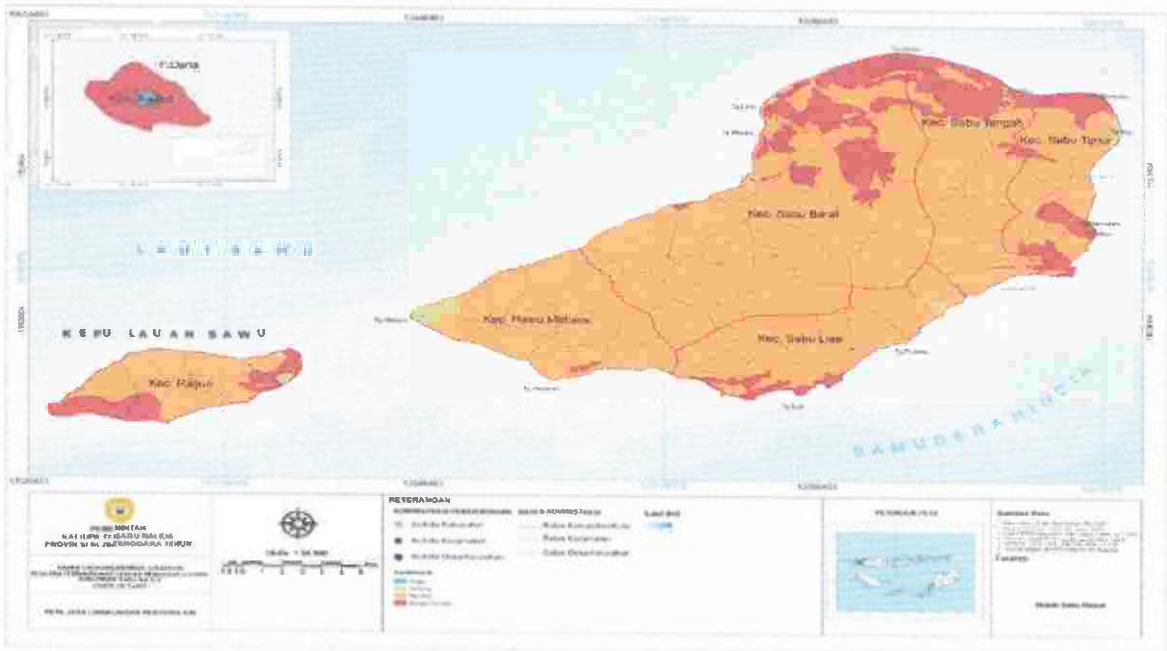
Sumber: Pengolahan data DDDT, 2024



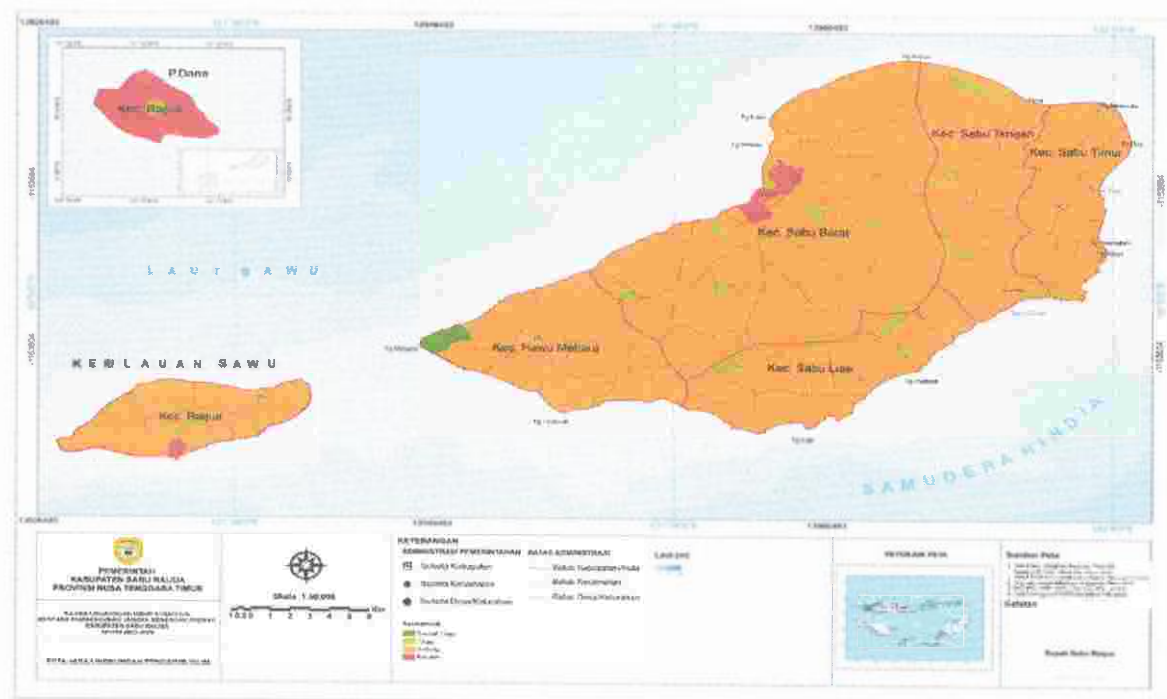
Peta 2.3 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Sumber: Pengolahan data DDDT, 2024





Peta 3.10 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih  
 Sumber: Pengolahan data DDDT, 2024



Peta 2.4 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Air  
 Sumber: Pengolahan data DDDT, 2024



Peta 2.5 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan  
 Sumber: Pengolahan data DDDT, 2024

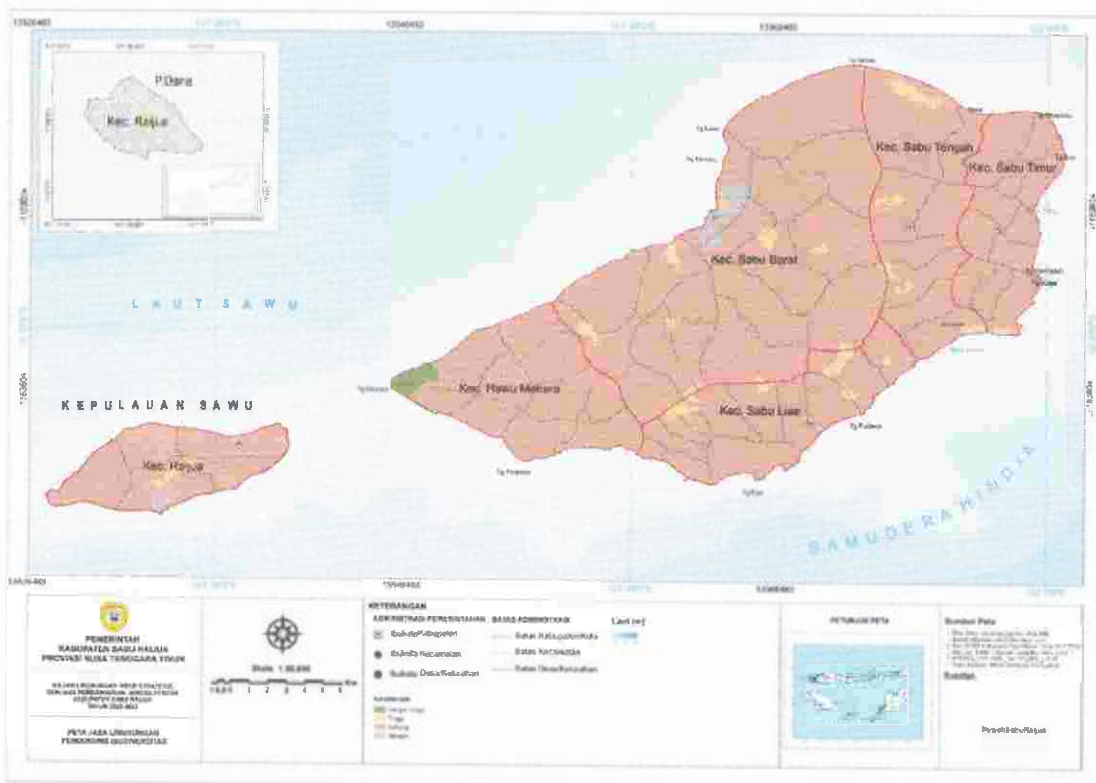
2.1.1.1.3.3. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati  
 2.1.1.1.3.3.1. Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas

Berbagai potensi keanekaragaman hayati alami dan buatan tersebut akan didukung oleh jasa ekosistem pendukung biodiversitas. Jasa ekosistem pendukung biodiversitas merupakan layanan yang diberikan oleh ekosistem alam memberikan manfaat dari tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang mendukung dari seluruh jasa ekosistem seperti penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit yang akan menjaga keutuhan rantai makanan, proses hidrologi dan siklus hara dan penyerapan karbon untuk menjaga emisi yang hilang ke udara sebagai bagian dari mengurangi perubahan iklim yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Berdasarkan Hasil analisis secara fisik ekoregion jasa ekosistem pendukung biodiversitas Kabupaten Sabu Raijua sebagian besar dalam kelas sedang dengan luas 44.024,88 atau 96% dari luas Kabupaten Sabu Raijua. Jasa ekosistem pendukung biodiversitas kelas tinggi tersebar di beberapa kecamatan khususnya di Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Tengah dan Kecamatan Hawu Mehara.

Tabel 2.8 Luas Per Kelas JL Biodiversitas Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan	Luas (Ha)				Total
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	
Kec. Hawu	261,34		6.001,00		6.262,34
Kec. Raijua		100,49	3.642,86	162,85	3.906,21
Kec. Sabu Barat		430,79	17.775,0	419,27	18.625,0
Kec. Sabu Liae		298,17	5.378,96		5.677,12
Kec. Sabu Tengah		299,32	6.282,29		6.581,61
Kec. Sabu Timur		85,49	4.944,77		5.030,25
Total	261,34	1.214,26	44.024,8	582,12	46.082,6

Sumber: Pengolahan data DDDT, 2024



Peta 2.6 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas  
 Sumber: KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

### 2.1.1.1.3.3.2. Profil Konservasi di wilayah Kabupaten Sabu Raijua

#### A. Taman Nasional Perairan Laut Sawu

Laut Sawu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah yang terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah pesisir barat Timor Leste. Daerah ini merupakan wilayah lintasan arus lintas Indonesia (Arlindo), dimana Arlindo adalah pertemuan dua massa arus dai samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Laut Sawu memanjang dari barat ke timur sepanjang 600 km dan dari utara ke selatan sepanjang 250 k. Perairan Laut Sawu bagi pembangunan di Provinsi NTT bermakna strategis, karena hampir sebagian besar Kabupaten/ Kota di NTT sangat tergantung kepada Laut Sawu. Lebih dari 65% potensi lestari sumber daya ikan di propinsi ini disumbang oleh Laut Sawu. Segitiga Karang adalah Pusat keanekaragaman sumber daya hayati laut di dunia dan merupakan prioritas bagi konservasi laut secara global. Wilayah ini mencakup hanya 2% dari perairan laut dunia, namun memiliki sekitar 76% spesies terumbu karang dan 37% spesies ikan karang yang ada didunia.

#### a. Pencadangan

Wilayah Perairan Laut Sawu sebagai wilayah sentral dari Taman Nasional Perairan telah dicadangkan sebagai kawasan konservasi laut. Pencadangan ini untuk menjaga perairan ini yang merupakan kawasan laut yang memiliki keanekaragaman perikanan dan sumberdaya laut yang cukup tinggi. Selain terkait dengan keanekaragaman hayati laut diatas, Laut Sawu juga merupakan salah satu wilayah penting sebagai batas terluar NKRI dengan negara lain.


Proses identifikasi dan inventarisasi TNP Laut Sawu telah dimulai sejak tahun 2005 oleh Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut (saat ini KKJI), dimana hasil kajian awal tersebut dilanjutkan dengan pembentukan Tim Pengkajian dan Penetapan Kawasan Konservasi Laut Sawu (Tim PPKKL Laut Sawu) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan SK Gubernur NTT No. 70/KEP/HK/2006. Deklarasi pencadangan TNP Laut Sawu dilaksanakan pada *side event WOC* dan *CTI Summit* di Manado tanggal 13 Mei 2009. Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu dibentuk melalui Kepmen KP No. KEP.38/MEN/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. TNP Laut Sawu meliputi perairan seluas lebih dari 3.5 juta hektar, yang terdiri dari 2 bagian yaitu Wilayah Perairan Selat Sumba dan Sekitarnya seluas 567.165,64 hektar dan Wilayah Perairan Pulau Sabu-Rote- Timor-Batek dan Sekitarnya seluas 2.953.964,37 hektar.

#### b. Rencana Pengelolaan Zonasi

Rencana pengelolaan dan Zonasi di TNP Laut Sawu mengacu pada pembagian zonasi yang telah diatur di Permen KP No 30 Tahun 2010. Sistem zonasi untuk TNP Laut Sawu mencakup dan meliputi kawasan pesisir dan laut. Usulan sistem zonasi untuk TNP Laut Sawu terdiri dari 4 tipe zona yang memiliki kriteria, peruntukan dan peraturan-peraturan khusus untuk masing-masing zona dan sub zona, zona-zona tersebut yaitu:

##### 1) Zona Inti

Zona Inti merupakan bagian-bagian kawasan konservasi perairan yang memiliki kondisi alam baik biota ataupun fisiknya masih asli dan/belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Zona inti mempunyai luas minimal 2 % dari luas kawasan, dengan kriteria antara lain meliputi:

- Merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;
- Merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langkadan/atau kharismatik. 

- Mempunyai keanekaragaman Jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
- Mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masihasli;
- Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup Jenis-Jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan
- Mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi Kawasan konservasi perairan

## 2) Zona Perikanan Berkelanjutan

Zonasi Perikanan Berkelanjutan adalah bagian kawasan konservasi perairan yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Kriteria dari Zona Perikanan Berkelanjutan meliputi:


- Memiliki nilai konservasi, tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
- Mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan;
- Mempunyai keanekaragaman Jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
- Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk mendukung kegiatan multifungsi dengan tidak merusak ekosistem aslinya;
- Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan budidaya ramah lingkungan, perikanan tangkap berkelanjutan, dan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; dan Mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonomi

Zona Perikanan Berkelanjutan terbagi menjadi 2 sub zona yaitu:

- a) Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Umum adalah zona perikanan berkelanjutan yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan yang bersifat komersial yang ramah lingkungan dan berdampak rendah bagi lingkungan.
- b) Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional adalah zona perikanan berkelanjutan yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan untuk mendukung kegiatan perikanan artisanal (skala kecil atau tradisional) bagi masyarakat setempat yang didalamnya terdapat beberapa pengaturan penggunaan alat tangkap yang bersifat tradisional untuk mengakomodir kepentingan nelayan-nelayan lokal dalam kawasan TNP Laut Sawu yang sebagian besar dalam kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan dengan armada penangkapan yang sederhana seperti sampan dan perahu berukuran GT kecil.

## 3) Zona Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan

Zonasi Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan merupakan bagian kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Zona pemanfaatan mempunyai kriteria sebagai berikut: Mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem perairannya yang indah dan unik;

- Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi;
- Mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung kepentingan konservasi;
- Mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya. 

#### 4) Zona Lainnya

Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain seperti zona perlindungan dan zona rehabilitasi. Zona lainnya di TNP Laut Sawu yaitu:

##### ➤ Zona Kearifan Lokal

Zona Kearifan Lokal diperuntukkan untuk melindungi daerah-daerah yang memiliki nilai-nilai budaya-tradisional yang penting dan mengakomodir kearifan lokal masyarakat yang terdapat dan tersebar di masing-masing daerah di dalam kawasan TNP Laut Sawu yang mempunyai keunikan dan mendukung upaya konservasi seperti Lilifuk, Nempung Cama, Watuweri, Mehing Parotu, Mini Parotu, Luat, Manita, dan kearifan lokal lainnya.


##### ➤ Zona Perlindungan Setasea

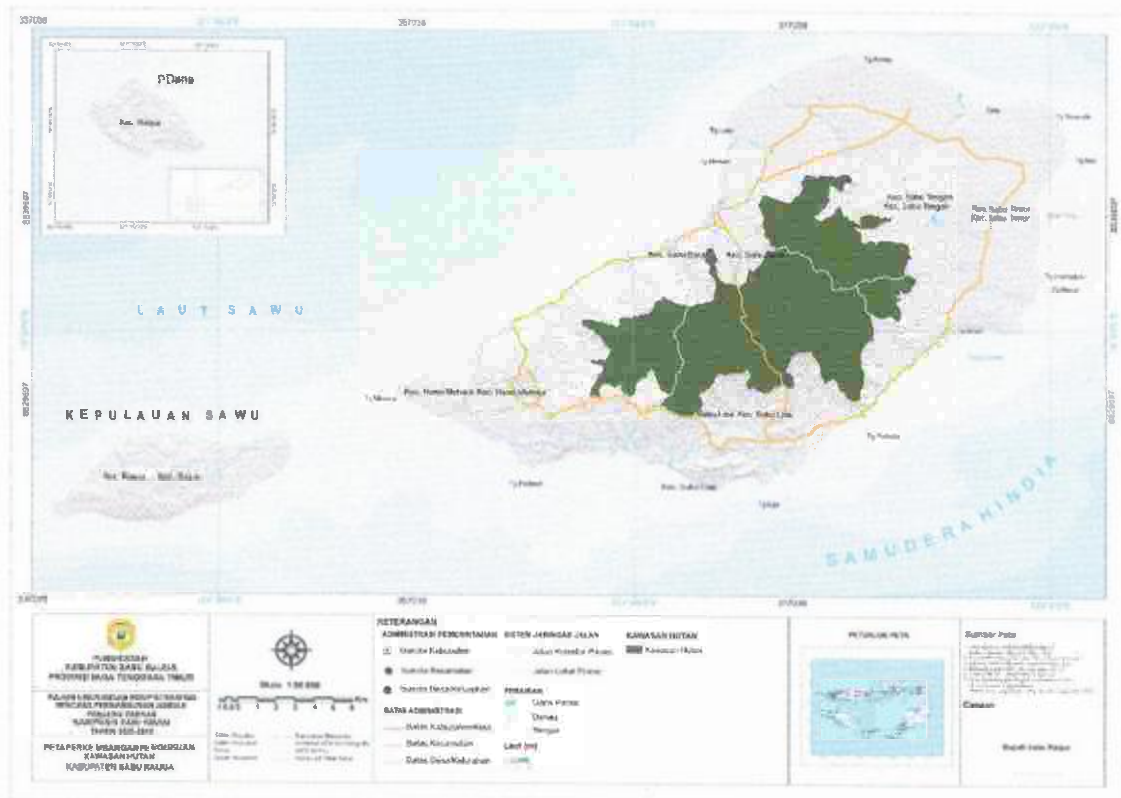
Zona Perlindungan Setasea diperuntukkan untuk melindungi habitat dan koridor migrasi penting bagi setasea (paus dan lumba-lumba) di TNP Laut Sawu dan memungkinkan juga untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan untuk mendukung kegiatan perikanan artisanal (skala kecil atau tradisional) bagi masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa pengaturan penggunaan alat tangkap untuk memaksimalkan perlindungan setasea.

#### B. Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penetapan kawasan hutan merupakan kegiatan perencanaan kehutanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Istilah kawasan hutan secara terminologi hukum pertama kali dicantumkan pada Undang-Undang Kehutanan Tahun 1967 serta peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970. Selanjutnya berdasarkan PP tersebut diterbitkan SK Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 1974, di mana hampir tiga perempat wilayah tanah di Indonesia ditetapkan sebagai Kawasan Hutan oleh Kementerian Kehutanan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan hutan saat ini adalah adanya tuntutan akan kepastian kawasan hutan dan kepastian legalitas aset pihak ketiga sehingga penataan batas menjadi program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan proses sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022. Penetapan kawasan hutan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdasarkan kepada Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan kondisi pemungkin (enabling condition) yang paling penting bagi segala aktivitas atau kegiatan berusaha di kawasan hutan, baik komersil maupun non-komersil.

Kabupaten Sabu Raijua memiliki kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6615 Tahun 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sampai Dengan Tahun 2020. Pada penetapan kawasan hutan tersebut, luas hutan di Kabupaten Sabu Raijua sebesar 9.979,40 Ha yang

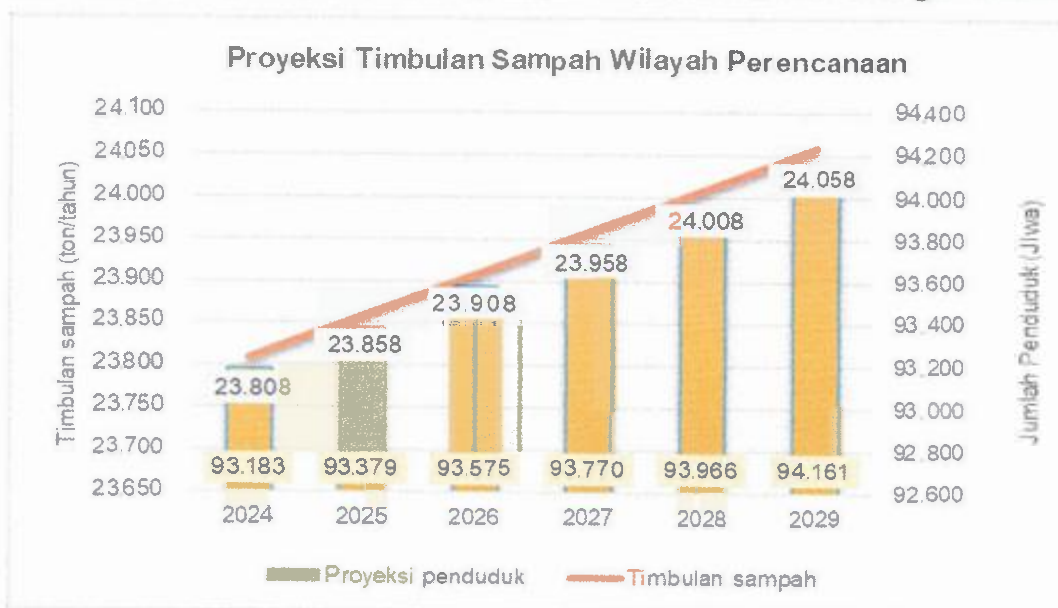
termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Daruma Lari Lobodue. 



Peta 2.7. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Kabupaten Sabu Raijua  
 Sumber: Pengolahan Data BPKHTL Wilayah XIV Kupang, 2024

#### 2.1.1.1.3.4. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup A. Timbulan Sampah

Peningkatan jumlah penduduk di wilayah perencanaan akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah timbulan sampah. Timbulan sampah domestik akan berasal dari pemukiman, pertokoan, pasar, perkantoran, pusat perbelanjaan dan lainnya. Sedangkan timbulan sampah non domestik akan berasal dari kegiatan fasilitas kesehatan dan industri. Berdasarkan SNI 19-3983-1995 timbulan sampah domestik per orang per hari adalah 0,7 kg untuk kota dengan penduduk 20.000-100.000 jiwa. Sedangkan, timbulan sampah non domestik sebesar 25% dari timbulan sampah domestik berdasarkan Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum No. 534/KPTS/M/2001. Sehingga, prakiraan timbulan sampah di wilayah perencanaan yaitu sebagai berikut.



Gambar 2.1 Proyeksi Timbulan Sampah Wilayah Perencanaan  
 Sumber: Hasil analisis, 2024

Berdasarkan analisis, timbulan sampah di wilayah perencanaan sebesar 23.808 ton/tahun dengan kondisi jumlah penduduk sebanyak 93.183 jiwa pada Tahun 2024. Timbulan sampah di wilayah perencanaan akan semakin meningkat setiap tahunnya, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan. Sedangkan, timbulan sampah di tiap kecamatan dalam wilayah perencanaan sebagai berikut.

Tab el 2.7 Proyeksi Timbulan Sampah per Kecamatan

Kecamatan	Timbulan sampah (ton/tahun)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sabu Barat	8.843	8.856	8.868	8.881	8.893	8.905
Sabu Tengah	2.329	2.325	2.321	2.318	2.314	2.310
Sabu Timur	2.459	2.457	2.456	2.454	2.452	2.450
Sabu Liae	2.840	2.847	2.855	2.862	2.870	2.877
Hawu Mehara	4.979	5.008	5.036	5.064	5.093	5.121
Raijua	2.357	2.365	2.373	2.380	2.388	2.395
Kab. Sabu Raijua	23.808	23.858	23.908	23.958	24.008	24.058

Sumber: KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

Sampah menjadi salah satu sumber pencemar udara karena menghasilkan emisi karbon berupa sulfur dioksida, karbondioksida dan gas metan. Maraknya kegiatan pembakaran sampah secara langsung oleh masyarakat juga dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim dikarenakan emisi karbon hasil pembakaran yang terakumulasi sehingga membentuk gas rumah kaca. Selain itu, penanganan sampah yang tidak maksimal juga berpotensi terhadap pencemaran tanah dan air. *Leached* yang dihasilkan dari tumpukan sampah merupakan sumber pencemar air baik air permukaan ataupun air tanah. Pembuangan sampah sembarangan ke sungai dan selokan selain menimbulkan bau juga mengganggu estetika lingkungan.

#### B. Produksi Air Limbah Domestik

Pengelolaan limbah domestik yang buruk berisiko terhadap kelestarian lingkungan hidup yaitu menimbulkan pencemaran air dan tanah, berkontribusi terhadap emisi Gas Rumah Kaca yang memicu perubahan iklim, memberikan risiko terhadap kesehatan masyarakat, serta mempengaruhi daya dukung dan tampung. Berdasarkan analisis, produksi air limbah domestik di wilayah perencanaan sebesar 3.265.132 m<sup>3</sup>/tahun dengan kondisi jumlah penduduk sebanyak 93.183 jiwa pada Tahun 2024. Proyeksi timbulan air limbah domestik didapatkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan besaran nilai air limbah domestik. Besaran nilai air limbah domestik didapatkan berdasarkan 80% dari kebutuhan air bersih setiap penduduk yaitu 120 l/orang/hari. Proyeksi timbulan air limbah dari tahun ke tahun di wilayah perencanaan semakin meningkat, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.



Gambar 2.2 Proyeksi Air Limbah Domestik  
Sumber: KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

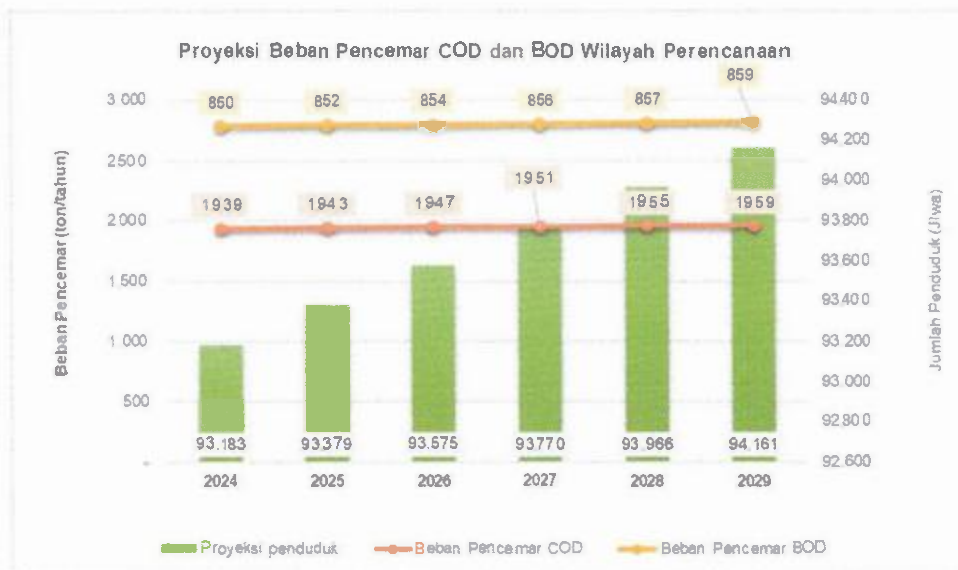
Secara lebih rinci proyeksi timbunan air limbah domestik di tiap kecamatan dalam wilayah perencanaan sebagai berikut.

Tab el 2.8. ProyeksiA ir Limbah Domestik per Kecamatan


Kecamatan	Proyeksi Air Ilmbah (m3/tahun)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sabu Barat	1.212.80	1.214.52	1.216.20	1.217.92	1.219.60	1.221.31
Sabu Tengah	319.39	318.86	318.37	317.84	317.32	316.83
Sabu Timur	337.29	337.01	336.76	336.48	336.20	335.96
Sabu Liae	389.50	390.48	391.50	392.51	393.53	394.51
Hawu Mehara	682.89	686.78	690.67	694.52	698.41	702.30
Raijua	323.31	324.33	325.38	326.43	327.48	328.50
Kab. Sabu Raijua	3.265.13	3.272.00	3.278.86	3.285.70	3.292.56	3.299.40

Sumber: KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

Air limbah domestik umumnya mengandung beban pencemar yang cukup tinggi terutama beban pencemar organik. Parameter yang dapat digunakan untuk mengindikasikan pencemaran organik adalah konsentrasi *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD). Pengelolaan air limbah domestik yang belum optimal dapat meningkatkan konsentrasi BOD dan COD dalam air tanah. Semakin tinggi nilai BOD dan COD menggambarkan semakin tingginya tingkat pencemaran yang terjadi di perairan baik berasal dari sumber terpusat maupun sumber lain. Proyeksi beban pencemar domestik di wilayah perencanaan disajikan dalam gambar berikut berikut.



Gambar 2.3. Komposisi Beban Pencemar COD dan BOD Limbah Domestik  
Sumber: KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

Analisis perkiraan beban pencemar di wilayah perencanaan didapatkan berdasarkan jumlah penduduk dengan besaran nilai BOD dan COD setiap orang dalam satu hari. Besaran beban pencemar per orang per hari yaitu BOD 25 gram dan COD 57 gram (Salim, 2002). Penanganan air limbah di wilayah perencanaan sangat erat hubungannya dengan pengurangan beban organik ke perairan yang akan mengurangi laju penurunan indek kualitas air. Sumbangan air limbah domestik terhadap naiknya beban organik BOD, COD terhadap perairan terutama sungai mencapai 60%, sehingga pengurangan beban pencemar dapat menaikkan kualitas air. Untuk mengolah air limbah domestik di Kabupaten Sabu Raijua maka dibutuhkan IPAL Domestik komunal sistem terpusat di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. 

C. Timbulan Lumpur Tinja

Selain sampah, tekanan penduduk juga akan berdampak peningkatan timbulan lumpur tinja. Lumpur tinja adalah salah satu air limbah domestik yang dapat menyebabkan degradasi dan pencemaran lingkungan. Permen PU tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat, Buku 4 Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) menetapkan bahwa nilai timbulan lumpur tinja yang ditetapkan sebagai standar adalah 0,1095 m<sup>3</sup>/orang/tahun. Sebaran timbulan lumpur tinja ini juga akan mengikuti pola persebaran penduduk.



Gambar 2.4 Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja Kabupaten Sabu Raijua  
Sumber: Hasil analisis, 2024

Sedangkan, proyeksi jumlah timbulan lumpur tinja menurut Kecamatan di wilayah perencanaan, sebagai berikut.

Tabel 2.9 Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja Menurut Kecamatan

Kecamatan	Lumpur Tinja (m <sup>3</sup> /tahun)					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Sabu Barat	3.790	3.795	3.801	3.806	3.811	3.817
Sabu Tengah	998	996	995	993	992	990
Sabu Timur	1.054	1.053	1.052	1.052	1.051	1.050
Sabu Liae	1.217	1.220	1.223	1.227	1.230	1.233
Hawu Mehara	2.134	2.146	2.158	2.170	2.183	2.195
Raijua	1.010	1.014	1.017	1.020	1.023	1.027
Kab. Sabu Raijua	10.204	10.225	10.246	10.268	10.289	10.311

Sumber: KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

Lumpur tinja mengandung organisme infeksius yang masih bisa bertahan hidup walaupun tinja sudah mengalami pengolahan di unit pengolahan setempat. Organisme infeksius yang umumnya terkandung berupa bakteri patogen, telur cacing, dan cacing parasit. Bakteri patogen dapat bertahan hidup hingga dua minggu, sedangkan telur cacing dan cacing parasit dapat bertahan sampai tiga tahun di lingkungan. Hal ini menyebabkan lumpur tinja perlu pengolahan dan penanganan yang sesuai dengan kaidah teknis. Pengelolaan lumpur tinja yang tidak sesuai dengan kaidah teknis dapat menyebabkan transmisi penyakit kepada manusia.

D. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indikator Kualitas Air (IKA), Indikator Kualitas Udara (IKU), dan Indikator Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Berdasarkan data KLHK, nilai IKLH Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2024 dalam kategori sedang yaitu sebesar 60,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, namun masih dalam kategori sedang. Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut.

Tabel 2.10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023-2024

No	Indikator	2023	2024
1	Indeks Kualitas Udara	91,96 (baik)	92,16 (baik)
2	Indeks Kualitas Air	60,00 (kurang)	60,20 (kurang)
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	25,16 (sedang)	25,36 (sedang)
IKLH		59,80 (sedang)	60,00 (sedang)

Sumber: KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

#### 2.1.1.1.3.5. Kajian Risiko Bencana

Berdasarkan Dokumen KRB Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024 kawasan rawan bencana di Kabupaten Sabu Raijua meliputi:

##### A. Kekeringan

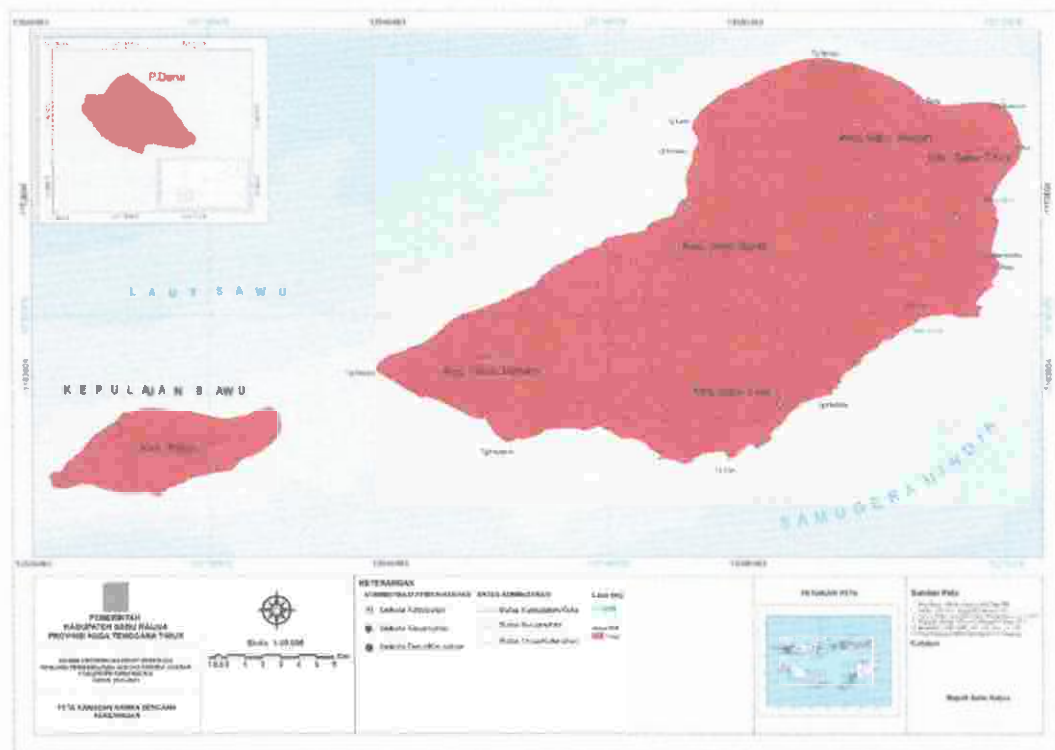
Bencana kekeringan adalah kejadian bencana yang paling sering terjadi dan dengan dampak yang paling luas. Berdasarkan pengolahan data Inariks dan dokumen KRB Kabupaten Sabu Raijua, hasil perhitungan indeks bahaya kekeringan menunjukkan bahwa lahan yang terpapar bahaya kekeringan terdapat di seluruh kecamatan di Kab. Sabu Raijua. Indeks Bahaya Kekeringan di Kab. Sabu Raijua sebagai berikut.

Tabel 2.11 Indeks Bahaya Kekeringan di Kab. Sabu Raijua

Wilayah Administrasi	Luas Tingkat Tinggi (Ha)	Total
Kec. Hawu Mehara	6.262,34	6.262,34
Kec. Raijua	3.906,21	3.906,21
Kec. Sabu Barat	18.625,06	18.625,06
Kec. Sabu Liae	5.677,12	5.677,12
Kec. Sabu Tengah	6.581,61	6.581,61
Kec. Sabu Timur	5.030,25	5.030,25
Total	46.082,60	46.082,60

Sumber: KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

Ada dua dampak utama yang dialami oleh masyarakat karena kekeringan. Pertama adalah kekurangan air yang ditandai dengan berkurangnya air permukaan, baik di sungai, sumur gali dan embung-embung. Kekurangan air bersih ini juga sering menyebabkan berbagai jenis penyakit, terutama penyakit kulit dan diare. Dampak kedua adalah gagal panen karena kekeringan pertanian, karena mayoritas pertanian di Kab. Sabu Raijua adalah pertanian lahan kering yang mengandalkan air hujan. Kekeringan menyebabkan tanaman pangan seperti padi, jagung, sorgum dan bahkan kacang-kacangan tidak bisa ditanam atau tidak bisa dipanen. Akibatnya, masyarakat mengalami kekurangan pangan dan biasanya disubstitusi dengan gula nira yang memang telah menjadi bagian dari sistem ketahanan pangan di Kabupaten Sabu Raijua.



Peta 2.8 Peta KRB Kekeringan Kabupaten Sabu Raijua  
Sumber: KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

## B. Kebakaran Hutan dan Lahan

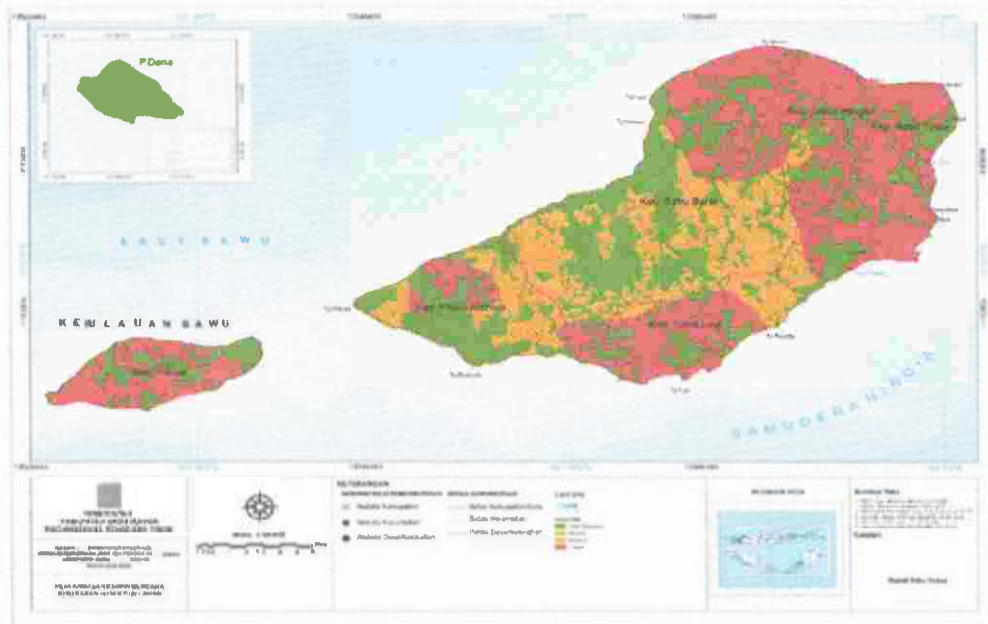
Bencana kebakaran, yakni kebakaran hutan dan lahan, merupakan bencana yang dialami hampir secara merata di Kab. Sabu Raijua, terutama pada saat persiapan lahan melalui aktivitas pembersihan lahan (*land clearing*) untuk pembukaan lahan ladang/kebun sebelum diakhir musim kemarau atau memasuki musim penghujan (*late-season burning*) serta di tunjang oleh musim kemarau yang Panjang serta panas yang ekstrim. Berdasarkan pengolahan data Inariks BNPB dan Dokumen KRB Kabupaten Sabu Raijua, hasil perhitungan menunjukkan bahwa mayoritas bahaya dalam kelas tinggi seluas 16.864,18 Ha. Untuk kelas sedang sebesar 9.725,78 Ha dan kelas rendah 0,62 Ha. Adapun yang tidak memiliki resiko bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dengan luas 19.492,02 Ha. Indeks Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kab. Sabu Raijua sebagai berikut.

Tabel 2.12 Indeks Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kab. Sabu Raijua

Wilayah Administrasi	Luas Indeks Bahaya (Ha)				Total
	Tidak Beresiko	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kec. Hawu	3.470,21	0,62	1.920,20	871,31	6.262,34
Kec. Raijua	1.750,55	-	-	2.155,66	3.906,21
Kec. Sabu Barat	8.747,02	-	6.323,06	3.554,99	18.625,06
Kec. Sabu Liae	1.748,36	-	1.190,63	2.738,14	5.677,12
Kec. Sabu Tengah	2.258,90	-	291,89	4.030,81	6.581,61
Kec. Sabu Timur	1.516,98	-	-	3.513,27	5.030,25
Total	19.492,02	0,62	9.725,78	16.864,18	46.082,60

Sumber: KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

Kebakaran berdampak pada kehilangan harta benda dan hunian, serta kehilangan sumber pangan dan pendapatan. Dalam peristiwa kebakaran lahan dan hutan, seringkali yang terbakar adalah tanaman lontar yang memang merupakan tanaman dominan dan menjadi ciri khas Pulau Sabu dan Raijua. Tanaman ini tidak saja menjadi andalan konservasi, tetapi terutama merupakan sumber pangan (setelah nira dimasak menjadi gula) dan juga sumber pendapatan dari produk-produk lainnya. Selain itu, pohon kelapa juga sering terbakar yang menyebabkan kerugian ekonomi.



Peta 2.9 Peta KRB Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Sabu Raijua  
 Sumber: KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

### C. Cuaca Ekstrim

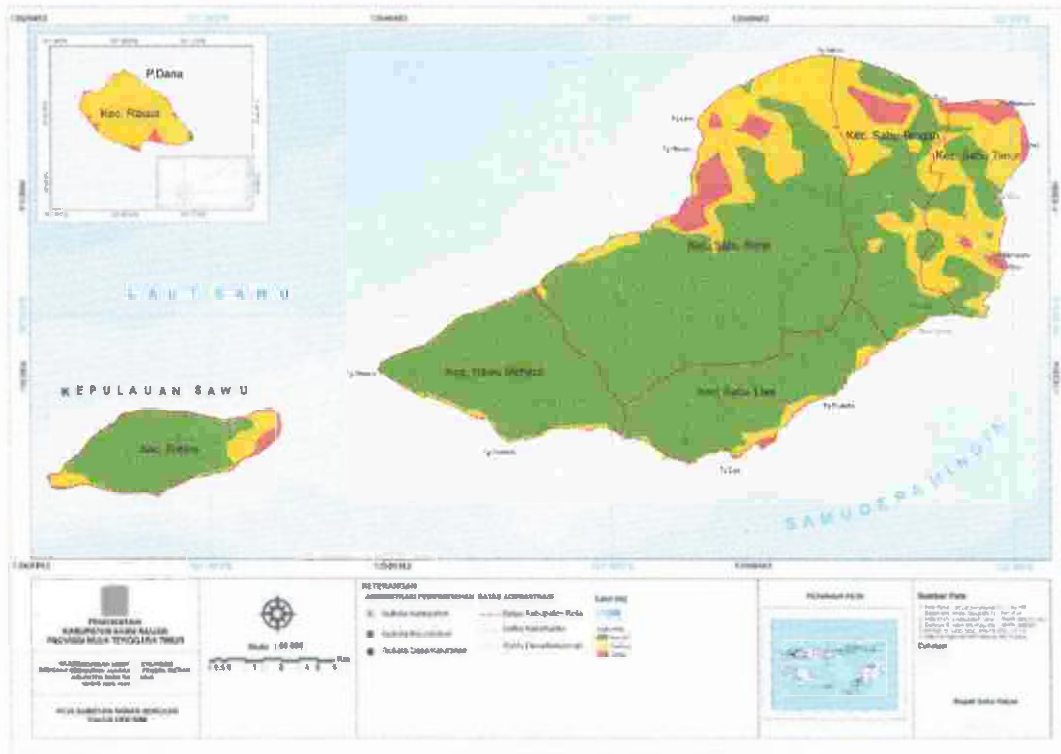
Berdasarkan Berdasarkan pengolahan data Inariks BNPB dan Dokumen KRB Kabupaten Sabu Raijua, hasil perhitungan menunjukkan bahwa mayoritas bahaya dalam kelas rendah seluas 34.458,50 Ha. Untuk kelas sedang sebesar 9.786,91 Ha dan kelas tinggi 1.837,19 Ha. Secara lengkap, bahaya cuaca ekstrim di Kab. Sabu Raijua bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Indeks Bahaya Cuaca Ekstrim di Kab. Sabu Raijua

Wilayah Administrasi	Luas Indeks Bahaya (Ha)			Total
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kec. Hawu Mehara	6.070,60	186,73	5,02	6.262,34
Kec. Raijua	3.086,92	685,28	134,01	3.906,21
Kec. Sabu Barat	14.132,33	3.656,82	835,92	18.625,06
Kec. Sabu Liae	5.247,45	384,93	44,75	5.677,12
Kec. Sabu Tengah	4.062,88	2.129,91	388,81	6.581,61
Kec. Sabu Timur	1.858,31	2.743,25	428,69	5.030,25
Total	34.458,50	9.786,91	1.837,19	46.082,60

Sumber: KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua berupa angin kencang yang memberikan implikasi terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data tidak tercatatnya dampak ataupun kejadian yang disebabkan oleh cuaca ekstrim tetapi berdasarkan pengamatan observasi dan wawancara terhadap masyarakat, setiap tahun masyarakat mengalami cuaca ekstrim. Dampak dari cuaca ekstrim atau angin kencang terjadi pada kerusakan atap rumah (dampak yang paling sering) maupun diberhentikannya alur pelayaran wilayah di Kabupaten Sabu Raijua sehingga secara langsung akan mempengaruhi perekonomian masyarakat dan konektivitas dengan wilayah lain. Dampak lainnya juga merusak tambak garam masyarakat serta merusak kebun masyarakat.



Peta 2.10 Peta KRB Cuaca Ekstrim Kabupaten Sabu Raijua

Sumber: Pengolahan data Inarisk, 2024

#### D. Banjir

Walaupun beriklim cenderung kering, tetapi dengan kondisi tanah dan topografi yang ada, Kab. Sabu Raijua kerap mengalami bencana banjir dan banjir yang disertai tanah longsor. Berdasarkan pengolahan data Inariks BNPB dan Dokumen KRB Kabupaten Sabu Raijua, hasil perhitungan menunjukkan bahwa mayoritas bahaya dalam kelas tidak beresiko seluas 43.456,06 Ha. Untuk kelas tinggi seluas 1.242,51 Ha, kelas sedang 1.382,10 dan kelas rendah 1,93 Ha. Indeks Bahaya Banjir dan Longsor di Kab. Sabu Raijua sebagai berikut.

Tabel 2.14 Indeks Bahaya Banjir di Kab. Sabu Raijua

Wilayah Administrasi	Luas Indeks Bahaya (Ha)				Total
	Tidak Beresiko	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kec. Hawu Mehara	6.160,67	-	64,41	37,26	6.262,34
Kec. Raijua	3.791,25	-	82,90	32,06	3.906,21
Kec. Sabu Barat	16.955,27	0,97	811,73	857,10	18.625,06
Kec. Sabu Liae	5.526,16	0,97	105,18	44,82	5.677,12
Kec. Sabu Tengah	6.297,12	-	180,67	103,82	6.581,61
Kec. Sabu Timur	4.725,59	-	137,21	167,45	5.030,25
Total	43.456,06	1,93	1.382,10	1.242,51	46.082,60

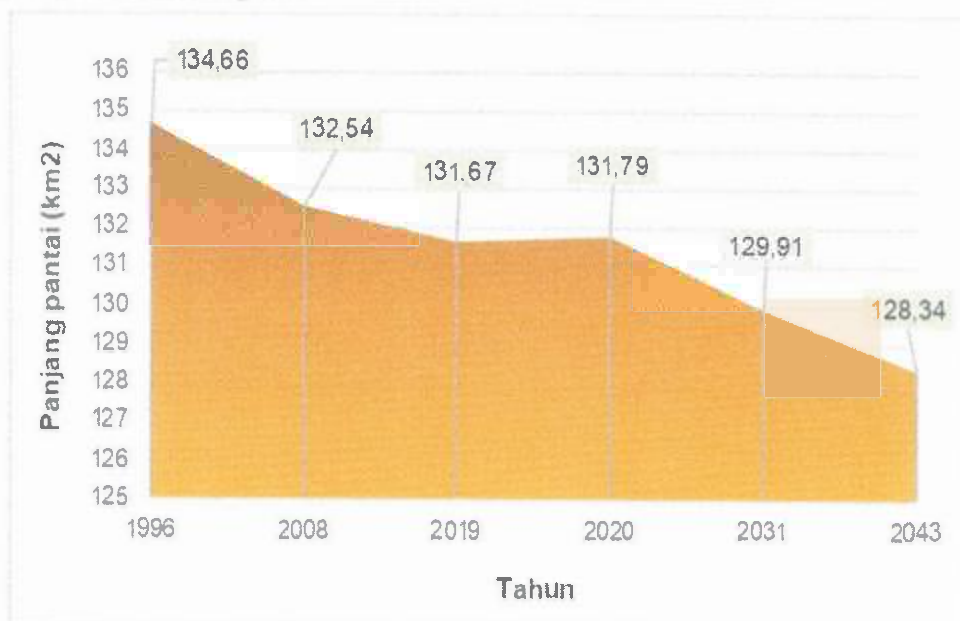
Sumber: Pengolahan data Inarisk, 2024

Banjir dan longsor berdampak luas pada kehidupan dan penghidupan masyarakat, diantaranya kerusakan aset masyarakat seperti kebun pangan, sawah, tanaman lontar dan kelapa, tambak garam, dan hanyutnya ternak, serta kerusakan fasilitas umum seperti kantor desa, gereja, sekolah dan embung.

#### E. Gelombang Pasang dan Abrasi

Gelombang pasang dan abrasi di Kabupaten Sabu Raijua dapat terjadi karena cuaca ekstrim dan pemanasan global yang menyebabkan semakin meningkatnya tinggi permukaan air laut. Berdasarkan hasil observasi terdapat beberapa yang mengalami abrasi karena tingginya gelombang pasang air laut.

Abrasi yang terjadi dapat menyebabkan semakin berkurangnya luas wilayah dan garis pantai Kabupaten Sabu Raijua. Berkurangnya luas wilayah dan garis pantai tidak hanya ditimbulkan dari bencana abrasi tetapi secara lokal juga dapat disebabkan dengan adanya penambangan ilegal yang ada di beberapa lokasi di Kabupaten Sabu Raijua. Penambangan pasir ilegal salah satunya yang paling luas berada pada Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Hawu Mehara. Adanya penambangan pasir ilegal tersebut dikarenakan kebutuhan bahan pokok untuk pembangunan pondasi fisik rumah masyarakat. Berdasarkan adanya ancaman terhadap masyarakat di pesisir dan secara keseluruhan dari luas daratan kabupaten yang semakin berkurang diperlukan penegakan peraturan terhadap penambangan pasir ilegal di wilayah pesisir Kabupaten Sabu Raijua.



Gambar 2.5 Perubahan Luas dan Panjang Pantai Kabupaten Sabu Raijua  
 Sumber: Laporan KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

Tabel 2.15 Indeks Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kab. Sabu Raijua

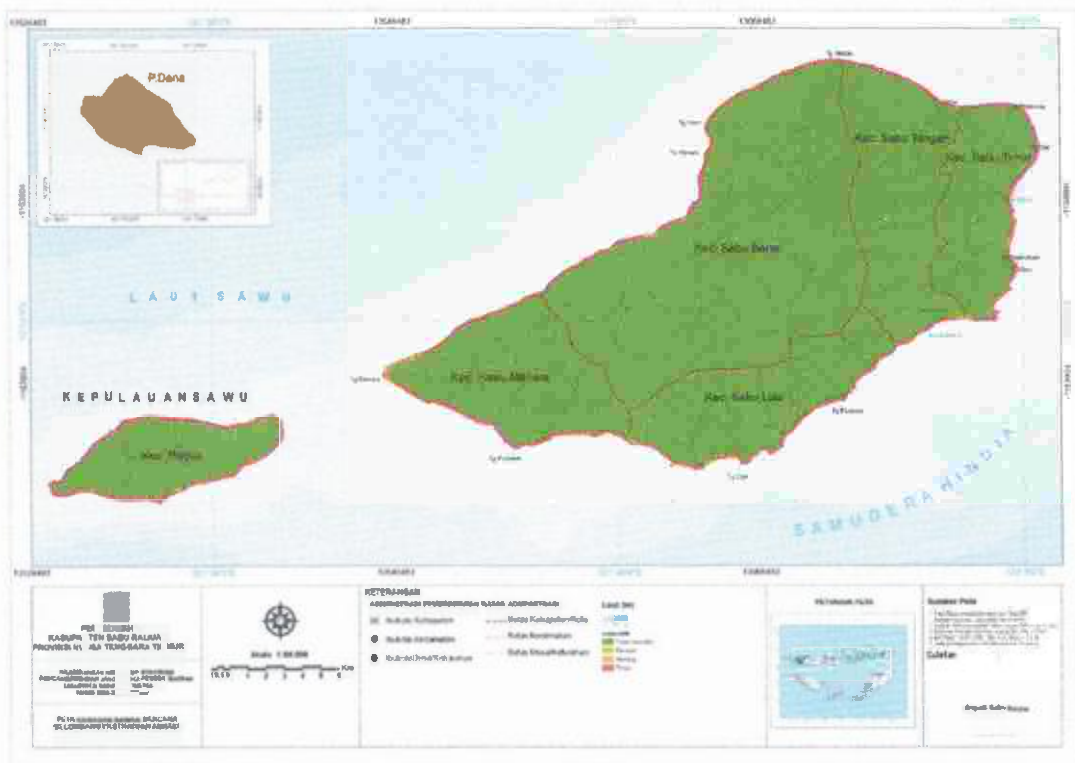
Wilayah Administrasi	Luas Indeks Bahaya (Ha)				Total
	Tidak Beresiko	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kec. Hawu Mehara	5.929,65	5,90	36,76	290,03	6.262,34
Kec. Raijua	3.441,56	31,12	-	433,53	3.906,21
Kec. Sabu Barat	18.302,16	-	12,16	310,74	18.625,06
Kec. Sabu Liae	5.456,73	16,47	-	203,93	5.677,12
Kec. Sabu Tengah	6.480,29	10,58	-	90,74	6.581,61
Kec. Sabu Timur	4.710,80	16,20	7,63	295,62	5.030,25
Total	44.321,18	80,27	56,55	1.624,60	46.082,60

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Sabu Raijua, 2024

Gelombang pasang dan abrasi berdampak terhadap kerusakan aset masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Kejadian ini pernah merusak rumah, tambak garam, kebun sayur di pesisir dan pohon kelapa yang merupakan sumber penghasilan.



Peta 2.10 Peta KRB Banjir Kabupaten Sabu Raijua  
 Sumber: Pengolahan data Inarisk, 2024



Peta 2.11 Peta KRB Gelombang Pasang dan Abrasi Kabupaten Sabu Raijua  
 Sumber: Pengolahan data Inarisk, 2024

F. Gempa Bumi

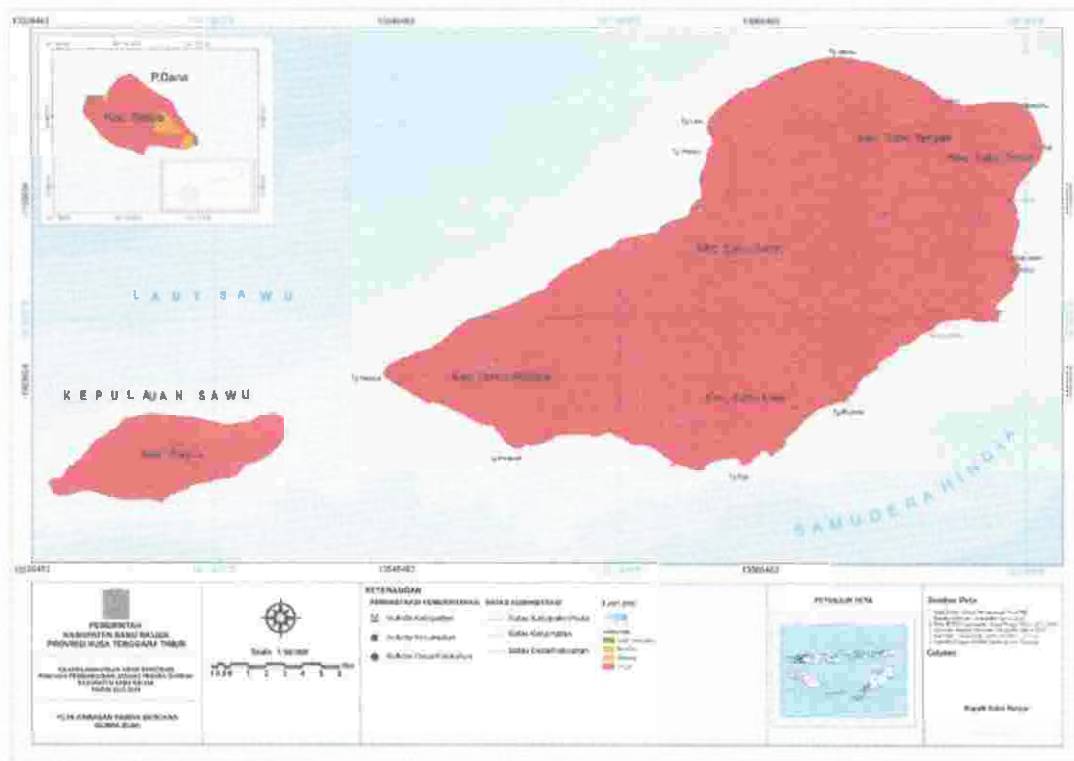
Berdasarkan data 20 tahun terakhir, Kabupaten Sabu Raijua belum terjadi bencana yang merugikan wilayah dan masyarakat. BMKG dalam Katalog Gempa Bumi Merusak dan Signifikan 1821-2018, mencatat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur tetapi tidak ada yang menimbulkan kerugian dan kerusakan di Kabupaten Sabu Raijua. Kejadian gempa bumi mayoritas terjadi di Laut Sabu dengan rata-rata kurang dari 5 mb. Secara kewilayahan, lokasi dari Kabupaten Sabu Raijua merupakan wilayah kepulauan yang berada di Laut Sabu dan terletak di zona subduksi atau pertemuan lempeng Australia dan lempeng Euro- Asia sehingga diperlukan mitigasi terhadap gempa bumi yang kemungkinan akan terjadi. Pada dokumen RPB Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dianalisis terdapat 46.087 Ha yang memiliki ancaman gempa bumi tinggi. Berdasarkan beberapa penelitian, Kabupaten Sabu Raijua atau segmen NTT memiliki potensi gempa bumi dengan magnitudo sebesar 8,7 Mw sehingga mitigasi bencana menjadi hal penting kesiapsiagaan karena faktor alam pergeseran lempeng dapat terjadi sewaktu-waktu.

Tabel 2.16 Indeks Bahaya Gempa Bumi di Kab. Sabu Raijua

Wilayah Administrasi	Luas Indeks Bahaya (Ha)				Total
	Tidak Beresiko	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kec. Hawu Mehara	4,08	-	-	6.258,26	6.262,34
Kec. Raijua	5,61	-	9,80	3.890,79	3.906,21
Kec. Sabu Barat	4,16	0,01	-	18.620,89	18.625,06
Kec. Sabu Liae	3,72	-	-	5.673,40	5.677,12
Kec. Sabu Tengah	0,14	-	-	6.581,46	6.581,61
Kec. Sabu Timur	2,40	-	-	5.027,86	5.030,25
Total	20,11	0,01	9,80	46.052,67	46.082,60

Sumber: Pengolahan data Inarisk, 2024

Berdasarkan pengolahan data Inariks BNPB dan Dokumen KRB Kabupaten Sabu Raijua, hasil perhitungan menunjukkan bahwa mayoritas bahaya dalam kelas tinggi seluas 46.052,67 Ha. Untuk kelas sedang sebesar 9,8 Ha dan kelas rendah 0,01 Ha. Adapun yang tidak memiliki resiko bahaya Gempa Bumi dengan luas 20,11 Ha.



Peta 2.12 Peta KRB Gempa Bumi Kabupaten Sabu Raijua

Sumber: Pengolahan data Inarisk, 2024

### G. Tsunami

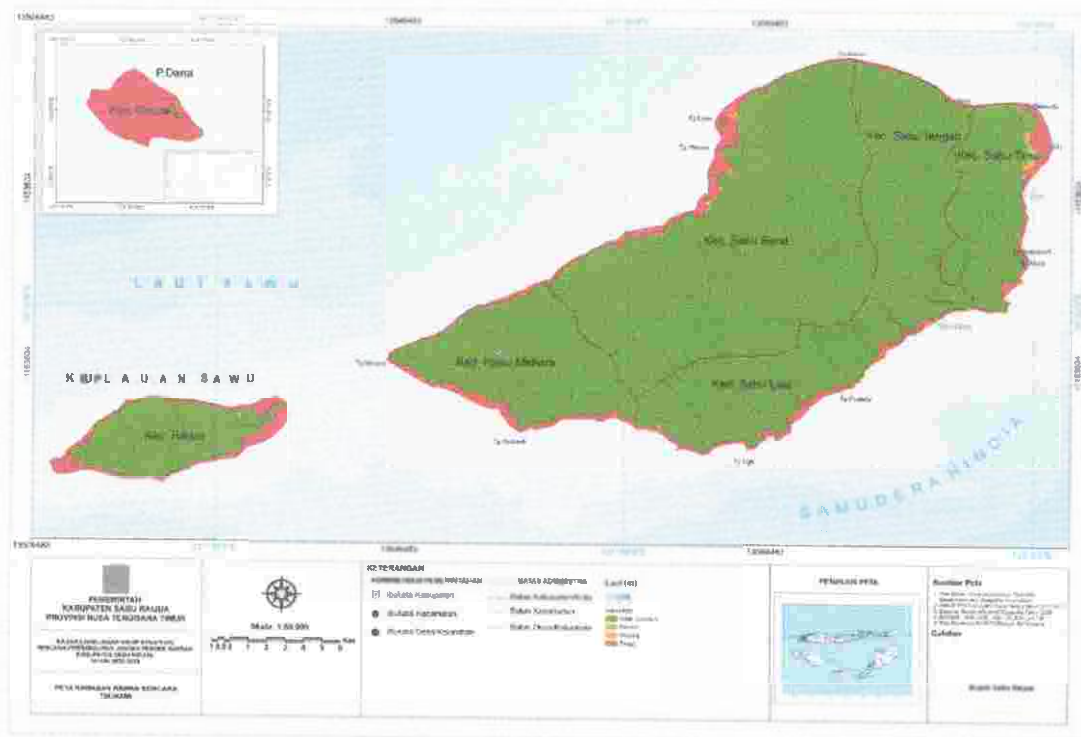
Bencana gelombang laut tinggi atau tsunami belum pernah terjadi di Kabupaten Sabu Raijua. Berdasarkan data BMKG dalam Katalog Tsunami Indonesia tahun 416-2018 didapatkan wilayah Kepulauan Sabu Raijua belum pernah mendapatkan dampak dari kejadian tsunami dari Laut Sabu maupun Samudera Hindia. Tetapi mitigasi bencana terhadap tsunami perlu disiapkan untuk kesiagaan daerah dan masyarakat ketika adanya gelombang tinggi. Berdasarkan pengolahan data Inariks BNPB dan Dokumen KRB Kabupaten Sabu Raijua, hasil perhitungan menunjukkan bahwa mayoritas bahaya dalam kejas tidak beresiko seluas 42.953,89 Ha, kelas tinggi sebesar 2.991,33 Ha di sepanjang wilayah pesisir, kelas sedang 66,05 Ha dan kelas rendah 71,33 Ha.

Jika dilihat berdasarkan data gempa bumi di Laut Sabu masih memiliki gempa bumi dibawah 5 mb. Hal tersebut yang kurang dapat memicu terjadinya gelombang tinggi tsunami di Kepulauan Sabu tetapi kesiapsiagaan daerah perlu ditingkatkan sebagai bagian dari pengembangan daerah berbasis mitigasi bencana untuk mengurangi risiko yang terjadi.

Tabel 2.17 Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Sabu Raijua

Wilayah Administrasi	Luas Indeks Bahaya (Ha)				
	Tidak Beresiko	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kec. Hawu Mehara	5.730,68	0,97	1,93	528,77	6.262,34
Kec. Raijua	3.138,83	-	-	767,38	3.906,21
Kec. Sabu Barat	17.812,4	22,84	27,50	762,26	18.625,06
Kec. Sabu Liae	5.343,99	3,15	0,97	329,02	5.677,12
Kec. Sabu Tengah	6.497,77	-	0,48	83,36	6.581,61
Kec. Sabu Timur	4.430,16	44,37	35,17	520,55	5.030,25
Total	42.953,8	71,33	66,05	2.991,33	46.082,60

Sumber: Pengolahan data Inarisk, 2024



Peta 2.13 Peta KRB Tsunami Kabupaten Sabu Raijua

Sumber: Pengolahan data Inarisk, 2024

### 2.1.1.1.3.6. Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

#### A. Indeks Kerentanan Iklim

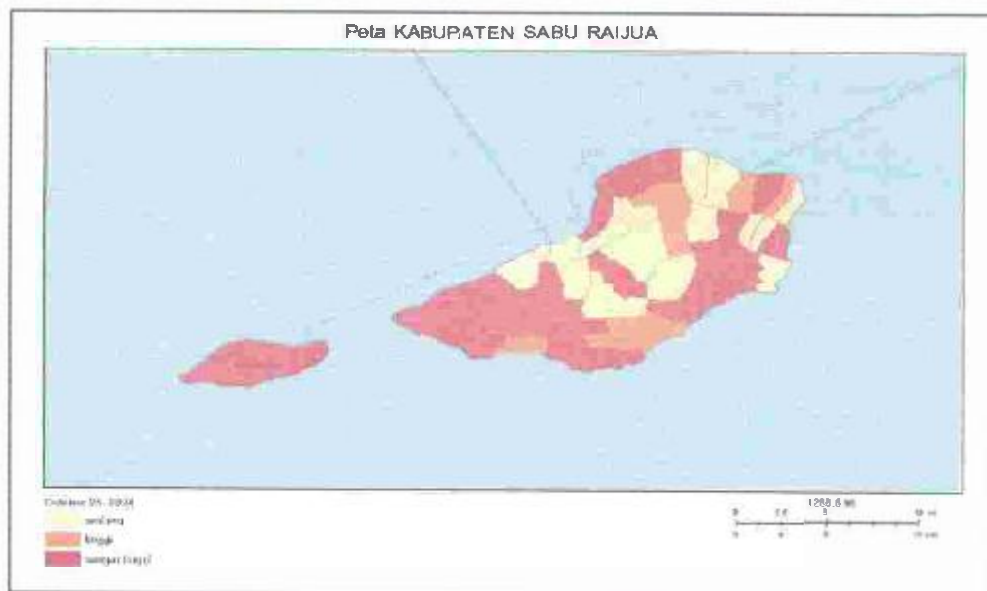
KLHK telah mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) pada Tahun 2022 yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Kabupaten Sabu Raijua memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim dengan kategori Sangat Tinggi, Tinggi dan Sedang. Adapun tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Sabu Raijua didominasi tingkat sangat tinggi. Daerah dengan kerentanan rendah akan mengalami dampak minimum jika terjadi bencana, sehingga lokasi dengan tingkat kerentanan dan/atau risiko yang lebih tinggi memiliki prioritas yang lebih tinggi sebagai lokasi untuk pelaksanaan program/aksi adaptasi.

Tabel 2.18 Kerentanan Iklim Kabupaten Sabu Raijua

Desa	IKA	IKS	Kerentanan	Kategori
Kecamatan Raijua				
Kolorae	0,27	0,57	7	Sangat tinggi
Bolua	0,23	0,65	7	Sangat tinggi
Ledeke	0,32	0,56	7	Sangat tinggi
Ledeunu	0,36	0,65	7	Sangat tinggi
Ballu	0,26	0,57	7	Sangat tinggi
Kecamatan Hawu Mehara				
Lobohede	0,20	0,56	7	Sangat tinggi
Ramedue	0,19	0,62	7	Sangat tinggi
Ledeae	0,17	0,64	7	Sangat tinggi
Gurimonearu	0,35	0,75	7	Sangat tinggi
Lederaga	0,26	0,58	7	Sangat tinggi
Molie	0,19	0,50	7	Sangat tinggi
Daieko	0,24	0,59	7	Sangat tinggi
Tanajawa	0,19	0,54	7	Sangat tinggi
Pedarro	0,28	0,57	7	Sangat tinggi
Wadumeddi	0,24	0,48	6	Tinggi
Kecamatan Sabu Liae				
Dainao	0,20	0,62	7	Sangat tinggi
Waduwala	0,25	0,50	7	Sangat tinggi
Raerobo	0,21	0,66	7	Sangat tinggi
Mehona	0,24	0,71	7	Sangat tinggi
Eikare	0,42	0,71	7	Sangat tinggi
Ledeke	0,28	0,44	6	Tinggi
Loborui	0,29	0,65	7	Sangat tinggi
Eilogo	0,28	0,44	6	Tinggi
Halapa ji	0,29	0,49	6	Tinggi
Kotahawu	0,30	0,59	7	Sangat tinggi
Ledetalo	0,27	0,61	7	Sangat tinggi
Deme	0,29	0,65	7	Sangat tinggi
Kecamatan Sabu Barat				
Teriwu	0,38	0,60	7	Sangat tinggi
Raenalulu	0,42	0,63	7	Sangat tinggi
Depe	0,41	0,57	4	Sedang
Titinalede	0,43	0,68	7	Sangat tinggi

Raemude	0,52	0,52	4	Sedang
Raenyale	0,47	0,70	7	Sangat tinggi
Raekore	0,43	0,59	4	Sedang
Nadawawi	0,41	0,55	4	Sedang
Delo	0,32	0,42	6	Tinggi
Menia	0,34	0,54	7	Sangat tinggi
Raeloro	0,49	0,63	4	Sedang
Roboaba	0,40	0,57	4	Sedang
Mebba	0,42	0,66	7	Sangat tinggi
Raemadia	0,38	0,71	7	Sangat tinggi
Ledeana	0,52	0,53	4	Sedang
Jadu	0,37	0,58	7	Sangat tinggi
Ledekepaka	0,36	0,65	7	Sangat tinggi
Raedewa	0,41	0,59	4	Sedang
Kecamatan Sabu Tengah				
Bebae	0,28	0,61	7	Sangat tinggi
Tada	0,35	0,60	7	Sangat tinggi
Matei	0,37	0,67	7	Sangat tinggi
Eimmadake	0,46	0,60	4	Sedang
Loboaju	0,36	0,57	7	Sangat tinggi
Jiwuwu	0,26	0,43	6	Tinggi
Eilode	0,41	0,48	4	Sedang
Eimau	0,50	0,42	4	Sedang
Kecamatan Sabu Timur				
Huwaga	0,39	0,50	4	Sedang
Lobodei	0,47	0,66	7	Sangat tinggi
Eiada	0,39	0,63	7	Sangat tinggi
Keduru	0,45	0,52	4	Sedang
Bolou	0,36	0,45	4	Sedang
Limaggu	0,42	0,63	7	Sangat tinggi
Loborai	0,33	0,62	7	Sangat tinggi
Bodae	0,43	0,51	4	Sedang
Kujiratu	0,26	0,46	6	Tinggi
Keliha	0,26	0,61	7	Sangat tinggi

Sumber: Pengolahan data SIDIK, 2024



Peta 2.14 Kerentanan Iklim

Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) oleh KLHK, 2024

### 2.1.1.1.3.7. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi sumber daya alam berkaitan langsung dengan kekayaan alam. Kekayaan alam dapat berupa tanah, air, tumbuhan ataupun sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi berupa mineral. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan adanya pemanfaatan sumber daya alam lokal yang ada di Kabupaten Sabu Raijua dalam mendukung kegiatan pembangunan. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam tersebut dengan memperhitungkan akibat dari kelangsungan pembangunan maupun kelangsungan ekosistem alam wilayah tersebut.

#### A. Potensi Kelautan dan Perikanan

Sebagai Kabupaten yang dikelilingi lautan, Sabu Raijua dianugerahi potensi sumber daya laut yang luar biasa. Kondisi ini dimanfaatkan oleh penduduk Kabupaten ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus menjadi lahan mata pencaharian. Laut memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sumber pendapatan dan penopang ekonomi. Beberapa potensi sumber daya laut di Kabupaten Sabu Raijua diantaranya yaitu potensi perikanan, potensi rumput laut dan potensi garam. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Sabu Raijua mengalami peningkatan produksi dari 11.995,02 kg pada tahun 2019 menjadi 13.101,28 kg pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan positif dalam sektor perikanan budidaya. Produksi Perikanan Tangkap juga mengalami peningkatan dari 1.520,15 kg pada tahun 2019 menjadi 1.847,75 kg pada tahun 2023, menandakan adanya peningkatan aktivitas tangkap ikan. Walaupun mengalami peningkatan pada sektor perikanan, produksi ikan tangkap di Sabu Raijua masih termasuk rendah. Hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat, potensi sumber daya perikanan belum dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dikarenakan masyarakat masih kurang memiliki fasilitas perkapalan untuk mendapatkan hasil laut dalam sehingga lebih dominan pada hasil rumput laut.

Saat ini rumput laut merupakan salah satu produk laut unggulan di Kabupaten Sabu Raijua. Budidaya rumput laut dapat diteui di seluruh kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua, namun kecamatan yang memiliki produksi Rumput Laut tinggi diantaranya Kecamatan Raijua dan Hawu Mehara. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, produksi Rumput Laut Kabupaten Sabu Raijua mencapai 53.921 Ton. Namun, jumlah tersebut cenderung mengalami penurunan dibandingkan pada periode Tahun 2020-2022. Penurunan tersebut dikarena terjadinya Badai Seroja di Kabupate Sabu Raijua pada Tahun 2021. Dampak dari Seroja, hampir semua rumput laut masyarakat rusak dan hilang. Sehingga pembudidaya membutuhkan modal untuk memulai kembali. Hasil budidaya rumput laut mulai dirasakan di era 2000-an dengan harga jual 1000/kg kepada pengepul dari Seba. Saat ini harga rumput laut tinggi. untuk harga kering Rp. 25.000-30.000 per kilo. Tingginya harga rumput laut saat ini tidak lepas dari sedikitnya warga membudidaya rumput laut paska badai Seroja.

Tabel 2.18 Produksi Kelautan Perikanan Laut Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019– 2023

Tahun	Produksi perikanan budidaya (Ton)*	Produksi perikanan tangkap (Ton)*	Rumput Laut (Ton)**
2019	11.995,02	1.520,15	79.713
2020	12.223,18	1.596,16	80.703
2021	12.420,06	1.675,96	62.941
2022	12.520,12	1.759,76	53.921
2023	13.101,28	1.847,75	NA

Sumber: (\*) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua, 2024; (\*\*) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Selain itu, budidaya garam juga dapat mejadi potensi besar untuk dikembangkan. Iklim semi-arid yang memiliki musim kemarau sangat panjang sangat mendukung produksi garam di Sabu Raijua. Namun, Industri tambang garam di Sabu Raijua masih sangat kecil dibanding potensinya dan baru hanya dikelola oleh beberapa kelompok dengan Disperindagkop Sabu Raijua saja. Hal ini karena investasi yang cukup besar diperlukan untuk membangun industri garam dan juga potensi jualnya yang relatif rendah. Kualitas garam yang dihasilkan hingga saat ini tergolong sangat baik bahkan tergolong garam industri namun hanya dijadikan garam konsumsi sehingga potensi harga jual tidak tercapai. Garam tersebut harus dijual dengan harga rendah karena lokasi Sabu Raijua yang sangat jauh dari pasar/pembeli komoditi garam industri, seperti di Pulau Jawa. Padahal, apabila industri garam di Sabu Raijua dapat berkembang, tingkat kesejahteraan masyarakat di Sabu Raijua dapat meningkat, dan masyarakat pesisir tidak perlu terlalu bergantung kepada kegiatan budidaya rumput laut saja. Oleh sebab itu, adanya intervensi pada sistem logistik yang dapat menekan harga pengangkutan hasil produksi Sabu Raijua masih sangat diperlukan.

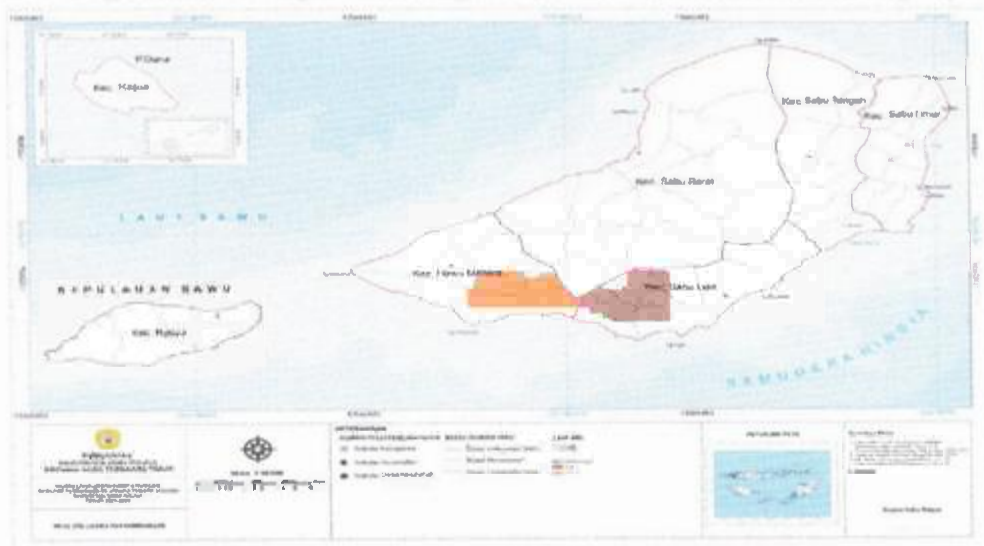
### B. Potensi Pertambangan dan Penggalian

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa potensi pertambangan dan penggalian di wilayah Sabu Raijua diantaranya batu gamping, lempung, zeolit, mangan, sirtu, tanah urug dan lain sebagainya. Potensi sumber daya tambang di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Potensi Sumber Daya Tambang di Kabupaten Sabu Raijua

Struktur tanah	SD Tambang	Hawu Mehara	Raijua	Sabu Barat	Sabu Liae	Sabu Tengah	Sabu Timur
		Ha					
Aluvium	Material bangunan (sirtu)	4,06	3,79	10,84	2,76	0,01	3.48
Batu Koral	Mineral (kapur)	21,59	19,52	47,27	0,72	40,94	35.55
Formasi Bari	Tanah liat/lempung/ Keramik	31,12	11,36	93,78	41,24	11,23	4.82
Formasi Noele	Tanah urug	5,83	4,38	24,56	-	13,61	6.42
Formasi Ofu	Mineral logam (mangan/base metal)	-	-	-	11,48	-	-

Sumber: Pengolahan data pertambangan Dinas PUPR Kab. Sabu Raijua, 2024



Peta 2.15 Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Sabu Raijua

Sumber: Pengolahan data pertambangan Dinas PUPR Kab. Sabu Raijua, 2024

Selain itu, di Kabupaten Sabu Raijua juga terdapat beberapa potensi tambang diantaranya minyak, gas bumi, mineral dan non mineral. Potensi minyak bumi terdapat di bagian blok Sawu; dan Sumber gas alam terdapat di Desa Kota Hawu Kecamatan Sabu Liae. Sedangkan, potensi mineral logam yaitu Mangan di Kecamatan Sabu Liae sebesar 3.486.475 ton bijih dan di Kecamatan Hawu Mehara sebesar 3.367.002 ton bijih. Mangan terdapat dalam batuan tufa karbonatan berwarna pink dan endapan alluvium dalam bentuk nodul, kadar Mn total = 44,74 % (Kementerian ESDM, 2017). Namun demikian, potensi sumber gas, minyak bumi dan mineral di wilayah Kabupaten Sabu Raijua masih memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai potensinya. Keberadaan blok Sawu sebagai lokasi potensi sumber minyak dan gas bumi misalnya masih memerlukan penelitian lebih lanjut demikian juga dengan keberadaan gas bumi di Kecamatan Sabu Liae.

### C. Potensi Pertanian

Sumber daya pertanian di Kabupaten Sabu Raijua, dapat dikatakan sangat tergantung dengan kondisi alam. Kondisi alam yang kering dengan curah hujan yang rendah berdampak pada masih rendahnya produksi hasil pertanian di Kabupaten Sabu Raijua. Sehingga mengakibatkan masih minimnya potensi di sektor pertanian. Potensi pertanian di Kabupaten Sabu Raijua meliputi:

#### a) Tanaman Pangan

Komoditi tanaman pangan yang paling banyak diproduksi di Kabupaten Sabu Raijua yaitu padi dan jagung. Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.


Tabel 2.20 Produksi Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017-2023

Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton)						
	2017*	2018*	2019*	2020**	2021**	2022**	2023**
Padi	7.332,0	5.292,0	8.059,2	4.493	8.634	7.205	7.276
Padi Sawah	7.181,0	5.141,5	8.059,2	NA	NA	NA	NA
Padi Ladang	90,1	97,6	0	NA	NA	NA	NA
Jagung	5.994,7	9.407,6	12.805,7	4.464	9.487	NA	NA
Ubi Kayu	770,0	547,6	22,8	39	50	NA	NA
Ubi Jalar	80,0	908,0	74,0	67	105	NA	NA
Kacang Tanah	680,6	1.230,5	430,1	221	573	NA	NA
Kacang Hijau	1.804,5	1.258,5	491,3	618	573	NA	NA
Sorgum	921,0	982,0	1.021,4	NA	NA	NA	NA

Sumber: \*) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua (2016-2019);

#### b) Hortikultura

Sub sektor hortikultura yang dihasilkan Kabupaten Sabu Raijua mencakup tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan. Pada tahun 2023, produksi tanaman sayuran terbesar yang dihasilkan Kabupaten Sabu Raijua adalah tanaman Bawang Merah dan Kangkung dengan produksi masing-masing 4.694 dan 3.203,7 kuintal. Sedangkan produksi buah-buahan terbesar yang dihasilkan Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2023 yaitu Semangka hingga 45,2 kuintal. Potensi hortikultura di Kabupaten Sabu Raijua, tersebar di:

1. Kecamatan Sabu Timur dengan komoditas unggulan adalah petsai/Sawi, tomat dan kangkung.
2. Kecamatan Sabu Liae dengan komoditas unggulan adalah bawang merah, kangkung dan bayam.
3. Kecamatan Sabu Barat dengan komoditas unggulan adalah bawang merah, kangkung dan bawang putih.
4. Kecamatan Sabu Tengah dengan komoditas unggulan adalah kangkung, Mpetsai dan tomat. 

5. Kecamatan Hawu Mehara dengan komoditas unggulan adalah bawang merah, cabe, tomat dan kangkung.
6. Kecamatan Raijua dengan komoditas unggulan adalah petsai.

Tabel 2.21 Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Sabu Raijua  
Tahun 2019-2023 (Kuintal)

Jenis Tanaman	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Sayuran</b>					
Bawangdaun	-	-	-	15	-
Bawang merah	3.143	1.631	3.498	911	4.694
Bawang putih	-	-	2	-	-
Bayam	222	205	118	123	376,5
Buncis	1.055	185	308	65	207,4
Cabai Besar	-	-	-	-	9
Cabai keriting	-	-	17	-	-
Cabai rawit	514	278	203	156	492,7
Kacang panjang	407	428	225	88	469,7
Kangkung	3.717	3.068	2.899	2.283	3.203,7
Kembangkol	88	11	10	-	31
Ketimun	100	525	880	32	380
Kubis	250	100	-	36	90
Petsai	3.257	1.539	2.209	1.164	1.375
Terung	1.357	955	540	339	1.103,8
Tomat	1.439	1.066	817	298	1.327,1
<b>Buah-buahan</b>					
Melon	-	-	7	-	-
Semangka	80	-	48	46	45,2

Sumber: Kabupaten Sabu Raijua dalam Angka 2023-2024

#### D. Potensi Peternakan

Sektor peternakan yang dihasilkan Kabupaten Sabu Raijua mencakup ternak besar (sapi, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi) dan unggas (ayam, burung puyuh dan itik). Potensi ternak besar di Kabupaten Sabu Raijua terbanyak yaitu kerbau sebanyak 15.127 ekor. Sedangkan potensi ternak kecil terbanyak adalah kambing sebanyak 84.241 ekor dan potensi unggas terbanyak adalah ayam sebanyak 496.458 ekor. Potensi peternakan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Populasi Hewan Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua  
Tahun 2023 (Ekor)

Kecamatan	Ternak Besar			Ternak Kecil			Unggas		
	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Ayam	Bebek	Burung Puyuh
Raijua	37	854	2.279	12.09	4.938	119	52.698	12.095	4.938
Hawu Mehara	939	1.967	1.049	9.337	2.418	194	40.026	9.337	2.418
Sabu Liae	1.857	1.752	2.289	13.15	8.666	242	100.894	13.159	8.666
Sabu Barat	3.514	8.405	3.898	25.19	8.047	1.088	141.510	25.192	8.047
Sabu Tengah	858	1.226	969	13.39	5.562	704	102.204	13.399	5.562
Sabu Timur	925	923	354	11.05	4.147	559	59.126	11.059	4.147
Kab.Sabu Raijua	8.130	15.127	10.838	84.24	33.778	2.906	496.458	84.241	33.778

Sumber: Kabupaten Sabu Raijua dalam Angka 2024

#### E. Potensi Perkebunan

Perkebunan rakyat di kabupaten Sabu Raijua meliputi perkebunan kelapa, tembakau, kapuk, pinang, jambu mente dan lontar. Jenis tanaman perkebunan terbanyak yang dihasilkan di Kabupaten Sabu Raijua yakni Kelapa. Pada Tahun 2023 produksi kelapa di Kabupaten Sabu Raijua sebesar 873,7 ton.

Tabel 2.23 Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Sabu Raijua (Ton)

Jenis Tanaman	2019	2020	2021	2022	2023
Kelapa	807	807	1.130	949	873,7
Tembakau	9	11	11	6,6	15,1
Kapuk	25	23	21	18	15,94
Pinang	47	47	44	37	17
Jambu Mete	270	270	244,15	204	194,4
Lontar	279	279	284	266	155,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua, 2024

#### 2.1.1.1.4. Topografi

##### A. Kemiringan Lahan

Ditilik dari keterengn (*slope*), sebagian besar wilayah Sabu Raijua tergolong sebagai daerah yang datar s/d landai dengan kelas lereng 0-8% (luas 25.451,28 ha atau 55.23%) dan 9-15% (luas 10.422,92 ha atau 22.62%). Jika ditilik dari persebaran kelas lereng per Kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Sabu Barat, Sabu Tengah dan Hawu Mehara akan memiliki kelas lereng yang tergolong curam (26-40%) s/d sangat curam (>41%) paling luas dibandingkan Kecamatan lainnya secara berturut-turut. Aspek pengelolaan lahan budidaya pertanian yang menjadi sektor dominan dalam perekonomian masyarakat dan wilayah di Sabu Raijua, maka aspek kelas lereng menjadi salah satu faktor topografi yang determinan dalam hal sustainabilitas lahan dalam kaitannya dengan erosi. Kondisi topografi ini menggambarkan bahwa mayoritas kondisi tanah di Pulau Sabu adalah bergelombang dimana kondisi ini membutuhkan biaya tambahan bagi konstruksi tertentu dalam pembangunan fisik dan infrastruktur lainnya. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi terhambat karena topografi yang kurang mendukung sehingga membutuhkan biaya tinggi dan sentuhan teknologi untuk dapat menjangkau seluruh wilayah desa dan dusun dalam upaya membuka keterisolasian wilayah.

Tabel 2.24 Persentase Luas Kemiringan Lahan Menurut Sabu Raijua

Tingkat Kelerengan	Keterangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
0 - 8 %	Datar	25.451,28	55,23
9 - 15 %	Landai	10.422,92	22,62
16 - 25 %	AgakCuram	8.762,08	19,01
26 - 40 %	Curam	1.170,04	2,54
> 41 %	Sangat Curam	277,84	0,60

M Sumber: RTRW Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2011-2031

Tabel 2.25 Sebaran Kemiringan Lahan Menurut Kabupaten Raijua

Kecamatan	Luas (Ha) Tingkat Kelerengan				
	0 - 8 %	9 - 15 %	16 - 25 %	26 - 40 %	> 41 %
Hawu Mehara	2.635,20	1.912,64	1.495,24	163,74	44,36
Raijua	2.207,37	1.029,50	536,42	74,43	27,77
Sabu Barat	9.040,64	4.447,41	4.240,91	571,46	121,54
Sabu Liae	1.934,95	1.643,82	1.860,04	222,35	58,04
Sabu Tengah	5.194,75	860,34	385,68	48,43	12,82
Sabu Timur	4.409,74	438,12	184,32	14,70	7,68

Sumber: RTRW Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2011-2031

### B. Ketinggian Lahan

Secara umum wilayah Kabupaten Sabu Raijua berada pada elevasi dari 0 s/d 343 meter serta didominasi area dengan ketinggian tempat (elevasi) 0-100 meter dengan luasan kumulatif 27.839,76 ha atau dengan persentase 60,41% dari keseluruhan wilayah. Kecuali Sabu Barat dan Sabu Tengah, maka kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki elevasi sampai maksimum 300-350 meter. Bahkan untuk wilayah Kecamatan Sabu Timur hanya memiliki elevasi maksimum 100-150 meter, serta Kecamatan Raijua dan Sabu Tengah memiliki elevasi maksimum 150-200 meter. Jika dicermati dari aspek elevasi, maka dapat terlihat masih tersedia luas area spasial yang dapat digunakan untuk aktivitas kultivasi dan ragam penggunaan lainnya oleh karena dominasi elevasi dataran rendah di Sabu Raijua. Dengan demikian, untuk proyeksi pengembangan wilayah kedepan masih tersedia peluang yang sangat luas dari aspek ketersediaan lahan ditilik dari aspek elevasi.

Tabel 2.26 Ketinggian Tempat (Elevasi) di Kabupaten Sabu Raijua

Elevasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
0 - 50 meter	14.173,72	30,76
50 - 100 meter	13.666,04	29,65
100 - 150 meter	9.883,04	21,45
150 - 200 meter	5.261,68	11,42
200 - 250 meter	2.287,12	4,96
250 - 300 meter	741,96	1,61
300 - 350 meter	70,52	0,15

Sumber: RTRW Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2011-2031

Tabel 2.27 Sebaran Ketinggian Tempat (Elevasi) di Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan	Luas (Ha) Menurut Ketinggian Tempat [Mdpl]						
	0-50	50-100	100-150	150-200	200-250	250-300	300-350
Hawu	1.995,4	1.615,	1.277,	1.073,6	292,85	14,32	-
Raijua	1.807,0	1.240,	792,32	56,92	-	-	-
Sabu Barat	5.284,4	4.555,	3.511,	2.781,4	1.677,	642,20	64,67
Sabu Liae	2.047,2	1.636,	1.083,	607,13	316,97	85,44	5,85
Sabu Tengah	636,77	2.727,	2.411,	742,39	-	-	-
Sabu	2.367,9	1.888,	806,93	-	-	-	-

Sumber: RTRW Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2011-2031



Peta 2.19 Elevasi Kabupaten Sabu Raijua  
 Sumber: RTRW Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2011-2031

#### 2.1.1.1.5. Hidrologi

Suplai air tanah maupun air tawar seluruhnya datang dari hujan yang berasal dari penguapan air laut, yang merupakan bagian dari proses siklus hidrologi. Hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah, sebagian menjadi air tanah yang mengisi akuifer (formasi tanah yang mengandung dan menghantarkan air tanah dan sebagian besar mengalir di permukaan sebagai *run off*, dalam kenyataannya siklus hidrologi ini sangat rumit meskipun pada dasarnya hidrologi adalah bagian dari ilmu bumi.

Namun kenyataannya hidrologi harus berhubungan dengan atmosfer sebagai medium yang meneruskan air ke muka bumi maupun dari muka bumi. Kabupaten Sabu Raijua memiliki sekitar 20 mata air dengan debit yang beranekaragam. Mata air yang ada tersebut pada umumnya terletak di Kecamatan 6 kecamatan.

Pulau Sabu Raijua yang merupakan gugusan kepulauan berukuran kecil berimplikasi pada ukuran DAS yang berukuran kecil pula dimana berdasarkan data BPDAS Benain Noelmina (2014) menunjukkan bahwa terdapat 21 DAS yang tersebar pada area terestrial Sabu Raijua dengan ukuran DAS yang tergolong sebagai DAS sangat kecil.

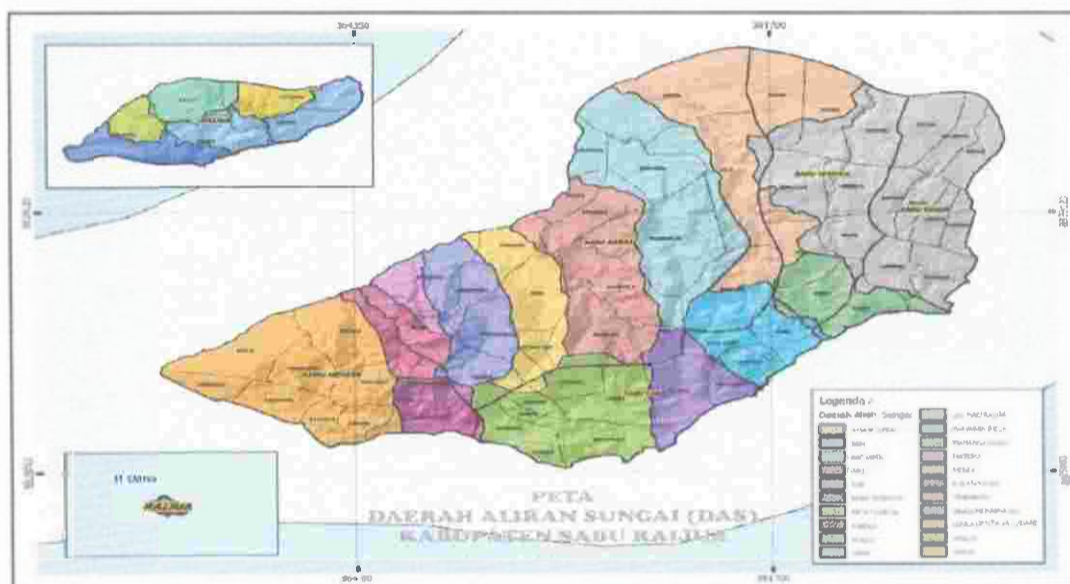
Dalam Pedoman Identifikasi Karakteristik DAS (Dirjen BPDAS-PS, 2013) menunjukkan bahwa dengan luasan DAS yang ada, maka seluruh DAS di Kabupaten Sabu Raijua tergolong sebagai DAS sangat kecil karena seluruh DAS berukuran < 10.000 ha. Oleh karena itu dengan bentuk penampang DAS yang berukuran sangat kecil yang notabene berfungsi sebagai processing dari input presipitasi, maka dapat diperkirakan persoalan ketersediaan dan kontinuitas ketersediaan air menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan wilayah di Sabu Raijua jika praktek-praktek konservasi tanah dan air luput untuk dilakukan untuk menahan selama mungkin air permukaan ataupun air tanah yang merupakan aliran dasar (*base flow*) saat musim kemarau serta memperkecil peluang terjadinya erosi dan sedimentasi yang membawa dampak negatif, baik on-site maupun off-site.

Tabel 2.28 Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Sabu Raijua

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Amadawadu	2.029,81
2	Beh	705,73
3	Daigama	4.932,19
4	Dari	955,54
5	Hai	1.599,14
6	HalaDaewao	778,18
7	Hego Daboa	3.305,74

No	Nama DAS	Luas (Ha)
8	Kabila	1.094,24
9	Kollo	700,66
10	Leba	675,40
11	Liu Rae Huwaga	8.173,34
12	Mananga Bela	1.951,99
13	Mananga Loro	1.540,61
14	Matepu	565,10
15	Menia	5.161,46
16	P. Dana Sabu	70,55
17	Tenihawu	3.577,05
18	Ubajami Hairawu	2.163,25
19	Ujula Liputaga Ubaae	4.700,35
20	Wallu	401,97
21	Wawa	468,77

Sumber: RTRW Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2011-2031



Peta.2.20 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Sabu Raijua

Sumber: RTRW Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2011-2031

Kondisi demikian jika mencermati akumulasi pengaliran (*flow accumulation*) pada beberapa DAS yang di delineasi ulang dari data *Digital Elevation Model* (DEM) menggunakan algoritme *fill-sink* berdasarkan metode Wang dan Liu menunjukkan beberapa wilayah dengan probabilitas terjadinya akumulasi pengaliran dari setiap bagian DAS. Fakta ini sekaligus menunjukkan keterkaitan antara hulu-hilir DAS dimana air akan bergerak dari tempat dengan elevasi yang lebih tinggi untuk kemudian terakumulasi pada daerah-daerah dengan elevasi yang lebih rendah. Jika pada suatu wilayah memiliki beberapa grid sel dengan elevasi yang rendah, maka akan terjadi akumulasi dari setiap aliran air (*water flow*) dari berbagai lokasi yang memiliki elevasi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan fakta diatas bahwa luas DAS pada wilayah Sabu Raijua tergolong sebagai DAS Sangat Kecil dan kerapatan aliran yang rendah, maka dapat memperbesar peluang terjadinya limpasan pada beberapa spot lokasi saat terjadinya debit puncak (*peak flow*).



Kondisi di Kabupaten Sabu Raijua mengalir banyak alur sungai/ saluran alam, antara lain: Loko Aimadawadu, Loko Raidui, Loko Latamako, Loko Helaba, Loko Roapahi dan Loko Pakah serta Loko Lui, Loko Leba, dan lain-lain. Sungai-sungai tersebut pada umumnya berupa sungai musiman yang hanya berair pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau tidak berair atau kering.

Tabel 2.29 Nama Sungai Panjang dan Jenis Sungai di Kabupaten Raijua

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (Km <sup>2</sup> )	Jenis Sungai
1	Hawu Mehara	Loko Kunudiodo	1.646	Permanen
		Loko Liputaga	2.663	Musiman
		Loko Roalie	2.662	Musiman
		Loko Ujula	5.004	Musiman
		Loko Marema	2.898	Musiman
		Loko Dari	2.046	Permanen
		Loko Wuilika	2.969	Musiman
		Loko Ubae	4.716	Musiman
		Loko Hego	2.621	Musiman
2	Sabu Barat	Loko Menia	13.276	Permanen
		Loko Kabila	5.369	Musiman
		Loko Pedete	2.533	Musiman
		Loko Wae	4.553	Musiman
		Loko Ubalami	3.735	Musiman
		Loko Hairawu	10.841	Musiman
		Loko Amadawudu	11.633	Musiman
		Loko Tenihawu	12.864	Musiman
		Loko Pedae	4.037	Musiman
3	Sabu Timur	Loko Liua	5.355	Permanen
		Loko Rae	2.744	Permanen
		Loko Huaga	5.536	Permanen
4	Sabu liae	Loko Rano	2.802	Musiman
		Loko Menagebela	8.458	Permanen
		Loko Daiiae	2.048	Musiman
		Loko Eiwao	2.594	Musiman
		Loko Hai	2.625	Musiman
		Loko Dabba	6.027	Musiman
5	Raijua	Loko Wallu	1.505	Musiman
		Loko Jaru	1.178	Musiman
		Loko Kolo	902	Musiman
		Loko Wawa	1.461	Musiman
		Loko Leba	3.331	Musiman
6	Sabu Tengah	Loko Tabawolo	5.635	Permanen
		Loko Eipuke	1.104	Musiman

Sumber: RTRW Kabupaten Sabu Raijua, Tahun 2011-2031

Kabupaten Sabu Raijua juga terdapat mata air. Mata air merupakan air tanah yang muncul ke permukaan tanah, pemunculannya dapat disebabkan karena lapisan pembawa air tersebut terpotong oleh permukaan tanah yang melereng atau adanya perbedaan litologi, terpengaruh adanya sesar dan sebagainya. Di Kabupaten Sabu Raijua terdapat beberapa sumber mata air yang berasal dari daerah perbukitan dengan debit menurun pada musim kemarau, sehingga kebutuhan air pada musim kemarau merupakan kendala di wilayah ini. Mata air yang ada di Kabupaten Sabu Raijua antara lain adalah mata air Menia di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat, mata air Molie di Desa Molie Kecamatan Hawu Mehara, mata air Lie Madira di Desa Molie Kecamatan Hawu Mehara, mata air di Desa Jiwuwu Desa Eimadake dan Desa Bebae Kecamatan Sabu Tengah, mata air di Desa Depe Kecamatan Sabu Barat serta mata air di Desa Ballu Kecamatan Raijua.

Embung di Kabupaten Sabu Raijua yang digunakan sebagai sarana konservasi air. Berdasarkan hasil Review RTRW Kabupaten Sabu Raijua (2013) menunjukkan terdapat tidak kurang dari 62 embung dengan kapasitas tampung yang beranekaragam serta tersebar hampir merata di seluruh wilayah. Berdasarkan data BPS 2010 s/d 2014 bahkan menunjukkan hingga tahun 2014 telah terdapat 145 embung dengan jumlah terbanyak embung berada pada Kecamatan Sabu Barat, Hawu Mehara dan Sabu Liae secara berturut-turut yang mengikuti pola kepadatan jumlah penduduk.  

Jika dianalisis kecenderungan (*trend*) jumlah embung secara time-series, maka dapat menjustifikasi bahwa ekstensifikasi pembangunan embung bergerak secara linier dengan slope yang positif. Hasil ini memperlihatkan bahwa embung merupakan salah satu kebijakan yang determinan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan produksi/produktifitas lahan.

Tabel 2.30 Jumlah Embung per Kecamatan Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Hawu Mehara	13	1	14	16	32
Raijua	2	0	0	0	14
Sabu Barat	25	3	33	30	53
Sabu Liae	12	1	16	20	25
Sabu Tengah	10	1	12	10	11
Sabu Timur	5	8	11	9	10
Total	67	8	86	85	145

Sumber: Kabupaten Sabu Raijua dalam Angka, BPS, 2011 – 2015

#### 2.1.1.1.6. Klimatologi

Keadaan iklim di wilayah Kabupaten Sabu Raijua pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia yaitu beriklim semi-arid yang erat kaitannya dengan pola monsoonal yang dicirikan oleh bentuk pola hujan yang bersifat unimodal (satu puncak musim hujan, yaitu pada Januari atau Februari). Musim hujan dan musim kemarau di Nusa Tenggara Timur terjadi seiring dengan bertiupnya monsun secara periodik, yaitu monsun Asia (Desember-Januari-Februari) dan monsun Australia (Juni-Juli-Agustus) dimana monsoon ini tercipta sebagai akibat perbedaan tekanan udara wilayah utara-selatan. Meski demikian, terdapat sejumlah keragaman pola iklim di wilayah Kabupaten Sabu Raijua, baik terhadap ruang maupun waktu. Dimana dalam hal ini kondisi lokal (topografi dan elevasi) memainkan peranan yang penting dalam persebaran iklim

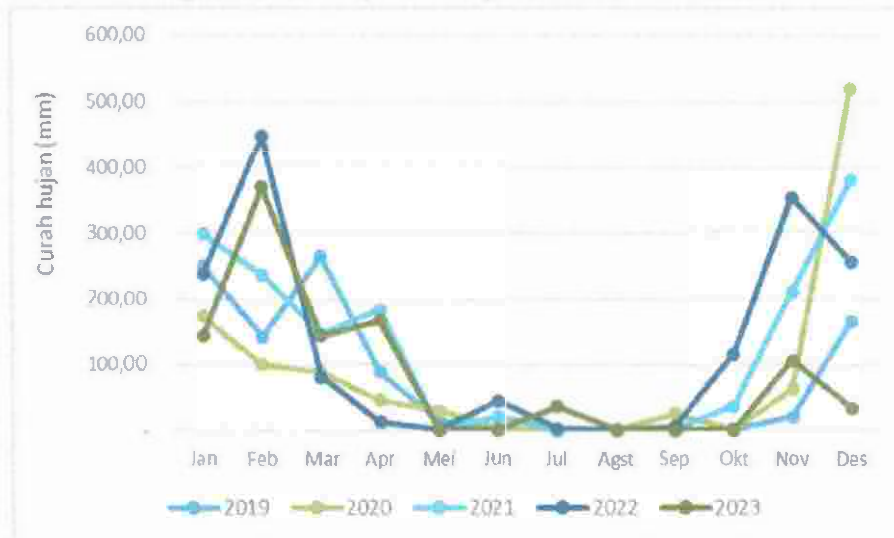
Kabupaten Sabu Raijua memiliki suhu rata-rata pada tahun 2023 sebesar 28,610C dengan suhu tertinggi mencapai 300C pada bulan November-Desember. Kelembaban udara pada Tahun 2023 memiliki rata-rata sebesar 75,25% dengan kelembaban tertinggi sebesar 83%. Sedangkan, curah hujan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 menunjukkan tren hari hujan dan jumlah curah hujan tinggi di bulan Januari-April dan November-Desember. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari yaitu 368,7 mm. Pada bulan Mei hingga Oktober curah hujan rendah bahkan pada beberapa bulan tidak terjadi hujan.

Tabel 2.31 Kondisi Curah Hujan, suhu dan kelembaban udara Kabupaten Sabu Raijua Tahun

Bulan	Hari Hujan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Kelembaban rata-rata (%)
Januari	14	142,5	79
Februari	20	368,7	83
Maret	10	142,6	81
April	10	165,8	80
Mei	0	0	75
Juni	0	0,8	75
Juli	3	36	72
Agustus	0	0	66
September	0	0	67
Oktober	0	0	73
November	10	105,5	74
Desember	15	33,2	78

Sumber: Stasiun Meteorologi Terdamu Kabupaten Sabu Raijua dalam Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2024

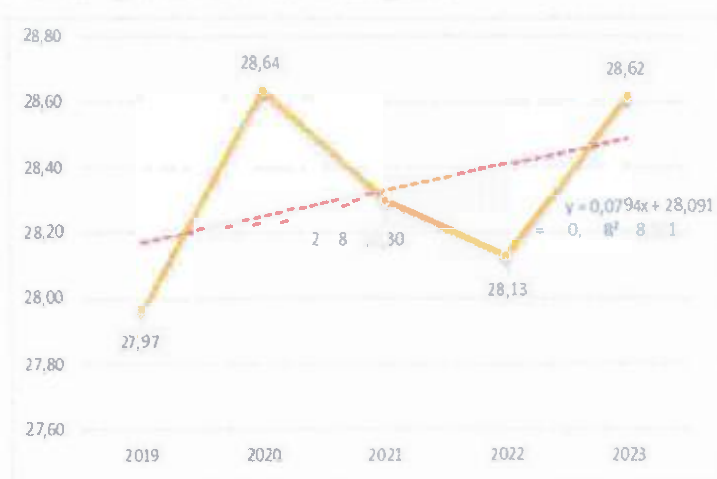
Berdasarkan data curah hujan bulanan periode 2019-2023 dari Stasiun Meteorologi Terdamu Kabupaten Sabu Raijua dalam Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka Tahun 2024, terlihat adanya kemiripan pola dan tren curah hujan bulanan. Dimana pada bulan Mei hingga Oktober jarang terjadi hujan bahkan beberapa bulan tidak terjadi hujan. Rata-rata curah hujan bulanan selama 5 tahun terakhir (tahun 2019-2023) yaitu 100,72 mm/bulan. Sedangkan, rata-rata jumlah curah hujan tahunan 5 tahun terakhir yaitu 1.208,58 mm/tahun.



Gambar 2.6 Grafik Tren Curah Hujan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023


Sumber: Stasiun Meteorologi Terdamu Kabupaten Sabu Raijua dalam Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data suhu udara bulanan periode 2019-2023 dari Stasiun Meteorologi Terdamu Kabupaten Sabu Raijua dalam Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka Tahun 2024, rata-rata suhu udara bulanan selama 5 tahun terakhir (tahun 2019-2023) sekitar 27-28 °C. Sedangkan, jika ditarik garis linear menunjukkan kondisi suhu di Kabupaten Sabu Raijua yang cenderung semakin meningkat.



Gambar 2.7 Grafik Tren Suhu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023

Sumber: Stasiun Meteorologi Terdamu Kabupaten Sabu Raijua dalam Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2024

Secara lebih rinci tren suhu udara di Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.32 Data Suhu Udara Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023 (°C)

Bulan	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	28,40	29,13	28,60	28,42	29,00
Februari	28,60	29,42	28,20	27,90	28,30
Maret	28,30	28,95	27,90	28,38	28,80
April	28,40	29,01	27,40	28,49	28,50
Mei	28,10	28,70	28,50	28,97	27,90
Juni	26,90	27,80	27,80	28,32	27,60
Juli	26,40	27,09	26,90	26,46	27,10
Agustus	26,30	27,26	27,90	27,25	27,70
September	27,00	28,60	28,60	27,98	28,20
Oktober	28,20	29,12	29,30	28,77	29,60
November	29,20	30,17	29,40	28,17	30,50
Desember	29,80	28,37	29,10	28,44	30,20
Rata-rata per	27,97	28,64	28,30	28,13	28,62

Sumber: Stasiun Meteorologi Terdamu Kabupaten Sabu Raijua dalam Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2024

Kecenderungan rendahnya curah hujan di Kabupaten Sabu Raijua dapat menyebabkan luasnya lahan kritis, lahan kering tak tergarap dan rendahnya produktifitas pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Selama ini permasalahan yang disebabkan oleh kondisi iklim terutama yang berdampak langsung terhadap ketersediaan air diatasi dengan pembangunan bendungan dan embung yang terletak pada beberapa titik.

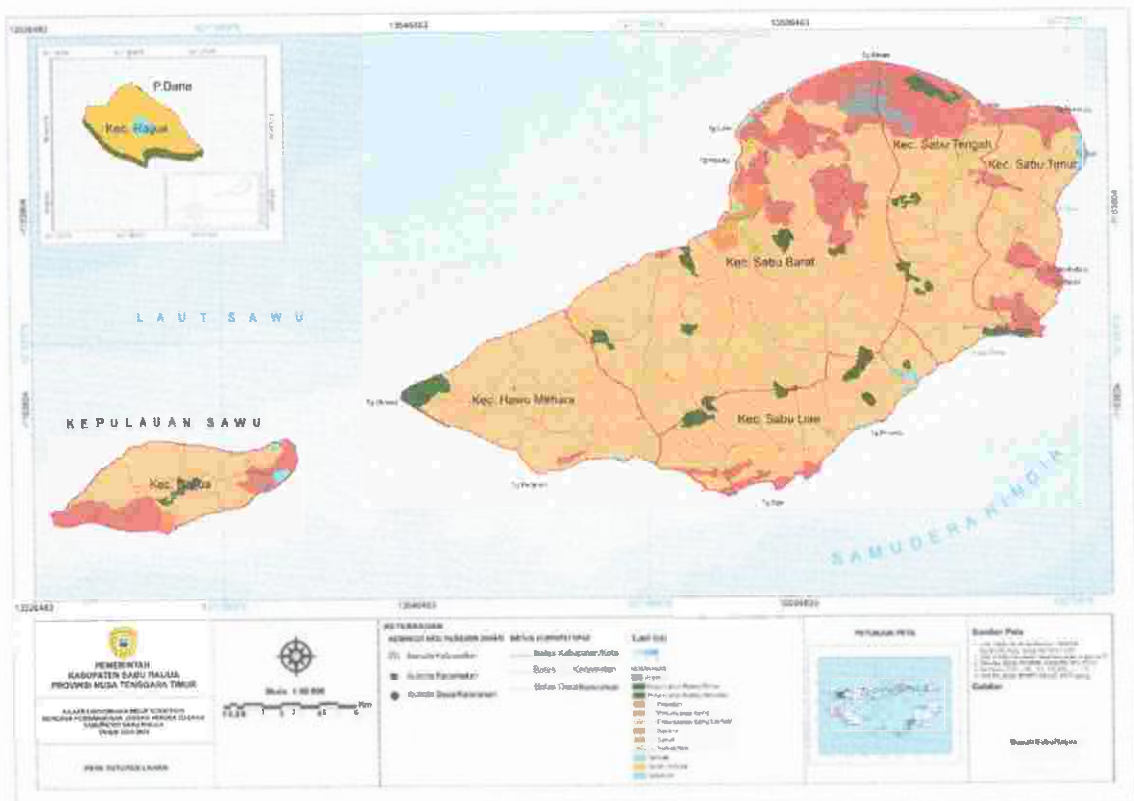
#### 2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan SK Menhut 3911/2014 menunjukkan bahwa terdapat luasan 9.966,23 ha sebagai kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan lindung (protection forest) atau mencakup 21,64% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Disisi yang lain, hasil analisis tutupan lahan menggunakan citra Landsat 8 Tahun 2015 menunjukkan bahwa tutupan lahan yang benar-benar bervegetasi pohon untuk seluruh wilayah Kabupaten Sabu Raijua ternyata hanya mencakup luasan 8.502,51 ha atau 18,45 %. Hal ini berarti terdapat selisih 1.463,72 ha antara "kawasan hutan" dan penutupan lahan yang mencirikan sebagai hutan. Jika ditilik lebih mendalam tutupan lahan hanya pada wilayah kawasan hutan memperlihatkan ternyata pada kawasan hutan justru formasi semak belukar/perkebunan yang paling mendominasi dengan luasan mencapai 3.071,05 ha atau 30,81% dari seluruh wilayah kawasan hutan. Di lain pihak, ditemui pula hanya 21,91% dari kawasan hutan yang diidentifikasi sebagai hutan karena didominasi oleh vegetasi pohon.

Tabel 2.33 Tutupan Lahan Hasil Intepretasi Citra Landsat 8 pada Kawasan Hutan Kabupaten Sabu Raijua

Tutupan Lahan pada Kawasan	Luas (Ha)	%
Hutan	2.183,79	21,91
Padang Rumput	2.247,27	22,55
Pertanian Lahan Kering	2.116,66	21,24
Sawah	279,17	2,80
Semak/Perkebunan	3.071,05	30,81
Tanah Terbuka	47,35	0,48
Tempat Tinggal	1,10	0,01
Tubuh Air	19,86	0,20

Sumber: RTRW Kabupaten Sabu Raijua 2011-2031



Peta 2.21 Tutupan Lahan Kabupaten Sabu Raijua  
 Sumber: Pengolahan Data BPKHTL Wilayah XIV Kupang, 2024

#### 2.1.1.1.8. Pengembangan Wilayah

Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2031, yang saat ini sedang dalam tahapan revisi memiliki arah pengembangan sebagai berikut:

##### a. Sudut Kepentingan Ekonomi

- Pengembangan kawasan agropolitan berbasis hortikultura berpusat di Desa Menia Kecamatan Sabu Barat. Beberapa hasil produk unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditas utama di kawasan agropolitan seperti buah mangga udang, bawang merah, kacang hijau dll;
- Pengembangan kawasan minapolitan di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat. Salah satu hasil unggulan di Kabupaten Sabu Raijua misalnya rumput laut yang dapat dikembangkan menjadi hasil yang memiliki nilai jual tinggi seperti agar-agar, manisan, dan bahan kosmetik yang terbuat dari rumput laut. Selain itu juga terdapat potensi unggulan ikan tuna yang dapat dikembangkan menjadi abon, sosis, sarden dan kerupuk ikan;
- Pembangunan bandara untuk kegiatan ekonomi yaitu kawasan bandara udara yang merupakan bandar udara pengumpan yang berfungsi khusus untuk melayani kegiatan dan ahli fungsi angkutan udara yaitu di Bandar Udara Eilode di Desa Eilode Kecamatan Sabu Tengah;
- Pembangunan pelabuhan untuk kegiatan ekonomi yaitu kawasan pelabuhan pengumpul yang berfungsi khusus untuk melayani kegiatan dan ahli fungsi moda angkutan laut yaitu Pelabuhan Seba di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat;
- Kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Sabu Raijua tersebar di beberapa lokasi, meliputi wisata Pantai Bali di Sabu Timur dan Pantai Raerobo di Kecamatan Sabu Liae.

b. Sudut Kepentingan Sosial Budaya

- Kawasan kampung adat Namata di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat;
- Kawasan kampung adat Kujiratu di Desa Kujiratu Kecamatan Sabu Timur;
- Istana Raja Sabu yaitu Tenni Hawu di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat; dan
- Situs sejarah Majapahit di Desa Kolorae dan Kelurahan Ledunu Kecamatan Raijua.

c. Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Sabu Raijua meliputi Bendungan Wie di Desa Dello Kecamatan Sabu Barat. Bendungan dapat mampu menumbuhkan kembangkan kawasan disekitarnya misalnya untuk kawasan pariwisata, konservasi, irigasi dan sebagainya sehingga menjadi satu kesatuan kawasan strategis wilayah.

Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan

Pangan, air dan energi merupakan bagian dari kebutuhan dasar hidup manusia. Ketersediaan pangan, air dan energi di suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam wilayah tersebut. Adapun kondisi kemandirian pangan, air dan energi di Kabupaten Ngada dapat digambarkan dengan indikator sebagai berikut:

Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan suatu daerah dapat diukur dengan indeks ketersediaan pangan, indeks keterjangkauan pangan dan indeks pemanfaatan pangan. Gabungan dari ketiga indeks tersebut adalah Indeks Ketahanan Pangan.

Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah persentase penduduk yang mengonsumsi pangan kurang dari standar kecukupan energi.

Akses Rumah Tangga terhadap air minum

Tabel 2.34 Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Kabupaten /Provinsi	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%/tahun)
Kabupaten Sabu Raijua	Persen	81,82	77,16	81,28	69,60	75,21	83,57	0,89

Sumber :BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas merujuk pada kondisi lingkungan yang mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara optimal dan berkelanjutan. Ini mencakup lingkungan biofisik yang seimbang, lingkungan sosial ekonomi yang memenuhi kebutuhan dasar, dan lingkungan budaya yang memberikan rasa aman dan nyaman.

Indeks Lingkungan Hidup Berkualitas.

Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan komposit dari indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas lahan (IKL).

M Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 

## 2.1.1.2. Demografi

### 2.1.1.3.1 Jumlah dan kepadatan Penduduk

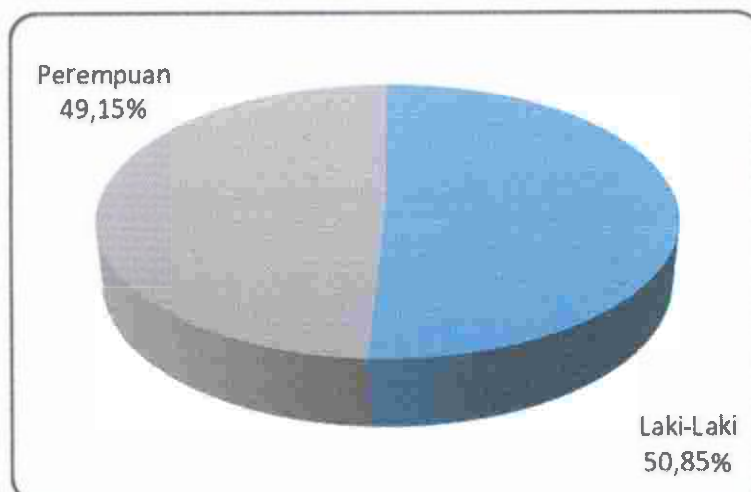
Perkembangan penduduk Kabupaten Sabu Raijua (berdasarkan BPS); pada tahun 2023 sebesar 93.330 jiwa dengan laju pertumbuhan periode tahun 2021-2023 yaitu 0,58% per tahun dengan rata-rata kepadatan 203,08 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sabu Barat dan terendah di Kecamatan Raijua. Sedangkan, kecamatan dengan penduduk terpadat yaitu Kecamatan Hawu Mehara (307,47 jiwa/km<sup>2</sup>) sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu Kecamatan Sabu Tengah (116,75 jiwa/km<sup>2</sup>). Jumlah serta kepadatan penduduk Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Persentase penduduk (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2021-2023 (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
Raijua	9.149	9,80	-0,20	239,75
Hawu Mehara	19.312	20,69	0,23	307,47
Sabu Liae	11.080	11,87	0,20	192,29
Sabu Barat	34.715	37,20	0,58	187,49
Sabu Tengah	9.179	9,83	0,38	116,75
Sabu Timur	9.895	10,60	2,63	265,92
Sabu Raijua	93.330	100,00	0,58	203,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua, 2024

Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu. *Sex ratio* Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023 adalah sebesar 103,88. Hal ini berarti dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Sabu Raijua terdapat 103 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki pada Tahun 2023 di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 47.359 jiwa (50,85%) dan perempuan sebanyak 45.777 jiwa (49,15%).



Gambar 2.7 Sex Ratio Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua, 2024

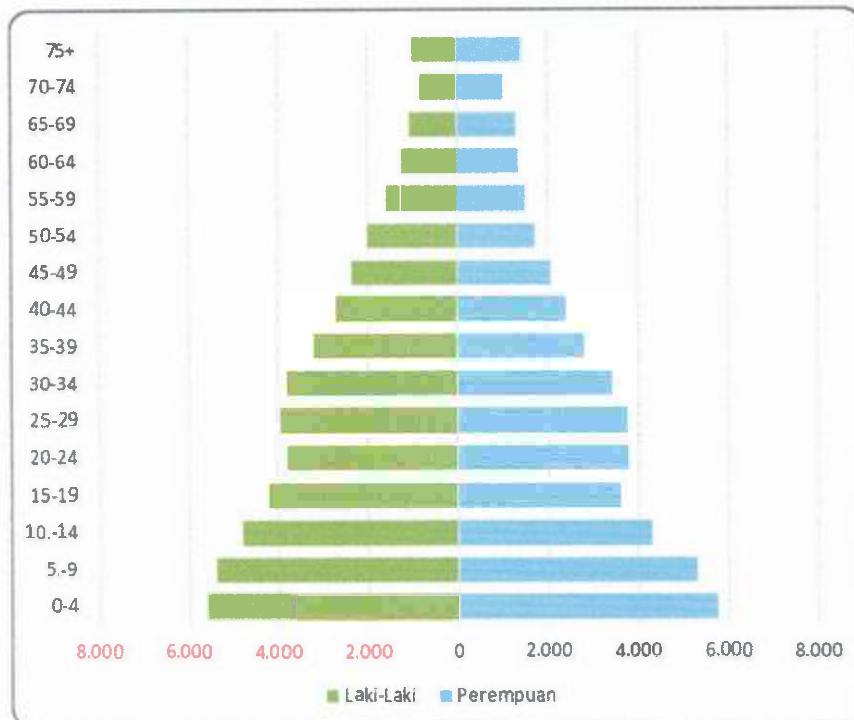
Tabel 2.36 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (Sex Ratio)
Raijua	101,30
Hawu Mehara	106,99
Sabu Liae	102,15
Sabu Barat	106,35
Sabu Tengah	107,67
Sabu Timur	91,10
Sabu Raijua	103,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua, 2024

### 2.1.1.3.2 Komposisi Penduduk

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, yang dapat digunakan, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya. Struktur penduduk Kabupaten Sabu Raijua tahun 2023 dapat dilihat melalui piramida penduduk pada gambar berikut.



Gambar 2.8 Piramida Penduduk Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sabu Raijua, 2024

Struktur penduduk Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan dominasi usia produktif (15-64 tahun). Pada tahun 2023, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 55.534 jiwa atau sebesar 59,50% dari total penduduk. Penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 31.429 jiwa atau 33,68% dan penduduk yang tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun (>64 tahun) sebanyak 6.367 jiwa atau 6,82%. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2023 sebesar 68,06 % yang berarti dari 100 penduduk usia produktif Kabupaten Sabu Raijua akan menanggung secara ekonomi sebesar 68 penduduk usia tidak produktif.

Jumlah dan persentase penduduk berdasarkan umur secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017-2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 4	12.734	13.044	5.683	6.317	11.519	11.663	11.014
5 - 9	10.510	10.728	0.356	10.235	10.344	10.512	10.820
10 - 14	10.532	10.801	11.485	11.201	8.728	8.931	9.595
15 - 19	9.302	9.542	9.986	10.111	7.530	7.594	7.980
20 - 24	7.072	7.422	8.780	9.072	7.686	7.676	7.396
25 - 29	5.735	5.988	7.588	7.503	7.729	7.905	7.760
30 - 34	5.437	5.533	7.213	7.231	6.877	7.094	7.317
35 - 39	5.048	5.184	6.125	6.210	5665	5807	6170
40 - 44	4.397	4.520	5.156	5.227	4915	5045	5144
45 - 49	4.117	4.248	4.435	4.476	4267	4392	4478
50 - 54	3.971	4.121	3.711	3.698	3498	3611	3769
55 - 59	3.653	3.830	3.124	3.139	2906	3008	3017
60 - 64	2.985	3.178	2.880	2.779	2580	2678	2503
65 - 69	2.319	2.429	2.330	2.182	2355	2451	2204
70 - 75	1.791	1.859	1.983	1.745	1780	1852	1827
75+	1.909	1.979	3.636	2.764	2458	2573	2336
Jumlah	91.512	94.406	4.471	93.890	90837	92792	93330

Sumber: BPS Kabupaten Sabu Raijua, 2024

Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2023 yang berada pada usia muda cukup banyak, dimana pada umumnya masih memiliki ketergantungan tinggi, memerlukan biaya pendidikan dan belum produktif dalam bekerja. Selain itu, penduduk usia anak-anak juga cukup tinggi yang mengindikasikan besarnya potensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Sehingga perlu adanya program yang mengarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan visi pembangunan.

### 2.1.1.3.3 Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan obJLk utama dalam sebuah perencanaan sehingga untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai maka diperlukan data kependudukan untuk mengetahui karakteristik penduduk di daerah perencanaan. Proyeksi penduduk digunakan untuk mengetahui kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup hingga beberapa tahun kedepan, selain itu dalam dokumen perencanaan juga untuk merencanakan kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana serta utilitas dalam daerah perencanaan. Berikut merupakan proyeksi penduduk Kabupaten Sabu Raijua tahun 2024-2029 berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2018-2023.

Tabel 2.33 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sabu Raijua

Tahun	Sabu Barat	Sabu Tengah	Sabu Timur	Sabu Liae	Hawu Mehara	Raijua	Kab.Sabu Raiju	
Baseline data (BPS, 2024)	2018	35.126	9.571	10.067	11.327	19.831	9.799	95.721
	2019	35.012	9.301	9.405	11.258	19.732	9.763	94.471
	2020	33.225	8.833	8.937	10.718	18.664	8.950	89.327
	2021	33.790	8.967	9.261	10.862	18.920	9.037	90.837
	2022	34.515	9.144	9.641	11.058	19.267	9.167	92.792
Hasil proyeksi	2023	34.715	9.179	9.895	11.080	19.312	9.149	93.330
	2024	34.612	9.115	9.626	11.116	19.489	9.227	93.183
	2025	34.661	9.100	9.618	11.144	19.600	9.256	93.379
	2026	34.709	9.086	9.611	11.173	19.711	9.286	93.575
	2027	34.758	9.071	9.603	11.202	19.821	9.316	93.770
2028	34.806	9.056	9.595	11.231	19.932	9.346	93.966	
2029	34.855	9.042	9.588	11.259	20.043	9.375	94.161	

Sumber: Pengolahan data BPS, 2024

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

#### 2.1.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha karena pulihnya aktivitas ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua atas dasar harga konstan 2024, mencapai 862,56 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 831,09 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,79 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum yang mencapai 11,23 persen diikuti oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mencapai pertumbuhan ekonomi 8,98 persen, Berikutnya lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan 8,44 persen dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,07 persen. Keempat lapangan usaha tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen pada tahun 2024. Di Kabupaten Sabu Raijua, tidak ada yang mengalami kontraksi atau seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2024.

Tabel 2.34 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fisheries	2,43	1,81	4,92	2,72	3,30
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	3,43	4,58	3,10	1,32	4,34
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-3,35	-1,73	6,74	8,98	8,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	8,24	2,51	6,42	11,53	8,44
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation	5,34	7,38	3,49	1,67	1,51
F	Konstruksi/ Construction	-7,96	7,53	-0,24	4,27	0,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-5,78	3,39	3,46	2,42	5,49
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-7,98	0,80	8,55	2,05	8,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service	-22,02	3,95	3,65	6,96	11,23
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	10,45	6,71	3,57	1,80	3,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	11,35	5,10	0,92	1,34	7,65
L	Real Estat/Real Estate Activities	-2,00	1,94	1,50	1,13	3,30
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-32,29	-8,39	2,15	4,56	7,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	4,08	-8,32	-2,92	0,24	4,81
P	Jasa Pendidikan/Education	1,48	-1,98	-0,44	1,08	3,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health and Social Work Activities	4,23	10,19	0,87	2,29	1,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	-16,83	-2,96	2,08	1,41	0,22
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-1,11	1,70	3,00	2,62	3,79

Sumber : BPS Sabu Raijua, 2024

#### 2.1.2.1.2. PDRB

Nilai PDRB Kabupaten Sabu Raijua atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 1.732,6 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 94,08 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 1.638,53 miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi membaiknya perekonomian setelah dampak pandemi Covid-19 dengan ditunjukkan oleh peningkatan aktivitas produksi dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 862,56 miliar rupiah pada tahun 2024 menjadi 831,09 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024, Kabupaten Sabu Raijua mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 3,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang mulai berangsur membaik setelah dampak pandemi Covid-19.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Sabu Raijua didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi; dan Real Estat. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang mencapai angka 34,83 persen (angka ini turun dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar angka 35,00 persen). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,24 persen (naik dari 15,24 persen pada tahun 2020), disusul oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,62 persen (turun dari 17,90 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,46 persen (turun dari 15,54 persen di tahun 2020) dan lapangan usaha Real Estat sebesar 7,37 persen (naik dari 6,68 persen di tahun 2020). t.

Tabel 2.35 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sabu Raijua Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fisheries	33,94	34,55	35,56	35,00	34,83
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,28	0,29	0,29	0,28	0,26
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1,32	1,27	1,32	1,47	1,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi/ Construction	14,31	15,41	15,42	15,54	15,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	14,08	14,57	14,84	15,24	16,24
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	4,33	4,29	4,68	4,77	5,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service	0,72	0,73	0,73	0,77	0,83
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	0,66	0,68	0,67	0,65	0,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	0,18	0,20	0,21	0,20	0,20
L	Real Estat/Real Estate Activities	6,65	6,53	6,55	6,68	7,37
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	22,00	19,91	18,24	17,90	15,62
P	Jasa Pendidikan/Education	0,37	0,35	0,34	0,32	0,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health and Social Work Activities	0,97	1,04	0,99	1,02	1,03
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

\* Angka sementara/Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber : BPS Sabu Raijua, 2024

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor dan Real Estat adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib peranannya berangsur menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

#### 2.1.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah adalah nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sabu Raijua atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 15,91 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 18,28 juta rupiah.

Tabel 2.36 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Sabu Raijua, 2020-2024

Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2020	2021	2022	2023*	2024**
- ADHB/ at current price	1.414,52	1.450,94	1.545,74	1.638,53	1.732,61
- ADHK/ at 2010 Constant Price	773,18	786,30	809,89	831,09	862,56
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	15.912,74	16.041,12	16.658,12	17.556,28	18.278,97
- ADHK/ at 2010 Constant Price	8.697,95	8.693,08	8.728,02	8.904,85	9.099,98
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	7,62	-0,06	0,41	2,03	2,19
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)					
	-8,27	1,26	1,26	1,58	1,56

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

#### 2.1.2.1.4. Ketimpangan

#### 2.1.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, Kinerja penurunan tingkat pengangguran Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2022 menghasilkan capaian yang lebih baik dibandingkan dengan Tahun baseline pada 2011. Pada Tahun 2011, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,35 persen dari angkatan kerja. Sementara itu, pada Tahun 2022, TPT berada pada angka capaian 3,29 persen, atau lebih rendah 0,06 persen.

Jika diamati menurut pembagian periode, capaian rata-rata pada periode MI (2011-2019) terlihat lebih baik dibandingkan periode MII (2020-2022). Pertumbuhan rata-rata penurunan TPT pada periode MI sebesar 0,07 persen dengan capaian akhir pada 2019 sebesar 2,89 persen. Sebaliknya pada periode MII, TPT justru mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,13 persen yang menyebabkan TPT kembali meningkat menjadi 3,29 di Tahun 2022. Grafik perkembangan TPT Kab Saburajua tahun 2011-2011 dapat dilihat pada Gambar 2.14.

Grafik 2.8 Perkembangan TPT Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2022

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,08	1,25	3,29	4,06	3,99

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua

#### 2.1.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk), IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*), Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

IPM Kabupaten Sabu Raijua mengalami peningkatan selama periode 2011-2022. Pola kenaikan tersebut terjadi di setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan 1,5 persen. Jika diamati secara kumulatif, IPM meningkat 8,74 poin atau sebesar 49,16 poin di tahun baseline menjadi 57,9 poin di Tahun 2022.

Pada periode MI (2011-2019), IPM meningkat sebesar 7,5 poin dari 49,16 poin (kondisi baseline) menjadi 56,66 poin (Tahun 2019) dengan rata-rata pertumbuhan 1,79 persen. Sementara itu, pada periode MII (2020-2022) dapat diamati bahwa IPM meningkat sebesar 0,88 poin dari 57,02 (Tahun 2020) menjadi 57,9 (Tahun 2022) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,73 persen.

Tabel 2.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Sabu Raijua dan Provinsi NTT  
Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sabu Raijua	57.02	57.03	57.9	58.89	59.58
Nusa Tenggara Timur	65.19	65.28	65.9	66.68	67.39

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua


Progres capaian IPM di Kabupaten Sabu Raijua dikontribusi oleh perkembangan capaian dari indikator-indikator pada 3 (tiga) dimensi pembentuknya, yaitu angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita disesuaikan (pengeluaran perkapita) yang dapat diamati pada Tabel.

Tabel 2.10. Indikator Pembentuk IPM di Sabu Raijua  
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (Tahun)	60,64	60,66	60,87	61,06	61,07
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,14	13,15	13,17	13,18	13,19
Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)	6,65	6,66	6,77	6,98	6,99
Pengeluaran Riil Perkapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	5.265	5.256	5.558	5.899	5.901

Sumber: BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

#### 2.1.2.1.7. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani, adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP membandingkan harga produk yang dihasilkan petani (dijual) dengan harga produk yang dibutuhkan petani, baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, NTP menunjukkan daya beli petani. 

#### 2.1.2.1.8. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk adalah pekerjaan atau aktivitas utama yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mendapatkan penghasilan. Mata pencaharian ini sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, dan keahlian penduduk.

#### 2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk semua adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya akses kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi. Ini bukan hanya tentang ketersediaan layanan kesehatan, tetapi juga tentang kondisi kesehatan yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi.

##### 2.1.2.2.1. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah suatu sistem perlindungan finansial yang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa khawatir akan biaya yang besar. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan adalah contoh utama dari jaminan kesehatan yang bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

##### 2.1.2.2.2. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur yang diharapkan dapat dijalani seseorang sejak lahir, dengan asumsi kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Ini adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2.34. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Hasil Long Form SP2020 (Tahun)	Tahun	
	2023	2024
	66,46	66,65

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

##### 2.1.2.2.3. Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang

Gizi buruk dan gizi kurang adalah dua kondisi kekurangan gizi pada balita, namun berbeda tingkat keparahannya. Gizi kurang adalah kondisi di mana anak kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, sementara gizi buruk adalah kondisi kekurangan gizi yang lebih parah, ditandai dengan berat badan anak yang sangat rendah dibandingkan tinggi badannya.

##### 2.1.2.2.4. Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian seorang perempuan yang terjadi selama kehamilan atau dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, yang disebabkan oleh penyebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan dan persalinan, tetapi bukan karena kecelakaan atau sebab-sebab insidental. Definisi ini mencakup kematian yang terjadi selama kehamilan, saat persalinan, atau dalam masa nifas (setelah persalinan).

Tabel 2.36. Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)

Tahun	Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur
2022	6	171
2023	2	135

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

#### 2.1.2.2.5. Kematian Bayi dan Balita

Kematian bayi dan balita mengacu pada kematian anak-anak dalam kelompok usia tersebut, yang diukur dengan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA). AKB adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kesehatan ibu dan anak serta kemajuan program kesehatan. AKABA mencerminkan kondisi kesehatan anak-anak usia 0-4 tahun dan berbagai faktor risiko yang mempengaruhi mereka. Pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah angka kematian bayi dan balita mengalami fluktuasi.

Tabel 2.37. Jumlah Kematian Bayi dan Balita Menurut Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020-2024 (Jiwa)

Bayi Balita	Jumlah Kematian Bayi dan Balita (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bayi	37	55	41	29	22
Anak Balita	4	8	5	9	7
Balita	41	63	46	38	29

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sabu Raijua

#### 2.1.2.2.6. Balita Stunting

Stunting merupakan kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan rata-rata anak seusianya. Kondisi ini terjadi akibat masalah gizi kronis atau kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Berikut disajikan jumlah dan persentase Balita stunting di NTT pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.38 Jumlah dan Persentase Balita Stunting Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2024

Wilayah	Stunting				Persentase Stunting			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Sabu Raijua	2037	1496	1230	1626	25	18	15	20,8
Nusa Tenggara Timur	81354	77338	63804	64507	21	18	15	16,9

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

#### 2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata adalah sistem pendidikan yang menyediakan akses pendidikan yang sama dan berkualitas untuk semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka. Ini mencakup penyediaan fasilitas yang memadai, guru berkualitas, kurikulum yang relevan, dan lingkungan belajar yang kondusif.

##### 2.1.2.3.1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah, khususnya dalam bidang pendidikan. Indeks ini mencerminkan hasil pembangunan di bidang pendidikan, dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tabel 2.39. Persentase Buta Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Sabu Raijua

Jenis Kelamin	Persentase Buta Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	8,23	8,65	7,91	7,11	6,83
Perempuan	13,6	11,2	7,96	6,32	10,01

Sumber: BPS Kabupaten Sabu Raijua

2.1.2.3.2. Angka Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi adalah dua kemampuan dasar yang sangat penting. Literasi mengacu pada kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi, sementara numerasi adalah kemampuan untuk memahami, menerapkan, dan berpikir tentang angka serta konsep matematika dalam berbagai konteks. Keduanya saling melengkapi dan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan dunia kerja. Pada tabel dibawah ini menunjukkan persentase di Kabupaten Sabu Raijua mengalami peningkatan dengan menurunnya persentase buta huruf pada setiap tahun.

Tabel 2.40 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	
	2023	2024
Sabu Raijua	63.28	45.52
Nusa Tenggara Timur	60.53	62.62

2.1.2.3.3. Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. RLS juga merupakan salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS mengukur tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dalam suatu wilayah, dan semakin tinggi angka RLS, semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk tersebut. RLS dihitung berdasarkan data penduduk berusia 25 tahun ke atas, karena diasumsikan bahwa pada usia tersebut, proses pendidikan formal pada umumnya telah selesai.

Tabel 2.40 Rata-rata lama Sekolah (Persen)

Rata-rata Lamanya Sekolah	Tahun	
	2023	2024
	6,98	6,99

Sumber BPS Kabupaten Sabu Raijua

2.1.2.3.4. Harapan lama sekolah (HLS)

HLS mengindikasikan harapan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Semakin tinggi angka harapan HLS suatu wilayah menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut semakin menyadari pentingnya pendidikan dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Tabel 2.41 Rata-rata lama Sekolah (Persen)

Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
2023	2024
13,18	13,19

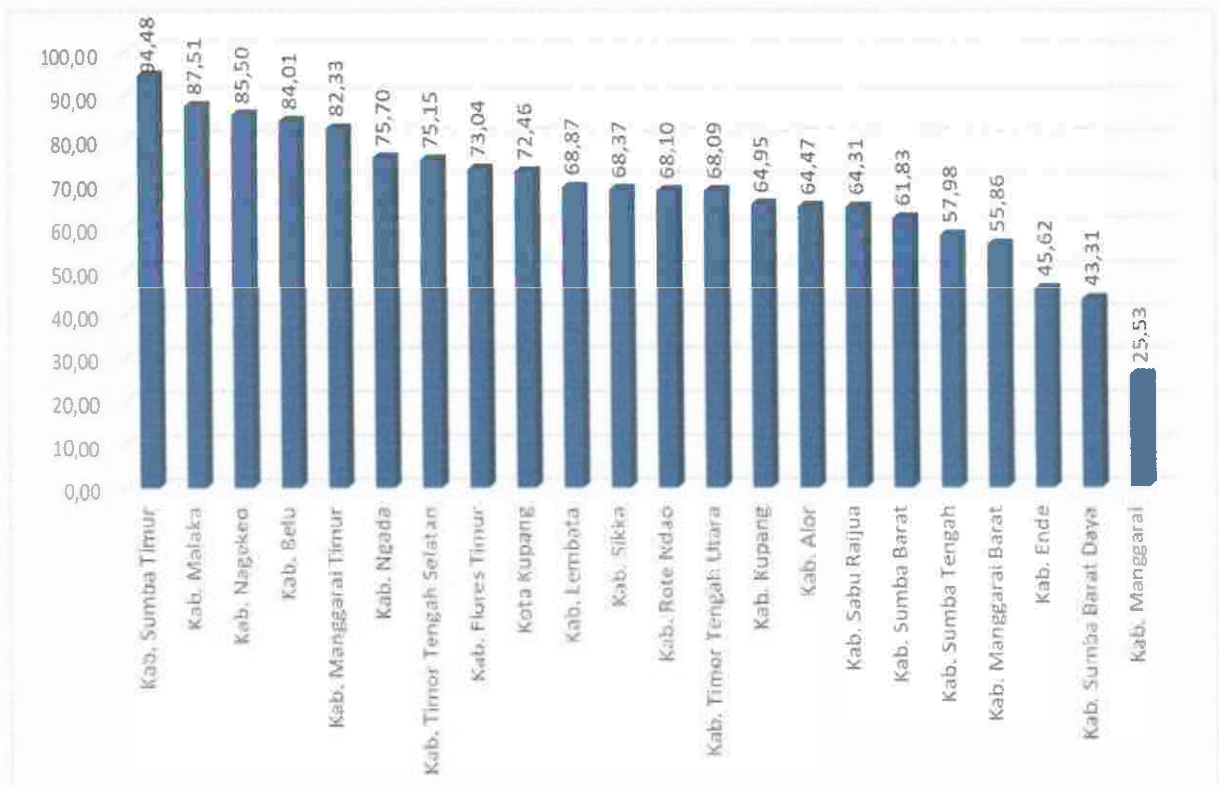
Sumber BPS Kabupaten Sabu Raijua

2.1.2.3.5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan hasil agregasi 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi, dan Anggota perpustakaan.

Capaian IPLM berdasarkan Kabupaten/Kota tertinggi Tahun 2023 yakni Kabupaten Sumba Timur dengan nilai 94,48 diikuti oleh Kabupaten Malaka dengan nilai 87,51. Sedangkan capaian terendah Tahun 2023 yaitu Kabupaten Manggarai dengan nilai 25,53, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nilai 43,31 serta Kabupaten Ende dengan nilai 45,31. Rincian selenmgkapnya dapat

dilihat pada gambar berikut ini. 



Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2024

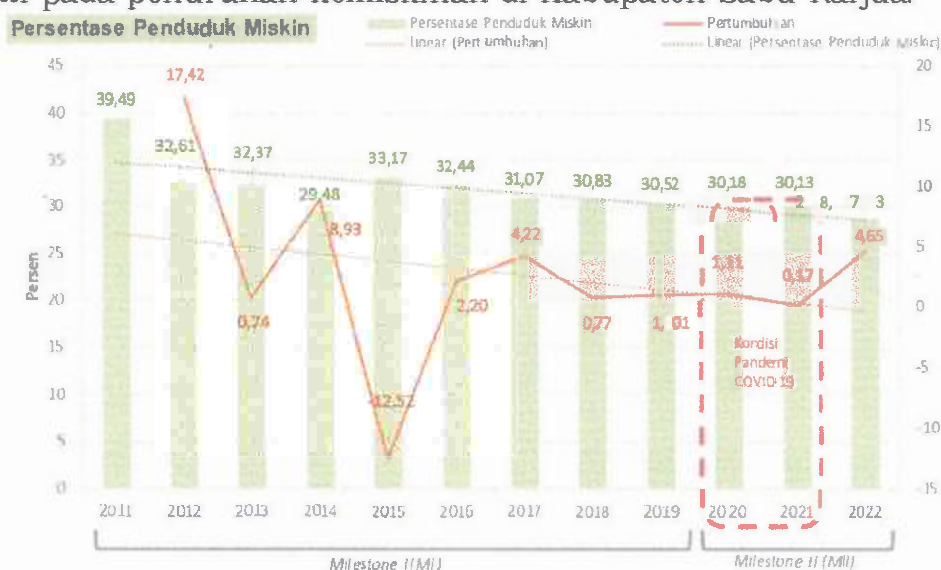
Gambar 2. 9 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

#### 2.1.2.3.6. Perlindungan Sosial yang Adaptif

#### 2.1.2.3.7. Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua mengalami penurunan selama periode 2011-2022. Pada Tahun 2011, persentase penduduk miskin (PO) sebesar 39,49 persen dan menurun mencapai 28,73 persen di Tahun 2022. Jika diamati pada Gambar 2.4, tingkat kemiskinan mengalami penurunan kumulatif sebesar 10,76 persen dengan rata-rata penurunan sebesar 0,98. Selain itu, laju pertumbuhan rata-rata penurunan kemiskinan sebesar 2,61 persen. Tingkat kemiskinan yang menurun setiap tahun juga dapat diamati dari pola garis tren persentase penduduk miskin yang melandai.

Jika diamati menurut klaster periode, laju pertumbuhan rata-rata pada periode MI (2011-2019) lebih tinggi (2,85 persen) dibandingkan periode MII (2020-2022) (1,98 persen). Kondisi ini merupakan representasi dari dampak pandemi pada penurunan kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Grafik 2. 10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011-2022

Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua mengalami penurunan selama periode 2011-2022, tren laju pertumbuhan penurunan kemiskinan cenderung melambat, yaitu sebesar 17,42 persen pada Tahun 2012 kemudian menurun pada Tahun 2022 sebesar 4,65 persen. Laju pertumbuhan kemiskinan yang melambat juga dapat diamati dari pola garis tren pertumbuhan penurunan kemiskinan yang cenderung melandai selama periode 2011-2022.

Laju pertumbuhan penurunan kemiskinan yang melambat menyebabkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua masih tinggi di atas 20 persen dengan garis kemiskinan (GK) sebesar 480.844 ribu rupiah per kapita per bulan pada Tahun 2022. Jika diamati lebih lanjut, nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Sabu Raijua pada tahun yang sama cukup rendah yaitu 1,50 persen. Namun, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) masih cukup tinggi yaitu 4,61 persen pada tahun yang sama. Artinya, kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin mungkin tergolong rendah, namun rata-rata pengeluarannya masih jauh dari GK. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai indikasi penyebab laju pertumbuhan penurunan kemiskinan yang melambat di Kabupaten Sabu Raijua.

Tabel 2.42. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023

Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	29,49	30,14	30,6	30	30,43
Persentase Penduduk Miskin (%)	30,52	30,18	30,13	28,73	28,37
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	374256	403846	438492	480844	526831
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1	6,2	5,88	8,11	4,61	5,16
Indeks Keparahannya Kemiskinan/P2	1,78	1,57	2,94	1,26	1,6

Sumber: BPS Kabupaten Sabu Raijua

#### 2.1.2.3.8. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen dalam memberikan gambaran terkait kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks pembangunan kebudayaan mengalami fluktuasi dengan tertinggi pada tahun 2023 dengan nilai 53,04. Nilai tersebut mengindikasikan masih belum optimalnya pembangunan kebudayaan di Provinsi NTT. Beberapa hal yang bisa ditingkatkan berdasarkan dimensi-dimensi yang ada maka aspek-aspek seperti keberlanjutan penyelenggaraan kebudayaan, pemanfaatan budaya sebagai kegiatan ekonomi, serta pemenuhan hak untuk pendidikan serta kesetaraan gender.

#### 2.1.2.3.9. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

##### 2.1.2.3.10. Indeks Kualitas Keluarga

Mengukur ketahanan dan kualitas keluarga digunakan indikator-indikator kualitas keluarga mencakup kecukupan akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, aspek legalitas, serta relasi setara gender, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keadilan sosial.

### 2.1.2.3.11. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia yang meliputi Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya, dan Perlindungan Khusus.

### Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

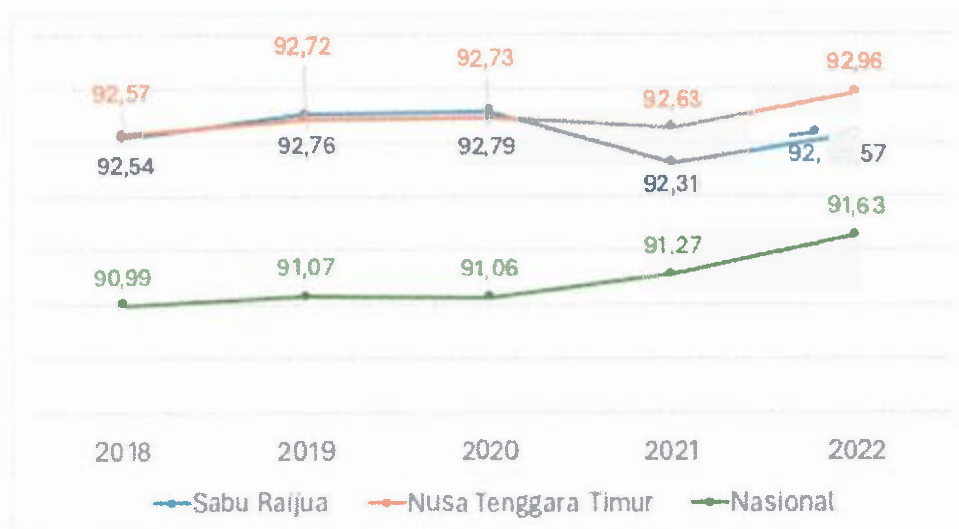
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan indikator untuk mengetahui kualitas keluarga yang tersusun dari 3 dimensi yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Pembangunan keluarga dinilai penting dalam rangka membangun masyarakat. Dalam indikator ini terdapat tiga kategori pembangunan kualitas keluarga yaitu tangguh, berkembang, dan renta.

Berikut capaian indeks pembangunan kualitas keluarga Kabupaten Sabu dalam beberapa tahun terakhir.

### 2.1.2.3.12. Indeks Pembangunan Gender

Kesetaraan gender dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar yang setara bagi laki-laki maupun Perempuan. Hak dasar yang dimaksud di antaranya terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan lingkungan sosial yang layak. Dengan hak dasar yang setara ini, laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam menciptakan pembangunan sosial ekonomi suatu negara.

Perkembangan IPG Kabupaten Sabu Raijua tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami perkembangan yang baik, yaitu pada tahun 2018 sebesar 92,54 dan tahun 2022 menurun menjadi sebesar 92,57. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS, 2023

Grafik 2. 6 Perkembangan IPG Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak berbeda dengan komponen pembentuk IPM hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin, Dilihat pada Tabel 2.17, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, angka harapan hidup perempuan tahun 2018 sebesar 61,28 tahun meningkat menjadi sebesar 62,70 tahun, sedangkan angka harapan hidup laki-laki tahun 2018 sebesar 57,68 tahun dan tahun 2022 sebesar 58,98 tahun. Harapan Lama Sekolah untuk perempuan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, dimana harapan lama sekolah perempuan tahun 2018 sebesar 13,33 tahun meningkat menjadi sebesar 13,38 tahun pada tahun 2022. *A.*

Sedangkan untuk laki-laki tahun 2018 sebesar 13,12 tahun dan tahun 2022 menjadi sebesar 13,17 tahun. Lebih lanjut, rata-rata lama sekolah perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki, yaitu pada tahun 2018 sebesar 6,22 tahun dan tahun 2022 meningkat menjadi 6,96 tahun. Sedangkan untuk laki-laki tahun 2018 sebesar 5,80 tahun dan tahun 2019 menjadi sebesar 6,77 tahun.

Dilihat dari Sumbangan Pendapatan Kabupaten Sabu Raijua tahun 2018 hingga tahun 2022 laki-laki lebih baik dibandingkan dengan perempuan yaitu tahun 2018 sebesar Rp. 6.979 ribu dan tahun 2022 menjadi Rp. 7.358 ribu. Sedangkan untuk perempuan tahun 2018 sebesar Rp. 4.675 ribu dan tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 4.964 ribu. Adapun rincian data komponen pembentuk IPG Kabupaten Sabu Raijua tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 44. Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018-2022

No.	Tahun	AHH		HLS		RRLS		Pengeluaran Per Kapita (Rp.000)	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	2018	57,68	61,28	13,12	13,33	5,80	6,22	6.979	4.675
2	2019	58,35	61,99	13,13	13,34	6,06	6,51	7.103	4.772
3	2020	58,78	62,41	13,14	13,35	6,34	6,84	6.980	4.698
4	2021	58,82	62,45	13,15	13,36	6,62	6,85	6.963	4.689
5	2022	58,98	62,70	13,17	13,38	6,77	6,96	7.358	4.964

Sumber: BPS NTT, 2023

#### 2.1.2.3.13. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja.

Tabel 2.45. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sabu Raijua	0,5	0,524	0,534	0,497	0,484

Sumber: BPS Kabupaten Sabu Raijua

#### 2.1.2.3.14. Indeks Pembangunan Pemuda


Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi.

#### 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

##### 2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

##### 2.1.3.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK Kabupaten Sabu Raijua dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan fluktuatif, yaitu pada tahun 2016 sebesar 74,66% dan tahun 2020 sebesar 75,11%, yang menurut pada tahun 2021 menjuadi 58,82% tetapi meningkat Kembali pada tahun 2023 sebesar 76,71% dan Tahun 2024 menjadi 77,44%, Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*M* dibawah ini. 

Tabel 2.46. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (Persen)				
2020	2021	2022	2023	2024
75,11	68,82	76,71	76,14	77,44

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua

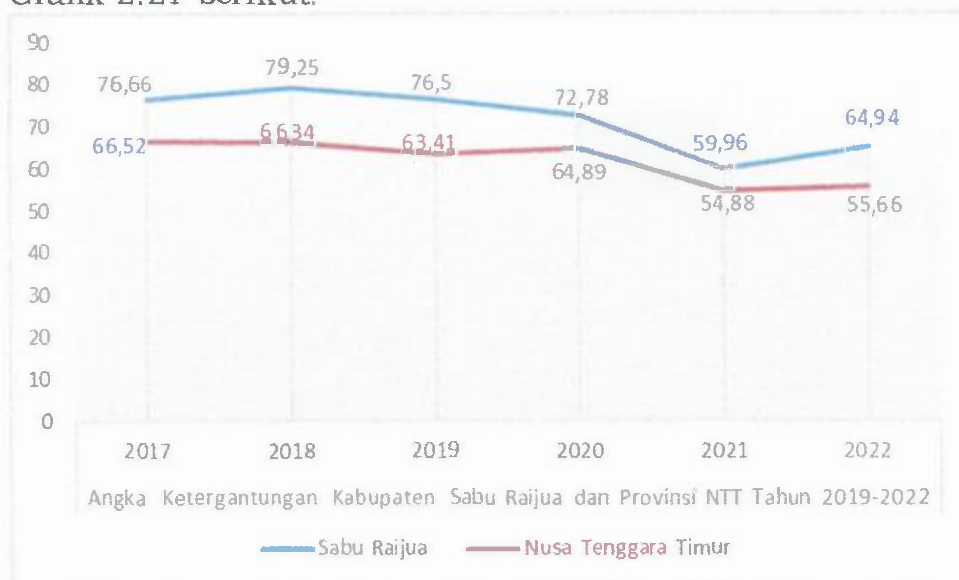
2.1.3.1.2. Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Angka ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak individu dalam populasi yang bergantung pada angkatan kerja produktif.

Angka ketergantungan di Sabu Raijua secara konsisten lebih tinggi daripada di NTT secara keseluruhan, menunjukkan bahwa beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif di Sabu Raijua lebih besar daripada di NTT. Namun, baik Sabu Raijua maupun NTT secara keseluruhan terjadi tren penurunan angka ketergantungan dari tahun 2017 hingga 2021, kemudian pada tahun 2022, terdapat sedikit peningkatan angka ketergantungan di Sabu Raijua dan NTT secara keseluruhan.

Pada tahun 2017, angka ketergantungan di Sabu Raijua adalah 76,66, di atas NTT sebesar 66,52, yang berarti ada sekitar 77 orang yang tidak produktif untuk setiap 100 orang yang produktif di Sabu Raijua, lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi NTT. Angka ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 79,25, namun menurun menjadi 76,5 pada 2019, dan terus menurun hingga mencapai 59,96 pada 2021. Pada tahun 2022, angka ketergantungan di Sabu Raijua sedikit naik menjadi 64,94.

Sementara, angka ketergantungan untuk Provinsi NTT secara keseluruhan terjadi penurunan sedikit dari tahun 2017 hingga mencapai 63,41 pada tahun 2019, kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 64,89. Penurunan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2021 dengan angka ketergantungan turun menjadi 54,88, dan sedikit naik menjadi 55,66 pada 2022. Keadaan ini ditampilkan dalam Grafik 2.21 berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023

Grafik 2.21 Angka Ketergantungan Kabupaten Sabu Raijua dan Provinsi NTT Tahun 2019-2022

2.1.3.2. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Kemudahan Perizinan

Pelayanan perizinan di Kabupaten Sabu Raijua saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan. Dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan melalui Online Single Submission (OSS) diantaranya dilakukan melalui waktu perijinan yang dipercepat dan mempermudah.

2. Penanaman Modal

Urusan Penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi 4 sub urusan antara lain: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) dan Pelayanan Penanaman Modal.

Terkait jumlah investor yang menginvestasikan modalnya di Kabupaten Sabu Raijua, dilihat dari sisi tren memang fluktuatif, tahun 2020 baru 2 investor, akan tetapi tahun 2020 tidak ada investor sama sekali.

Untuk mendukung kemudahan berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Sabu Raijua, salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses perijinan. Standar waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurus perijinan usaha di Kabupaten Sabu Raijua adalah 7 hari kerja dengan kecepatan pelayanan perijinan maksimal 3 hari.

Perkembangan selengkapnya kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 2. 47 Peningkatan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Sektor	10	10	10	10	1
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Jumlah	Na	2	2	1	0
3	Peta potensi investasi kabupaten Sabu Raijua	dokumen	Na	1	1	1	1
4	Kecepatan pelayanan perizinan	Hari	14	7	7	3	1

Sumber: DPMPTSPPP Kab. Sabu Raijua, 2024

3. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam, Lingkup kewenangan pada perijinan meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan, Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan

pinjam/unit simpan pinjam koperasi. 

Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota, Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, meliputi: 1) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota, 2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), 3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Perkembangan wirausaha baru mikro di Kabupaten Sabu Raijua sampai pada tahun 2020 mencapai 559 unit, Jika dilihat capainnya menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 233 unit. Dukungan terhadap manajemen UKM setiap tahun dilaksanakan di 6 kecamatan sejak tahun 2017. Sementara itu jumlah UKM yang berkembang dari mikro ke kecil pada tahun 2020 mencapai 12 unit. Untuk kondisi koperasi kategori aktif, ditahun 2020 mencapai sebesar 44,94%, atau terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2017 sebesar 16,17% walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi sedikit penurunan.

Kinerja urusan koperasi dan UKM di Kabupaten Sabu Raijua selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 48 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah wirausaha baru mikro	unit	Na	130	233	551	559
2	Cakupan dukungan manajemen UMKM	Kec	Na	6	6	6	6
3	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Unit	Na	5	9	12	12
4	Persentase Koperasi aktif	%	Na	16,17	31,7	48,10	44,94
5	Persentase pertumbuhan UKM	%	Na	3,8	3,9	2,2	2,2
6	Persentase UKM yang telah mengakses kredit Usaha	%	Na	Na	Na	4,2	4,2
7	Persentase usaha mikro yang berijin	%	Na	Na	Na	2,9	2,9
8	Jumlah usaha mikro yang dibina	unit	Na	Na	100	132	30
9	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%	Na	16,7	7,3	7,9	7,5
10	Persentase sumberdaya manusia koperasi yang terampil	%	Na	Na	Na	39,7	22,47
11	Persentase koperasi yang dibina	%	Na	16,7	7,3	48,10	44,94

Sumber: Dinas Transmigrasi, Koperasi, Tenaga Kerja dan UKM Kab Sabu Raijua, 2024

- *Indeks Inovasi Daerah*

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Indeks ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan inovasi, mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil melakukan inovasi.

Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 400.10.11-4898 TAHUN 2024 tentang TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024 maka Indeks Inovasi Daerah (IID)

Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 dengan Skor 3,77 kategori Kurang Inovatif.

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) adalah persentase dari jumlah perempuan usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total jumlah penduduk perempuan usia kerja. Secara sederhana, TPAK Perempuan mengukur seberapa aktif perempuan terlibat dalam pasar tenaga kerja.

### 2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

#### 2.1.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau (Green Economy index/ GEI) merupakan salah satu alat untuk mengukur transformasi ekonomi guna menilai interaksi sosial ekonomi lingkungan dalam lingkup ekonomi hijau serta mengidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk merancang kebijakan ekonomi hijau yang lebih baik pada masa yang akan datang. Indeks ekonomi hijau terdiri dari 15 indikator terpilih yang memiliki 3 pilar sustainable development yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

#### 2.1.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan alat untuk mengukur kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam sektor ekonomi biru. Indeks ekonomi biru terdiri dari 35 indikator yang mewakili 3 pilar yaitu pilar ekonomi yang menekankan pada analisis rantai nilai produksi dan perdagangan antar daerah, pilar sosial yang menekankan pada potensi perempuan dan kelompok marginal untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap sektor ekonomi biru, serta pilar lingkungan yang menekankan pada pengelolaan sampah khususnya sampah laut.

#### 2.1.3.4. Transformasi Digital

##### 2.1.3.4.1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan suatu wilayah menuju masyarakat informasi.

##### 2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global



###### Indikator PMTB

Indikator PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) adalah ukuran investasi yang digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PMTB mengukur nilai total investasi baru dalam aset tetap, seperti bangunan, mesin, dan peralatan, yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga.

###### Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah

Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat fluktuasi atau perbedaan harga suatu komoditas di berbagai wilayah. Ini dihitung dengan membandingkan simpangan baku harga dengan rata-rata harga, dinyatakan dalam bentuk persentase. Nilai koefisien variasi yang lebih tinggi menunjukkan perbedaan harga yang lebih besar antar wilayah, sementara nilai yang lebih rendah menunjukkan harga yang lebih seragam.

###### Ekspor Barang Jasa

Ekspor barang dan jasa adalah kegiatan mengirimkan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial. Ekspor barang melibatkan perubahan kepemilikan ekonomi atas barang antara penduduk dan bukan penduduk, sedangkan ekspor jasa adalah penyediaan layanan oleh penduduk kepada bukan penduduk. 

### 2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

#### Indeks Infrastruktur/Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. IKLI juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terkait infrastruktur, serta memberikan umpan balik bagi pemerintah dalam perencanaan dan perbaikan layanan infrastruktur.

#### Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak

Rumah tangga dengan akses hunian layak adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk luas tempat tinggal yang cukup, akses air bersih, dan sanitasi yang layak. Hunian layak tidak hanya berarti memiliki atap dan dinding, tetapi juga harus aman, nyaman, dan mendukung kesehatan penghuninya.

#### Potensi Kebudayaan

Cagar budaya merupakan warisan budaya suatu bangsa, dengan menjaga dan melestarikannya kita bisa menjaga sejarah bangsa. Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut.

Kesenian dan kebudayaan dalam masyarakat juga harus kita jaga dan lestarikan, Seni dan budaya merupakan identitas suatu bangsa, selain menjaga dan melestarikan kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sabu Raijua ditunjukkan dengan indikator Persentase budaya lokal yang dilestarikan, Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan Cakupan cagar budaya yang dilestarikan.

Cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Sabu Raijua sejumlah 12 Cagar Budaya pada tahun 2020. Budaya lokal yang dilestarikan antara lain dilakukan Promosi seni dan budaya melalui kegiatan festival yang dilakukan dengan persentase sebesar 60 % pada tahun 2020, Festival budaya diharapkan bisa memperkenalkan seni dan budaya yang berasal dari Kabupaten Sabu Raijua.

Tabel 2. 46 Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Indikator				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase misi budaya yang dilestarikan	%	80	80	85	86	60
2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	Kegiatan	6	6	6	6	0
3	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	12	12	12	12	12
4	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	82	85	86	90	0
5	Persentase misi budaya yang dilestarikan	%	87	88	89	90	60
6	Jumlah pembinaan kepada pelaku seni dan budaya	Kelompok	62	62	62	62	9
7	Jumlah grup kesenian	Kelompok	11	11	11	11	9
8	Cakupan Kajian Seni	%	65	70	75	80	60
9	Cakupan Fasilitasi Seni	%	70	70	70	75	60
10	Cakupan sumber daya manusia kesenian	%	70	75	80	85	60
11	Cakupan organisasi seni	%	65	70	70	75	70
12	Cakupan gelar seni dan budaya	%	66	70	73	75	60

Sumber: Dinas PKKO Kabupaten Sabu Raijua, 2024

## Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diukur dari capaian Indeks Desa Membangun. Selama kurun waktu 2021–2023 menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Desa Membangun adalah Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38 Indeks Desa Membangun Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2023 per Kecamatan

No	Kecamatan	Satuan	Capaian Indikator		
			2021	2022	2023
1	Raijua	Indeks	0,5473 (tertinggal)	0,5604 (teringgal)	0,51470 (tertinggal)
2	Sabu Barat	Indeks	0,5663 (tertinggal)	0,5778 (tertinggal)	0,55000 (tertinggal)
3	Hawu Mebara	Indeks	0,5535 (tertinggal)	0,5586 (tertinggal)	0,52486 (tertinggal)
4	Sabu Timur	Indeks	0,6187 (berkembang)	0,6330 (berkembang)	0,59321 (tertinggal)
5	Sabu Liae	Indeks	0,5488 (tertinggal)	0,5710 (tertinggal)	0,53697 (tertinggal)
6	Sabu Tengah	Indeks	0,5900 (tertinggal)	0,6114 (berkembang)	0,58456 (tertinggal)
	Sabu Raijua	Indeks	0,5700 (tertinggal)	0,5844 (tertinggal)	0,5519 (Tertinggal)

Sumber: Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2024, diolah

### 2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

#### Rasio Pajak Daerah

Rasio pajak daerah adalah perbandingan antara total penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu daerah, yang dinyatakan dalam persentase. Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap perekonomian daerah tersebut. Secara umum, rasio pajak daerah yang rendah menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah masih kecil dibandingkan dengan potensi ekonomi daerah, dan sebaliknya.

#### Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Secara sederhana, ini mengukur seberapa cepat daya beli uang menurun dari waktu ke waktu. ↗

Inflasi dapat diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang membandingkan harga barang dan jasa saat ini dengan harga di periode sebelumnya.

#### Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat, termasuk mereka yang berada di lapisan ekonomi terbawah, memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Ini mencakup akses ke produk dan layanan seperti rekening bank, pinjaman, asuransi, dan produk keuangan lainnya, yang disediakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

#### 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

##### 2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

##### 2.1.4.1.1. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi..

##### 2.1.4.1.2. Indeks Inovasi Daerah

##### 2.1.4.1.3. Indeks SAKIP

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.47 Indeks SAKIP Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022-2024

Tahun	Indeks SAKIP
2022	C
2023	CC
2024	CC

Sumber : Kemenpan RB, Tahun 2025

##### 2.1.4.1.4. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja.

Tabel 2.48. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022-2024

Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
2022	C
2023	CC
2024	CC

Sumber: Kemenpan RB, Tahun 2025

#### Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi. IKM digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja penyelenggara pelayanan publik dan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terkait pelayanan yang

diterima. Pengukuran ini membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan hasil pelayanan yang mereka terima.

#### 2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

##### Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) mengacu pada ukuran keberhasilan pelaksanaan dan penegakan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Ini adalah indikator penting untuk menilai efektivitas perda dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Persentase Perda biasanya dihitung sebagai persentase dari jumlah Perda yang ditegakkan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan total Perda yang ada. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa Perda efektif dalam mengatur perilaku dan mencapai tujuan yang diinginkan. Penegakan Perda yang baik mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Persentase penegakan yang tinggi juga menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

##### Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase capaian Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) bervariasi tergantung pada tahun dan tingkatan pelaporan (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota). Secara umum, terdapat peningkatan dalam pelaksanaan Aksi HAM dari tahun ke tahun, meskipun target dan capaiannya berbeda-beda. Aksi HAM bertujuan untuk memastikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, peningkatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia. Fokus Aksi HAM adalah pada pemenuhan hak-hak kelompok rentan dan termarginalkan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Pelaksanaan Aksi HAM diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap HAM, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

##### Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan masyarakat di suatu wilayah atau komunitas. Ini adalah indikator penting dalam mengukur kualitas hidup dan kebijakan pembangunan, dan sering digunakan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengevaluasi kondisi keamanan dan ketertiban umum

##### Indeks Ketentraman Dan Ketertiban



Indeks Ketentraman dan Ketertiban (IPKKU) adalah ukuran kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Indeks ini mengukur berbagai aspek terkait keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta efektivitas upaya pemerintah dalam menjaga kondisi tersebut.

##### 2.1.4.2.1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi baik di nasional maupun di tingkat daerah.

##### 2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

##### 2.1.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi suatu daerah. Model pengukuran IDSD ini dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi-BRIN untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IDSD menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.  

## 2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

### 2.1.4.4.1. Layanan Urusan Wajib

#### 2.1.4.4.1.1. Urusan Pendidikan

Beberapa indikator yang mencakup aspek pelayanan pemerintahan wajib yang berurusan dengan pelayanan dasar urusan Pendidikan pada level kabupaten/kota, antara lain; Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, serta Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Tabel 2.31 berikut merupakan gambaran mengenai kondisi yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan Pendidikan.

Tabel 2.48 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019– 2023

No.	Indikator	Satuan	Capaian Setiap Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,18	13,21	13,25	13,28	13,32
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,89	7,14	7,38	7,62	7,87
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dari tabel 2.31 terlihat adanya peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sabu Raijua secara bertahap dari 13,18 tahun pada 2019 menjadi 13,32 tahun pada 2023. Ini menunjukkan perbaikan dalam harapan masyarakat terhadap pendidikan anak. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga meningkat dari 6,89 tahun pada 2019 menjadi 7,87 tahun pada 2023. Ini mencerminkan perbaikan dalam akses dan partisipasi pendidikan. Sementara beberapa indikator pelayanan umum urusan pendidikan lainnya sudah maksimal sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Namun, dari tahun 2019 hingga 2023, menunjukkan tidak ada atau sangat sedikit anak-anak yang berpartisipasi dalam program pendidikan kesetaraan.

Tabel 2.50 Angka Melanjutkan ke Jenjang SMP SMA /Sederajat

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Melanjutkan ke Jenjang SMP/Sederajat	87,34	93,38	98,43	100	92,08
Angka Melanjutkan ke Jenjang SMA/Sederajat	91,98	99,02	93,45	97,14	96,93

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sabu Raijua

Pada tahun 2023, seluruh lulusan SD melanjutkan ke jenjang SMP dengan angka partisipasi mencapai 100%, yang merupakan kondisi ideal. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan, menunjukkan adanya tantangan baru dalam keberlanjutan akses pendidikan. Secara umum, tren melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA/ sederajat menunjukkan capaian yang positif dan tinggi, meskipun masih terdapat fluktuasi signifikan pada beberapa tahun. Oleh karena itu, intervensi kebijakan pendidikan sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan angka partisipasi, terutama setelah puncak capaian pada tahun 2023.

Tabel 2.51 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) Menurut Jenis Kelamin				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	98,5	98,98	93,94	93,76	-
Perempuan	98,34	99,5	91,23	92	-
Jumlah	98,42	99,26	92,67	92,9	96,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sabu Raijua

Tabel 2.52 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Jenis Kelamin				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	75,77	76,7	78,41	85,58	-
Perempuan	75,58	74,71	73,48	70,58	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sabu Raijua

#### 2.1.4.4.1.2. Urusan Kesehatan

Kabupaten Sabu Raijua telah mencapai capaian kesehatan yang sangat baik dalam periode 2019–2023. Semua indikator menunjukkan capaian 100% untuk berbagai pelayanan kesehatan, menunjukkan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia produktif, usia lanjut, serta penderita berbagai kondisi kesehatan khusus, menerima layanan yang memadai. Selain itu, ada peningkatan rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk, menunjukkan upaya yang masih perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan.

Tabel di bawah menunjukkan capaian berbagai indikator kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua selama lima tahun dari 2019 hingga 2023. Dari tabel diketahui kondisi capaian urusan kesehatan di Sabu Raijua berdasarkan berbagai indikatornya. Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk mengukur seberapa banyak kapasitas rumah sakit (RS) dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio ini meningkat secara bertahap dari 0,69% di tahun 2019 menjadi 0,90% di tahun 2023, menunjukkan peningkatan kapasitas rumah sakit relatif terhadap jumlah penduduk.

Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang Terakreditasi mengindikasikan proporsi rumah sakit rujukan yang telah mendapatkan akreditasi. Selama periode ini, angka ini konsisten di 100%, menunjukkan semua rumah sakit rujukan tingkat kabupaten telah terakreditasi. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil menunjukkan persentase ibu hamil yang menerima pelayanan kesehatan. M A

Angka ini tetap di 100% setiap tahun, menandakan pelayanan kesehatan ibu hamil yang sangat baik. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mengukur proporsi ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan bersalin. Konsisten di 100% menunjukkan pelayanan kesehatan bersalin yang optimal.

Sementara, Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir menunjukkan persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Angka 100% setiap tahun menunjukkan layanan kesehatan bayi baru lahir yang memadai. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita mengukur persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Konsistensi pada 100% menunjukkan pelayanan kesehatan untuk balita yang sangat baik. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar mengukur proporsi usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Capaian di Sabu Raijua konsisten di 100% menunjukkan pelayanan kesehatan yang efektif untuk kelompok usia ini.

Selanjutnya, Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut mengindikasikan proporsi usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan capaian selalu 100%, menunjukkan perhatian yang memadai terhadap kelompok usia lanjut. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi menunjukkan proporsi penderita hipertensi yang menerima pelayanan kesehatan dengan capaian yang konsisten di 100%, menunjukkan layanan kesehatan hipertensi yang baik. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) mengukur proporsi penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian selalu 100%, menandakan layanan kesehatan untuk diabetes melitus yang optimal. Angka yang sama tercapai untuk beberapa indikator lainnya, yakni; Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat; Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis, dan; Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

Tabel 2.53 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019–2023

No.	Indikator	Satuan	Capaian Setiap Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,69	0,74	0,80	0,85	0,90
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Pelayanan kesehatan balita	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator	Satuan	Capaian Setiap Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.54 Jumlah Kelahiran Bayi

Kelahiran	Jumlah Kelahiran Bayi (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lahir Hidup	1744	2525	6241	1844	2221
Lahir Mati	57	41	37	44	35
Jumlah	1801	2566	6278	1888	2256

Sumber: BPS Sabu Raijua Tahun 2025

Tabel 2.55 Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin (Persen)

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan menurut Jenis Kelamin				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	17,95	6,34	12,67	10,7	12,98
Perempuan	11,55	6,81	18,05	12,57	15,3
Jumlah	19,46	6,57	15,31	11,61	14,12

Sumber: BPS Sabu Raijua Tahun 2025

#### Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencakup dua bidang utama: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pekerjaan Umum berkaitan dengan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bangunan, dan sumber daya air, sementara Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kedua bidang ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Penataan Ruang memberikan kerangka dasar bagi pelaksanaan Pekerjaan Umum, sementara Pekerjaan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan rencana tata ruang.

Tabel 2.56. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Kabupaten/Provinsi	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%/tahun)
Kabupaten Sabu Raijua	Persen	45,30	61,06	49,98	59,96	72,24	72,95	11,62
Provinsi NTT	Persen	82,35	83,87	85,40	86,76	88,35	88,55	1,46

Tabel 2.57. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)  
Kabupaten Sabu Raijua

2020	2021	2022	2023	2024
117,51	111,63	107,9	111,4	115,55

Sumber: BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

#### Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) adalah urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan penyediaan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas perumahan serta kawasan permukiman. Urusan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk perumahan kumuh dan tidak layak huni.

Tabel 2.59. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki  
Akses Terhadap Hunian Layak

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak (Rumah Layak Huni) Kabupaten Sabu Raijua				
2020	2021	2022	2023	2024
21,01	18,01	22,25	27,8	36,17

Sumber: BPS Sabu Raijua Tahun 2025

#### Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan "Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat" adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Urusan ini mencakup berbagai kegiatan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di wilayah daerah.

#### Urusan Sosial

Urusan sosial mengacu pada berbagai masalah dan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan hubungan antar individu dalam suatu komunitas. Ini mencakup berbagai aspek seperti perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan masalah sosial.

Tabel 2.62. Persentase Rumah Tangga Yang Pernah Menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Persentase Rumah Tangga Yang Pernah Menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Tahun		
	2021	2022	2023
	45,97	30,87	13,73

Sumber: BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

Tabel 2.63. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan/Asuransi Kematian (Persen)

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan/Asuransi Kematian				
2019	2020	2021	2022	2023
3,41	7,59	3,32	3,69	4,2

Sumber: BPS Sabu Raijua Tahun 2025

Urusan wajib non dasar:

### Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja (Employment Affairs) adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja, termasuk pelatihan, penempatan, perlindungan, dan hubungan industrial. Urusan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di tingkat pusat dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di tingkat daerah.

Tabel 2.64. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
	2,68	5,17	2,6	3,41	0,31

Sumber: BPS Sabu Raijua Tahun 2025

### Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan anak mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, melindungi hak-hak, dan memastikan kesetaraan gender serta pemenuhan hak-hak anak. Ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai tingkatan pemerintahan.

### Urusan Pangan

Urusan Pangan merujuk pada semua hal yang berkaitan dengan penyediaan, distribusi, dan konsumsi makanan, serta upaya untuk menjaga ketahanan pangan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi pangan, pengelolaan rantai pasok, hingga kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pangan.




Gambar 2.10. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019-2024

### Urusan Pertahanan

Urusan Pertahanan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan meliputi kebijakan serta tindakan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Urusan ini mencakup pembentukan dan pengaturan angkatan bersenjata, serta menyatakan perang atau perdamaian.

### Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan, termasuk pencegahan pencemaran, pengelolaan 

sampah, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang ini, mulai dari penyusunan rencana hingga pengawasan dan pengendalian.

#### Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, termasuk pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk, serta pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan.

#### Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) adalah bagian dari urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di perdesaan. Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) bertanggung jawab untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program terkait pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah bidang tugas yang berkaitan dengan pengaturan jumlah penduduk dan upaya untuk merencanakan keluarga. Ini mencakup berbagai aspek seperti penyediaan informasi dan layanan keluarga berencana, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.

#### Urusan Perhubungan


Urusan perhubungan mencakup berbagai aspek terkait transportasi dan mobilitas, baik darat, laut, maupun udara. Di tingkat daerah, Dinas Perhubungan (Dishub) bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan perhubungan. Tugas dan fungsinya meliputi perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pengawasan, serta pembinaan dan pengendalian di bidang perhubungan.

Tabel 2.69. Jumlah Penerbangan Pesawat Menurut Bulan di Bandara Tardamu (Sabu Raijua)

Bulan	Datang			Berangkat		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Januari	9	48	40	9	48	40
Februari	42	45	40	42	45	40
Maret	41	29	45	41	29	45
April	5	50	40	5	50	40
Mei	69	40	46	69	40	46
Juni	57	42	41	57	42	41
Juli	49	39	47	49	39	47
Agustus	52	32	44	52	32	44
September	73	22	45	73	22	45
Oktober	51	22	46	51	22	46
November	56	-	41	56	-	41
Desember	56	21	44	56	21	44
Tahunan	560	390	519	560	390	519

Sumber: BPS Sabu Raijua Tahun 2025

#### Urusan Komunikasi dan informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika, yang sering disingkat menjadi Kominfo, adalah bidang yang berkaitan dengan pengelolaan informasi dan komunikasi, baik dalam konteks pemerintahan maupun masyarakat. Di tingkat daerah, 

urusan ini ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.

#### Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) adalah instansi yang bertanggung jawab mengelola urusan ini.

#### Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal mencakup kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, untuk melakukan usaha di Indonesia. Ini melibatkan berbagai aspek seperti perizinan, promosi, pengembangan potensi, serta pemberian fasilitas dan insentif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah instansi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan ini di daerah.

#### Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga, atau disingkat menjadi Kepora, adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan pemuda serta olahraga. Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).

#### Urusan Pilihan:

##### Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan adalah bidang yang mencakup berbagai aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas dan fungsi urusan ini meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengembangan sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 2.70. Produksi Lumput Laut (Ton)

Produksi Rumput Laut				
2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
74.437	79.713	80.703	62.941	53.921

Sumber BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

#### Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata mencakup berbagai kegiatan dan aspek yang berkaitan dengan perjalanan dan kunjungan wisatawan, baik untuk tujuan rekreasi maupun bisnis. Ini melibatkan pengelolaan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Tabel 2.71. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Dengan Asal Dari Kabupaten Sabu Raijua Menurut Bulan

Bulan	2022	2023	2024
Januari	886	831	3921
Februari	561	588	3619
Maret	1037	664	4105
April	514	708	5256
Mei	512	796	4813
Juni	530	1048	3755
Juli	444	1220	4916
Agustus	453	1089	3463

Bulan	2022	2023	2024
September	515	809	3547
Oktober	568	1060	3328
November	488	1180	2931
Desember	911	5804	3952
Tahunan	7419	15797	47606

Sumber: BPS Kabupaten Sabu Raijua

Berdasarkan data jumlah perjalanan wisatawan nusantara Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2022, jumlah total perjalanan wisatawan hanya mencapai 7.419 perjalanan. Jumlah ini meningkat drastis pada Tahun 2023 menjadi 15.797 perjalanan, dan melonjak lebih dari tiga kali lipat pada Tahun 2024 dengan total 47.606 perjalanan.

Secara keseluruhan, mencerminkan meningkatnya dinamika pariwisata dan pergerakan masyarakat Sabu Raijua ke luar daerah, yang dapat menjadi indikator tumbuhnya kesadaran wisata dan ekonomi lokal. Hal ini juga menunjukkan potensi pengembangan sektor transportasi, pariwisata, serta dukungan kebijakan yang lebih terarah untuk mendorong konektivitas dan promosi wisata ke dan dari Kabupaten Sabu Raijua.

Tabel 2.72. Jumlah Akomodasi Hotel (Bintang+Non-Bintang) Menurut Kecamatan (Unit)

Kecamatan	Raijua	Hawu Mehara	Sabu Liae	Sabu Barat	Sabu Tengah	Sabu Timur	Kabupaten Sabu Raijua
Hotel	2020	-	-	5	-	-	5
	2021	-	-	4	-	-	4
	2022	-	-	3	-	-	3
	2023	-	-	5	-	-	5
	2024	-	-	5	-	-	5
Kamar	2020	-	-	56	-	-	56
	2021	-	-	44	-	-	44
	2022	-	-	32	-	-	32
	2023	-	-	67	-	-	67
	2024	-	-	83	-	-	83
Tempat Tidur	2020	-	-	81	-	-	81
	2021	-	-	50	-	-	50
	2022	-	-	43	-	-	43
	2023	-	-	88	-	-	88
	2024	-	-	100	-	-	100

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua

Dari tabel diatas meskipun persebaran hotel masih terpusat di satu kecamatan, peningkatan kapasitas akomodasi dari 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya potensi pertumbuhan sektor pariwisata dan kebutuhan akan fasilitas inap yang semakin meningkat di Kabupaten Sabu Raijua. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk mendorong pembangunan akomodasi yang lebih merata di kecamatan lain guna mendukung pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

#### Urusan Pertanian

Urusan pertanian mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan sumber daya untuk menghasilkan produk pertanian, baik tanaman maupun hewan. Ini termasuk bercocok tanam, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, urusan pertanian juga melibatkan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. *A.*

Tabel 2.72 Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton)

Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan			
	2020	2021	2022	2023
Padi	4240,2	7332	5292	8059,2
Padi Sawah	3324,2	7181	5141,5	8059,2
Padi Ladang	306,9	90,1	97,6	-
Jagung	9890,1	5994,7	9407,6	12805,71
Ubi Kayu	649,9	770	547,6	22,8
Ubi Jalar	136,5	80	908	74
Kacang Tanah	2572	680,6	1230,5	430,08
Kacang Hijau	4642	1804,5	1258,5	491,28
Sorgum	1179,7	921	982	1021,24

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua

Berdasarkan data produksi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2015 hingga 2018, terjadi fluktuasi yang cukup signifikan pada berbagai jenis komoditas.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa Kabupaten Sabu Raijua memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas jagung dan padi sawah sebagai komoditas unggulan. Namun, terdapat penurunan yang signifikan pada tanaman umbi dan kacang-kacangan yang perlu mendapat perhatian, baik dari sisi kebijakan pertanian, dukungan teknis, maupun diversifikasi pangan. Penguatan terhadap tanaman yang adaptif seperti sorgum juga dapat menjadi strategi penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah dengan karakteristik iklim kering seperti Sabu Raijua.

Tabel 2.73. Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Kuintal)

Produksi	Tahun	Raijua	Hawu Mehara	Sabu Liae	Sabu Barat	Sabu Tengah	Sabu Timur	Kabupaten Sabu Raijua
Bawang Daun	2020	-	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	15	-	-	15
	2023	-	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	57	-	-	57
Bawang Merah	2020	-	15	2	1305	147	162	1631
	2021	-	120	30	3120	120	108	3498
	2022	-	-	8	840	28	35	911
	2023	-	109	36	4360	156	33,6	4694,6
	2024	1,4	91	26,57	4690	222,8	10,8	5042,47
Bawang Putih	2020	-	-	-	-	-	-	-
	2021	-	2	-	-	-	-	2
	2022	-	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	21	-	-	-	21
Bayam	2020	-	-	1	155	46	3	205
	2021	3	9	1	60	10	35	118
	2022	-	-	55	43	4	21	123
	2023	29,2	1	55	179	51	61,3	376,5
	2024	-	5,7	-	58,5	9	5,53	78,73
Buncis	2020	-	-	-	155	-	30	185
	2021	-	30	-	195	75	8	308

	2022	-	5	-	60	-	-	65
	2023	-	4,4	-	57	124	22	207,4
	2024	-	3,8	-	10,99	-	0,3	15,09
Cabai Rawit	2020	-	83	-	150	30	15	278
	2021	-	63	-	92	33	15	203
	2022	-	19	42	56	-	45	162
	2023	-	96,7	34	57,4	223	81,6	492,7
	2024	6,56	204	-	315	169	1,5	696,06
Kacang Panjang	2020	-	66	9	191	81	82	428
	2021	-	9	20	70	33	93	225
	2022	-	12	16	47	11	3	88
	2023	28	4	-	135	271,5	31,2	469,7
	2024	-	0,5	0,21	72	88,8	57	218,51
Kangkung	2020	156	511	93	928	455	925	3068
	2021	80	502	251	519	250	1297	2899
	2022	-	464	160	502	95	1071	2291
	2023	245	1421	68	593	335	541,7	3203,7
	2024	6,79	2299	17,6	1069	72,5	182,7 8	3647,17
Kembang Kol	2020	-	-	-	11	-	-	11
	2021	-	-	-	-	-	10	10
	2022	-	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	27	-	4	31
	2024	-	-	-	-	-	-	-
Kentang	2020	-	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-	-
Ketimun	2020	-	-	-	525	-	-	525
	2021	-	80	60	690	40	10	880
	2022	-	20	-	-	12	-	32
	2023	-	-	-	260	120	-	380
	2024	-	-	-	88,6	-	-	88,6
Kubis	2020	-	-	-	100	-	-	100
	2021	-	-	-	-	-	-	-
	2022	-	6	-	-	30	-	36
	2023	-	-	-	90	-	-	90
	2024	-	-	2,4	-	-	-	2,4
Labu Siam	2020	-	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-	-
Paprika	2020	-	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-	-
Petsai/Sawi	2020	104	108	75	732	265	255	1539
	2021	50	190	700	240	300	729	2209

M

76

	2022	-	212	256	405	120	171	1164
	2023	80,7	428	72	437	212	145,3	1375
	2024	25,34	258	42	583	52	2,76	963,1
Terung	2020	-	15	7	435	420	78	955
	2021	-	60	62	150	60	208	540
	2022	-	44	-	170	45	80	339
	2023	-	402	24	351	300	26,8	1103,8
	2024	-	338	-	479,4	40,86	-	858,26
Toma	2020	-	48	5	453	490	71	1066
	2021	30	120	60	310	100	197	817
	2022	-	40	26	170	40	22	298
	2023	-	233	35	729	247	83,1	1327,1
	2024	26,4	310	6,3	69,1	65,2	2,22	479,22
Wortel	2020	-	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	0,15	-	-	-	0,15
Cabai Besar/TW/Teropong	2020	-	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	9	-	-	9
	2024	-	-	-	-	-	1,8	1,8
Cabai Keriting	2020	-	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	17	-	17
	2022	-	-	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

Tabel 2.74 Populasi Ternak Sapi Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan (Ekor)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Raijua	33	35	37	37	40
Hawu Mehara	2.782	3.062	930	939	1.005
Sabu Liae	658	794	1.735	1.857	1.987
Sabu Barat	675	808	3.282	3.514	3.760
Sabu Tengah	1.436	1.622	802	858	918
Sabu Timur	618	747	864	925	990
Kabupaten Sabu Raijua	6.202	7.068	7.650	8.130	8.700

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

Tabel 2.75 Populasi Ternak Kerbau Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan (Ekor)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Raijua	761	798	854	854	914
Hawu Mehara	6.876	7.341	1.967	1.967	2.105
Sabu Liae	1.743	1.849	1.637	1.752	1.875
Sabu Barat	678	806	7.855	8.405	8.933
Sabu Tengah	1.445	1.530	1.146	1.226	1.312
Sabu Timur	1.014	1.069	862	923	988
Kabupaten Sabu Raijua	12.517	13.393	14.321	15.127	16.127

M Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 t.

Tabel 2.76 Populasi Ternak Kuda Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan (Ekor)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Raijua	1.991	2.129	2.279	2.279	2.437
Hawu Mehara	3.182	3.405	1.049	1.049	1.122
Sabu Liae	1.922	987	2.289	2.289	2.449
Sabu Barat	289	309	3.643	3.898	4.171
Sabu Tengah	1.999	2.139	914	969	1.037
Sabu Timur	790	845	331	354	379
Kabupaten Sabu Raijua	10.173	9.814	10.505	10.838	11.595

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

Tabel 2.77 Populasi Ternak Kambing Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan (Ekor)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Raijua	10.277	11.304	12.095	12.095	13.303
Hawu Mehara	18.927	20.820	9.337	9.337	10.271
Sabu Liae	7.782	8.560	13.159	13.159	14.298
Sabu Barat	8.309	9.140	22.902	25.192	27.711
Sabu Tengah	10.875	11.963	12.181	13.399	14.739
Sabu Timur	10.095	11.105	10.054	11.059	12.165
Kabupaten Sabu Raijua	66.265	72.892	79.728	84.241	92.487

Tabel 2.78 Populasi Ternak Domba Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan (Ekor)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Raijua	4.195	4.615	4.938	4.938	5.431
Hawu Mehara	6.046	6.651	2.418	2.418	2.660
Sabu Liae	2.018	2.220	8.666	8.666	9.533
Sabu Barat	3.116	3.428	7.315	8.047	8.852
Sabu Tengah	7.162	7.878	5.059	5.562	6.118
Sabu Timur	4.176	4.594	3.770	4.147	4.562
Kabupaten Sabu Raijua	26.713	29.386	32.166	33.778	37.156

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

Tabel 2.79 Populasi Ternak Babi Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan (Ekor)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Raijua	8.972	112	119	119	131
Hawu Mehara	23.870	298	194	194	213
Sabu Liae	9.534	119	242	242	266
Sabu Barat	7.911	99	562	1.088	1.197
Sabu Tengah	9.991	125	181	704	776
Sabu Timur	8.714	109	190	559	615
Kabupaten Sabu Raijua	68.992	862	1.488	2.906	3.198

Sumber : BPS Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025

#### 2.1.5. Hasil Evaluasi RPJMD Periode Sebelumnya

RPJMD 2021-2026 berfokus pada peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses layanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan

prestasi olahraga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Kondisi ini dicapai melalui perwujudan kolaborasi setiap elemen untuk mencapai kondisi kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Dalam mewujudkan visi pembangunan, RPJMD dijabarkan menjadi 4 tujuan, 13 sasaran pembangunan daerah, dan 46 indikator capaian kinerja pembangunan daerah. Dari 46 indikator yang dijabarkan, sebanyak 28 indikator dijadikan sebagai dasar pengukuran capaian pembangunan RPJPD tahap ketiga dengan mempertimbangkan ketersediaan data target dan capaian serta konsistensi formulasi satuannya.

Secara rata-rata, capaian kinerja RPJMD periode 2021-2025 sebesar 75,92 persen atau berkategori tinggi

Tabel 2.80. Capaian Kinerja RPJMD 2021-2025

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada akhir tahun perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	
Visi: "Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat"							
Misi I: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan	1.1	Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia	57,02	59,34 -59,90	57,9	97,57%
			Angka kemiskinan	30,18	28,27 -27,82	28,73	98,40%
	1.1.1	Meningkatnya Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR	Harapan lama sekolah	13,14	13,35	13,17	98,65%
			Rata-rata lama sekolah	6,65	8,11	6,77	83,48%
			Lulusan SMA/SMK yang Melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi	N/A	100	N/A	
	1.1.2	Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT	Usia harapan hidup	60,64	63,57	57,48	90,42%
			Prevalensi Balita Gizi Buruk Per 1000KH	558	0	2,96	97,04%
			Angka Kematian Ibu Hamil per 100.000 KH	459	0	309 (5 orang)	95,00%
			Angka Stunting	31,4	3	18,1	78,90%
			Persentase Vaksinasi Covid-19	N/A	100%	74,60%	74,60%
	1.1.3	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	75,11	75,2%	76,71%	100,00%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	3,08	2,09 - 1,9	3,29%	63,53%
			Indeks pembangunan Gender	92,79	94,29	92,31	97,90%
			Indeks Pemberdayaan Gender	55,93	69,13	56,12	81,18%
			Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja	-0,39	5%	5,12%	99,22%

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada akhir tahun perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	
Misi 2: Menjamin ketercukupan pangan, air dan energi serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah dengan sektor pariwisata sebagai penggerak utama	2.1	Menumbuhkan tingkat Perekonomian daerah dan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,11	5,25	3,02	57,52%
	2.1.1	Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	63,9	70,51	65,2	92,47%
			Persentase ketersediaan pangan	81,75	100		
			Presentase Desa Rentan Rawan Pangan	30,18	29,28	100	0,00%
			Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	1,76	3,11		
			Produksi sektor pertanian	17.610,20	17.742,63		
	2.1.2	Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Pariwisata yang Mendukung PDRBADHK	5,42	6,03	111,25%	
			Jumlah Even Pariwisata pertahun	1	1	100%	
	2.1.3	MeningkatnyaPerekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU	PDRB per Kapita	14,18	17,23		
			Pengeluaran per Kapita	5.354	6.214		
			Persentase PAD terhadap APBD	4,88	8,69	103,06	
			Peningkatan Nilai Ekspor	1,72	1,72	9,19%	100,00%
	Misi 3: Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional dan mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, dan akuntabel	3.1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik
3.1.1		Meningkatnya Integritas Apratur dalam pelayanan Pemerintahan Menuju SARAI JUJUR	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CUKUP	TINGGI	C (Kurang)	0,00%
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	TINGGI	SANGAT TINGGI		
			Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	100%	100%	100%	100,00%
			Skor Monitoring Center For Prevention (MCP)	24,4	65,01 - 80,00		

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/sasaran	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada akhir tahun perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD		
	3.1.2	Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik	100	100			
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WDP	0,00%	
	3.1.3	Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju SARAI RAMAH	Presentase Penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	100	100			
			Presentase aksi tanggap darurat dan bencana bagi masyarakat	100%	100%	100	100,00%	
Penanganan Layanan Aduan Masyarakat			100	100				
		Tingkat Kapabilitas APIP dalam waskat	1+	3				
Misi 4 Meningkatkan akses masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang handal, pemerataan wilayah, serta menjamin pembangunan berkelanjutan	4.1	Meningkatnya akses masyarakat dan pembangunan berkelanjutan	Presentase Capaian Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Umum	40	60			
	4.1.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas INFRASTRUKTUR	Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi	-7,96	10	2	20,00%	
			Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan	Peningkatan Angkutan Umum Darat	3,21	6,92		
				Persentase Sarana Pelabuhan Udara/Laut dan Terminal Bis yang beroperasi	100	100		
	4.1.3	Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,34	2	2,5	100,00%	
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	N/A	72	75,78	100,00%	
	4.4.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang BERKELANJUTAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	62,5	70,79	70,79	100,00%	
Rata-rata Capaian Kinerja Periode 2021-2025						75,92%		
Predikat Kinerja						Tinggi		
Rata-rata Capaian Kinerja RPJMD						83,92%		

## 2.2. Gambaran Keuangan Daerah

### 2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

#### 2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi.

Struktur APBD Kabupaten Sabu Raijua terdiri atas: 1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; 2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

#### 2.2.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam kurun waktu tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp583,83 miliar pada tahun 2021, menjadi Rp649,36 miliar pada tahun 2023. Pada perkembangannya sektor Pendapatan Daerah masih terjadi fluktuasi yang mana sempat terjadi pertumbuhan negatif pada periode tahun 2021-2022 sebesar -2,64%, namun demikian progresivitas pertumbuhan cukup baik pada periode 2021-2023 yang mana secara rerata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab. Sabu Raijua sebesar 4,48%. Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.80 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022-2024 (Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan
PENDAPATAN	568,428,975,418.68	649,359,532,832.40	640,326,035,769.37	4,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH	30,976,942,583.68	24,576,074,744.40	19,052,226,319.37	1,02
Pendapatan Pajak Daerah	5,661,974,798.04	4,978,159,604.80	4,934,625,570.00	
Pendapatan Retribusi Daerah	18,160,726,740.00	11,716,654,568.00	7,000,775,722.00	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,329,492,032.00	4,304,652,548.00	2,306,016,815.00	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,824,749,013.64	3,576,608,023.60	4,810,808,212.37	
PENDAPATAN TRANSFER	514,572,199,210.00	617,544,974,868.00	615,361,652,553.00	5,85
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	440,083,421,954.00	513,050,666,741.00	506,169,841,263.00	8,02
Dana Bagi Hasil Pajak	73,789,018,889.00	25,533,627,775.00	2,255,257,000.00	
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2,268,456,977.00	2,658,452,068.00	2,112,952,000.00	
Dana Alokasi Umum	336,260,812,302.00	353,576,035,296.00	373,274,825,957.00	
Dana Alokasi Khusus	94,175,250,786.00			
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	60,882,277,028.00	86,859,427,550.00	89,946,353,980.00	6,67
Dana Penyesuaian (Dana Desa 2022)	60,882,277,028.00	62,145,670,550.00	62,797,184,980.00	
Transfer Pemerintah Provinsi/Antar Daerah	13,606,500,228.00	17,634,880,577.00		38,17
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13,606,500,228.00			
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	22,879,833,625.00	7,238,483,220.00	5,912,156,897.00	11,38
Pendapatan Hibah	885,825,500.00	1,329,549,000.00	874,951,500.00	
Pendapatan Lainnya	21,994,008,125.00	5,908,934,220.00		

Berdasarkan data keuangan masa lalu, masih terjadi fluktuasi yang bervariasi baik untuk pendapatan daerah secara keseluruhan maupun rinciannya. Pendapatan Daerah Kabupaten Sabu Raijua masih didominasi oleh dana perimbangan dengan proporsi 91,95% pada tahun 2022 menjadi 95,10% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kontribusi PAD semakin menurun karena ada tambahan DAU SG pada tahun 2024.

Pada era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer pusat ke daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar -1,02% dari sebesar Rp. 28,34 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp24,58 miliar rupiah pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja dalam peningkatan PAD perlu lagi didorong lebih keras untuk membantu terlaksananya kemandirian pembiayaan daerah yang optimal. Perlu dicari sumber PAD baru serta diperlukan inovasi untuk lebih meningkatkan kinerja PAD.

Untuk dana transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama kurun waktu tahun 2021-2023 perkembangan dana transfer mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari Rp536,86 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp. 617,54 miliar pada tahun 2023 dengan rerata pertumbuhan sebesar 5,85%. Namun demikian Pencapaian target dana transfer sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, sehingga sulit untuk diprediksi pencapaiannya.

Lain-lain pendapatan daerah mencakup Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi negatif dengan kecenderungan menurun dari Rp18,61 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp7,24 miliar pada tahun 2023 dengan rerata pertumbuhan sebesar -11,38%. Hal tersebut menunjukkan tingkat dukungan pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.


kinerja pelaksanaan APBD

#### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

indeks kemandirian fiskal Kabupaten Sabu

Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) adalah ukuran kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total belanja daerah. Semakin tinggi nilai IKF, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut, yang berarti daerah tersebut semakin mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. IKF berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai 0 menunjukkan daerah sepenuhnya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sedangkan nilai 1 menunjukkan daerah mampu membiayai seluruh kebutuhannya dari PAD. IKF dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal dan melihat sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil mengoptimalkan potensi pendapatan

daerah. 

Tabel 2.81 Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Sabu Raijua

Tahun	PAD	Belanja	IKF
2021	28.339.245.445,35	643.381.390.458,44	0,04405
2022	30.976.942.583,68	577.377.056.047,70	0,05365
2023	24.576.074.744,40	630.977.703.831,00	0,03895

#### 2.2.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan angka pertumbuhan yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2021-2023 dengan rerata sebesar negatif 5,62%. Pada tahun 2021 total Belanja Daerah sebesar Rp643,38 miliar, menjadi sebesar Rp630,98 miliar pada tahun 2023. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021-2023 terlihat pada gambar berikut.

Proporsi Belanja Operasional, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga terhadap total Belanja selama kurun waktu 2021 – 2023 juga menunjukkan fluktuasi dimana Belanja Operasional memiliki porsi lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modal maupun Belanja Tak Terduga. Proporsi Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer sebesar 54,51% berbanding 24,73%, 2,12% dan 18,65% pada tahun 2021. Proporsi tersebut berfluktuatif selama kurun waktu 2021-2023 dan pada tahun 2023 proporsi Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer masing-masing 61,41%, 22,95%, 0,03%, dan 15,61%.

Belanja operasional merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Perkembangan belanja operasional selama kurun waktu tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan dari Rp350,68 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp387,48 miliar pada tahun 2023.

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri dari: Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; dan belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset tetap lainnya dan Belanja Aset lainnya. Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sabu Raijua selama kurun waktu tahun 2021-2023 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar Rp. 159,09 milyar pada tahun 2021 menjadi Rp144,79 miliar pada tahun 2023.

Pada sisi Belanja Tak Terduga terjadi penurunan yang cukup besar terutama dimana pada 2021 sebesar Rp13,61 miliar turun menjadi 208 Juta pada 2023.

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur belanja daerah dan perbandingannya dengan target belanja daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 - 2024 (dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan
BELANJA	577,377,056,047.70	630,977,703,831.00	665,029,611,849.33	5,62
BELANJA OPERASI	343,687,101,658.70	387,560,224,506.00	426,909,601,857.96	4,38
Belanja Pegawai	172,071,722,075.00	187,907,607,342.00	238,912,266,079.00	
Belanja Barang	161,021,209,297.70	179,440,748,520.00		
Belanja Hibah	7,739,068,286.00	14,681,600,644.00	27,662,555,221.00	
Belanja Bantuan Sosial	2855,102,000.00	5,454,518,000.00	4,101,750,000.00	

KETERANGAN	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan
BELANJA MODAL	137,291,124,197.00	144,716,363,178.00	136,951,565,031.37	10,97
Belanja Tanah	8,411,920.00	6,000,000.00	0.00	
Belanja Peralatan dan Mesin	9,247,832,312.00	22,836,344,170.00	18,526,761,862.00	
Belanja Gedung dan Bangunan	31,557,107,226.00	32,522,108,837.00	19,844,122,737.37	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	93,612,153,264.00	87,803,912,171.00	97,259,462,732.00	
Belanja Aset Tetap lainnya	2,865,619,475.00	1,547,998,033.00	1,321,217,700.00	
BELANJA TAK TERDUGA	216,151,500.00	208,951,900.00	99,500,000.00	100,08
Belanja Tak Terduga	216,151,500.00	208,951,900.00	99,500,000.00	
TRANSFER	96,182,678,692.00	98,492,164,247.00	101,068,944,960.00	18,64
Transfer Bagi Hasil ke KAB/KOTA/DESA	96,182,678,692.00	98,492,164,247.00		18,64
Bagi Hasil Pajak	790,395,664.00	438,878,560.00	678,324,680.00	
Bagi Hasil Retribusi				
Bantuan Keuangan	95,392,283,028.00	98,053,285,687.00	100,392,620,280.00	
SURPLUS/DEFISIT	(8,948,080,629.02)	183,818,290,014.00	24,703,576,079.96	237,69

Sumber: Data Olahan; LKPD-LRA Kabupaten Sabu Raijua 2021-2023

#### 2.2.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Sabu Raijua berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sabu Raijua menunjukkan fluktuatif menurun dari sebesar Rp130,47 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp95,95 miliar pada tahun 2023.

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Sabu Raijua berasal dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pemberian Pinjaman Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp9,92 miliar meningkat menjadi Rp38 miliar pada tahun 2023.

Perkembangan Pembiayaan Daerah dan Perbandingannya dengan Target Pembiayaan Daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.83 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2023 (Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH	71,033,641,416.28	95,948,118,999.70	98,518,425,724.10	28,02
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	61,130,281,643.59	55,025,137,051.62	76,398,429,724.10	
Pencairan Dana Cadangan	9,903,359,772.69	40,922,981,948.08	22,120,000,000.00	

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	0.00	
PENGELUARAN DAERAH	7,000,000,000.00	38,000,000,000.00	7,000,000,000.00	191,95
Pembentukan Dana Cadangan		31,000,000,000.00	0.00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	
Pemberian Pinjaman Daerah				
PEMBIAYAAN NETTO	64,033,641,416.28	57,948,118.999.70	91,518,425,724.10	- 51,63
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	55,085,560,787.26	76,329,948,001.10	66,814,849,644.14	9,59

Sumber: Data Olahan; LKPD-LRA Kabupaten Sabu Raijua 2022-2024

### 2.2.1.2. Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga menjelaskan bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan.

Selanjutnya mengenai gambaran kinerja neraca Kabupaten Sabu Raijua dalam kurun waktu tahun 2021-2022 disajikan pada Tabel 3.9

Tabel 2.84 Neraca Kabupaten Sabu Raijua 2022-2024 (dalam jutaan Rupiah)

URAIAN	2022	2023	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	24,094,452,314.02	44,062,099,800.98	65,951,878,915.80
Kas di Bendahara Penerimaan			
Kas di Bendahara Pengeluaran			
Kas di BLUD			
Kas Di Bendahara FKTP	935,942,532.30	2,222,637,191.30	45,258,786.34
Kas Di Bendahara BOS	30,955,899.64	45,115,188.00	75,371,812.00
Kas Lainnya	69.926.022,30	73,628,536.56	5,070,487.00
Investasi Jangka Pendek			
Piutang Pajak Daerah	1.667.579.908,00	1,664,279,544.00	1,507,794,700.16
Piutang Retribusi	2.916.890.589,00	4,656,995,548.00	3,330,456,248.00
Piutang Lain - lain PAD yang sah	4.462.956.449,30	3,333,207,053.30	3,635,873,696.62
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	4.544.103.181,00	4,350,576,705.00	2,844,241,907.00
Piutang Lainnya			
Penyisihan Piutang	7.218.710.642,28		
Beban Dibayar Dimuka		31,080,000.00	23,970,500.00

URAIAN	2022	2023	2024
Persediaan	15.760.963.224,98	13,495,197,756.00	8,412,695,049.60
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>47.265.059.478,26</b>	<b>96,662,265,649.54</b>	<b>79,228,069,836.25</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Non Permanen			
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara			
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya			
Investasi Dalam Surat Utang Negara			
Investasi Non Permanen Lainnya	13.423.178.753,00	13,423,178,753.00	13,423,178,753.00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	-	13,423,178,753.00	13,423,178,753.00
<b>JUMLAH Investasi Non Permanen</b>		-	-
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	42.747.324.493,82		
Investasi Permanen Lainnya			
<b>JUMLAH Investasi Permanen</b>	<b>42.747.324.493,82</b>	<b>49,709,559,274.79</b>	<b>56,709,559,274.79</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>42.747.324.493,82</b>	<b>49,709,559,274.79</b>	<b>56,709,559,274.79</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	14.200.893.688,00	21,737,683,938.00	21,731,552,462.00
Peralatan dan Mesin	333.348.019.790,42	339,123,654,009.42	349,193,299,339.60
Gedung dan Bangunan	545.280.742.591,47	562,644,595,694.30	614,368,957,812.64
Jalan, Jaringan dan Instalasi	761.575.931.846,51	802,330,108,849.04	963,850,283,590.44
Aset Tetap Lainnya	27.553.041.364,68	29,524,484,359.68	30,560,778,327.68
Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.106.670.077,85	76,686,758,606.85	41,569,049,040.22
Akumulasi Penyusutan	-	619,226,108,827.35	784,489,788,426.37
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.163.490.680.145,27</b>	<b>1,212,821,176,630.14</b>	<b>1,236,784,232,146.21</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan	31.213.749.885,95	22,120,000,000.00	-
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>31.213.749.885,95</b>	<b>22,120,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran			
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		373,682,411.00	330,658,138.00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		4,412,826,270.00	4,412,826,270.00
Aset Tidak Berwujud	11.097.121.041,00	-	-
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-		
Aset Lain-lain	5.007.331.009,83	100,372,985,362.27	103,014,929,386.47
Ak. Penyusutan Aset Lain-lain	70.484.569.455,95		
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>14.207.586.559,40</b>	<b>105,493,901,043.27</b>	<b>107,793,322,794.47</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.347.083.586.931,02</b>	<b>#####</b>	<b>1,480,528,549,051.72</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	69.869.181,00	73,532,715.74	5,070,487.00
Utang Bunga		-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	2.562.780.533,00	31,799,999.67	61,799,999.67
Utang Beban	6.134.246.585,94		
Bagian Jangka Pendek Lainnya		-	20,920,497.36
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA</b>	<b>8.766.896.299,94</b>	<b>8,788,275,822.88</b>	<b>4,885,855,916.03</b>

M

T:

URAIAN	2022	2023	2024
PENDEK			
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Lainnya			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
JUMLAH KEWAJIBAN	8.766.896.299,94	8.788.275.822,88	4.885.855.916,03
EKUITAS			
EKUITAS	1.368.316.690.640,08	1.478.031.991.774,86	1.475.642.693.135,69
JUMLAH EKUITAS			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.377.083.586.940,02	1.486.820.267.597,75	1.480.528.549.051,72

Sumber: LKPD-Neraca Kab. Sabu Raijua 2021-2022; BAPPEDA Kab. Sabu Raijua.

### 2.2.1.3. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN KE DEPAN

Proyeksi rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen dalam pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.14 dibawah menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif pesimis, dimana besaran rata-rata pertumbuhan komponen PAD sebesar -1,02% namun diproyeksikan naik secara progresif setiap tahunnya, yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar 6,27%, Pendapatan Retribusi daerah sebesar 107%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 26% dan juga Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar -46%. Proyeksi ini akan didukung dengan visi misi serta program kerja startegis yang ditetapkan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pembangunan daerah Sabu Raijua secara keseluruhan, seperti pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), peningkatan kapasitas disektor pariwisata, dan juga optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki.

Untuk sub-sektor Pendapatan Transfer diproyeksikan relatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,48%, dengan rerata pertumbuhan per-komponen yaitu Transfer Pemerintah Pusat sebesar 8,02% dan Transfer Pemerintah Provinsi/Antar daerah mencapai 38,17%. Demikian pula dengan sektor Lain-lain Pendapatan Yang Sah diprediksi tumbuh rerata sebesar -11,38% selama 5 tahun.

Dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik. Hal ini bertujuan agar dalam perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian dengan mempertimbangkan pula aspek makro ekonomi yang akan terjadi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pertumbuhan daya beli masyarakat, kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah termasuk keuangan daerah dan juga faktor fundamental global yang terus berfluktuasi semisal harga tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika yang mempengaruhi harga belanja barang maupun jasa dalam kontek belanja/pengeluaran operasional pemerintah daerah.

Dari sisi proyeksi Belanja Daerah, secara keseluruhan mengalami peningkatan yang secara rerata sebesar 3,48%. Peningkatan ini diperuntukkan pada Belanja Modal khususnya Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Hal inipun berkenaan dengan proses pembangunan daerah terutama visi/misi dan program kerja jangka pendek maupun menengah pemerintah daerah berkaitan dengan peningkatan infrastruktur dan pendukungnya sebagai faktor/landasan utama pengembangan kewilayahan di


M daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah terlihat pula bahwa program Penyertaan Modal Pemerintah Daerah masih menjadi fokus pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua tetap sebesar Rp. 7 milyar sampai dengan tahun 2026.

Namun demikian secara keseluruhan analisis dari aspek Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat memberikan gambaran pertumbuhan yang positif terkait proses pembangunan dan pengembangan daerah Kabupaten Sabu Raijua. Walaupun terjadi peningkatan yang progresif, namun masih dalam perkiraan yang optimistik dengan asumsi bahwa rerata pertumbuhan penerimaan daerah sebesar 3,44% masih bisa ditunjang dengan prediksi pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5%, masih dirasa cukup memadai untuk mengatasi pengeluaran daerah. Oleh karena itu diharapkan proyeksi APBD Kabupaten Sabu Raijua tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi lokal daerah.

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah dilaksanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan diproyeksikan sebagai sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisis realisasi 5 tahun sebelumnya, sedangkan terkait Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah belum menjadi prioritas, mengingat proyeksi Pendapatan Daerah masih dapat membiayai prioritas belanja daerah yang direncanakan dalam 5 tahun kedepan. Dalam hal pelaksanaan belanja daerah yang diproyeksikan mengalami peningkatan karena faktor kebutuhan di luar perkiraan yang direncanakan, maka kebijakan terkait pinjaman daerah dapat dilakukan atas kesepakatan bersama dengan DPRD sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku serta tetap memperhatikan periode RPJMD.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam 5 tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua merencanakan adanya penyertaan modal kepada BUMD guna meningkatkan kinerja dan penguatan struktur modal BUMD.

Gambaran proyeksi Pendapatan, Belanja dan pembiayaan daerah tahun 2024-2029 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.82 Proyeksi Penerimaan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2025-2030 (dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata- Rata Pertum- Buhan
PENDAPATAN	649.519,78	686.918,49	720.040,16	748.325,19	770.955,59	787.360,45	3,93
PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.683,35	38.702,39	40.524,36	42.453,32	44.495,87	46.659,05	4,93
Pendapatan Pajak Daerah	6.576,87	6.989,24	7.427,47	7.893,17	8.388,07	8.914,00	6,27
Pendapatan Retribusi Daerah	18.294,37	19.757,92	20.996,74	22.313,24	23.712,28	25.199,04	6,62
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.228,39	5.306,82	5.386,42	1,50
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.812,11	6.880,23	6.949,03	7.018,52	7.088,71	7.159,60	1,00
PENDAPATAN TRANSFER	605.618,48	640.853,80	672.006,24	698.212,12	718.704,41	732.849,20	3,90
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	583.582,61	618.597,57	649.527,44	675.508,54	695.773,80	709.689,27	4,00
Transfer Pemerintah Provinsi/Antar Daerah	22.035,87	22.256,23	22.478,79	22.703,58	22.930,61	23.159,92	1,00
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.217,95	7.362,31	7.509,56	7.659,75	7.755,31	7.852,20	1,70
Pendapatan Hibah	1.787,06	1.822,80	1.859,26	1.896,44	1.934,37	1.973,06	2,00
Pendapatan Lainnya	5.430,89	5.539,51	5.650,30	5.763,30	5.820,94	5.879,15	1,60
BELANJA	690.708,31	693.312,96	707.639,74	718.939,44	730.445,16	742.161,02	1,45
BELANJA OPERASI	472.775,85	480.504,96	488.678,33	496.997,91	505.466,45	514.086,69	1,69
Belanja Pegawai	264.642,90	269.935,76	275.334,47	280.841,16	286.457,99	292.187,15	2,00
Belanja Barang	177.462,51	179.592,06	181.747,16	183.928,13	186.135,27	188.368,89	1,20

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata- Rata Pertum- Buhan
Belanja Hibah	26.712,19	26.979,31	27.518,90	28.069,28	28.630,66	29.203,27	1,80
Belanja Bantuan Sosial	3.958,25	3.997,83	4.077,79	4.159,34	4.242,53	4.327,38	1,80
BELANJA MODAL	115.566,41	109.788,09	115.277,49	117.583,04	119.934,70	122.333,40	1,20
Belanja Tanah							
Belanja Peralatan dan Mesin							
Belanja Gedung dan Bangunan							
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan							
Belanja Aset Tetap lainnya							
BELANJA TAK TERDUGA	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52	3.828,84	5,00
Belanja Tak Terduga	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52	3.828,84	5,00
TRANSFER	99.366,05	99.869,90	100.376,42	100.885,61	101.397,49	101.912,08	0,51
Transfer Bagi Hasil ke KAB/KOTA/DESA	468,31	477,68	487,23	496,97	506,91	517,05	2,00
Belanja Bantuan Keuangan	98.897,74	99.392,23	99.889,19	100.388,64	100.890,58	101.395,03	0,50
SURPLUS/DEFISIT	-	6.394,46	12.400,42	29.385,74	40.510,43	45.199,43	-
PEMBIAYAAN DAERAH							
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah	48.188,53	6.394,46	-	-	-	-	-37,35
- Penggunaan Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran (SILPA)	21.522,91	0	0	0	0	0	20,00
- Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	22.210,02	0	0	0	0	0	-
- Penerimaan Pinjaman Daerah							-
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.455,60						-11,30

M

2

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Rata- Rata Per Bulan
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000,00	6.394,46	12.400,42	29.385,74	40.510,43	45.199,43	17,28
- Pembentukan Dana Cadangan							
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000,00		12.400,42	29.385,74	40.510,43	45.199,43	
- Pemberian Pinjaman Daerah							
PEMBIAYAAN NETTO	41.188,53	6.394,46	12.400,42	29.385,74	40.510,43	45.199,43	75,68

Sumber: Hasil Analisis Data Keuangan, 2025

#### 2.2.1.4. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, dan dialokasikan untuk pendanaan belanja/pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2026, dan juga alokasi belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 s.d tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024-2029 *dalam Jutaan Rupiah*)

No.	URAIAN	Poyeksi					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendapatan Daerah	649.519,78	686.918,49	720.040,16	748.325,19	770.955,59	787.360,45
2	Penerimaan Pembiayaan Daerah	48.188,53	6.394,46	-	-	-	-
	- Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	22.210,02	-	-	-	-	-
	- Penggunaan Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran (SiLPA)	21.522,91	-	-	-	-	-
	- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan /Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	697.708	693.313	720.040	748.325	770.956	787.360

Sumber: Hasil Analisis Data Keuangan 2024

Tabel di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun ke tahun terus membaik secara perlahan. Jika dilihat dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sabu Raijua walaupun cukup tinggi. Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal pada akhir tahun 2024.

Perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sabu Raijua. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut: a) Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar; b) Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) diluar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar; dan c) Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Tabel 2.87 Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Berdasarkan Prioritas Anggaran Tahun Anggaran 2021-2026 *(dalam Jutaan Rupiah)*

URAIAN	Proyeksi (Tahun/Jutaan Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Prioritas I	381.322	396.022	411.579	424.026	433.048
Prioritas II	228.793	237.613	246.947	254.415	259.829
Prioritas III	83.198	86.405	89.799	92.515	94.483
JUMLAH	693.313	720.040	748.325	770.956	787.360

Sumber : Hasil Analisis Data Keuangan

Pendanaan terhadap Prioritas I dianggarkan pada kisaran 55% yang mana sebagian besar pengeluaran dimaksud untuk kepentingan layanan publik, termasuk program Kepala Daerah yang terkait dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang berdampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan pendanaan anggaran yang relatif besar.

Untuk penganggaran Prioritas II, dianggarkan pada kisaran 33%, yang mana pendanaannya lebih ditekankan pada program Kepala Daerah pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar (16%), dan diperuntukan pada penyediaan anggaran untuk belanja tidak terduga dan belanja transfer yang pada realitasnya diharapkan akan mendukung program Kepala Daerah yang masuk dalam pendanaan Prioritas I pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, seperti peningkatan SDM melalui pendidikan, pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dan program kerja lainnya, sehingga akan berjalan secara simultan dan diharapkan akan memberikan dampak positif yang besar dalam pelayanan kepada masyarakat.

Penganggaran terhadap Prioritas III pun tidak terlepas dari perspektif penganggaran Prioritas I dan II, yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas operasional Pemerintah Daerah Sabu Raijua yang merupakan unsur pemerintahan fungsi penunjang, dengan proporsi anggaran yang relatif kecil yakni pada kisaran 12%.

### 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

#### 2.3.1. Permasalahan pembangunan daerah

Tabel 2.90 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua

No	Aspek	Permasalahan Pembangunan Daerah	Akar Masalah
1	Aspek Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendah Derajat Pendidikan (Kualitas dan Akses)</li> <li>Rendah tingkat literasi dan numerasi masyarakat</li> <li>Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>
	Aspek Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih Rendahnya Derajat Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya kematian bayi, balita dan ibu melahirkan</li> <li>Rendah kualitas pelayanan Kesehatan</li> <li>Masih tingginya prevalensi stunting</li> </ul>
2	Aspek Kemiskinan dan Ketimpangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya angka kemiskinan dan Ketimpangan pendapatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendah pendapatan masyarakat</li> <li>Terbatasnya lapangan kerja</li> <li>Tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial</li> </ul>
3	Aspek Ekonomi dan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya pengelolaan sumber daya ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pengembangan industri kreatif</li> <li>Sarana dan prasarana pada obyek wisata unggulan masih rendah</li> <li>Sarana dan prasarana pendukung pertanian masih minim</li> <li>Rendah peningkatan sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan</li> </ul>


No	Aspek	Permasalahan Pembangunan Daerah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil.</li> <li>Letak kabupaten sabu rajua yang merupakan pulau terluar menyebabkan kurangnya dukungan investasi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kurang akuratnya data objek pajak</li> <li>rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan obyek pajaknya</li> <li>belum optimalnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh</li> <li>Minimnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah</li> </ul>
4	Aspek Tata Kelola Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya Tata Kelola Pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya Kualitas dan Jumlah ASN</li> </ul>
5	Aspek Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi kerentanan dan resiko lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keadaan iklim di Kabupaten Sabu Raijua termasuk wilayah beriklim kering yaitu musim kemarau yang panjang dan musim hujan yang pendek</li> <li>Kabupaten Sabu Raijua memiliki kondisi wilayah dengan topografi bergunung dan berbukit</li> <li>Kapasitas sumberdaya lahan dan air semakin terbatas</li> <li>Tingginya Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sabu Raijua</li> <li>Abrasi pantai dan instrusi air laut</li> <li>Kelangkaan Air</li> </ul>
6	Aspek Infrastruktur dan pengembangan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya kualitas Infrastruktur dasar dan strategis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang memadainya kondisi infrastruktur di Kabupaten Sabu Raijua</li> <li>Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi</li> <li>Terbatasnya sarana dan prasarana olah raga untuk pembinaan keolahragaan</li> </ul>

### 2.3.2. Isu strategis daerah

#### 2.3.2.1 Analisis Lingkungan Strategis

##### 2.3.2.1.1 Isu Strategis Internasional /Global

Isu-isu strategis global mencakup berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh komunitas internasional atau secara global yang turut berpengaruh terhadap pembangunan baik nasional maupun daerah. Beberapa

Misu strategi global, antara lain: 


a) Perdagangan dan Perekonomian Global

Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, Eropa dan negara-negara sedang berkembang. Tambahan pula dengan adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital outflow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (*tax policy*) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, di mana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan.

Komposisi pertumbuhan ekonominya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah. Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 % transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecenderungan (*trend*) ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships* (TPP), *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), *East Asia Summit* (EAS), serta *Expand ASEAN Maritime Forum* (EAMF).

b) Konflik Geopolitik

Meskipun ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif di tahun 2023, perlu tetap diwaspadai terjadinya masalah geopolitik global yang berkepanjangan, seperti Invasi Rusia ke Ukraina, konflik di jalur Gaza, dan konflik geopolitik lainnya. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut Cina Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Konflik yang terjadi kemungkinan mengundang kehadiran negara-negara besar lainnya untuk terlibat yang ditakutkan akan menjadi masalah global yang berkepanjangan, sehingga tentu akan memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi sosial-ekonomi dunia dikarenakan kontribusi negara-negara tersebut yang sangat besar terhadap dunia. 

c) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

*Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030 atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Goals dan 169 Target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

Tujuan 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun

Tujuan 2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

2. Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi:

Tujuan 7: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;

Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;

Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara

Tujuan 17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk

pembangunan berkelanjutan

3. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

Tujuan 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

Tujuan 13: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

Tujuan 14: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

Tujuan 15: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi:

Tujuan 16: Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan

permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan akhir RPJPN Indonesia 2025-2045, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, Indonesia berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

d) Isu Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Dunia kini menghadapi berbagai dampak nyata, seperti kenaikan suhu ekstrem, cuaca yang tidak teratur, kekeringan masal, krisis air, kelangkaan pangan, munculnya berbagai penyakit, hingga naiknya permukaan air laut. Semua ini erat kaitannya dengan pemanasan global yang semakin parah. Perubahan ini dapat mengakibatkan; Kerusakan Infrastruktur, dimana, Badai tropis yang intens atau banjir bisa merusak jembatan, jalan raya, dan bangunan penting lainnya; Ancaman terhadap Kesehatan, yakni, gelombang panas yang lebih sering dan ekstrem dapat meningkatkan risiko kesehatan seperti penyakit panas dan dehidrasi; Ketidakstabilan Pangan, yakni, kekeringan yang parah atau banjir dapat mengganggu produksi pangan dan mengakibatkan kenaikan harga pangan; Kehilangan Keanekaragaman Hayati, yakni, Perubahan iklim yang drastis dapat mengancam spesies-spesies tertentu dan mengganggu ekosistem yang rapuh, dan; Meningkatnya Pengungsi Iklim, yakni, masyarakat yang terdampak dapat terpaksa pindah atau mengungsi akibat bencana alam yang lebih sering dan parah.


Pemanasan global terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dan dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O). Aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, serta industri yang tidak ramah lingkungan, menjadi penyebab utama meningkatnya emisi gas-gas tersebut. Gas rumah kaca berfungsi seperti selimut yang menyelimuti bumi dan menjebak panas matahari, menyebabkan suhu bumi terus meningkat.

Dampak perubahan iklim sudah dapat kita rasakan di berbagai belahan dunia. Salah satu contoh nyata adalah naiknya suhu rata-rata global. Menurut data dari lembaga iklim internasional, suhu bumi telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celsius sejak era pra-industri. Peningkatan ini mungkin terdengar kecil, tetapi dampaknya sangat signifikan. Misalnya, pemanasan global menyebabkan mencairnya es di kutub, yang berkontribusi pada naiknya permukaan air laut. Hal ini mengancam daerah pesisir dan pulau kecil, bahkan bisa menyebabkan tenggelamnya wilayah tersebut jika tidak segera ditangani.

Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Curah hujan menjadi tidak menentu, di beberapa daerah terjadi hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir besar, sedangkan di daerah lain terjadi kekeringan berkepanjangan yang memicu krisis air. Kondisi ini berdampak buruk pada sektor pertanian karena tanaman sulit tumbuh dengan baik, menyebabkan kelangkaan pangan di banyak negara.

Munculnya berbagai penyakit juga menjadi salah satu konsekuensi dari perubahan iklim. Suhu yang lebih hangat menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangan berbagai virus dan bakteri. Penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan menjadi lebih mudah menyebar, terutama di wilayah tropis dan subtropis.

e) Masalah Keamanan *Cyber Security*

Di era revolusi industri 4.0 segala aspek kehidupan tidak terlepas dari sentuhan teknologi, mendorong transformasi digital pada aktivitas dan proses bisnis di berbagai sektor. 

Hal ini melahirkan beragam inovasi teknologi seperti *Artificial Intelligence* dan *Internet of Things* (IoT). Melalui perkembangan teknologi informasi, saat ini setiap perangkat dengan mudah terkoneksi dalam jaringan komputer seperti internet. Peningkatan jumlah pengguna internet di dunia tidak terlepas dari peningkatan jumlah ancaman ataupun serangan siber (*cyber attack*). serangan siber (*cyber attack*) terus menciptakan ancaman potensial bagi sistem sampai *end-user*. Salah satu solusi untuk meminimalisir hal tersebut yaitu dengan memberi perhatian terhadap pengelolaan sistem keamanan siber (*cybersecurity*). *Cybersecurity* merupakan perlindungan yang sangat dibutuhkan baik untuk perorangan, perusahaan, ataupun pemerintahan untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut.



Beberapa risiko utama yang terkait dengan kegagalan *cybersecurity* meliputi; Serangan Siber, dimana, serangan malware, ransomware, phishing, dan hacking yang dapat mengakibatkan pencurian data sensitif, pencurian identitas, atau gangguan pada infrastruktur kritis; Kerentanan Perangkat IoT, dimana, peningkatan penggunaan dan ketergantungan pada perangkat *Internet of Things* (IoT) meningkatkan risiko terhadap serangan siber karena keamanan yang lemah pada perangkat tersebut; Kehilangan Kepercayaan Publik, dimana, kejadian kebocoran data atau pelanggaran keamanan yang sering dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap perusahaan atau institusi yang terlibat; Dampak Ekonomi, yakni, biaya besar untuk memulihkan data, memperbaiki sistem yang terpengaruh, dan mengganti kerugian akibat serangan siber dapat berdampak pada kesehatan finansial perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan, dan; Ancaman Terhadap Keamanan Nasional, dimana, serangan siber yang terkoordinasi dan kompleks dapat menimbulkan ancaman terhadap infrastruktur kritis suatu negara, seperti sistem energi, transportasi, dan komunikasi.

### 2.3.3 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan berbagai masalah, tantangan, dan peluang yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Isu-isu ini mendapatkan perhatian dan penanganan serius oleh Pemerintah Pusat sehingga memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi NTT untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

#### a) Isu Strategis Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah dan tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas, dan pemerataan kapasitas dan responsiveness system kesehatan di seluruh wilayah, yang ditandai dengan; AKI masih tinggi (189/100.000); Stunting masih tinggi (21,6%); Prevalensi obesitas 21,8%; Kasus baru TB meningkat ke-2 dunia; Kasus kusta peringkat ke-3 dunia; 51,14% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar; 24,7% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang, dan; 36,5% Rumah Sakit terakreditasi Paripurna, 56,4% FKTP terakreditasi.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada kondisi untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang.  

Beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain; Layanan pendidikan belum merata; Kualitas pendidikan masih rendah; Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas; Kualitas pendidikan angkatan kerja masih rendah; Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah, dan; Daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih rendah.

Perlindungan social yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif. Beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain; Akurasi program bantuan social masih rendah; Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim; Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah; Belum optimalnya integrasi layanan dan system administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan, dan; Program Jaminan Sosial belum optimal.

- b) Isu Strategis Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

Pembangunan ekonomi pada periode pertama dari 20 tahun pembangunan jangka panjang diarahkan untuk penyelesaian isu:

- Peningkatan produktivitas, sektor-sektor ekonomi melalui industrialisasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dengan pemanfaatan IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan UMKM dan Koperasi, Produktivitas BUMN, dan penguatan ekonomi dan keuangan Syariah.
- Pengembangan IPTEK dan Inovasi
- Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
- Transformasi digital
- Integrasi ekonomi domestik dan global
- Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

- c) Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

Transformasi tata kelola akan menjamin terlaksananya transformasi social dan transformasi ekonomis sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Transformasi tata kelola akan menciptakan pelayanan public yang berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif. Transformasi tatakelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif.

- d) Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gencar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

Supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan dipomasi diarahkan untuk; terwujudnya supremasi hukum nasional yang berkeadilan, kepastian hukum, bermanfaat dan berlandaskan HAM; terwujudnya keselamatan Bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara Nusantara Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta aktif menjaga perdamaian dunia dan berpengaruh di dunia Internasional; terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik; kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik, serta terbukanya partisipasi untuk semua pihak; **A.**

terwujudnya kesinambungan fiskal dan stabilitas harga melalui transformasi tata kelola dan kelembagaan keuangan negara disertai optimalisasi bauran kebijakan; penguatan sinergi dan fokus diplomasi, dan; pemantapan kelembagaan dan infrastruktur pendukung diplomasi.


- e) Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Ketahanan social budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi social, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan social budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga kesinambungan alam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembanugnan. Ketahanan social, budaya dan ekologi bertumpu pada; penguatan agama sebagai landasan spiritual, etika, moral sebagai modal dasar pembangunan; pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menetapkan peran dan posisi Indonesia dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; peningkatan ketangguhan individu keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*), dan; pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK, pembangunan berketahanan iklim, dan penanggulangan bencana didasarkan pada kareakteristik dan kondisi berbasis pulau.

- f) Isu Strategis Transformasi Sistem Pangan

Sektor pangan adalah pilar penting dalam perekonomian Indonesia dimana sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan pangan. Tetapi sektor ini dalam beberapa tahun terakhir ini dihadapkan pada beberapa tantangan seperti adanya konflik geopolitik dan dampak dari perubahan iklim global. Tantangan-tantangan ini sangat mempengaruhi stabilitas pasokan pangan, kualitas, keamanan, hingga akses masyarakat terhadap pangan.

Industri pangan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Ke depan, terdapat tantangan besar yang perlu dihadapi oleh setiap insan pangan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem pangan di Indonesia. Tantangan besar tersebut adalah bagaimana Indonesia dapat melaksanakan transformasi sistem pangan.

Transformasi sistem pangan bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan resiliensinya; yaitu kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi, mengatasi, mencegah, meminimalkan atau menghilangkan tekanan pada sistem. Dengan demikian, diharapkan untuk terus mampu berfungsi memberikan ketahanan pangan dan gizi bagi semua. Menjamin kemampuan produksi pangan dalam berbagai skenario situasi, sehingga dapat memastikan ketahanan pangan dan gizi, dengan tetap memberikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang optimal. 

Transformasi ini memerlukan investasi dan inovasi untuk memastikan bahwa sistem pangan secara keseluruhan menjadi lebih berkelanjutan dan adil, serta menjamin akses bagi setiap individu untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

g) Isu Strategis Transformasi Energi Baru Terbarukan

Dalam mitigasi perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% hingga 43,2% dengan bantuan internasional pada 2030. Salah satu upaya mengurangi emisi GRK yakni melalui transisi energi dimana sistem energi yang ada sekarang ditransformasi untuk mengakomodasi penetrasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tinggi, sehingga secara berangsur-angsur akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Pada 2023, Indonesia berhasil untuk mencapai porsi energi terbarukan sebesar 14%. Namun demikian, potensi pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik masih sangat besar. Dari potensi tenaga listrik sebesar 3.686 GW, pemanfaatan EBT baru mencapai 12.557 MW dimana bioenergi berkontribusi sebesar 3.086 MW.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan energi terbarukan. Hingga Semester I (Januari - Juni) tahun 2024, penambahan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) telah mencapai 217,73 Mega Watt (MW) atau sekitar 66,6% dari target tahunan sebesar 326,91 MW. Peningkatan kapasitas ini didominasi oleh PLT hidro dan PLT surya. PLT hidro berhasil mencapai 66,4% dari target, sementara PLT surya bahkan melampaui target dengan capaian 147,02%. Kendati PLT panas bumi belum mencapai target, namun sektor energi terbarukan lainnya seperti bioenergi juga menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu 43,2% dari target.

Dalam upaya pengembangan energi bersih, Indonesia menghadapi tantangan berupa realisasi bauran EBT yang belum mencapai target. Hingga semester I-2024, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan realisasi bauran EBT baru mencapai 13,93%, masih jauh dari target 23% yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional pada 2025.

#### 2.3.4 Isu Strategis Provinsi

Berdasarkan permasalahan serta isu global dan nasional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis daerah, sebagai berikut:

a) Isu Strategis Transformasi Sosial : Peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif

Tercapainya transformasi sosial bertumpu pada upaya pemenuhan pelayanan dasar serta pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya yang berkaitan dengan kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata, dan perlindungan social yang adaptif. Karena itu, transformasi sosial di NTT adalah upaya untuk; mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di daerah, dan menciptakan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Kesehatan untuk semua dihadapkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui; optimalisasi penanganan stunting dan penyakit M endemic (malaria), dan; pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas

fasilitas kesehatan; optimalisasi peningkatan umur harapan hidup; optimalisasi penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, dan; optimalisasi penurunan angka wasting yaitu gizi buruk, gizi kurang, dan *underweight*.

Pendidikan yang berkualitas dan merata dihadapkan pada upaya untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia NTT yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di daerah pada berbagai bidang melalui; peningkatan mutu pendidikan, peningkatan angka partisipasi sekolah untuk penduduk usia sekolah termasuk disabilitas, peningkatan angka melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah, mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan vokasional, peningkatan cakupan SMA dan SMK yang terakreditasi, peningkatan digitalisasi sektor pendidikan, dan peningkatan SPM sektor pendidikan.

Perlindungan sosial yang adaptif dihadapkan pada upaya untuk memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip keadilan dan inklusif adaptif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui; penurunan angka kemiskinan; optimalisasi pembangunan *Gender, Equalitu, Disabilitas, dan Social Inklusi* (GEDSI), peningkatan perlindungan social bagi PMKS; optimalisasi cakupan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; optimalisasi akurasi data untuk ketepatan intervensi; optimalisasi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; fasilitas umum yang ramah GEDSI, dan; Mengurangi jumlah masyarakat yang masuk kategori rumah tidak layak huni.

- b) Isu Strategis Transformasi Ekonomi : Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi

Terciptanya transformasi ekonomi bertumpu pada upaya penciptaan kemampuan dan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi sektor primer, sektor industri, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, serta BUMD. Upaya tersebut ditunjang dengan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan pembangunan pada berbagai sektor.

Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor primer dihadapkan pada upaya untuk; perbaikan pola pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat subsisten kepada pola pertanian yang berorientasi komersil; optimalisasi adopsi teknologi pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan; optimalisasi penguatan sentra produksi dikawasan pedesaan, serta sentra-sentra pengolahan dan pemasaran di kawasan perkotaan; perbaikan insentif pada system pasar sektor primer; optimalisasi ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasana termasuk ketersediaan pupuk, benih, jalan usaha tani, ketersediaan air dan irigasi; optimalisasi penanganan hama penyakit pada sektor pertanian dan peternakan, dan optimalisasi ketahanan sektor primer terhadap dampak perubahan iklim.

Peningkatan produksi dan produktifitas pada sektor primer memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pengolahan (hilirisasi). Selain itu, ketersediaan dan kontinuitas produksi dan produktifitas sektor primer juga diperlukan agar dapat menjamin keberlanjutan supply bahan baku bagi pengembangan industry di NTT. Apa lagi NTT memiliki komoditas berbasis *Core Competence* Komoditas Unggulan Wilayah, antara lain; padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi, rumput laut, perikanan tangkap, dan garam. Komoditas- komoditas ini perlu diperkuat guna mendukung industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

- c) Isu Strategis Transformasi Tata Kelola : Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan

M pembangunan *A.*

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga bisa menyediakan pelayanan public yang berkualitas. Hal ini ditempuh melalui; peningkatan kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan public, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

Penguatan terhadap drajat kemandirian fiskal dihadapkan pada upaya; optimalisasi pengelolaan potensi PAD; mengembangkan investasi pengelolaan keuangan daerah, dan; penguatan pengelolaan asset daerah. Penguatan terhadap pelayanan publik ditempuh melalui upaya; peningkatan akses pelayanan publik berbasis digital yang merata bagi masyarakat; peningkatan pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan, dan; optimalisasi inovasi pelayanan publik. Peningkatan manajemen talenta ditempuh melalui; optimalisasi pengembangan SDM birokrasi berbasis manajemen talenta. Keberlanjutan pembangunan ditempuh melalui; pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, dan; peningkatan perencanaan dan penganggaran dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2.3.5 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan analisis permasalahan dan isu-isu strategis yang merupakan tantangan pembangunan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikelompokkan isu-isu strategis Kabupaten Sabu Raijua tahun 2025-2029 sebagai berikut:

#### a. Peningkatan Kualitas SDM Berdaya Saing dan Pelayanan Dasar

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia belum optimal hal ini dapat dilihat dari:

##### a) Pendidikan yang belum optimal

Beberapa permasalahan di Kabupaten Sabu Raijua di bidang pendidikan adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah yang masih cukup tinggi, angka melanjutkan yang masih kurang. Pendidikan vokasi yang belum terlaksana dalam rangka meningkatkan ketrampilan bagi anak sekolah. Pendidikan dasar sudah merata di semua wilayah di Kabupaten Sabu Raijua. Namun demikian kualitas pendidikan masih belum merata, kesenjangan masih terasa antara daerah atas dan daerah bawah, kualitas guru menjadi permasalahan.

##### b) Derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal

Masih ditemukannya angka kematian pada ibu melahirkan, bayi dan balita. Angka kesakitan di Kabupaten Sabu Raijua masih cukup tinggi baik penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS, Kusta, Filariasi) maupun penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Mellitus, Kanker, Jantung). Kondisi ini dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang sehat, lingkungan yang tidak sehat dan pelayanan masih belum optimal. Pendekatan Keluarga Sehat merupakan salah satu solusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Perwujudan keluarga sehat masih menjadi prioritas dalam tahun kedepan. Sampai dengan tahun 2019 indeks Keluarga Sehat baru mencapai angka 0,10.

##### c) Kualitas Tenaga Kerja

Tenaga Kerja yang belum mampu menjawab kebutuhan pasar Kabupaten Sabu Raijua telah mengalami bonus demografi, dimana penduduk usia produktif memiliki jumlah yang lebih besar 2 kali lipat dibandingkan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat menjadi potensi dan ancaman. Kualitas penduduk usia produktif yang baik akan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Sabu Raijua, Namun apabila usia produktif tidak berkualitas banyak pengangguran maka ini akan menambah beban bagi Pemerintah

 Kabupaten Sabu Raijua.

Pengangguran di Kabupaten Sabu Raijua masih tinggi, urusan tenaga kerja memiliki tugas untuk meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan pasar. Kabupaten Sabu Raijua memiliki potensi kedepan untuk menjadikan calon tenaga kerja terserap dalam industri yang akan dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus.

d) Kualitas Pelayanan Dasar belum optimal

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan dampak program pembangunan. Pelayanan dasar lain adalah pada ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta sosial.

e) Kualitas Perempuan, anak dan pemuda yang masih belum optimal

Kesetaraan dan keadilan gender adalah isu dalam pembangunan kualitas perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih belum optimal, masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kekerasan padaperempuan dan anak, sehingga peran pemuda dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Pemuda harus memiliki prestasi termasuk prestasi olahraga.

f) Pemajuan Budaya dan peningkatan Minat Baca

Menjadi SDM yang maju dan unggul harus memiliki karakter budaya dan pengetahuan yang baik. Minat baca menjadi alat ukur terkait dengan peningkatan kualitas SDM

g) Penanggulangan Stunting dan Gizi Buruk

Stunting dan gizi buruk masih menjadi permasalahan di kabupaten Sabu Raijua. Penanggulangan tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor lain, mulai dari pendidikan, sanitasi dan air bersih, perumahan, dan pemberian makanan tambahan.

b. Peningkatan Ekonomi Inklusif dan pertumbuhan ekonomi berkualitas

Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan ditingkatkan melalui bidang usaha industri pengolahan, pertanian kehutanan dan perikanan. Untuk itu Kabupaten Sabu Raijua perlu dibuat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

a) Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah, Industri pengolahan

Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi kecil tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan belum optimal dan pemasaran yang belum dilakukan. Koperasi belum mampu memberikan akses permodalan pada wirasusaha mikro. Masih ada koperasi yang tidak aktif dan koperasi tidak sehat yang akan menjadi target pembangunan kedepan.

Sentra-sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kota sekitar. Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan sentra industri menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Sabu Raijua.

b) Penanaman Modal

Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Sabu Raijua menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Sabu Raijua.

c) Pertanian Perkebunan dan Perikanan

Terbatasnya lahan pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi tantangan bagi Kabupaten Sabu Raijua untuk meningkatkan produksinya. Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian

M perkebunan dan perikanan. 

d) Perdagangan, perhotelan, pariwisata

Potensi ekspor di Kabupaten Sabu Raijua belum optimal dalam pengembangannya, hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor. Potensi lain yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah jasa perhotelan dan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata merupakan pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan termasuk pengembangan ekonomi kreatif.

c. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, berkualitas dan berpelayanan prima

Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah Indeks Profesional Pegawai belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan, Indeks Kematangan informasi masih belum dilaksanakan. Pengelolaan keuangan cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan agar status WTP dalam pengelolaan keuangan tetap dipertahankan. Untuk itu juga perlu dilakukan peningkatan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan korupsi di Kabupaten. Selain itu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga belum maksimal. Pelayanan publik yang belum optimal juga menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi. Pelimpahan kewenangan Perangkat Daerah di Kecamatan bagian dari meningkat pelayanan publik yang lebih cepat. Belum semua Perangkat Daerah memberikan pelimpahan kewenangan di Kecamatan.

d. Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Kualitas lingkungan yang baik akan terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup yang bagus melalui penilaian kualitas pada komponen air, udara, lahan dan air laut. Permasalahan jangka Panjang yang perlu menjadi perhatian serius adalah ancaman abrasi pantai karena eksploitasi penambangan pasir pantai secara illegal. Termasuk, ancaman kelangkaan air dan intrusi air laut menjadi pokok perhatian untuk keberlanjutan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga pengelolaan sampah, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang.

e. Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Kemiskinan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Sabu Raijua. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar Kabupaten Sabu Raijua memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua menjadikan daerah ini menjadi salah satu kabupaten yang dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrim mulai tahun 2022.

Untuk itu, Penanggulangan kemiskinan ini harus segera diselesaikan dengan menyiapkan strategi penanggulangan kemiskinan secara serius bagi Perangkat Daerah terkait, dengan melibatkan TNP2K serta peran masyarakat, tokoh agama, dan CSR, guna menghasilkan data terpadu kemiskinan yang *update* diikuti dengan strategi dan sasaran pencapaian penanggulangan kemiskinan yang berkontribusi terhadap pencapaian pada semua sektor yang lain seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain.

f. Peningkatan Infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas untuk mendukung konektivitas Antar Wilayah

Hal ini lebih dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan antar wilayah, dan kualitas lingkungan yang belum optimal. Kualitas infrastruktur yang tidak baik menyebabkan konektivitas antar wilayah terganggu. Masih ditemukannya jalan rusak sepanjang jalan Kabupaten Sabu Raijua atau masih kurangnya panjang jalan dalam kondisi mantap, jalan yang tidak memiliki drainase baik. Terbatasnya Pelayanan angkutan juga menjadi salah satu penyebab konektivitas antar wilayah.

BAB III  
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

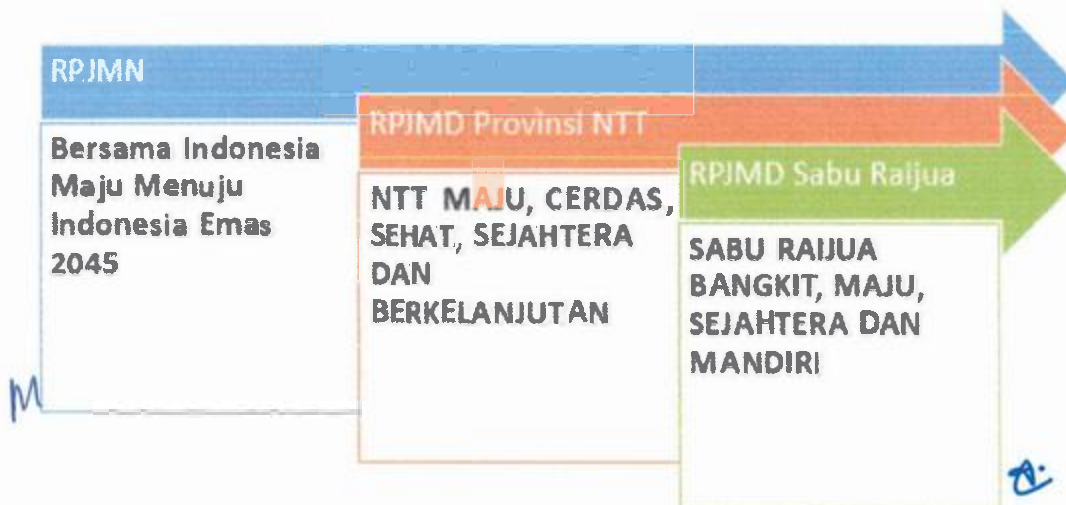
3.1.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum tentang keadaan atau kondisi daerah yang akan terwujud pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebagai hasil pembangunan selama lima tahun. Perumusan visi RPJMD berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati. Visi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2025-2029 yaitu: “SABU RAIJUA BANGKIT, MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI”

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Sabu Raijuatahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi nilai dan cita-cita yang mendorong komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan untuk mencapainya. Visi jangka menengah menjadi pemandu arah bagi berbagai agenda dan program pembangunan agar dapat diarahkan untuk mencapai cita-cita yang diharapkan tersebut. Visi pembangunan jangka menengah memiliki peran penting untuk membangun fondasi transformasi pembangunan dalam konteks pembangunan jangka panjang daerah. Visi sebagai rumusan kondisi umum memerlukan penjelasan agar mampu dijabarkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan. Penjelasan visi RPJMD sebagai berikut:

- Bangkit* : Mengandung makna sebagai suatu gerakan dari posisi bawah menuju ke atas dalam arti berusaha dengan segala upaya untuk bangkit dari posisi rendah ke posisi lebih tinggi. Peningkatan taraf hidup, peningkatan mutu Pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua
- Maju* : Mengandung makna bahwa Pembangunan di kabupaten Sabu Raijua Tidak berdiri di tempat, tidak jalan di tempat tetapi bergerak kedepan. Adanya keberlanjutan Pembangunan.
- Sejahtera* : Suatu keadaan/kondisi dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai dengan kata lain terpenuhinya kebutuhan dasar.
- Mandiri* : Melepaskan ketergantungan yang berlebihan kepada pihak lain.

Visi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua memiliki keterkaitan dengan Visi RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:



Tabel 3.1 Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029

Sasaran Visi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029	Indikator Visi	Baseline 2025	Target 2030
• Pendapatan masyarakat meningkat	• PDRB per kapita (Rp Juta)	8.812	20.000
	• Kontribusi PDRB sektor industri (%)	1,57	2,76
• Kemiskinan dan ketimpangan menurun	Tingkat Kemiskinan (%)	27,10	20,00
	Rasio gini (Indeks)	0,316	0,295
• Daya Saing Daerah yang meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	2,89	4,0
• Kualitas Sumber Daya Manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	60,01	65,90
• Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	72,86	73,11

Sumber : Hasil Olahan, 2025

### 3.1.2. Misi

Misi RPJMD merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan guna mencapai visi. Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan yaitu “Sabu Raijua Bangkit, Maju, Sejahtera dan Mandiri”, terdapat 6 (enam) Misi yang akan dilaksanakan.


- Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Misi 2 : Meningkatkan daya saing Bidang Ekonomi yang difokuskan pada pembangunan Ekonomi Inklusif
- Misi 3 : Meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta partisipatif
- Misi 5 : Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas
- Misi 6 : Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Berikut penjelasan pada masing-masing Misi:

Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Sabu Raijua berupaya untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya memiliki pendidikan yang baik, tetapi juga memiliki keterampilan, pengetahuan, karakter, dan daya saing yang tinggi. Dengan demikian, masyarakat Sabu Raijua akan mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah, memanfaatkan potensi yang ada, dan bersaing secara positif di berbagai tingkatan. Misi ini menjadi landasan penting bagi berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pengembangan potensi masyarakat.

Misi 2: Meningkatkan daya saing Bidang Ekonomi yang difokuskan pada pembangunan Ekonomi Inklusif

Sabu Raijua tidak hanya ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan fokus pada ekonomi inklusif, diharapkan tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi. Misi ini menjadi panduan untuk merancang kebijakan dan program yang mendorong daya saing ekonomi sekaligus memerhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan. 

### Misi 3: Meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Masyarakat Sabu Raijua akan memiliki derajat kesehatan yang semakin baik dan tingkat kesejahteraan sosial yang meningkat. Ini berarti masyarakat memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terlindungi dari risiko sosial, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup, dan tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam menikmati pembangunan. Misi ini menjadi landasan bagi berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk menciptakan masyarakat Sabu Raijua yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan.

### Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta partisipatif

Sabu Raijua akan memiliki pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat karena keterbukaannya, bertanggung jawab atas tindakannya, mampu bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan pembangunan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap prosesnya. Dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan kepercayaan masyarakat meningkat, pelayanan public menjadi lebih berkualitas, pembangunan berjalan lebih optimal, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Misi ini menjadi komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani dan berpihak kepada kepentingan seluruh masyarakat Sabu Raijua.


### Misi 5: Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas

Dengan tersedianya infrastruktur dasar dan strategis yang memadai dan berkualitas, Sabu Raijua akan memiliki fondasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, dan membuka akses ke berbagai peluang pembangunan. Misi ini menjadi prioritas untuk memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur yang mendasar terpenuhi dan potensi strategis daerah dapat dikembangkan secara optimal. Pemerintah daerah akan berupaya untuk merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur dengan baik, melibatkan partisipasi masyarakat, dan mencari sumber pendanaan yang beragam untuk mewujudkan misi ini.

### Misi 6: Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Sabu Raijua akan mampu menata dan mengelola lingkungan hidupnya secara bertanggung jawab, sehingga kelestarian alam terjaga, kualitas lingkungan hidup meningkat, dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Misi ini menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, demi kesejahteraan masyarakat Sabu Raijua saat ini dan di masa depan. Pemerintah daerah akan berupaya untuk menyusun kebijakan, melaksanakan program, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, lestari, dan berkelanjutan.

#### 3.1.2.1. Keselarasan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD

Visi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua 2025-2029 tidak terlepas dari visi jangka panjang yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sabu Raijua 2025-2045. Tabel di bawah ini menjelaskan hubungan logis antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Sabu Raijua NTT Tahun 2025-2045. 

Tabel 3.3 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2045

Visi RPJMD 2025-2029	selaras	Visi RPJPD 2025-2045
Sabu Raijua Bangkit, Maju, Sejahtera dan Mandiri		Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat 'Mira Kaddi Hari'
Misi RPJMD 2025-2029		Misi RPJPD 2025-2045
Misi I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	selaras	Misi 1: Mewujudkan Sumber daya Manusia Sabu yang Unggul dan terlindungi
Misi II: Meningkatkan daya saing Bidang Ekonomi yang difokuskan pada pembangunan Ekonomi Inklusif	selaras	Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Inklusif dan pertumbuhan ekonomi berkualitas
Misi III: Meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	selaras	Misi 1: Mewujudkan Sumber daya Manusia Sabu yang Unggul dan terlindungi
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta partisipatif	selaras	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, berkualitas dan berpelayanan prima  Misi 4: Mewujudkan masyarakat Sabu Raijua yang ramah, taat hukum, aman dan damai.
Misi V: Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas	selaras	Misi 5: Menyediakan Infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas
Misi VI: Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	selaras	Misi 6: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan pendekatan sosial budaya dan inklusi

Sumber : olahan Tim Penyusun RPJMD Provinsi NTT, 2025

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Visi Kedua dokumen selaras dalam mengejar kemajuan dan keberlanjutan, dengan RPJPD lebih luas cakupannya (nasional/Indonesia Emas 2045). Dan Misi RPJMD fokus pada 5 (aspek (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, Sumber Daya Alam), sedangkan RPJPD lebih detail dengan 6 (enam) misi yang mencakup tata kelola, hukum, dan kewilayahan, Setiap misi RPJMD memiliki keterkaitan langsung dengan misi RPJPD.

### 3.1.2.2. Keselarasan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN Tahun 2025-2029

Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dan Visi, Misi RPJMN 2025-2045 sebagaimana terlihat di bawah ini :

1. Visi RPJMN 2025-2029 : "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".
2. Visi RPJMD 2025-2029 : NTT Maju, Sehat Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan.
3. Visi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua: "Sabu Raijua Bangkit, Maju, Sejahtera dan Mandiri" *M dan Mandiri*

Tabel keselarasan Misi RPJMD Kabupaten dengan Misi RPJMD Provinsi NTT dan Misi RPJMN sebagai berikut:

Tabel 3.4 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

MISI RPJMD KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2025-2029	MISI RPJMN TAHUN 2025-2029
Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Misi III : Menghadirkan Pendidikan Berkualitas Yang Merata, Partisipatif Dan Tepat Sasaran (CERDAS)  Misi V : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Manusia Yang Bijak Serta Pemenuhan HAM Untuk Menciptakan Masa Depan Yang Inklusif (BERKELANJUTAN)	Misi IV : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Misi VIII : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi II: Meningkatkan daya saing Bidang Ekonomi yang difokuskan pada pembangunan Ekonomi Inklusif	Misi IV : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, Serta Kualitas Hidup Yang Berkeadilan Dan Madani Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (SEJAHTERA)  Misi V : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Manusia Yang Bijak Serta Pemenuhan HAM Untuk Menciptakan Masa Depan Yang Inklusif (BERKELANJUTAN)	Misi V : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Misi VI : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Misi III: Meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Misi II : Memperluas Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Sosial Yang Lebih Inklusif, Terjangkau Dan Mudah Diakses (SEHAT)	Misi V : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Misi VI : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sertapartisipatif	Misi V : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Manusia Yang Bijak Serta Pemenuhan HAM Untuk Menciptakan Masa Depan Yang Inklusif (BERKELANJUTAN)	Misi I : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Misi V: Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas	Misi I: Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Yang Berdaya Saing (MAJU)	Misi II : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi

m

✍

MISI RPJMD KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2025-2029	MISI RPJMD PROVINSI NTT TAHUN 2025-2029	MISI RPJMN TAHUN 2025-2029
		biru. Misi III : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Misi VI: Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan		Misi VIII: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sumber : Hasil Olahan, 2025

### 3.1.2.3. Keselarasan Misi RPJMD dengan Tujuan SDGs Tahun 2015-2029

Penerapan SDGs di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Perpres ini menguraikan 17 tujuan dari implementasi SDGs yang termasuk dalam sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 di Indonesia.

Pada Tabel 3.4 menggambarkan keselarasan antara Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) Tahun 2015-2029. Keselarasan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda global pembangunan berkelanjutan sekaligus mencerminkan integrasi prinsip-prinsip SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah. sehubungan dengan itu, maka penerapan SDGs dalam RPJMD Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan 5 (lima) misi pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 dengan SDGs Tahun 2015-2029

Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Tujuan SDGs Tahun 2015-2029
Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan Berkualitas: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua  Kesetaraan Gender: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan  Tanpa Kemiskinan: Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
Misi II: Meningkatkan daya saing Bidang Ekonomi yang difokuskan pada pembangunan Ekonomi Inklusif	Energi Bersih dan Terjangkau: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua  Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja

Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Tujuan SDGs Tahun 2015-2029
	<p>yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p> <p>Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung jawab : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</p> <p>Tanpa Kelaparan: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan</p>
<p>Misi III: Meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Kehidupan Sehat dan Sejahtera: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</p>
<p>Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta partisipatif</p>	<p>Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di SemuaTingkatan</p> <p>Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan</p>
<p>Misi V: Meningkatkan ketersediaan Infrastruk turdasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas</p>	<p>Air Bersih dan Sanitasi Layak: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua</p> <p>Industri, Inovasi, dan Infrastruktur: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</p> <p>Berkurangnya Kesenjangan: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan antar Negara</p> <p>Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan</p>
<p>Misi VI: Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan</p>	<p>Penanganan Perubahan Iklim: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</p> <p>Ekosistem Laut : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan</p> <p>Ekosistem Daratan : Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati</p>

Sumber : Hasil Olahan, 2025 

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap Misi RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan satu atau lebih Tujuan SDGs. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan agenda global, sekaligus memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi panduan pembangunan daerah, tetapi juga kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Sabu Raijua 2025-2029. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Ini disebabkan sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2025-2045 melalui RPJMD tahun 2025-

M2029. ✨

Tabel 3.6 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2024	Target Tahun					Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	
1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	1.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia cerdas, terampil, berkarakter, berbudaya, dan berdayasaing, yang mampu mengoptimalkan potensi local untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	1.1.1 Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan untuk penciptaan sekolah unggulan yang Berbasis Kearifan Lokal melalui pengembangan literasi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	59,58	61,72	63,81	65,93	67,99	68,71	70,20
				13,19	13,35	13,95	14,21	14,97	15,15	15,65
			Rata-rata lama sekolah	6,99	7,05	7,28	7,98	8,35	8,99	9,21
				45,52	50,02	52,53	60,00	70,00	75,00	80,00
2 Meningkatkan daya saing Bidang Ekonomi yang difokuskan pada pembangunan Ekonomi Inklusif	2.1 Mewujudkan daya saing bidang ekonomi yang kuat dan berkelanjutan melalui pembangunan ekonomi inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, memanfaatkan potensi unggulan daerah secara optimal, serta mengurangi ketimpangan ekonomi	1.1.1.2 Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Pemuda	55,86	56,30	56,84	57,36	57,89	58,27	58,86
				3,79	4,50	4,90	5,02	5,45	5,66	6,00

M

4

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2.1.1 Pengembangan Sektor Unggulan Ekonomi Yang Berbasis Masyarakat	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	34,83	34,83	34,83	34,83	34,83	34,83	34,83	
			PDRB Per kapita (Dalam ribu)	18.278	18.675	18.927	19.257	19.567	19.976	20.123	
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,62	1,65	1,72	1,81	1,93	1,95	2,01	
			Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	NA	5.7	6.9	8.1	8.5	8.8	9.1	
		2.1.2 Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Infrastruktur Ekonomi	Realisasi investasi (dalam juta Rupiah)	7.157	8.000	10.000	15.000	25.000	50.000	100.000	
			Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,49	2 hari	2 hari	3 hari	3 hari	4 hari	5 hari	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77.44	78.89	79.67	80.79	81.59	82.23	83.39	
		2.1.3 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi berkualitas	4.40	43.51	44.16	44.81	45.45	46.10	46.75	
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	3.1 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial inklusi dan pemberdayaan masyarakat rentan	Persentase Penduduk Miskin	28,13	27,45	26,15	24,31	22,42	20,01	18,19	
			Prevalensi Stunting	35.1	32.7	31.6	30.4	29.1	28.1	28	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		3.1.1 Meningkatkan Akses dan Mutu layanan Kesehatan dasar dan rujukan	Usia Harapan Hidup	62.51	63	63.5	63.9	64	64.2	64.5	
		3.1.2 Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana	Angka kematian ibu	218	217.5	216	215.8	214	213	212	
			Angka Kematian bayi	29	28.5	28	27.8	27.5	26	25.8	
			Total Fertility Rate (TFR)	3.16	3.15	3.14	3.13	3.12	3.1	3.05	
		3.1.3 Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penguatan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Rentan	Indeks Ketimpangan Gender	0.484	0.471	0.458	0.445	0.432	0.419	0.406	
			Indeks Pembangunan Gender	92,42	93,65	94,31	94,99	95,01	95,50	95,90	
			Indeks Desa Membangun	0,5634 (Fertinggal)	0,5959	0,6101	0,6531	0,6910	0,7023	0,7321	
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	13.21	10.38	16.62	22.56	28.65	34.48	40.46	
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	95	95.5	96	96.5	97	97.5	98	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4.06	4.00 - 3.50	3.60 - 3.10	3.20 - 2.80	2.90 - 2.40	2.40 - 1.90	2.00 - 1.50	
			Gini Ratio (0-1)	0,316	0,3283-0,3218	0,3247-0,3211	0,3211-0,3204	0,3175-0,3197	0,3140-0,3190	0,3104-0,3183	

3

M

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta partisipatif	4.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, responsif, dan partisipatif, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	3.1.4 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pemenuhan Gizi Berbasis Sumber Daya Lokal	Prevalensi stunting	35.1	32.7	31.6	30.4	29.1	28.1	28	
		4.1.1 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi dan Pelayanan Publik serta Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A
5 Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas	5.1 Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membuka keterisolasian wilayah	4.1.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Daerah	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A
		5.1.1 Meningkatkan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dasar	a. persentase rumah tangga dengan akses air bersih layak	72,95	75	77	80	95	90	95	95
			b. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			c. Indeks Pelayanan Publik	2,75	3,05	3,51	4,00	4,25	4,50	4,65	
			d. Indeks SPBE	1,82	2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	
			e. Indeks keterbukaan informasi publik	94,30	94,39	94,47	94,56	94,64	94,73	94,82	
			Persentase Ketercapaian Target Kinerja RPJMD (%)	90	92	93	94	95	96	97	
			Indeks daya saing Daerah	2,92	2,96	3,06	3,26	3,50	3,90	4,00	

M

di



3.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah  
 3.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

3.7 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029  
 Arah Kebijakan 1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
1.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia cerdas, terampil, berkarakter, berbudaya, dan berdaya saing, yang mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	1.1 1 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan untuk penciptaan sekolah unggulan yang Berbasis Kearifan Lokal melalui pengembangan literasi	Pengembangan Model Sekolah Unggulan Berbasis Kekhasan Daerah  Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal dan Potensi Daerah  Perluasan Akses dan Kualitas Pendidikan yang Berkeadilan dengan Fokus pada Sekolah Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Identifikasi dan Penetapan Standar Sekolah Unggulan Lokal</li> <li>•Pendirian dan Pengembangan Sekolah Model</li> <li>•Penguatan Kurikulum Muatan Lokal yang Mendalam</li> <li>•Memperluas akses pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas di seluruh wilayah kabupaten</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam mengintegrasikan kearifan lokal dan potensi daerah kedalam proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif.</li> <li>•Mendorong dan memfasilitasi guru untuk mengembangkan modul, buku, dan bahan ajar lain yang relevan dengan kearifan lokal dan potensi daerah, serta memanfaatkan sumber daya lokal sebagai media pembelajaran</li> <li>•Kemitraan dengan Tokoh Masyarakat dan Praktisi Lokal</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Program Afirmasi untuk Sekolah Unggulan melalui pemberian dukungan khusus kepada sekolah-sekolah yang berpotensi menjadi unggulan, terutama di wilayah yang memiliki kekayaan kearifan lokal dan potensi daerah yang unik</li> <li>•Menyediakan beasiswa atau bantuan pendidikan khusus bagi siswa berprestasi yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah unggulan berbasis kearifan lokal dan potensi daerah</li> </ul>

Arah Kebijakan 1			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan berkualitas di semua sekolah, termasuk sekolah yang berpotensi menjadi unggulan di daerah terpencil</li> <li>•Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran untuk memperluas akses ke sumber belajar yang relevan dengan kearifan lokal dan potensi daerah, serta meningkatkan kualitas pembelajaran</li> <li>•Membentuk tim khusus di tingkat kabupaten yang bertugas merancang, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi program pengembangan sekolah unggulan berbasis kearifan lokal dan potensi daerah.</li> <li>•Menggalang dukungan dan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendapatkan bantuan teknis dan pendanaan dalam pengembangan sekolah unggulan</li> <li>•Mendorong partisipasi aktif masyarakat, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha local dalam mendukung pengembangan sekolah unggulan, misalnya melalui program magang siswa, penyediaan narasumber, atau dukungan pendanaan</li> <li>•Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sekolah unggulan dan program-program yang dilaksanakan, serta melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ul>
		Penguatan Tata Kelola dan Kemitraan untuk Pengembangan Sekolah Unggulan	
		Identifikasi dan Pengembangan Klaster Keterampilan Unggulan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Keterampilan: Melakukan studi komprehensif untuk mengidentifikasi potensi unggulan daerah (misalnya pertanian lahan kering, perikanan, pariwisata bahari, kerajinan tenun ikat, pengolahan hasil bumi) dan kebutuhan keterampilan spesifik yang terkait dengan pengembangan potensi tersebut</li> </ul>

Arah Kebijakan 1			
Tujuan	Sasaran	Strategi	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelompokkan jenis-jenis keterampilan yang saling terkait dan memiliki potensi ekonomi signifikan menjadi klaster-klaster pengembangan keterampilan unggulan lokal.</li> <li>• Merumuskan standard kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan potensi unggulan daerah, dengan melibatkan para ahli, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat setempat</li> <li>• Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pelatihan</li> <li>• Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Lokal</li> <li>• Penyelenggaraan Pelatihan yang Fleksibel dan Inklusif</li> </ul>
		Peningkatan Kualitas dan Akses Pelatihan Vokasi dan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun sistem sertifikasi kompetensi yang mengakui keterampilan dan pengetahuan masyarakat di bidang-bidang unggulan lokal. Sertifikasi ini dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja dan produk lokal</li> </ul>
	Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Potensi Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan kewirausahaan yang menarik, interaktif, dan relevan bagi pemuda, dengan fokus pada identifikasi peluang bisnis berbasis potensi lokal</li> <li>• Menyediakan program mentoring dan pendampingan berkelanjutan oleh para ahli, pengusaha sukses lokal, dan tokoh masyarakat kepada pemuda yang memiliki minat dan potensi untuk berwirausaha</li> <li>• Pemanfaatan Teknologi untuk Kewirausahaan</li> <li>• Pengembangan Inkubator Bisnis Pemuda berbasis potensi lokal</li> </ul>
	1.1. 2		

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
			Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Pemuda yang Kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan Usaha</li> <li>•Menyediakan atau mendukung pembentukan ruang-ruang kreatif (<i>creative hub</i>) dan pusat kolaborasi (<i>collaborative space</i>) di mana pemuda dapat berkumpul, bertukar ide, mengembangkan proyek bersama, dan membangun jaringan</li> <li>•Membantu pemuda dalam mengakses pasar yang lebih luas melalui pameran, festival produk lokal, <i>platform e-commerce</i> yang dikelola daerah, dan kerjasama dengan sektor pariwisata</li> <li>•Promosi Produk dan Usaha Pemuda Lokal</li> <li>•Membangun kerjasama yang sinergis dengan perusahaan swasta, organisasi kepemudaan, dan lembaga non-pemerintah dalam mendukung program pemberdayaan kewirausahaan pemuda</li> </ul>
			Pemberdayaan Pemuda dalam Pemanfaatan Potensi Lokal yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan</li> <li>•Fasilitasi Transfer Pengetahuan Antar generasi</li> <li>•Mendorong pemuda untuk melakukan riset dan mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan potensi lokal agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.</li> </ul>
2.1	Mewujudkan daya saing bidang ekonomi yang kuat dan berkelanjutan melalui pembangunan ekonomi inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, memanfaatkan potensi unggulan daerah secara optimal, serta mengurangi ketimpangan ekonomi	2.1.1 Pengembangan Sektor Unggulan Ekonomi yang Berbasis Masyarakat	Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mendorong pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok usaha berbasis masyarakat</li> <li>•Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi serta BUMDes sebagai wadah ekonomi kolektif yang mampu mengelola potensi unggulan secara profesional dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat</li> <li>•Memberikan pelatihan teknis yang relevan dengan sector unggulan serta pelatihan kewirausahaan</li> </ul>

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan akses informasi pasar, teknologi produksi yang tepat guna, dan inovasi kepada kelompok ekonomi masyarakat melalui pendampingan, pelatihan, dan penyediaan infrastruktur yang mendukung</li> <li>• Identifikasi dan Penguatan Rantai Pasok Lokal</li> <li>• Mendorong inovasi dan diversifikasi produk serta layanan yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal</li> <li>• Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada kelompok ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk sesuai standar pasar dan memfasilitasi proses sertifikasi</li> <li>• Memfasilitasi pembentukan sistem pemasaran bersama untuk memperluas jangkauan pasar produk dan layanan masyarakat</li> </ul>
		Peningkatan Rantai Nilai Sektor Unggulan yang Inklusif		
2.1.2	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Ekonomi	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan atau memperbaiki infrastruktur dasar yang mendukung sector unggulan</li> <li>• Penyediaan Infrastruktur Pemasaran: Membangun atau memperbaiki pasar tradisional, pusat penjualan produk lokal, dan fasilitas pendukung pariwisata</li> <li>• Pengembangan Infrastruktur Digital: Memperluas jangkauan internet dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat</li> </ul>
2.1.3	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi UMKM dan Koperasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM dan anggota koperasi dalam berbagai aspek, termasuk manajemen usaha, keuangan, pemasaran (termasuk digital), produksi, inovasi produk, dan peningkatan kualitas</li> <li>• Menyediakan akses mudah terhadap informasi pasar, tren konsumen, teknologi produksi yang tepat guna, dan platform digital untuk pemasaran dan penjualan.</li> <li>• Mendorong adopsi teknologi dalam operasional UMKM dan koperasi.</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
		<p>Perluasan Akses Pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengembangan Standar dan Sertifikasi UMKM dan koperasi</li> <li>● Membangun kerjasama dengan perbankan, lembaga keuangan mikro, dan fintech untuk menyediakan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan koperasi</li> <li>● Mendukung inisiatif pembentukan lembaga keuangan mikro tingkat lokal yang lebih mudah diakses oleh UMKM dan koperasi di Sabu Raijua</li> <li>● Mengupayakan skema penjaminan kredit untuk mengurangi risiko bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dan koperasi yang layak</li> </ul>
		<p>Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Usaha UMKM dan Koperasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembentukan dan Pemberdayaan Asosiasi/Forum UMKM dan Koperasi</li> <li>● Memfasilitasi kegiatan promosi dan pemasaran bersama bagi produk dan layanan UMKM dan koperasi, baik melalui pameran, festival, platform digital, maupun kerjasama dengan sektor pariwisata</li> </ul>
	<p>Penguatan Keterampilan dan Kapasitas Pelaku Ekonomi Lokal</p>		
	<p>Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Bertanggung Jawab</p>	<p>Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Investasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan melalui implementasi sistem perizinan terpadu (PTSP) yang efektif dan berbasis digital.</li> <li>● Menyediakan layanan informasi investasi yang lengkap dan mudah diakses, termasuk potensi daerah, regulasi, insentif, dan prosedur investasi</li> <li>● Menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi investor melalui penegakan hukum yang konsisten dan penyelesaian sengketa investasi yang adil dan efisien</li> </ul>

M

t

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan 1
				Promosi Potensi Investasi Daerah yang Terarah dan Efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Identifikasi dan Pemetaan Potensi Investasi Unggulan</li> <li>•Pengembangan Materi Promosi yang Menarik dan Informatif</li> <li>•Partisipasi dalam Forum dan Pameran Investasi</li> <li>•Mengoptimalkan penggunaan media sosial, website investasi daerah, dan platform digital lainnya untuk menjangkau investor secara lebih luas</li> </ul>
				Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang Selektif dan Terukur	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Merancang skema insentif fiskal (misalnya keringanan pajak daerah) dan non-fiskal (misalnya kemudahan perizinan, dukungan infrastruktur) yang menarik bagi investor, namun tetap memperhatikan kepentingan daerah</li> <li>•Memberikan insentif secara selektif kepada investasi yang memiliki dampak ekonomi signifikan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pengembangan sector unggulan daerah serta prinsip keberlanjutan</li> <li>•Memfasilitasi akses investor terhadap lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan menyediakan dukungan infrastruktur yang dibutuhkan.</li> </ul>

4.

W

Arah Kebijakan 1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
<p>3.1 Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten serta meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan system perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat rentan</p>	<p>3.1.1 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan</p>	<p>Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Peningkatan Jumlah dan Distribusi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): Memastikan ketersediaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan praktik dokter/ klinik swasta yang memadai dan merata di seluruh wilayah</li> <li>•Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana FKTP</li> <li>•Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan (dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat) yang bertugas di FKTP melalui program rekrutmen, pelatihan berkelanjutan, dan insentif</li> <li>•Meningkatkan upaya penyuluhan kesehatan, deteksi dini penyakit, imunisasi, dan program pencegahan lainnya di tingkat masyarakat melalui FKTP dan melibatkan kader kesehatan serta tokoh masyarakat</li> <li>•Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi kesehatan berbasis digital untuk pendaftaran pasien, rekam medis, pelaporan, dan pemantauan program kesehatan di FKTP</li> <li>•Membangun sistem rujukan yang jelas, terkoordinasi, dan efisien antara FKTP dan fasilitas kesehatan rujukan untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat waktu</li> </ul>
		<p>Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan daerah dalam hal jumlah tempat tidur, ketersediaan dokter spesialis dan sub-spesialis, peralatan medis canggih, dan fasilitas penunjang diagnostic serta terapi</li> <li>•Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan</li> <li>•Mengembangkan layanan unggulan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, seperti layanan maternal dan neonatal komprehensif, penanganan penyakit menular dan tidak menular prioritas, serta layanan kegawat daruratan</li> </ul>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penguatan Upaya Pencegahan Stunting: Melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitive secara terintegrasi untuk mencegah dan menurunkan angka stunting pada anak usia dini, termasuk pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, pemberian ASI eksklusif, dan MPASI yang adekuat</li> <li>•Memperkuat kapasitas fasilitas kesehatan rujukan dalam menangani kasus komplikasi kehamilan dan persalinan secara cepat dan tepat.</li> <li>•Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga serta masyarakat tentang pentingnya KIA melalui edukasi dan promosi kesehatan.</li> </ul>
		<p>Penguatan Program Keluarga Berencana yang Berkualitas dan Merata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Peningkatan Akses Informasi dan Pelayanan KB</li> <li>•Peningkatan Konseling dan Pemilihan Kontrasepsi</li> <li>•Menjamin ketersediaan alat kontrasepsi yang beragam dan berkualitas di semua fasilitas kesehatan</li> </ul>
		<p>Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mengembangkan dan menyampaikan informasi serta edukasi yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi, seksualitas yang sehat, pencegahan IMS, HIV/AIDS, dan perencanaan keluarga bagi remaja melalui jalur formal (sekolah) maupun non-formal (organisasi kepemudaan, komunitas)</li> <li>•Menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi remaja dengan menjaga kerahasiaan dan menghormati hak-hak mereka</li> <li>•Melakukan upaya pencegahan pernikahan dini melalui edukasi, sosialisasi, dan penegakan peraturan perundang-undangan</li> <li>•Melibatkan remaja sebagai <i>peer educator</i> atau agen perubahan untuk menyebarkan informasi kesehatan reproduksi di kalangan teman sebaya.</li> </ul>

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
	3.1.3	Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penguatan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Rentan	Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pengurangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Memperluas jangkauan dan meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial (misalnya PKH, bantuan pangan non-tunai) serta memastikan penyalurannya tepat waktu dan efisien</li> <li>•Mengintegrasikan program bantuan sosial dengan upaya pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha mikro, dan fasilitasi akses pasar bagi keluarga penerima manfaat</li> <li>•Memastikan masyarakat miskin dan rentan memiliki akses yang memadai terhadap layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak</li> <li>•Mengkaji dan mengembangkan skema jaminan sosial berbasis kontribusi yang terjangkau bagi pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah</li> <li>•Merancang dan melaksanakan program khusus yang fokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak</li> </ul>
			Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Modal Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)</li> <li>•Mendorong pembentukan forum-forum komunikasi di tingkat masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam perencanaan pembangunan dan penyelesaian masalah sosial</li> <li>•Mendorong dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial dalam masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial dan budaya</li> <li>•Memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara</li> </ul>

M

25

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
				<ul style="list-style-type: none"> <li>•Merancang program pemberdayaan yang spesifik untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan</li> </ul>
			Penguatan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Rentan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Membangun dan memelihara basis data yang akurat dan terintegrasi mengenai masyarakat rentan untuk memudahkan identifikasi, penyaluran bantuan, dan perencanaan program perlindungan sosial</li> <li>•Memperiapkan skema asuransi dan bantuan yang memadai untuk melindungi masyarakat rentan dari dampak bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya</li> <li>•Memperkuat layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan kelompok rentan lainnya agar dapat kembali berfungsi sosial secara optimal</li> <li>•Mengembangkan sistem peringatan dini terhadap potensi kerawanan sosial dan melaksanakan upaya mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya konflik dan gejolak sosial</li> </ul>
	3.1.4	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pemenuhan Gizi Berbasis Sumber Daya Lokal	Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Lokal untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mendorong diversifikasi produksi dan konsumsi pangan yang memanfaatkan berbagai jenis sumber daya lokal yang bergizi</li> <li>•Mendorong inovasi dan pengembangan produk pangan olahan skala rumah tangga dan UMKM yang berbahan baku lokal dan memiliki nilai gizi tinggi</li> <li>•Mendukung praktik pertanian, perikanan, dan peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menjamin ketersediaan pangan bergizi dalam jangka Panjang</li> <li>•Memperbaiki dan memperkuat rantai distribusi pangan lokal agar lebih efisien dan menjangkau seluruh masyarakat, termasuk wilayah terpencil</li> <li>•Peningkatan Keamanan Pangan Lokal</li> </ul>

M

7

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
4.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, responsif, dan partisipatif, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan	4.1.1 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi dan Pelayanan Publik serta Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintegrasikan materi edukasi gizi berbasis sumber daya local dalam kurikulum- pendidikan formal dan non-formal sejak usia dini</li> <li>• Kampanye Sadar Gizi Berbasis Lokal</li> <li>• Memberikan edukasi dan pelatihan kepada keluarga, terutama ibu, tentang perencanaan menu sehat berbasis sumber daya lokal, pengolahan makanan yang mempertahankan nilai gizi, dan pemberian makan yang benar untuk semua kelompok usia</li> </ul>
			Digitalisasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja</li> <li>• Membentuk unit-unit pelayanan publik yang terintegrasi dan fokus pada kebutuhan pengguna layanan</li> <li>• Menerapkan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karir ASN yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan profesionalisme</li> <li>• Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik</li> <li>• Menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan, program, dan kinerja pemerintah</li> <li>• Pengembangan dan Implementasi <i>E-Government</i> Terintegrasi</li> <li>• Mengubah proses pelayanan publik dari manual menjadi digital untuk mempercepat waktu layanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan akurasi</li> <li>• Pemanfaatan Data dan Informasi untuk Pengambilan</li> <li>• Memastikan keamanan sistem informasi dan data pemerintah serta melindungi data pribadi pengguna layanan publik</li> <li>• Meningkatkan kemampuan digital ASN dalam mengoperasikan sistem <i>e-government</i> dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan layanan publik digital</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan</li> <li>•Menanamkan nilai-nilai profesionalisme, integritas, etika kerja, dan orientasi pelayanan kepada seluruh ASN</li> <li>•Menerapkan sistem penghargaan (<i>reward</i>) bagi ASN yang berprestasi dan memberikan sanksi (<i>punishment</i>) bagi yang tidak berkinerja baik atau melanggar aturan</li> <li>•Meningkatkan kesejahteraan ASN secara proporsional untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja</li> <li>•Mendorong budaya kerja yang adaptif, responsive terhadap perubahan, dan terbuka terhadap inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> </ul>
		Penataan dan Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Menganalisis dan menyederhanakan proses bisnis di seluruh OPD untuk mengurangi birokrasi, mempercepat layanan, dan meningkatkan efisiensi. Menyusun dan mengimplementasikan SOP yang jelas, terukur, dan mudah dipahami</li> <li>•Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Perangkat Daerah</li> <li>•Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya</li> <li>•Memperkuat peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan, audit, dan evaluasi terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan daerah. Meningkatkan independensi dan profesionalisme APIP</li> </ul>
4.1.2	Peningkatan Kualitas perencanaan serta Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penyusunan dan Penegakan Peraturan Keuangan Daerah yang Komprehensif</li> <li>•Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh organisasi perangkat daerah untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan</li> <li>•Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran</li> <li>•Penguatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)</li> </ul>

Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan 1
5.1	Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membuka keterisolasian wilayah	5.1.1	Peningkatan Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penguatan Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan yang Partisipatif dan Inklusif</li> <li>•Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Perencanaan</li> <li>•Harmonisasi dan Sinkronisasi Perencanaan di Berbagai Tingkat dan Sektor</li> <li>•Mengintegrasikan perspektif gender dan kebutuhan kelompok inklusi (penyandang disabilitas, anak-anak, lansia) dalam seluruh tahapan perencanaan</li> <li>•Peningkatan Kapasitas Perencana dan Penggunaan Teknologi dalam Perencanaan</li> <li>•Penguatan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan</li> <li>•Mengidentifikasi, memetakan, dan mengembangkan sumber-sumber air bersih potensial (air tanah, air permukaan, air hujan) dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan</li> <li>•Pembangunan dan Perbaikan Sistem Distribusi Air Bersih</li> <li>•Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sistem air bersih melalui pembentukan kelompok pengelola tingkat desa atau komunitas.</li> <li>•Menedukasi masyarakat tentang pentingnya penghematan air dan menerapkan teknologi hemat air dalam sistem distribusi.</li> <li>•Mendorong pembangunan dan penggunaan jamban sehat di setiap rumah tangga dan fasilitas umum</li> <li>•Merencanakan dan membangun sistem pengolahan air limbah domestik skala komunal atau individual yang aman dan ramah lingkungan</li> <li>•Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan (daur ulang, kompos), dan pembuangan akhir yang sesuai standar</li> </ul>

Arah Kebijakan 1			
Tujuan	Sasaran	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Peningkatan Kesadaran dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> <li>•Melakukan inventarisasi dan pemetaan secara berkala kondisi seluruh jaringan jalan dan jembatan di kabupaten untuk mengetahui tingkat kerusakan dan kebutuhan pemeliharaan</li> <li>•Menetapkan prioritas pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan tingkat kerusakan, volume lalu lintas, dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat</li> <li>•Melakukan pengawasan yang ketat terhadap kualitas pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk memastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan</li> <li>•Menyusun rencana induk pengembangan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan</li> <li>•Megalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar</li> <li>•Mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran dan teknis</li> <li>•Menjajaki kerjasama dengan sektor swasta melalui skema investasi atau CSR untuk pembangunan infrastruktur</li> <li>•Mengkaji potensi pembiayaan infrastruktur melalui obligasi daerah atau sumber-sumber lain yang memungkinkan</li> <li>•Melakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi jenis, lokasi, dan spesifikasi infrastruktur yang paling dibutuhkan untuk mendukung pengembangan setiap sektor unggulan</li> </ul>
		Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan yang Ada	
		Penguatan Tata Kelola dan Pembiayaan Infrastruktur Dasar	
	Pengembangan Infrastruktur Strategis Pendukung Sektor Unggulan	Identifikasi dan Prioritisasi Kebutuhan Infrastruktur Sektor Unggulan	5.1.2

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur berdasarkan potensi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan pembangunan antar wilayah</li> </ul>
			Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pendukung Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun dan memperbaiki jalan akses menuju sentra sentra produksi pertanian lahan kering untuk mempermudah transportasi input pertanian dan hasil panen</li> <li>• Pengembangan Infrastruktur Irigasi dan Pengelolaan Air</li> <li>• Menyediakan fasilitas penyimpanan, pengeringan, penggilingan, dan pengolahan hasil pertanian skala kelompok atau koperasi untuk meningkatkan nilai tambah produk</li> <li>• Membangun atau memperbaiki pasar komoditas pertanian dan memfasilitasi sistem distribusi yang efisien untuk menghubungkan petani dengan konsumen</li> </ul>
			Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pendukung Sektor Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan</li> <li>• Menyediakan fasilitas penyimpanan dingin (<i>cold storage</i>) di pelabuhan dan sentra produksi perikanan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan</li> <li>• Mendorong pembangunan unit pengolahan hasil perikanan skala kecil dan menengah untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan</li> </ul>
			Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pendukung Sektor Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan Peningkatan Aksesibilitas Destinasi Wisata</li> <li>• Membangun atau meningkatkan ketersediaan fasilitas akomodasi (<i>homestay</i>, penginapan), toilet umum yang bersih, pusat informasi wisata, area parkir, dan fasilitas penunjang lainnya di kawasan wisata</li> </ul>

4.

W

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Bahari</li> <li>• Menyediakan akses internet yang memadai di kawasan wisata dan mengembangkan platform digital untuk promosi pariwisata dan pemesanan layanan</li> <li>• Pelestarian Infrastruktur Berbasis Budaya Lokal</li> </ul>
			Pembangunan Infrastruktur Pendukung Sektor Kerajinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Pusat Promosi dan Penjualan Kerajinan</li> <li>• Membangun atau memperbaiki jalan akses menuju sentra sentra produksi kerajinan</li> <li>• Memfasilitasi pemasaran produk kerajinan melalui <i>platform e-commerce</i> dan media sosial</li> <li>• Penyediaan Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan Desain Kerajinan</li> </ul>
6.1	Mewujudkan penataan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan terhadap bencana untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan	6.1.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis</li> <li>• Mengembangkan rencana pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, meliputi konservasi sumber air, efisiensi penggunaan air, pengendalian pencemaran air, dan alokasi air yang adil</li> <li>• Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</li> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan</li> </ul>
			Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Sampah Terpadu</li> <li>• Pengendalian Pencemaran Air</li> <li>• Pengendalian Pencemaran Udara</li> <li>• Menerapkan mekanisme analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) secara ketat untuk setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan</li> <li>• Melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>

M

4

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan 1
6.1.2	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dan mengurangi risiko serta dampak bencana bagi masyarakat dan pembangunan.	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Identifikasi Kerentanan dan Risiko Perubahan Iklim</li> <li>•Pengembangan dan Implementasi Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim</li> <li>•Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim</li> </ul>
		Penguatan Tata Kelola Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana</li> <li>•Penyusunan dan Implementasi Rencana Kontinjensi Bencana</li> <li>•Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Perencanaan Pembangunan</li> <li>•Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Bencana</li> </ul>
		Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Edukasi dan Sosialisasi Kebencanaan</li> <li>•Pembentukan dan Pelatihan Relawan Bencana Tingkat Masyarakat</li> <li>•Pengembangan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat</li> <li>•Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan</li> </ul>
		Pengurangan Risiko Bencana (Mitigasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Melakukan pemetaan wilayah rawan bencana secara detail untuk berbagai jenis ancaman bencana</li> <li>•Menerapkan zonasi dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat di wilayah rawan bencana untuk meminimalkan risiko.</li> <li>•Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana</li> <li>•Konservasi Lingkungan untuk Mitigasi Bencana</li> <li>•Pengembangan Teknologi Mitigasi Bencana</li> </ul>

### 3.3.2. Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026-2030

Pentahapan ini dirancang untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Sabu Raijua secara sistematis dan berkelanjutan, memastikan setiap misi dapat terealisasi secara optimal.

Tabel 3.8 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua tahun 2026-2030

Misi	Pentahapan				
	Tahun 2026 (Tahap Konsolidasi)	Tahun 2027 (Tahap Percepatan)	Tahun 2028 (Tahap Pengembangan)	Tahun 2029 (Tahap Penguatan)	Tahun 2030 (Tahap Pemantapan)
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Perkuatan kapasitas internal dan membenahan tata Kelola dalam membangun fondasi kuat untuk kemandirian	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar untuk Akselerasi Menuju Pertumbuhan Inklusif	Pengembangan potensi wilayah secara lebih luas untuk mewujudkan Daya Saing Wilayah dan Peningkatan Kualitas Hidup	Sinergi dan Penguatan Ekosistem Pembangunan Inklusif Berkelanjutan	Pemantapan dan mengukuhkan posisi sebagai wilayah yang mandiri dan sejahtera
Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Bidang Ekonomi yang Difokuskan pada	Fokus pada pemetaan kebutuhan SDM, identifikasi potensi lokal, penguatan kapasitas dasar tenaga pendidik, serta penyusunan kurikulum pelatihan yang relevan. Ini juga mencakup konsolidasi data kependudukan terkait kualitas SDM	Implementasi program-program peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi profesi, dan beasiswa pendidikan. Percepatan akses terhadap pendidikan berkualitas di seluruh wilayah, termasuk pemerataan fasilitas dan tenaga pengajar	Pengembangan inovasi dalam pendidikan dan pelatihan, pembentukan pusat keunggulan SDM, serta fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta dan perguruan tinggi. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga ahli di berbagai bidang	Penguatan ekosistem pengembangan SDM melalui sinergi antar lembaga, evaluasi dampak program, dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi. Penguatan daya saing SDM lokal untuk mengisi peluang kerja di tingkat regional dan nasional	Pemantapan sistem pengembangan SDM yang adaptif terhadap perubahan global, memastikan ketersediaan SDM yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa depan, dan menjadikan Sabu Raijua sebagai daerah dengan SDM yang unggul
Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Bidang Ekonomi yang Difokuskan pada	Pemetaan potensi ekonomi lokal, identifikasi komoditas unggulan, penguatan data UMKM, serta penyusunan regulasi yang mendukung iklim	Percepatan hilirisasi produk unggulan, peningkatan akses UMKM terhadap modal dan pasar, pengembangan klaster ekonomi lokal, serta	Pengembangan ekowisata dan pariwisata berkelanjutan, diversifikasi sektor ekonomi, peningkatan nilai tambah produk	Penguatan jaringan pemasaran, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, pengembangan ekonomi digital, serta	Pemantapan struktur ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan pemerataan pendapatan, serta menjadikan Kabupaten Sabu Raijua sebagai

Misi	Pentahapan				
	Tahun 2026 (Tahap Konsolidasi)	Tahun 2027 (Tahap Percepatan)	Tahun 2028 (Tahap Pengembangan)	Tahun 2029 (Tahap Penguatan)	Tahun 2030 (Tahap Pemantapan)
Pembangunan Ekonomi Inklusif	investasi dan kemudahan berusaha. Konsolidasi data terkait akses keuangan inklusif	fasilitasi investasi yang berdampak positif pada masyarakat	pertanian dan perikanan, serta pengembangan ekonomi kreatif	fasilitasi kemitraan strategis antara pelaku usaha lokal dan investor	pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia
Misi 3: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Pemetaan fasilitas kesehatan dan sosial yang ada, identifikasi kesenjangan layanan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan pekerja sosial, serta konsolidasi data kesehatan dan sosial masyarakat	Percepatan pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan dasar, pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan akses masyarakat terhadap BPJS, serta percepatan program-program penanganan gizi buruk dan stunting	Pengembangan layanan kesehatan rujukan, peningkatan kualitas layanan di Puskesmas, pengembangan program kesehatan preventif dan promotif, serta pengembangan sistem rujukan sosial terpadu.	Penguatan sistem jaminan kesehatan dan sosial, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, serta pengembangan program rehabilitasi dan pemberdayaan bagi kelompok rentan	Pemantapan sistem pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang komprehensif, merata, dan berkualitas, memastikan seluruh masyarakat Sabu Raijua memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar ini
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien, serta Partisipatif	Konsolidasi data dan sistem informasi pemerintahan, evaluasi regulasi dan prosedur pelayanan publik, serta penguatan komitmen anti korupsi dan integritas aparatur	Percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan kualitas layanan perizinan, serta percepatan penanganan aduan masyarakat	Pengembangan inovasi layanan publik, penguatan kapasitas aparatur dalam hal transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan platform partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan	Penguatan pengawasan internal dan eksternal, peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, serta penguatan budaya kerja berintegritas dan profesional	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, menjadikan Kabupaten Sabu Raijua sebagai contoh <i>good governance</i> di tingkat daerah
Misi 5: Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan	Pemetaan kondisi infrastruktur eksisting (jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi), identifikasi area prioritas pembangunan, serta penyusunan master plan infrastruktur	Percepatan pembangunan dan rehabilitasi jalan desa dan kabupaten, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta percepatan elektrifikasi di wilayah	Pengembangan infrastruktur konektivitas (pelabuhan, dermaga, jaringan telekomunikasi), peningkatan kualitas jaringan irigasi, serta	Penguatan pemeliharaan infrastruktur, pengembangan smart infrastructure, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Pemantapan ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah, mendukung mobilitas, aksesibilitas, dan pertumbuhan ekonomi

Misi	Pentahapan				
	Tahun 2026 (Tahap Konsolidasi)	Tahun 2027 (Tahap Percepatan)	Tahun 2028 (Tahap Pengembangan)	Tahun 2029 (Tahap Penguatan)	Tahun 2030 (Tahap Pemantapan)
Berkualitas		terpencil	pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi	penunjang sektor pariwisata dan pertanian	masyarakat secara berkelanjutan
Misi 6: Penataan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Pemetaan potensi dan masalah lingkungan hidup, identifikasi area konservasi, penguatan regulasi, tenaga pengelolaan sampah dan limbah, serta konsolidasi data terkait sumber daya alam	Percepatan program rehabilitasi lahan kritis, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah, serta percepatan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan	Pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam, serta pengembalian Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan, penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjadi Kabupaten Sejahtera sebagai daerah yang lestari dan ramah lingkungan


Sumber: Hasil Olahan, 2025

### 3.3.3. Program-Program Prioritas Daerah

Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD secara umum diturunkan dari penelaahan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga dapat diperoleh *outcome*, indikator yang bermuara pada pemilihan program-program prioritas daerah yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Secara umum, kerangka perumusan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua dapat di lihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar : 3.1. Pemetaan Visi, Misi, dan Program Unggulan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029

Menunjuk amanat pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*quick wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Selain itu Juga Program Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua perlu diselarskan dengan 7 Pilar dan Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang Mtertuang dalam RPJMD. 

Dengan demikian, pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati, yang menjabarkan makna Sapta Cita dengan 6 Misi, dan Program Unggulan yang kemudian mengerucut pada pemilihan program-program prioritas pembangunan daerah. Pemetaan Misi dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Pemetaan Misi, Sarai Cita dan Program Unggulan

Visi	Misi	Sarai Cita	Program Unggulan
"Sabu Raijua Bangkit, Maju, Sejahtera dan Mandiri"	1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Sarai pintar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian beasiswa dan perlengkapan siswa dari keluarga kurang mampu.</li> <li>• Program wajib belajar 12 tahun.</li> <li>• Pelayanan transportasi gratis bagi anak sekolah.</li> <li>• Meningkatkan kesejahteraan guru/tenaga pengajar baik negeri maupun swasta.</li> <li>• Pembangunan dan Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah</li> </ul>
		Sarai berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan mutu pendidikan prasekolah, SD, SLTP, SLTA.</li> <li>• Pelatihan manajemen tata kelola sekolah mutu/unggul.</li> <li>• Pembentukan Sekolah Unggul Tingkat PAUD/TK, SD</li> </ul>
	2 Meningkatkan daya saing Bidang Ekonomi yang difokuskan pada pembangunan Ekonomi Inklusif	Sarai berdaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi padi/palawija, buah-buahan dan sayuran.</li> <li>• Bantuan dan Optimalisasi Taraktor Roda 4</li> <li>• Bantuan pompa air</li> <li>• Peningkatan produksi peternakan (sapi, kerbau, kuda, babi, domba, kambing, unggas).</li> <li>• Peningkatan produksi perikanan laut, tambak garam, tambak udang, budidaya rumput laut dan tambak ikan bandeng.</li> <li>• Bantuan Kapal Penangkap ikan</li> <li>• Penataan wilayah/lokasi perdagangan.</li> <li>• Bantuan modal Usaha bagi UMKM.</li> <li>• Pembentukan Home Industri gula semut ditiap Kecamatan</li> <li>• Penguatan manajemen pengelolaan usaha UMKM dan digitalisasi pemasaran (e-commerce).</li> </ul>
		Sarai Melayani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan jalur distribusi barang/jasa.</li> <li>• Penataan kelembagaan perdagangan termasuk koperasi.</li> <li>• Peningkatan kemampuan modal usaha bagi pedagang ekonomi makro/mikro.</li> <li>• Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD RAI HAWU) sebagai roda penggerak peningkatan Pendaratan Asli Daerah</li> </ul>

M

o.

Visi	Misi	Sarai Cita	Program Unggulan
	3 Meningkatkan pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Sarai Sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian insentif yang layak bagi tenaga dokter spesialis dasar.</li> <li>• Revitalisasi sarana pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang terakreditasi.</li> <li>• Penanganan stunting dengan Pemberian PMT bagi ibu hamil KEK dan bayi baru lahir 1000 hari pertama kehidupan.</li> <li>• Beasiswa bagi tenaga dokter spesialis.</li> </ul>
		Sarai Berdaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.</li> <li>• Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial.</li> </ul>
	4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta partisipatif	Sarai Melayani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan birokrasi, menuju birokrasi yang professional dengan menerapkan asas kaya fungsi dan miskin struktur serta taat hukum.</li> <li>• Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.</li> <li>• Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah, Tenaga Kontrak/Honorer daerah dari tingkat kabupaten s/d kecamatan dan desa/kelurahan agar mampu bekerja dengan jujur sehingga terciptanya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bebas KKN.</li> <li>• Penyediaan informasi dan digitalisasi pengelolaan pemerintahan dan layanan publik.</li> <li>• Menyediakan ruang dan waktu untuk pengaduan Masyarakat secara langsung</li> </ul>
	5 Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas	Sarai Terang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas penerangan jalan maupun penerangan rumah tangga dengan menciptakan teknologi listrik berbasis tenaga surya/angin.</li> </ul>
		Sarai Karya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata dan sarana pendukung guna memudahkan pengunjung mengakses objek wisata.</li> <li>• Bantuan rehabilitasi rumah layak huni tanpa merubah kearifan lokal</li> <li>• Meningkatkan jumlah dan kualitas jalan, jembatan, embung dan irigasi pertanian guna meningkatkan produksi, dan membuka isolasi serta mempermudah akses barang dari kantong produksi ke pasar.</li> </ul>

M

ti

Visi	Misi	Sarai Cita	Program Unggulan	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas sarana transportasi laut dari dan ke Raijua.</li> </ul>	
		Sarai Melayani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan <i>shooping center</i> (pusat perbelanjaan) ekonomi kreatif, UMKM dan Seni budaya.</li> <li>4) Pembangunan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).</li> <li>• Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)</li> <li>• Pengadaan Sumur Bor</li> <li>• Pembangunan <i>Cold Storage</i></li> <li>• Pembangunan SPBU Sabu Timur dan Raijua.</li> <li>• Percepatan Pembangunan Bandara Udara Eilode.</li> <li>• Pembangunan Gedung kantor Pemerintahan</li> </ul>	
		Sarai Berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan infrastruktur Pusat seni, budaya untuk pusat pengembangan kreatifitas minat kawula muda.</li> <li>• Penyelesaian Gedung Olah Raga (GOR) yang mangkrak</li> </ul>	
	6	Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Sarai Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reboisasi, terasering dan penutupan lahan-lahan kritis dan pemulihan keanekaragaman hayati.</li> <li>• Gerakan Sarai Hijau.</li> <li>• Gerakan tanam air (1 rumah/1 biopori).</li> </ul>
			Sarai Bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian, pengolahan daur ulang sampah</li> </ul>

Sumber: Hasil Olahan, 2025

Tabel 3.10 Program-Program Prioritas Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025- 2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
<p>Visi : "SABU RAIJUA BANGKIT, MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI"</p> <p>1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing</p>	<p>1.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia cerdas, terampil, berkarakter, berbudaya, dan berdaya saing, yang mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indek Pembangunan Manusia (IPM)</li> </ul>		
		<p>1.1.1 Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan untuk penciptaan sekolah unggulan yang Berbasis Kearifan Lokal melalui pengembangan literasi</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angka Harapan Lama Sekolah</li> <li>• Rata-rata lama sekolah</li> <li>• Indeks Literasi</li> <li>• Indeks Numerasi</li> </ul>		
			<p>Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase Anak Usia 4-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)</li> <li>• Presentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekola Dasar (APS)</li> </ul>	<p>Program Pengelolaan Pendidikan</p>	



Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan 'si P (APS)</li> <li>Persentase <sup>SM</sup>Satuan PAUD yang melaksanakan layanan HI</li> </ul>		
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal</li> </ul>	Program Pengembangan Kurikulum	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Pemerataan Guru</li> <li>Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik M<sup>PAUD</sup> - SD - SMP</li> </ol>	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	•
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	•

M

t

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	•
	1.1.2	Meningkatnya Pemberdayaan Pemuda dan Penghimpunan Kepramukaan Berbasis Potensi Lokal		Indeks Pembanguan Pemuda		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	•
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Program Pembinaan Sejarah	•
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	

M

2

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
2 Meningkatkan daya saing Bidang Ekonomi yang difokuskan pada pembangunan Ekonomi Inklusif	2.1 Mewujudkan daya saing bidang ekonomi yang kuat dan berkelanjutan melalui pembangunan ekonomi inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, memanfaatkan potensi unggulan daerah secara optimal, serta mengurangi ketimpangan ekonomi			Laju Pertumbuhan Ekonomi		
	2.1.1	Meningkatnya Pengembangan Sektor Unggulan Ekonomi yang Berbasis Masyarakat		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB PDRB Per kapita Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kontribusi UMKM Terhadap PDRB		
			Meningkatnya produksi Perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Lkan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	

M

4

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan</li> <li>• Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</li> <li>• Peningkatan Produksi Hortikultura</li> </ul>	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

M

ti

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			barang yang efisien, merata dan terintegrasi			
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Pengembangan Ekspor	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Meningkatnya Realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	program perencanaan dan pembangunan industri	
			Meningkatnya Kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	

M

2

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
	2.1.2	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi		Persentase meningkatnya koperasi berkeaktifan Persentase UMKM aktif		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif dan berkinerja baik	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Meningkatnya Produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase usaha kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal</li> <li>Pertumbuhan Wirusaha</li> </ul>	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	

5

W

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Penguatan Badan Hukum Koperasi	
		2.1.3 Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dan Bertanggung Jawab	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Investasi		
			Meningkatnya Promosi pelayanan modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	Program Pengelolaan Dan Informasi Penanaman Modal	
					Program Kerja Sama Penanaman Modal	

2

M

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
		Terwujudnya Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)		
	2.1.4		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan</li> <li>Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan</li> </ul>	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan KunjunganWisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Meningkatnya Jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
			Meningkatnya Kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	

7

W

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
		2.1.5 Meningkatkan kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial	
3 Meningkatkan pelayanan kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	3.1 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial inklusi dan pemberdayaan masyarakat rentan			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penduduk Miskin</li> <li>• Prevalensi Stunting</li> </ul>		

M

2

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
		Meningkatnya Akses dan Mutu layanan Kesehatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Usia Harapan Hidup</li> <li>Angka kematian ibu</li> <li>Angka Kematian bayi</li> <li>Total Fertility Rate (TFR)</li> <li>Angka Kematian Ibu (AKI)</li> <li>Angka Kematian Balita</li> </ul>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat			
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Sosial inklusi		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Ketimpangan Gender</li> <li>Indeks Pembangunan Gender</li> <li>Indeks Desa Membangun</li> <li>Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)</li> <li>Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>Gini Ratio (0-1)</li> </ul>		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Program Penataan Desa	
			Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya</li> <li>• Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa</li> </ul>	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</li> <li>• Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat</li> </ul>	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial</li> <li>• Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan</li> </ul>	Program Pemberdayaan Sosial	
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti</li> <li>• Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti</li> <li>• Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti</li> </ul>	Program Rehabilitasi Sosial	

8.

M

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar</li> <li>• Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi</li> </ul>	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)</li> <li>• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</li> </ul>	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	

TE

M

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	
	3.1.3	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pemenuhan Gizi Berbasis Sumber Daya Lokal		Prevalensi stunting		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta partisipatif	4.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, responsif, dan partisipatif, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan			Indeks Reformasi Birokrasi		
	4.1.1	Meningkatnya Kualitas perencanaan dan pengelolaan kebijakan pembangunan daerah		Persentase ketercapaian target kinerja RPJMD (%)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD</li> <li>Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD</li> </ul>	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Outcomes: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> </ul>	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

M

6

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			infrastruktur dan kewilayahan dan bidang perekonomian dan SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA</li> </ul>		
		4.1.2 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</li> <li>Opini BPK</li> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>Indeks SPBE</li> <li>Indeks keterbukaan informasi publik</li> </ul>		
			Meningkatnya tata kelola Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase penyampaian dan penetapan Dokumen APBD Murni serta Perubahan tepat waktu</li> <li>Persentase Penatausahaan keuangan secara tepat waktu sesuai ketentuan perundangan</li> <li>Persentase penyampaian dan penetapan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten secara tepat waktu</li> </ul>	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Program Penataan Organisasi	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas Kerja Sama Daerah</li> <li>Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</li> </ul>	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan	Tingkat Kematangan UKPBJ	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	



Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			barang dan jasa meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Program Kepegawaian Daerah	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li> <li>• Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</li> </ul>	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah	Persentase Tingkat Keuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			daerah			
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Pemerintahan Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Statistik (IPS) Pembangunan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Pengamanan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	
			Meningkatnya tata kelola arsip di amis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	

M

ti

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase Masyarakat kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasaan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasaan Pemerintahan Desa	
5 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas	5.1 Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membuka keterisolasian wilayah			Indeks daya seing Daerah		
	5.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dasar		a. persentase rumah tangga dengan akses air bersih layak b. persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
				c. persentase jalan kabupatèn dalam kondisi baik dan sedang d. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Meningkatnya Akses masyarakat Terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Meningkatnya Kualitas infrastruktur permukiman		Program Pengembangan Permukiman	
			Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	
			Terperuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	

M

26

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah			
			Meningkatnya Kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Frasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	
	5.1.2	Pengembangan Infrastruktur Strategis Pendukung Sektor Unggulan		Indeks konektivitas		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	
			Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konektivitas Darat</li> <li>Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang Terhadap Kondisi Ideal</li> </ul>	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
6 Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	6.1 Meningkatnya penataan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan guna meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
	6.1.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks kualitas Air</li> <li>• Indeks kualitas udara</li> </ul>	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

M

ti

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan Izin lingkungan	program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	•
	6.1.2	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dan mengurangi risiko serta dampak bencana bagi masyarakat dan pembangunan.		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap anjir dan meningkatnya		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Ourcomes	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Ket
			akses masyarakat terhadap irigasi			
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</li> <li>Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana</li> <li>Persentase Penanganan Pasca Bencana</li> </ul>	Program Penanggulangan Bencana	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran</li> </ul>	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana</li> </ul>	Program penanganan bencana	
			Meningkatnya Layanan persampahan regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional</li> </ul>	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	

Sumber: Hasil Olahan, 2025 

### 3.4. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pada sub bab ini secara umum akan menggambarkan tentang arahan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Sabu Raijua pada 5 (lima) tahun mendatang dan arah kebijakan kewilayahan RPJMN 2025-2029 di wilayah Bali-Nusa Tenggara yang memberikan dampak bagi pertumbuhan wilayah di Kabupaten Sabu Raijua.

Dimana, penelaahan terhadap pengembangan Pusat-pusat pertumbuhan dilakukan dengan mencermati beberapa dokumen penting baik pada level nasional, provinsi maupun kabupaten yang memberikan arahan di dalam perencanaan spasial dan a-spasial yang berpengaruh pada pembangunan jangka panjang di Kabupaten Sabu Raijua.

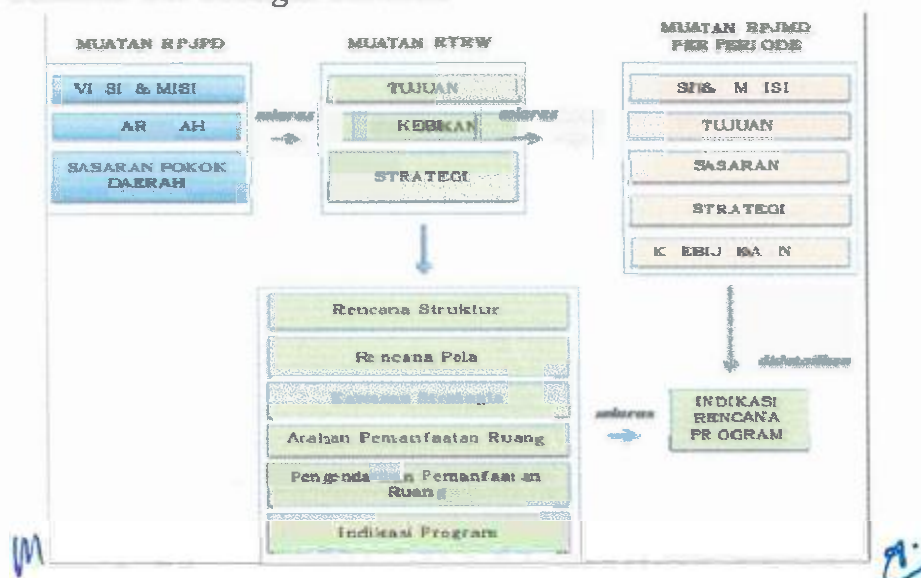
Dokumen – dokumen yang dimaksudkan memiliki beberapa sifat sebagai induk dari perencanaan, fungsi operasional dan koordinasi keruangan maupun program antara lain:

1. Arah Kebijakan Kewilayahan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Rencana Tata Ruang Perbatasan Negara (RTR Perbatasan Negara) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Arahan Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi NTT Tahun 2014-2034 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2014;
5. Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2022-2043; dan
6. Revisi RTRW Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2041.

Kemudian, secara umum juga dilakukan penilaian keselarasan muatan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua dengan muatan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan pola ruang pada sektor unggulan/potensi daerah;
2. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan struktur ruang mendukung pertumbuhan sektor unggulan/potensi daerah;
3. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan kawasan strategis nasional dan daerah (fokus pada pengembangan kawasan strategis yang mendukung ekonomi, sosial budaya, daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan sebagainya).

Penyelarasan muatan ini terintegrasi ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029. Penyelarasan muatan ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut.



### Gambar 3.2 Penyelarasan Muatan RTRW dengan Muatan RPJPD dan RPJMD

#### 3.4.1 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025- 2045

Indonesia Emas 2045 tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Nusantara dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah dan kelompok pendapatan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan.

Arah pembangunan wilayah untuk Nusa Tenggara Timur selama 20 tahun ke depan dikemas menjadi satu kesatuan sebagai “Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara” yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke wilayah timur Indonesia. Pembangunan ekosistem kepariwisataan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas antara lain:

Pertama:

- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata;
- Sentra - sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta Sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan;
- Optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, pemanfaatan potensi lokal (rantai pasok) dan nilai investasi melalui PMA dan PMDN dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedua: pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia SDM lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara ke depan; khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata, serta didukung oleh infrastruktur pelayanan dasar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ketiga: peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antar Wilayah Bali-Nusa Tenggara yang menjadi *backbone* pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Keempat: penguatan tata kelola pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kepemimpinan unggul dan masyarakat sipil yang partisipatif untuk menopang percepatan pembangunan wilayah, serta upaya penguatan pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan stabilitas wilayah dan menjadikan NTT sebagai kawasan yang berdaya saing ekonomi tinggi


Kelima: peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan.

#### 3.4.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2045

##### 3.4.2.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kabupaten Sabu Raijua dalam RTRWN

Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu Kabupaten yang memegang peranan penting sebagai Kawasan Perbatasan Negara dan merupakan bagian gugusan wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, arahan pengembangan wilayah di Kabupaten Sabu Raijua meliputi arah pembangunan struktur ruang wilayah nasional terfokus pada Pelabuhan sebagai simpul transportasi nasional melalui tahapan pengembangan pemantapan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan utama di Seba, Jalan sebagai simpul jaringan jalan nasional melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional antara lain Bolou-Seba dan Seba-Mesara di Kabupaten Sabu Raijua; dan Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik melalui tahapan pengembangan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Sabu Raijua.

Sedangkan, Pola Ruang Wilayah Nasional di Kabupaten Sabu Raijua terfokus pada Kawasan Lindung Nasional yaitu tahapan pengembangan berupa Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional di Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya; 

Kawasan Andalan yaitu tahapan pengembangan berupa Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Pariwisata di Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya dengan Fungsi Pariwisata dan Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan di Kawasan Andalan Laut Sawu dan Sekitarnya dengan Fungsi Perikanan.

Sementara itu, arah pengembangan Kawasan Strategis Nasional berupa Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan yaitu Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan yang merupakan bagian dari Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### 3.4.2.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Sabu Raijua dalam RTR Perbatasan Negara


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu kabupaten dari 12 (dua belas) Kabupaten yang merupakan Kabupaten perbatasan di darat dan perbatasan di laut dan memiliki pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Arah-an arah umum terkait Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT khususnya Kabupaten Sabu Raijua dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Cakupan Kawasan Perbatasan Negara yaitu Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut yang meliputi 6 (enam) kecamatan.
2. Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara yaitu Strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara yang menegaskan titik-titik garis pangkal kepulauan di Pulau -pulau Kecil Terluar (PPKT) yang meliputi Pulau Dana dan Pulau Sabu.
3. Sistem Jaringan Transportasi meliputi pelabuhan dan Bandar udara.
4. Sistem Jaringan Energi meliputi depo minyak, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid.
5. Sistem Jaringan Telekomunikasi berupa Jaringan satelit.
6. Sistem Jaringan Sumber Daya Air meliputi Sumber air permukaan pada danau, Embung, Sistem jaringan irigasi dan system pengamanan pantai.
7. Sistem Jaringan Prasarana Permukiman terdiri dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem pengelolaan sampah.
8. Rencana Peruntukan Kawasan Lindung meliputi Zona Lindung 1, 2, 3, 4 dan Zona Lindung 5 dengan peruntukannya masing - masing.
9. Rencana Peruntukan Kawasan Budi Daya meliputi Zona Budidaya 1,2,3,4,5 dan Zona Budidaya 6 dengan peruntukannya masing - masing.

Arah-an rencana kawasan perbatasan Negara khususnya di Kabupaten Sabu Raijua dan lokasi- lokasinya dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 dan Lampirannya.

#### 3.4.2.3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kabupaten Sabu Raijua pada TNP Laut Sawudan sekitarnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 - 2034 menjelaskan tentang Perairan Laut Sawu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir barat Timor Leste.

Bahwa Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu wilayah dilingkup kawasan TNP Laut Sawu yang merupakan koridor migrasi lebih dari 18 (delapan belas) spesies mamalia laut (paus, lumba-lumba dan dugong), dengan di dukung bentang laut dengan transisi kedalaman dari perairan dangkal ke perairan dalam hanya beberapa ratus meter saja dari pantai. 

Dengan demikian, strategi utama pengelolaan jangka panjang TNP Laut Sawu dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu:

1. Strategi Penguatan Kelembagaan;
2. Strategi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan;
3. Strategi Penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya.

Adapun arahan pengelolaan dan zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sekitarnya di Provinsi NTT yang mencakup wilayah Kabupaten Sabu Raijua yang berada pada:

1. Zona Inti pada Pulau Dana-Desa Kolorae dan Perairan Utara Pulau Raijua.
2. Zona Perikanan Berkelanjutan - Sub Zona Perikanan Berkelanjutan Tradisional (Perairan Sabu Raijua, Perairan antara Sumba Timur dan Sabu Raijua dan Perairan sebelah Barat-Barat Daya Pulau Dana Sabu Raijua).
3. Zona Perikanan Berkelanjutan - Sub Zona Perlindungan Setasea pada Perairan Sabu Raijua dan sekitarnya.
4. Zona Pemanfaatan pada Desa Bolua, Molie, Lobodei, Deme, Ledetalo, Halapaji, Eilogo, Waduwala, Kujiratu, dan Bodae.
5. Zona Lain-Sub Zona Kearifan Lokal (Panadahi) meliputi Desa Ledeke dan Ledeeunu.
6. Zona lain-Sub Zona Pemanfaatan Pariwisata dan Budaya meliputi Desa Ledetalo, Halapaji, Eilogo dan Waduwala.

Melihat kedudukan strategis Kabupaten Sabu Raijua pada zonasi TNP Laut Sawu, maka upaya pengembangan wilayah pesisir dan laut perlu diperhatikan untuk perencanaan 20 (dua puluh) ke depan.

#### 3.4.2.4. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kabupaten Sabu Raijua dalam Revisi RTRWP NTT Tahun 2010-2030


Arah pengembangan Kabupaten Sabu Raijua di tingkat Provinsi dapat dilihat pada analisa arahan pengembangan khususnya dititik beratkan pada Struktur ruang dan Pola Ruang meliputi:

- a. Arah pengembangan Struktur Ruang Provinsi di Kabupaten Sabu Raijua
  1. Pengembangan sistem pusat permukiman di Kota Seba sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  2. Rencana Satuan Wilayah Pengembangan (WP) Pulau Timor dengan Pusat Pengembangan Kupang dengan wilayah pengaruh meliputi Sabu berupa pusat pemerintahan, perikanan, perindustrian, perkebunan, pariwisata, pendidikan, Pertanian tanaman pangan, kehutanan, perdagangan dan peternakan;
  3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi meliputi sistem jaringan jalan provinsi yang merupakan kewenangan Provinsi NTT berupa Jalan kolektor primer dua (JKP-2);
  4. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, danau dan Penyeberangan berupa pengembangan Lintas penyeberangan antar Kabupaten di Provinsi NTT termasuk Sabu dan Seba, dan Pengembangan Pelabuhan penyeberangan di Pulau NTT yaitu Pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua dan Pelabuhan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
  5. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi laut berupa pengembangan Pelabuhan Laut dan Alur Pelayaran. Untuk Pelabuhan Laut, arah pengembangan pelabuhan pada Pelabuhan Pengumpul yang memiliki jangkauan antar provinsi di NTT yaitu Pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua. Sedangkan, pengembangan Pelabuhan Pengumpan meliputi Pelabuhan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua dan Pelabuhan Bui di Kabupaten Sabu Raijua. Sementara untuk Rencana pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan diarahkan ke Pelabuhan Perikanan Ledeeanu, Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian, pengembangan Alur pelayaran umum dan perlintasan di Provinsi NTT meliputi 5 (lima) alur pelayaran termasuk Sabu dan Raijua;

6. Arah pengembangan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus, rencana pengembangan di Kabupaten Sabu Raijua adalah Rencana pengembangan bandar udara pengumpan di Provinsi NTT meliputi Bandar Udara Terdamu/Sabu Baru di Sabu, Kabupaten Sabu Raijua, Bandar Udara Elode di Kabupaten Sabu Raijua dan Bandar Udara Kolorae di Kabupaten Sabu Raijua;
  7. Rencana pengembangan Sistem Jaringan Energi terdiri dari rencana pengembangan Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa depo bahan bakar di Depo Sabu (Sabu Raijua) dan rencana Rencana pengembangan sistem jaringan energi diarahkan pada upaya meningkatkan pelayanan secara lebih merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di lokasi PLTD Raijua (dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di lokasi PLTS Raijua dan PLTS Sabu;
  8. Rencana Pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan tetap dan jaringan bergerak, dimana jaringan tetap diarahkan melintasi beberapa kabupaten antara lain Jaringan tetap yang melintasi Kabupaten Sabu Raijua - Kabupaten Rote Ndao dan Jaringan tetap yang melintasi Kabupaten Sumba Timur - Kabupaten Sabu Raijua. Kemudian, Infrastruktur jaringan telekomunikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu BMH Sabu. Sedangkan, untuk pengembangan Jaringan bergerak di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas jaringan bergerak terrestrial dan jaringan bergerak seluler meliputi Jaringan bergerak terrestrial di Kota Seba dan Jaringan bergerak seluler Menara Base transceiver Station (BTS) di BTS Bolua, BTS Ledeke, BTS Tanajawa, BTS Raenyale, BTS Delo, BTS Raeloro, BTS Bolou, BTS Eimadake;
  9. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana lainnya berupa Rencana Sistem jaringan persampahan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berlokasi di TPA Seba.
- b. Arah pengembangan Pola Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Sabu Raijua

Arah Pengembangan Kawasan Lindung di Kabupaten Sabu Raijua adalah untuk Kawasan Perlindungan Setempat meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal. Adapun Kawasan Perlindungan setempat yang terdapat di Propinsi NTT, meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar atau waduk dan kawasan sempadan jurang dan Kawasan Ekosistem Mangrove.

Sedangkan untuk pengembangan Kawasan Budidaya diarahkan untuk Kawasan pertanian yang dikembangkan berdasarkan pada kewan pertanian yang telah ada serta kecocokan lahan berdasarkan kriteria untuk pertanian, dan Kawasan Perkebunan meliputi Kopi, Kemiri, Kapuk, Jarak, Vanili dan Pinang. Sedangkan untuk Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi dengan potensi pada Gas alam dan minyak. Potensi minyak bumi terdapat di Blok Sawu daerah Kabupaten Sabu Raijua yang mana masih diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana kualitas bahan tambang yang ada. Kemudian untuk Kawasan Pariwisata berupa Kawasan yang termasuk jenis pariwisata budaya dan ritual keagamaan di Sabu Raijua terutama di Kampung Namata. Sedangkan, untuk Kawasan Kellaba Maja lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan sebagai pendukung Kawasan Strategis Provinsi NTT dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi. Selanjutnya, untuk mendukung Kabupaten Sabu Raijua sebagai Kawasan Pertahanan dan Keamanan melalui peningkatan

Mfasilitas Kepolisian Resor (Polres). 

### 3.4.3. Arah Pengembangan Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Revisi RTRWK Sabu Raijua Tahun 2021-2041

Dalam konteks pengembangan wilayah untuk perencanaan jangka panjang, analisis terhadap penataan ruang sangat diperlukan karena kebutuhan wilayah Kabupaten Sabu Raijua untuk berkembang terutama karena ketersediaan sumber daya alam dan adanya kebutuhan masyarakat yang makin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta potensi – potensi resiko bencana.


Upaya pengembangan wilayah Sabu Raijua dimaksudkan untuk meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Secara ringkas, perencanaan program utama pada Struktur dan Pola Ruang serta Kawasan Strategis Kabupaten Sabu Raijua dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. 10 Ringkasan Progam Utama pada Struktur, Pola Ruang dan Kawasan Strategis pada Revisi RTRW Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2041

A. Struktur Ruang	B. Pola Ruang	C. Kawasan Strategis
1. Rencana Sistem Perkotaan	1. Kawasan Peruntukan Lindung	a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
1.1 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	a. Penetapan dan Pengendalian Luasan Kawasan Lindung Hutan	b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
1.2 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	b. Peningkatan Fungsi Kawasan Lindung	c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
1.3 Pusat Kegiatan Kawasan (PKK)	c. Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Lindung	
2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi	d. Pemantapan Fungsi Konservasi Kawasan Lindung	
2.1 Infrastruktur Jalan	e. Penyediaan Ruang Ketahanan Pangan	
2.2 Infrastruktur Perhubungan	f. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Mitigasi Bencana	
3. Rencana Sistem Jaringan Energi	g. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau.	
3. Infrastruktur Energi		
4. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi	2. Kawasan Budidaya	
4. Infrastruktur Telekomunikasi	a. Industri	
5. Rencana Sistem Jaringan Infrastruktur Permukiman	b. Perdagangan	
5.1 Infrastruktur Permukiman	c. Pariwisata	
5.2 Infrastruktur Sumber Daya Air	d. Penggunaan Lahan Lainnya.	

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2041, 2023 (diolah)

Dengan demikian, perencanaan untuk Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis yang dapat dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 sebagai berikut. 

### 3.4.3.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kabupaten Sabu Raijua

#### a. Arah Pengembangan Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan akan dibagi menjadi 3 (tiga) Pusat kegiatan yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Kawasan (PKK). Adapun arah pengembangan PKW berfokus pada pembangunan mengarah pada Pembangunan Pelabuhan Udara di Desa Eilode dan Desa Kolorae, Peningkatan Struktur Jaringan Jalan di seluruh kecamatan, Peningkatan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan berlokasi di Kelurahan Limaggu dan Kelurahan Mebba, Pembangunan Kawasan Pertahanan Keamanan di Perkotaan Seba dan Pulau Dana.

Sedangkan, arah pengembangan PKL dibagi ke dalam setiap wilayah kecamatan yang ditujukan untuk peningkatan layanan pendidikan, dan pengembangan wisata skala lokal. Kemudian, di Kecamatan Sabu Barat di arahkan untuk Pengembangan Kawasan Perkantoran, Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Regional, Pengembangan Rumah Sakit Tipe B serta Pembangunan pasar induk regional. Sedangkan, Pengembangan Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Raijua.

Selanjutnya, arah pengembangan pada PKK adalah di seluruh kecamatan untuk Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan, Peningkatan infrastruktur dasar permukiman, Pengembangan Desa Mandiri, Pembangunan fasilitas jasa/perdagangan/keuangan dan Pendataan dan Penetapan Kawasan Adat.

#### b. Arah pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Jalan dan Perhubungan

Pengembangan infrastruktur jalan lebih diarahkan pada pembangunan ruas jalan baru dan peningkatan status jalan, Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan serta Pengembangan Sistem Informasi Infrastruktur Jalan lebih diarahkan untuk peningkatan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Sabu Raijua untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kota kecamatan, pusat pertumbuhan kawasan ekonomi, kawasan peruntukan perindustrian, kawasan pariwisata, perdagangan jasa, pertanian dan perkebunan, perkantoran regional dan bandara. Adapun ruas jalan yang diprioritaskan antara lain Pembangunan Jalan Lingkar Luar Seba-Sabu Timur (Seba-Sabu Timur), Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Baru: Desa Roboaba-Desa Eimadake (Desa Roboaba - Desa Eimadake), Peningkatan status jalan Desa Ledekapaka-Desa Teriwu (Desa Ledekapaka-Desa Teriwu), Peningkatan status jalan Desa Jadu-Desa Lobodei (Desa Jadu-Desa Lobodei), Peningkatan status jalan Desa Jadu-Desa Deme (Desa Jadu-Desa Deme), Peningkatan status jalan Desa Eilode-Keduru (Desa Eilode-Keduru), Peningkatan status jalan Seba-Ege (Seba-Ege), Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan, Pengembangan Sistem Informasi Infrastruktur Jalan di seluruh kecamatan.

Sedangkan, dalam rangka mendukung aksesibilitas dan pariwisata, peningkatan skala pelayanan, arah pengembangan perhubungan difokuskan pada Pengembangan pelabuhan, pembangunan bandara dan pengembangan terminal penumpang Kelas C. Untuk Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal pada Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Raijua dan Kecamatan Sabu Liae dan Pengembangan pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota dan pelabuhan khusus penumpang di Kelurahan Limaggu dan Kelurahan Mebba serta pembangunann kawasan pelabuhan udara internasional baru di Desa Eilode Kecamatan Sabu Tengah dan Peningkatan skala pelayanan Bandar Udara di Desa Kolorae Kecamatan Raijua. Sedangkan pengembangan Terminal Pengumpan Kelas C di Kecamatan Sabu Barat dan studi penetapan lokasi

terminal di seluruh kecamatan. 

c. Arah pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Telekomunikasi

Dalam upaya untuk mendukung pusat – pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan kawasan pariwisata dan sektor perdagangan dan jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Sektor Informal dan Kawasan Pertambangan termasuk kawasan permukiman, maka Pengembangan jaringan energi di Kabupaten Sabu Raijua mengarah pada energi diesel, air, energi terbarukan (EBT) dan peningkatan jaringan listrik. Begitu juga untuk jaringan telekomunikasi diarahkan untuk Peningkatan pelayanan system jaringan mikro digital perkotaan, Pengembangan jaringan multimedia dan Kajian Penempatan BTS sehingga jangkauan sinyal dari BTS tersebut dapat menjangkau seluruh pengguna.

d. Arah pengembangan Sistem Infrastruktur Permukiman dan Sumber Daya Air

Untuk pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sabu Raijua diarahkan pada dua jenis yaitu kawasan permukiman perkotaan pada setiap ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten dengan luasan sekitar 6.024,32 Ha yang bervariasi luasannya di setiap Kecamatan dan kawasan permukiman perdesaan yang diarahkan di perdesaan dengan luasan yang bervariasi hingga mencapai 2.814,87 Ha.

Dimana, strategi pengembangan kawasan permukiman adalah berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan dampak bencana longsor dan gerakan tanah, banjir, gelombang pasang, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, abrasi, pengembangan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan teknologi hemat air dan pengendalian perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan kolektor primer.

Adapun sistem jaringan infrastruktur permukiman yang direncanakan 20 (dua puluh) tahun ke depan meliputi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP), Peningkatan Pengelolaan Persampahan, Penataan Kawasan Permukiman, Sistem Database Perumahan Tidak Layak Huni dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi berlokasi di seluruh Kabupaten, Pembangunan TPA Regional berlokasi di Kecamatan Sabu Tengah dan Kecamatan Hawu Mehara, Pengembangan hunian vertikal, Kawasan Perkotaan Kecamatan.

Sedangkan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum dan air irigasi untuk kebutuhan pertanian, peternakan dan industri. Dengan demikian, rencana pengembangan diseluruh kecamatan berupa Pembangunan Embung, Rehabilitasi jaringan irigasi, dan studi air tanah dalam.



### 3.4.3.2 Pengembangan Pola Ruang Kabupaten Sabu Raijua

Adapun arah penetapan Pengembangan Pola Ruang Kabupaten Sabu Raijua mencakup Kawasan Peruntukan Lindung dan Kawasan Budidaya. Untuk Kawasan peruntukan lindung meliputi rencana Penetapan dan Pengendalian Luasan Kawasan Lindung Hutan, Peningkatan Fungsi Kawasan Lindung, Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Lindung, Pemantapan Fungsi Konservasi Kawasan Lindung, Penyediaan Ruang Ketahanan Pangan, Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Mitigasi Bencana, dan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau.

- Rencana Penetapan dan Pengendalian Luasan Kawasan Lindung Hutan

Dengan arahan umum rencana mencakup Perubahan kawasan-kawasan hutan lindung di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Liae, dan Kecamatan Hawu Mehara.

- Peningkatan Fungsi Kawasan Lindung.

Rencana peningkatan Kawasan Lindung dilakukan melalui Optimalisasi pengelolaan lahan di kawasan rawan bencana, Optimalisasi penanganan kawasan sekitar mata air dan sempa dan pantai di seluruh Kecamatan.  

- Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Lindung.  
Arahan Rehabilitasi lahan di sekitar hutan lindung di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Hawu Mehara.
- Pemantapan Fungsi Konservasi Kawasan Lindung.  
Dilakukan melalui Optimalisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung, Rehabilitasi dan konservasi ekosistem wilayah pesisir dan laut di seluruh Kecamatan.
- Penyediaan Ruang Ketahanan Pangan  
Arah pengembangan dilakukan melalui Percetakan Sawah Baru, Peningkatan fungsi sawah beririgasi teknis, Pengembangan pengaturan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim, Penyediaan prasarana sumber daya air untuk cadangan air, Pemeliharaan saluran irigasi, Peningkatan pengelolaan penanganan kekurangan persediaan pangan di daerah rawan kekeringan di seluruh Kecamatan.
- Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Mitigasi Bencana.  
Rencana arah pengembangan mencakup Perencanaan dan Penetapan Kawasan Rawan Bencana, Tahapan Pencegahan dan Mitigasi, Tahap Kesiapsiagaan, Tahap Tanggap Darurat, Tahap Pemulihan, Mitigasi Bencana Berdasarkan Jenis Bencana (Gempa Bumi dan Tsunami, Gerakan Tanah/Longsor, Abrasi/Erosi, Banjir, dan Air Pasang/Rob) di seluruh Kecamatan.
- Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  
Arah pengembangan RTH Study Identifikasi Pemenuhan RTH Kabupaten dan Pengadaan lahan RTH di Kabupaten Sabu Raijua.

Sedangkan untuk Kawasan Budidaya akan dibahas menyatu pada Kawasan Strategis Kabupaten pada sub bab berikut ini yang meliputi kawasan industri, perdagangan, pariwisata, dan penggunaan lahan lainnya.

#### 3.4.3.3. Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Sabu Raijua

Kawasan Strategis Kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Arah pengembangan kawasan strategis Kabupaten Sabu Raijua di kelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

##### a. Arah pengembangan Kawasan strategis Kabupaten Sabu Raijua dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Sabu Raijua dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan yang di dukung dengan pengembangan sarana prasarana serta pengembangan dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas serta pengembangan pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Adapun yang menjadi fokus pengembangan adalah kawasan budidaya Pertanian dan Perkebunan serta Peternakan dan Kawasan Industri dan Perdagangan dan Jasa.

- Arah Pengembangan Kawasan Pertanian dan Perkebunan serta Peternakan  
Rencana pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sabu Raijua seluas 34.284,38 Ha (74% dari total luas wilayah Kabupaten Sabu Raijua). Adapun perwujudan pengembangan Kawasan Budidaya terdiri dari Pengembangan dan pengendalian Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Pengembangan dan pengendalian Kawasan Pertanian, Pengembangan dan pengendalian Kawasan Perkebunan, Rehabilitasi, Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Pertambangan, Pengembangan dan pengendalian Kawasan Peruntukan Industri, Pengembangan dan pengendalian Kawasan

M Pariwisata, Pengembangan dan pengendalian Kawasan Perikanan Laut dan

Kelautan, Pengembangan dan pengendalian Kawasan Pelabuhan Udara, Pengembangan dan pengendalian Kawasan Pelabuhan Laut.

Rencana kawasan pertanian di Kabupaten Sabu Raijua dikembangkan dengan luas 2.320,35 hektar (5% dari total luas wilayah Kabupaten Sabu Raijua). Sesuai Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/Sk-Pg.03.03/XII/2019 Tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019 maka sebaran sawah nasional yang telah ditetapkan di Kabupaten Sabu Raijua adalah sebesar 2.387,68 Ha yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan yaitu Hawu Mehara, Raijua, Sabu Barat, Sabu Liae, Sabu Tengah dan Sabu Timur.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ (Location Question) (analisa untuk mengidentifikasi sektor unggulan (basis) dalam suatu wilayah) pada PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi NTT, maka sektor unggulan berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Sabu Raijua yang dapat dikembangkan adalah Pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai LQ 1.6. Dimana, nilai  $LQ > 1$ , sektor yang bersangkutan lebih terspesialisasi dibanding sektor yang sama di tingkat daerah tertentu, sehingga merupakan sektor unggulan. Untuk tanaman hortikultura, potensi Kabupaten Sabu Raijua ada pada Bawang Merah, Buncis, Kangkung. Sedangkan, berdasarkan analisis growth share khusus sektor perkebunan, ditemukan komoditi jambu mente, lontar dan tembakau berpotensi untuk dikembangkan.

Untuk pengembangan ternak, khusus ternak besar adalah Kerbau dan Kuda, ternak kecil kambing dan domba sedangkan ternak unggas adalah ayam kampung.

Selain itu, pengembangan ternak Babi untuk memenuhi pasokan daging di Kabupaten Sabu Raijua sangat diperlukan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan adat istiadat. Termasuk di dalamnya pemenuhan pakan ternak Babi dan industri ikutan pengolahan skala rumah tangga seperti pengolahan kulit babi menjadi kerupuk kulit babi.

#### - Arah Pengembangan Kawasan Industri dan Perdagangan dan Jasa

Secara umum prioritas pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, berteknologi tinggi dan tepat guna, padat karya, dan didukung pengelolaan limbah industri terpadu melalui penerapan *clean development mechanism* pada 2 (dua) Kecamatan yaitu Sabu Timur dan Sabu Barat meliputi Industri pengolahan dan jasa hasil peternakan, hortikultura, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan, Industri pengolahan dan jasa hasil perikanan dan kelautan dan Industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi.

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat untuk Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara kluster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (*added value*) tinggi yang berorientasi ekspor, maka untuk Pengembangan Kawasan Industri berupa Industri sedang, industri rumah tangga dan industri lainnya di Kabupaten Sabu Raijua meliputi industri pengolahan hasil pertanian berbasis hortikultura di Desa Menia dan Industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang minapolitan di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat. Untuk pengembangan Industri Rumah Tangga berupa Industri gerabah di Desa Lede Talo Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Hawu Mehara dan Kecamatan Sabu Liae dan Industri pandai besi mehona di Desa Mehona Kecamatan Sabu Liae, gula sabu, gula semut dan jenis lainnya.

Sedangkan, pengembangan Kawasan Industri Garam di wilayah PKL Sabu Liae. Pengembangan Garam diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan ekspor ke luar daerah untuk pemenuhan kebutuhan garam nasional seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri di Indonesia. Untuk mendukung pengembangan garam maka identifikasi, perluasan wilayah dan

pengelolaan terhadap potensi tambak garam, pendampingan dan pembukaan akses pasar untuk petani garam, termasuk pengembangan industri garam skala Kabupaten menjadi fokus perhatian untuk 20 (dua puluh tahun) ke depan.

Sementara itu, pengembangan kawasan industri perikanan pada PKL Rajua. Untuk pengembangan perikanan di arahkan pada potensi unggulan Kabupaten Sabu Rajua yaitu cakalang, udang dan ikan lainnya serta pengembangan rumput laut. Secara khusus, untuk pengembangan rumput laut di arahkan pada identifikasi, perluasan wilayah, pengelolaan, pendampingan dan pembukaan akses pasar untuk petani rumput laut, termasuk pengembangan industri rumput skala Kabupaten.

Untuk industri lain yang pengembangannya di seluruh kecamatan berupa Pengembangan industri-industri andalan masa depan (industri kreatif dan telematika) dan Penguatan jaringan antar industri IKM dan industri besar. Sedangkan, perluasan jaringan perdagangan luar negeri di tingkat Kabupaten akan di buka untuk pemasaran komoditas unggulan daerah yang telah dikembangkan, pemantapan standarisasi industri ramah lingkungan, dan kajian roadmap investasi.

Selanjutnya, menurut analisis *shift-share* klasik, dari hasil perhitungan untuk sektor ekonomi Kabupaten Sabu Rajua yang mempunyai kedudukan potensial untuk dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif terdapat pada 3 (tiga) sektor yaitu Pertanian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Konstruksi.

Dengan demikian, konsep pengembangan kawasan perdagangan ada pada Pengembangan kerjasama dan perdagangan regional, Peningkatan dan penguatan sistem jaringan distribusi barang dalam negeri, dan Pembangunan dan penataan kawasan pusat bisnis pesisir serta Kajian Penentuan Lokasi Pasar Regional di tingkat Kabupaten Sabu Rajua termasuk arahan terkait penyediaan sarana perdagangan dan jasa di Kabupaten Sabu Rajua meliputi toko/warung, pertokoan, pasar lingkungan dan pusat perbelanjaan dan perbankan. Sedangkan untuk pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Regional berlokasi di Kecamatan Sabu Barat.

b. Arah pengembangan Kawasan strategis Kabupaten Sabu Rajua dari sudut kepentingan sosial budaya

Arah pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya mencakup revitalisasi kawasan yang mendukung optimalisasi wisata budaya, pengembangan perdagangan dan jasa, permukiman dan industri kreatif.

Untuk mendukung transformasi ekonomi pada "*Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara*", pada prinsipnya strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Sabu Rajua di arahkan pada pemanfaatan pariwisata alam laut dan darat dengan konsep ekowisata yang tanggap bencana alam agar tetap mengkonservasi alam dan melestarikan alam, pemanfaatan wisata budaya dan ritual keagamaan dengan penyelenggaraan event-event (atraksi) budaya dalam rangka perlindungan terhadap adat istiadat dan warisan nenek moyang, penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berstandar internasional, Pemasaran wisata dalam konsep *tourism, trade, and investment (TTI)*, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sebagai mitra kerja dalam bidang *service excellence* di kawasan wisata potensial, Pengembangan dan Perencanaan Masterplan Pariwisata, Kajian Pengembangan Bisnisplan Pariwisata Kabupaten dan Kajian Peningkatan Layanan Pendukung Pariwisata Kabupaten. Hal ini dilaksanakan juga untuk mewujudkan arah kebijakan pemerintah pusat di dalam mendukung ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Sabu Raijua dari sudut kepentingan sosial budaya untuk pengembangan kawasan Kampung Adat Namata, Kampung Adat Kujiratu, Kawasan Istana Tenni Hawu dan Kawasan Situs Maja yaitu pengembangan kawasan wisata adat sebagai pusat pengembangan budaya dan tujuan wisata yang didukung dengan pengembangan sarana prasarana, promosi, atraksi wisata serta penguatan kelompok sadar wisata.


Adapun Destinasi Pariwisata Daerah di Kabupaten Sabu Raijua dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar yaitu wisata alam (wisata Pantai, gua, benteng, sumur, mata air, bendungan, embung, pegunungan, dan padang Rumput), wisata budaya (kegiatan/ritual Adat, pedoa, hole, pacuan kuda, rumah adat, dan kampung adat) dan wisata minat khusus (anyaman/kain tenun Daerah dan lainnya).

Memperhatikan bahwa Kabupaten Sabu Raijua dikelilingi oleh pesisir dan lautan maka fokus utama untuk pembangunan wisata minat khusus pada Wisata Bahari pada Cluster pengambangan II, III dan IV.

Pengembangan Kawasan Wisata Regional diarahkan pada 4 (empat) cluster dengan masing-masing tema pengembangan antara lain:

- Cluster I di Kecamatan Hawu Mehara berupa Wisata Budaya dan Wisata Alam dengan daya tarik wisata berupa Kawasan Wisata Adat Kolorae Pedaro, Kawasan Pantai Lohohede, Gua Alam Lie Ma Dira, Kawasan Pantai Lederaga, Kawasan pantai dan bukit salju ledeae, Kawasan Pantai Gela Nalalu dan Kawasan Kelabba Madja. Pengembangan kawasan pariwisata secara umum diarahkan untuk kawasan wisata budaya dan kawasan wisata alam. Kawasan Wisata Budaya tersebar di seluruh kecamatan sedangkan Kawasan Wisata Alam khususnya pada kawasan Wisata Kelabba Madja di Kecamatan Hawu Mehara berupa Kawasan cagar alam geologi dan Karst dengan keunikan proses geologi sebagai salah satu destinasi Wisata Unggulan di Kabupaten Sabu Raijua.
- Dilanjutkan, Cluster II di Kecamatan Sabu Barat berupa Wisata budaya dan wisata bahari meliputi Kawasan Adat Namata, Istana Raja Sabu Tenni Hawu, Kawasan Upacara Adat Pantai Boddo, Kawasan Wisata Pantai Napae, Wisata Pantai Hewau, Kawasan Pantai Bodo, Kawasan Pantai Menia/Kolouju, Kawasan Wisata Embung Guriola, Taman Doa Skyber, dan Pantai Menanga Hede.
- Sedangkan, pada Cluster III yaitu di Kecamatan Sabu Liae diarahkan pada wisata budaya dan wisata bahari diarahkan pada Kawasan Pantai Kepo Halapaji, Wisata Adat Kepaka Horo, Wisata Adat Kolorame, Rumah Adat Eiko, Wisata Adat Wadu Mea/Merabhu, Wisata Pantai Deme, Rumah Adat Rajamara, Kampung Adat Dabba, Pacuan Kuda, Wisata Alam Ledepemulu.
- Pada Cluster IV berlokasi di Kecamatan Sabu Tengah dan Sabu Timur mengarah pada wisata budaya dan wisata alam pada Kawasan Adat Kujiratu, Mata Air Loko Eimada, Wisata Pantai Nyiu Wudu Kujiratu, Wisata Pantai Rae Mea, Kawasan Wisata Alam Mata Air Tano, Pantai Mahera dan tambak ikan paro, Wisata Pantai Menanga Eilode, Wisata Pantai Eimau, Wisata Alam Gua Mabala, Wisata Alam Eimada Kabba Loboaju dan Wisata Pantai Cemara Jiwuwu.

c. Arah pengembangan Kawasan strategis Kabupaten Sabu Raijua dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Sabu Raijua dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu pengembangan wisata alam dan buatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 


Dengan demikian yang menjadi fokus pengelolaan adalah kawasan lindung, dimana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 mengarahkan kawasan lindung untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam serta sumberdaya buatan guna pembangunan berkelanjutan. Luas kawasan lindung di Kabupaten Sabu Raijua adalah 11.798,64 Ha.

Secara umum, rencana pengelolaan Kawasan Lindung di arahkan untuk melakukan Rehabilitasi, Pemantapan dan Pengembangan Fungsi Konservasi Kabupaten meliputi Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, Kawasan konservasi, Kawasan lindung geologi, Kawasan rawan bencana dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan, rencana pengembangan pada Kawasan Lindung untuk perubahan kawasan-kawasan hutan lindung berlokasi di Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Hawu Mehara.

Kemudian, terkait pengelolaan kawasan bencana, bahwa berdasarkan rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada buku Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022 secara umum Kabupaten Sabu Raijua termasuk Kabupaten yang memiliki Indeks Resiko Bencana kategori sedang dengan skor 102.40. Namun jika dilihat pada setiap jenis bencana maka angka skor bervariasi dimulai dari kategori sedang pada Bencana Banjir, tsunami, dan tanah longsor. Sedangkan kategori tinggi pada bencana gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan cuaca ekstrim.

Dari ke-6 jenis bencana tersebut, jenis bencana dengan tingkat ancaman tinggi yang cakupannya wilayahnya paling luas adalah kekeringan dan kebakaran. Dimana dampak yang terjadi adalah kekurangan air yang ditandai dengan berkurangnya air permukaan, baik di sungai, sumur gali dan embung-embung. Kekurangan air bersih ini juga sering menyebabkan berbagai jenis penyakit, terutama penyakit kulit dan diare. Selain itu, gagal panen karena kekeringan lahan pertanian, karena sistem pertanian lahan kering yang mengandalkan air hujan. Sedangkan ancaman kebakaran hutan terjadi karena persiapan lahan secara tradisional oleh petani untuk persiapan lahan atau pembukaan ladang baru dan cuaca panas ekstrim, dari data RPB Provinsi NTT potensi ancaman kebakaran di Kabupaten Sabu Raijua tercatat seluas 45.198 Ha. Selain itu, ancaman berupa angin kencang sering terjadi yang menyebabkan kerusakan pada rumah, tambak garam dan kebun masyarakat.

Dengan demikian, arahan pengelolaan bencana melalui tahapan pencegahan dan mitigasi, tahapan kesiapsiagaan, tahapan tanggap darurat dan tahapan pemulihan meliputi Perencanaan dan Penetapan Kawasan Rawan Bencana di seluruh Kecamatan, Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana, penerapan kaidah mitigasi bencana dalam penataan ruang dan pembangunan fisik kawasan, dan Mitigasi bencana wilayah pesisir dan laut dan adaptasi terhadap perubahan iklim, Pembangunan sistem peringatan dini, Pengembangan penelitian masalah kebencanaan, Penetapan zona evakuasi, Peningkatan pengelolaan tanggap darurat penanggulangan bencana, Penyusunan SOP Bencana, Peningkatan pengelolaan penanganan pasca bencana, penyusunan zonasi bencana, pengendalian banjir, Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan resapan air, Study Identifikasi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten dan Pengadaan lahan RTH di seluruh kawasan rawan bencana, pesisir dan wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Selanjutnya, untuk arah pengembangan penggunaan lahan lainnya adalah Kajian Perubahan Penggunaan Lahan dan Proses Formalitas Penetapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di tingkat Kabupaten. Sedangkan, Kajian Penentuan Batas Wilayah dan Kota dan Kajian Kawasan Pertambangan dilakukan di seluruh Kecamatan. 

BAB IV  
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kebijakan dan mencapai sasaran yang tertuang dalam RPJMD. Program pembangunan daerah disusun guna menggambarkan keterkaitan antar program perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk periode Tahun 2025 sampai dengan 2029 merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Sabu Raijua, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Sumber pendanaan program perangkat daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar daerah.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026-2030

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				132,798		132,798		132,798		132,798		132,798	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				53,197		53,197		53,197		53,197		53,197	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Presentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	81.77	87.24		89.98		92.72		95.26		97.81		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Presentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	98.95	99.39		99.61		99.83		100.00		100.00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Presentase Anak Usia 13-15 Tahun	98.95	99.39		99.61		99.83		100.00		100.00		Dinas Pendidikan,

M

J

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP (APS)												Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Satuan PAUD yang melaksanakan layanan HI	37.68	41.66		47.36	214	57.44		69.53		81.63		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				214	214	214		214		214		214	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Outcomes: Meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	50	60		65		70		75		80		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				36	36	36		36		36		36	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Outcomes: Meningkatkan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru	NA	11		13		15		17		20		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	20	25		32		45		55		70		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				5	5	5		5		5		5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

M

i

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcomes: Meningkatnya pengendalian perizinan pendidikan	Persentase Pengendalian perizinan Pendidikan	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan, Kepermdaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			5		5		5		5		5		Dinas Pendidikan, Kepermdaan dan Olahraga
Outcomes: Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan, Kepermdaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
PROGRAM PENJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			71,620		71,620		71,620		71,620		71,620		Dinas Keselamatan, Pengendalian Penduduk dan Kekuarga Berencana
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Dinas Keahatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			53,412		53,412		53,412		53,412		53,412		Dinas Keselamatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcomes: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	218	216		215.8		214		213		212		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2. Angka Kematian Bayi	29	28		27.8		27.5		26		25.8		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				9,014		9,014		9,014		9,014		9,014	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcomes: Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	NA	7		9		11		15		20		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				278		278		278		278		278	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcomes: Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	76	82		85		88		90		95		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5

AM

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				107		107		107		107		107	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcomes: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Hidang Kesehatan yang Djberdayakan	60	75		80		90		95		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,308		9,308		9,308		9,308		9,308	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian AKIP PD Nilai	C	B		B		BB		A		A		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				14800		14800		14800		14800		14800	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Outcome: Meningkatnya Perilaku masyarakat terhadap banjir	1. Persentase Peningkatan Perjindungan Kawasa Perumahan	10.00	27.50		30.00		32.50		35.00		37.50		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rawan Banjir												
	2. Persentase peningkatan Perindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	79.02	79.12		79.19		79.26		79.33		79.39		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multi komoditas	43.20	44.40	45.40		46.40	47.40		48.40				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Outcome : Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaduran Air Minum Perpipaan	9,00	12.20	14.20	16.20	18.21	20.21						Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				21000	750	750	750	750	750	750	750	750	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target (4)	Pagu (Juta Rp) (5)	Target (6)	Pagu (Juta Rp) (7)	Target (8)	Pagu (Juta Rp) (9)	Target (10)	Pagu (Juta Rp) (11)	Target (12)	Pagu (Juta Rp) (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome : Meningkatnya Layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	14,29	42.86		57.14		71.43		85.71		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				18000		8000		8000		8000		8000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Outcome : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	13,00	20.00		25.00		30.00		35.00		40.00		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				800		800		800		800		800	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Outcome : Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	25	29.17		33.33		37.50		41.67		45.83		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				750		750		750		750		750	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Outcome : Meningkatnya Kualitas	Persentase cakupan Infrastruktur	14	19.00		21.50		24.00		26.50		29.00		Dinas Pekerjaan Umum dan



Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
infrastruktur permukiman	pemukiman dalam kondisi baik di desa Strategis			50		50		50		50		50		Perumahan Rakyat
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				50		50		50		50		50		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Outcome : Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki IMB/PBG dan SLF	0.95	1.10		1.17		1.24		1.31		1.38			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				25		25		25		25		25		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Outcome : Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	0.95	1.14		1.24		1.33		1.43		1.52			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				31,000		37,500		55,000		44,000		44,500		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Outcome : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	43.36	49.16		53.23		57.29		61.64		64.55			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Tingkat Kemantapan Jalan Desa	21.17	22.50		23.53		24.56		25.59		26.61			Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target (4)	Pagu (Juta Rp) (5)	Target (6)	Pagu (Juta Rp) (7)	Target (8)	Pagu (Juta Rp) (9)	Target (10)	Pagu (Juta Rp) (11)	Target (12)	Pagu (Juta Rp) (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Strategis												Perumahan Rakyat
	Tingkat Kemantapan Jembatan	29.41	35.29		41.18		47.06		52.94		58.82		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>													Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Outcome : Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi Kualifikasi Ahli Kerja												Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>				1300		1300		1300		1300		1300	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Outcome : Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketersediaan Peraturan Tata Ruang/ RTRW dan RRTR	14.29	42.86		57.14		71.43		85.71		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>													
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				700		1120		1400		1645		1785	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(7)	(6)	(9)	(8)	(11)	(10)	(13)	(12)	(14)	
Outcome : Terpenuhi rumah layak bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	11.58	20.53	20.53	35.26	53.68	75.79	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
	2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	NA	36.67	50.00	66.67	83.33	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>			2,124		2,124		2,124		2,124		2,124		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Outcome : Meningkatnya penyediaan permukiman	Persentase kawasan permukiman yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			153		153		153		153		153		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
Outcome : Meningkatnya	Persentase Permukiman yang	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan					

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target (4)	Pagu (Juta Rp) (5)	Target (6)	Pagu (Juta Rp) (7)	Target (8)	Pagu (Juta Rp) (9)	Target (10)	Pagu (Juta Rp) (11)	Target (12)	Pagu (Juta Rp) (13)	
(1) penyediaan permukiman	(2) PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	(3)											(14) Umum dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,754		5,754			5,754			5,754	Satuan Polisi Pamong Praja
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian AKIP PD Nilai	C	B		B		BB		A			A	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				588		588			588			588	Satuan Polisi Pamong Praja
Outcomes: 1.Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100		100		100		100			100	Satuan Polisi Pamong Praja
2.Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100	100		100		100		100			100	Satuan Polisi Pamong Praja

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3. Meningkatkan kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100	2,158	100	2,158	100	2,158	100	2,158	100		Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,158		2,158		2,158		2,158		2,158	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				913		913		913		913		913	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Outcomes: 1. Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Meningkatkan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Meningkatkan penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				207		207		207		207		207	Satuan Polisi Pamong Praja

M

2

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Outcomes: 1. Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja	
2. Meningkatnya pelayanan dan penyelamatan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,966		2,966		2,966		2,966		2,966	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				185		185		185		185		185	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Outcomes: Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

M

t

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM REABILITASI SOSIAL				795		795		795		795		795	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcomes: Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya												Perlindungan Anak
	2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	4. Persentase Gelandang dan Pengemis Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			782	782		782		782		782		782	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

M

4



Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target (4)	Pagu (Juta Rp) (5)	Target (6)	Pagu (Juta Rp) (7)	Target (8)	Pagu (Juta Rp) (9)	Target (10)	Pagu (Juta Rp) (11)	Target (12)	Pagu (Juta Rp) (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP PD	Nilai	B	3,013	B	3,013	BB	3,013	A	3,013	A	3,013	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD		C											
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				356		356		356		356		356	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Outcome: Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Bersertifikat	0.514	0.77		1.541		1.644		2.311		2.465		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				579		579		579		579		579	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Outcome 1.1: Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan	5.136	6.420		7.704		8.988		10.272		11.556		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				30		30		30		30		30	Dinas Transmigrasi, Koperasi,

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome 1.1: Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	5,646	5,851	5,951	6,051	6,151	6,251						Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				70	70	70	70	70	70	70	70	70	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcomes: Meningkatnya kualitas efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	71,68	71,78	71,98	72,08	72,28	73,12						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcomes: Menurunnya kekerasan terhadap	Persentase Perempuan Korban	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
perempuan	Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif													dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				72		72		72		72		72		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcomes: Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar													Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN DATA SISTEM GENDER DAN ANAK				11		11		11		11		11		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcomes: Meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				117		117		117		117		117		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

M

4

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcomes: Terjaminnya hak pemenuhan semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)												Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				444	444	444	444	444				444	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Outcomes: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, pencelantaran, perkawinan paksaan dan perlakuan salah terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,267	8,267	8,267	8,267	8,267		8,267		8,267	Dinas Pertanian dan Pangan
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD PROGRAM PENINGKATAN	Capaian Nilai AKIP PD	C	B	428	428	428	428	428	B	BB	A	A	Dinas Pertanian dan Pangan
				428	428	428	428	428		428		428	Dinas Pertanian dan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT													Pangan
Outcome : Meningkatnya dan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95	95.5		95.75	60	96		96.25		96.5		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				60		60		60		60		60	Dinas Pertanian dan Pangan
Outcome: Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	12.70	9.52		7.94		4.76		3.15		3.10		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				33		33		33		33		33	Dinas Pertanian dan Pangan
Outcome 1.1: Meningkatnya mutu dan Keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	80	84		86		86		90		90		Dinas Pertanian dan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				250		250		250		250		250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcomes: Meningkatnya penyelesaian kerugian santunan tanah untuk pembangunan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase bidang Tanah Pemerintah yang disertifikasi	26.97	35.39		39.61		43.82		48.03		52.25		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,378		2,378		2,378		2,378		2,378	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD PROGRAM	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Dinas Lingkungan Hidup
Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP				118		118		118		118		118	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome I.1: Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				252		252		252		252		252	Dinas Lingkungan Hidup

4



Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. indeks kualitas Air	52,62	53,73		55,84		60,70		64,37		67,79		Dinas Lingkungan Hidup
	2. Indeks kualitas udara	90.30	90.37		90.57		90.77		90.97		91.17		Dinas Lingkungan Hidup
PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (Kehati)													Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Presentase RTH		20.00		40.00		60.00		80.00		100.00		Dinas Lingkungan Hidup
PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 1.1: Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Presentase Limbah B3 yang Terkelola		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGLOLAAN PERSAMPAHAN				130				130		130		130	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 1.1: Meningkatnya Tata Kelola persampahan	Indeks Pengelolaan Sampah	63.30	63.50		63.70		63.90		64.10		64.30		Dinas Lingkungan Hidup

M

A

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				15		15		15		15		15	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 1.1: Meningkatnya Pembinaan terhadap MHA yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang dibina	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				84		84		84		84		84	Dinas Lingkungan Hidup
Outcome: Meningkatnya masyarakat/ lembaga masyarakat/ komunitas/ SDM bidang lingkungan hidup yang mendapatkan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	Persentase masyarakat/lemba ga masyarakat / komunitas/SDM bidang lingkungan hidup yang mendapatkan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	40	60		70		80		90		100		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				20		20		20		20		20	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome: Meningkatnya Kinerja Pemangku Keuntungan dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PROGRAM PENANGANAN PESUJUKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Lingkungan Hidup
Outcome 1.1: Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100.00	100.00	41	100.00	41	100.00	41	100.00	41	100.00	41	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
PROGRAM PENGURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3,362		3,362		3,362		3,362		3,362	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian AKIP PD Nilai	C	B		B		BB		A		A		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				203		203		203		203		203	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcomes: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1.Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	0,38  22	12  33	  	24  43	  	36  53	  	48  63	  	60  73	  	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				172		172		172		172		172	
Outcomes: Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100  100  100  100	100  100  100  100		100  100  100  100		100  100  100  100		100  100  100  100		100  100  100  100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				298		298		298		298		298	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcomes: Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan PROGRAM PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	100	100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcomes: Meningkatnya kualitas profil kependudukan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100			100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD PROGRAM PENATAAN DESA	Capaian Nilai AKIP PD	C	B	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	3,421	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Outcomes: Meningkatnya kualitas penataan desa PROGRAM	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100	100	87	87	87	100	87	100	87	100	87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

11

11

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PENINGKATAN KERJA SAMA DESA													Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Outcomes: Meningkatkan efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Outcomes: Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Outcomes: Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2.Persentase Fasilitasi	100	100		1,197		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

13

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pemberdayaan Lembaga Desa Lembaga Masyarakat Hukum Adat												Masyarakat dan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BERKUALITAS BERKENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				198		198		198		198		198	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcomes: Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	3.16	3.14		3.13		3.12		3.11		3.10		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1,724		1,724		1,724		1,724		1,724	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcomes: Meningkatnya pemberdayaan dan peran masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	NA	55		60		65		70		75		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

M

12

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	2.Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	NA	15		13		12		11		10		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				528		528		528		528		528	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Outcomes: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	22	24		26		28		30		32		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,515		2,515		2,515		2,515		2,515	Dinas Perhubungan
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian AKIP PD Nilai	C	B		B		BB		A		A		Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (L.L.A.)				637		637		637		637		637	Dinas Perhubungan

M

A

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat	1,41	1,8		1,8		1,8		1,8		1,8		Dinas Perhubungan
	2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang Terhadap Kondisi Ideal	NA	40		42		45		48		50		Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGLOLAAN PELAYARAN				658		658		658		658		658	Dinas Perhubungan
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	1,41	1,8		1,8		1,8		1,8		1,8		Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,823		2,823		2,823		2,823		2,823	Dinas Komunikasi dan Informatika
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				450		450		450		450		450	Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcomes: Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80.49	80.49		80.5		80.51		80.52		80.53		Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1,696		1,696		1,696		1,696		1,696	Dinas Komunikasi dan Informatika
Outcomes: Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE/ Indeks Pemertahan Digital	1.82	2		2.05		2.1		2.15		2.2		Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI				36		36		36		36		36	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Outcome 1.1: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100	100		100		100		100		100		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				50		50		50		50		50	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target (4)	Pagu (Juta Rp) (5)	Target (6)	Pagu (Juta Rp) (7)	Target (8)	Pagu (Juta Rp) (9)	Target (10)	Pagu (Juta Rp) (11)	Target (12)	Pagu (Juta Rp) (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome 1.1: Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif dan berkinerja baik	4.40	43.51		44.16		44.81		45.45		46.10		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				80		80		80		80		80	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	15.38	50.00		62.34		74.68		87.01		99.35		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				2,484		2,484		2,484		2,484		2,484	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Outcome 1.1: Meningkatnya Produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	15.38	50.00		62.34		74.68		87.01		99.35		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				2,484		2,484		2,484		2,484		2,484	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome 1.1: Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase usaha kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	9 1,63	12 3,63	24 6,63	36 12,63	48 18,63	60 20,63	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja					
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Outcome 1.1: Meningkatkan daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Mitraan dan Ekspor	NA	5	10	15	20	25	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja					
PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Outcome 1.1: Meningkatkan legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	38.46	63.64	64.29	64.94	65.58	66.23	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja					
URUSAN PEMERINTAHAN													

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BIDANG PENANAMAN MODAL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,122		1,122		1,122		1,122		1,122	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian AKIP PD Nilai	C	B		B		BB		A		A		Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				18		18		18		18		18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome 1.1: Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	10	20		30		35		40		45		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				54		54		54		54		54	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome 1.1: Meningkatnya Promosi pelayanan modal	Persentase promosi penanaman modal	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				19		19		19		19		19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome 1.1: Meningkatkan Perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				102		102		102		102		102	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome 1.1: Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				16		16		16		16		16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome 1.1: Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL				16		16		16		16		16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Outcome 1.1: Meningkatkan efektivitas kerja sama penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				73		73		73		73		73	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
Outcomes: Meningkatkan daya saing kepemudaan	Rasio Wirasaha Pemuda	NA	0,28		0,30		0,36		0,40		0,45		Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				1,566		1,566		1,566		1,566		1,566	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
Outcomes: Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olah raga	1. Persentase Atlet Binaan Yang Berprestasi di Event Regional dan Nasional 2. Persentase Pelajar yang berprestasi di	NA	7.06		7.19		7.32		7.45		7.58		Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
			40.00		40.00		45.00		45.00		50.00		Dinas Pendidikan, Kebudayaan

M

B

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pekan Olahraga Pelajar Daerah												dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				300		300		300		300		300	Diras Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Outcomes: Meningkatkan kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	NA	10		15		20		25		30		Diras Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				193		193		193		193		193	Diras Komunikasi dan Informatika
Outcomes: Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,71	2,75		2,81		2,91		3,01		3,11		Diras Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				68		68		68		68		68	Diras Komunikasi dan Informatika
Outcomes: Meningkatkan Keamanan Siber dan	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi	35	38		40		42		44		46		Diras Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah												Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				77		77		77		77		77	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				252		252		252		252		252	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcomes: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	80	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA				711		711		711		711		711	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcomes: Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang	100	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

4

100

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target (4)	Pagu (Juta Rp) (5)	Target (6)	Pagu (Juta Rp) (7)	Target (8)	Pagu (Juta Rp) (9)	Target (10)	Pagu (Juta Rp) (11)	Target (12)	Pagu (Juta Rp) (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,364		2,364		2,364		2,364		2,364	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Capaian AKIP PD Nilai	C	B	262	B	262	BB	262	A	262	A	262	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Outcomes: Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	NA	25	35	35	262	45	262	55	262	70	262	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN PROGRAM PENGLOLAAN ARSIP				353		353		353		353		353	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Outcomes: Meningkatnya lata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	50	75	80	80	353	85	353	90	353	95	353	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN													

M

0.

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DAN PERIKANAN PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,713		2,713		2,713		2,713		2,713	Dinas Kelautan dan Perikanan
Outcome : Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD PROGRAM	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Dinas Kelautan dan Perikanan
PE_GELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				2,169		2,169		2,169		2,169		2,169	Dinas Kelautan dan Perikanan
Outcome 1.1: Meningkatnya produksi Perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2,500	3,000		3,500		4,000		4,500		5,000		Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1,972		1,972		1,972		1,972		1,972	Dinas Kelautan dan Perikanan
Outcome 1.1: Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1,200	1,800		2,400		2,900		3,500		4,100		Dinas Kelautan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,900		3,900		3,900		3,900		3,900	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome : Meningkatnya	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Dinas Pariwisata dan



M

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Capaian Nilai AKIP PD													Kebudayaan
PROGRAM PENGINGKATAN DAYA DESTINASI PARIWISATA				229		229		229		229		229	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome 1.1: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	20	25		30		35		40		45		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				31		31		31		31		31	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome 1.1: Meningkatnya Jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	20	35		49		45		50		55		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				20		20		20		20		20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Outcome 1.1: Meningkatnya Kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	NA	10		15		25		35		45		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				47		47		47		47		47	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

12

M

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome 1.1: Meningkatkan kapasitas pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	NA	50		60		70		80		90		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	1,888	Dinas Pertanian dan Pangan
Outcome 1.1: Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	80	86		88		94		98		98		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				397	397	397	397	397	397	397	397	397	Dinas Pertanian dan Pangan
Outcome 1.1: Meningkatkan distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Laban Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	53	71		82		92		100		100		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				268	268	268	268	268	268	268	268	268	Dinas Pertanian dan Pangan
Outcome 1.1: Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian dan Pangan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan kesehatan masyarakat veteriner	Menular Strategis (PHMS)												
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			265	265		265		265		265		265	Dinas Pertanian dan Pangan
Outcome 1.1: Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				490		490		490		490		490	Dinas Pertanian dan Pangan
Outcome 1.1: Meningkatkan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	70	80		82		85		90		95		Dinas Pertanian dan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,584		1,584		1,584		1,584		1,584	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome : Meningkatkan Capaian Nilai AKIP PD	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

M

1.

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				25	25	25	25	25	25	25	25	25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 1.1: Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				638	638	638	638	638	638	638	638	638	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 1.1: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				50	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 1.1: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				50	50	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome 1.1: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi eksportir	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 1.1: Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN DALAM PRODUK DALAM NEGERI			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 1.1: Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 1.1: Meningkatnya Realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target (4)	Pagu (Juta Rp) (5)	Target (6)	Pagu (Juta Rp) (7)	Target (8)	Pagu (Juta Rp) (9)	Target (10)	Pagu (Juta Rp) (11)	Target (12)	Pagu (Juta Rp) (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				450		450		450		450		450	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Outcome 1.1: Meningkatnya Kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	100		100		100		100		100		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN TRANSMIGRASI													
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				100		100		100		100		100	Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Outcome 1.1: Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase program Transmigrasi yang dilaksanakan	100	100		100		100		100		100		Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				24,543		24,543		24,543		24,543		24,543	Sekretariat Daerah
Outcome Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian AKIP PD Nilai	C	B		B		BB		A		A		Sekretariat Daerah

M

i

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcomes:	Persentase pelayanan terhadap WKDH Sekretariat Daerah	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Cakupan pelayanan administrasi pimpinan dan sekretariat daerah	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				6,500		6,500		6,500		6,500		6,500	Sekretariat Daerah
Outcomes:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				678		678		678		678		678	Sekretariat Daerah
Outcomes:	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan perekonomian dan pembangunan	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				14,928		14,928		14,928		14,928		14,928	Sekretariat DPRD

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	: Capaian AKIP PD Nilai	C	B		B		BB		A		A		Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				7,531		7,531		7,531		7,531		7,531	Sekretariat DPRD
Outcomes: 1.Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
2.Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3,212		3,212		3,212		3,212		3,212	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Outcome Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	: Capaian AKIP PD Nilai	C	B		B		BB		A		A		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				565		565		565		565		565	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcomes: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKP	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1,692		1,692		1,692		1,692		1,692	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Outcomes: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan dan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKP dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RKP dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

M

A

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Keseelarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEUANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				5,941		5,941		5,941		5,941		5,941	Badan Keuangan Daerah
Outcome Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian AKIP PD	Nilai C	B		B		BB		A		A		Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				104,521		104,521		104,521		104,521		104,521	Badan Keuangan Daerah
Outcomes: 1. Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah	Persentase penyampaian dan penetapan Dokumen APBD Murni serta Perubahan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
	Persentase Penatausahaan keuangan secara tepat waktu sesuai ketentuan perundangan	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase penyampaian dan penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten secara tepat waktu	100	100		100		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1,105	1,105	1,105		1,105		1,105		1,105	Badan Keuangan Daerah
Outcomes: Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	2,57	4,5		5,75		6,35		7,95		8,00		Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,205	1,205	1,205		1,205		1,205		1,205	Badan Keuangan Daerah
Outcomes: 1.Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan 2.Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah  Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	2,98	3,40		3,46		3,50		3,58		3,69		Badan Keuangan Daerah
3.Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	25	14,50		33		44,44		77		100		Badan Keuangan Daerah
KEPEGAWAIAN													

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target (4)	Pagu (Juta Rp) (5)	Target (6)	Pagu (Juta Rp) (7)	Target (8)	Pagu (Juta Rp) (9)	Target (10)	Pagu (Juta Rp) (11)	Target (12)	Pagu (Juta Rp) (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3,658		3,658		3,658		3,658		3,658	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Outcome Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian AKIP PD Nilai	C	B		B		BB		A		A		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1,019		1,019		1,019		1,019		1,019	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Outcomes: 1.Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	50	60		65		70		75		80		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
2.Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	8.42	14.99		15.26		18.28		21.30		24.32		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
3.Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	56.84	60.56		62.19		63.69		65.07		66.36		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
4.Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	61	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Peranggung Jawab
			Target (4)	Pagu (Juta Rp) (5)	Target (6)	Pagu (Juta Rp) (7)	Target (8)	Pagu (Juta Rp) (9)	Target (10)	Pagu (Juta Rp) (11)	Target (12)	Pagu (Juta Rp) (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2,122		2,122		2,122		2,122		2,122	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Outcomes: 1.Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, manajerial, dan Fungsional	86	87.40		87.60		88		90.70		91.10		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
2.Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar	Persentase ASN yang mendapatkan tugas belajar	84	90	91	92	93	94						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM													
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				130		130		130		130		130	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Outcomes: 1.Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penaung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(1) potensi unggulan	(2) dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan dalam daerah penyelesaian permasalahan dalam daerah	100 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, dan pengkajian dan penerapan di daerah	100 Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENGLOLAAN PERBATASAN													Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENGLOLAAN PERBATASAN				110		110		110		110		110	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Outcomes: 1.Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
INSPEKTORAT DAERAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4,804		4,804		4,804		4,804		4,804	Inspektorat Daerah
Outcome Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Inspektorat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1,223		1,223		1,223		1,223		1,223	Inspektorat Daerah
Outcomes: Menurunnya terjadinya penyewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses kewenangan	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				163		163		163		163		163	Inspektorat Daerah
Outcomes: Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase unit kerja yang mendapatkan predikat WBK WBBM	15	20		30		40		60		80		Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN													

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN JINTAN PEMERINTAHAN DAERAH				2,298		2,298		2,298		2,298		2,298	Kecamatan Hawu Mehara
Outcome Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	: Capaian AKIP PD Nilai	C	B		B		BB		A		A		Kecamatan Hawu Mehara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				93		93		93		93		93	Kecamatan Hawu Mehara
Outcomes: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Hawu Mehara
PROGRAM PENGDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				17		17		17		17		17	Kecamatan Hawu Mehara
Outcomes: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Hawu Mehara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				94		94		94		94		94	Kecamatan Hawu Mehara
Ourcomes: Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Hawu Mehara

M

A

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEM INAAAN DAN PENAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20		20		20		20		20	Kecamatan Hawu Mehara
Outcomes: Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Hawu Mehara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3,224		3,224		3,224		3,224		3,224	Kecamatan Rajua
Outcome Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Kecamatan Rajua
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				875		875		875		875		875	Kecamatan Rajua
Outcomes: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Rajua
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				400		400		400		400		400	Kecamatan Rajua
Outcomes: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Rajua

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				148		94		94		94		94	Kecamatan Rajua
Outcomes: Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Rajua
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													Kecamatan Rajua
Outcomes: Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Rajua
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2,991		2,991		2,991		2,991		2,991	Kecamatan Sabu Barat
Outcomes: Meningkatkan Capaian Nilai AKIP PD	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Kecamatan Sabu Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				415		415		415		415		415	Kecamatan Sabu Barat
Outcomes: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sabu Barat

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kecamatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				202		202		202		202		202	Kecamatan Sabu Barat
Outcomes: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sabu Barat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													Kecamatan Sabu Barat
Outcomes: Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sabu Barat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													Kecamatan Sabu Barat
Outcomes: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Sabu Barat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			2,363	2,363		2,363		2,363		2,363		2,363	Kecamatan Sabu Liae
Outcome Meningkatnya	Capaian AKIP PD Nilai	C	B	B	B	B	BB		A		A		Kecamatan Sabu Liae



Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Capaian Nilai AKIP PD PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				89		89		89		89		89	Kecamatan Sabu Liae
Outcomes: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sabu Liae
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20		20		20		20		20	Kecamatan Sabu Liae
Outcomes: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sabu Liae
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				118		118		118		118		118	Kecamatan Sabu Liae
Outcomes: Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sabu Liae
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				66		66		66		66		66	Kecamatan Sabu Liae
Outcomes: Meningkatkan pembinaan dan	Persentase pembinaan dan pengawasan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sabu Liae

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
		Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
pengawasan pemerintahan desa	pemerintahan desa													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2,109		2,109		2,109		2,109		2,109		Kecamatan Sabu Tengah
Outcome Meningkatkan Capaian Nilai AKIP PD PROGRAM	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A			Kecamatan Sabu Tengah
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				59		59		59		59		59		Kecamatan Sabu Tengah
Outcomes: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100			Kecamatan Sabu Tengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														Kecamatan Sabu Tengah
Outcomes: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100		100		100		100		100			Kecamatan Sabu Tengah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				53		53		53		53		53		Kecamatan Sabu Tengah

M

2

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Ourcomes: Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	100	100	81	100	81	100	81	100	81	100	81	Kecamatan Sabu Tengah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				81		81		81		81		81	Kecamatan Sabu Tengah
Ourcomes: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sabu Tengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3,578		3,578		3,578		3,578		3,578	Kecamatan Sabu Timur
Ourcomes: Meningkatnya Capaian Nilai AKIP PD	Capaian Nilai AKIP PD	C	B		B		BB		A		A		Kecamatan Sabu Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				741		741		741		741		741	Kecamatan Sabu Timur
Ourcomes: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sabu Timur
PROGRAM PEMBEKALAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				432		432		432		432		432	Kecamatan Sabu Timur

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcomes: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sabu Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				57		57		57		57		57	Kecamatan Sabu Timur
Outcomes: Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	persentase Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sabu Timur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													Kecamatan Sabu Timur
Outcomes: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sabu Timur
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1,730		1,730		1,730		1,730		1,730	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target (4)	Pagu (Juta Rp) (5)	Target (6)	Pagu (Juta Rp) (7)	Target (8)	Pagu (Juta Rp) (9)	Target (10)	Pagu (Juta Rp) (11)	Target (12)	Pagu (Juta Rp) (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome Meningkatkan Nilai Capaian Nilai AKIP PD	Capaian AKIP PD	Nilai C	B		B		BB		A		A		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM Penguatan kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	1,392	100	1,392	100	1,392	100	1,392	100	1,392	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				620		620		620		620		620	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Outcomes: Meningkatkan etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				12		12		12		12		12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

M

A

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcomes: Meningkatnya ketertarikan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				27	27	27		27		27		27	
Outcomes: Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100				100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				183				183		183		183	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	Target	Pagu (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcomes: Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Hasil Olahan, 2025

## 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penentuan target keberhasilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa visi dan misi kepala daerah dapat diterjemahkan secara operasional dan terukur. Untuk itu, digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen utama dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah.


Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun dalam RPJMD ini merupakan hasil seleksi dari berbagai indikator yang tersedia dan dipilih secara cermat untuk merepresentasikan aspek kunci dari misi Bupati. Pemilihan IKU tidak hanya mempertimbangkan dimensi strategis dan relevansinya terhadap program prioritas daerah, tetapi juga memperhatikan keterukuran, ketersediaan data, serta keselarasan dengan indikator Nasional (RPJMN) maupun Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Setiap IKU dikaitkan langsung dengan sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD dan memiliki target tahunan yang realistis selama periode perencanaan lima tahun. Dengan demikian, IKU menjadi alat ukur kinerja yang konkret dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjawab amanat pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi: " SABU RAIJUA BANGKIT, MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI."

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan sebagai alat ukur utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. IKD mencerminkan capaian yang ingin diraih dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Penyusunan target IKD dilakukan secara sistematis dan berbasis data, dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya (baseline), sumber daya yang tersedia, serta tantangan dan potensi wilayah.

Target-target yang ditetapkan melalui IKD juga berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMD dan menjadi dasar evaluasi kinerja Kepala Daerah setiap tahunnya, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut disusun agar selaras dengan arah kebijakan Nasional, target Pembangunan Daerah, serta prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dengan penetapan IKD yang tepat dan terukur, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua memiliki pijakan kuat untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) berlaku untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030. Adapun tahun 2030 merupakan tahun transisi, yang pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode selanjutnya. 

Tabel 4.2  
Indikator Kinerja Utama  
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029

NO	Indikator	Satuan	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PDRB per kapita	(Rp Juta)	18.67	18.92	19.25	19.56	19.97	20.12
	Indeks Pembangunan Manusia	poin	61,72	63,81	65,93	67,99	68,71	70,20
	Tingkat Kemiskinan	%	27,45	26,15	24,31	22,42	20,01	18,19
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,50	4,90	5,02	5,45	5,66	6,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00 – 3,50	3,60 – 3,10	3,20 – 2,80	2,90 – 2,40	2,40 – 1,90	2,00 – 1,50
	Rasio Gini		0,3283-0,3218	0,324-0,3211	0,3211-0,3204	0,3175-0,3197	0,314-0,3190	0,310-0,3183
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	poin	76.56	76.73	76.91	77.08	77.25	77.42
	Indeks Risiko Bencana	poin	102,40	102,40	102,40	102,40	102,40	102,40
	Prevalensi Stunting	%	32.7	31.6	30.4	29.1	28.1	28

Sumber: Hasil Olahan, 2025 

Tabel 4.3  
Indikator Kinerja Daerah

NG	INDIKATGR	SATUAN	TARGET TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1.	Indeks Ketahanan Pangan	skor	58.33	57.71	58.61	58.5	59.07	59.19	Dinas Pertanian dan Pangan
2.	Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan	%	10.59	10.18	9,73,39	9.29	8.86	8.42	Dinas Pertanian dan Pangan
3.	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	95.25	95.5	95.75	96	96.25	96.5	Dinas Pertanian dan Pangan
4.	Cakupan layanan Air Minum Layak	%	68	70	73	75	78	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	9	11	14	17	20	22	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6.	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	13	16	20	25	30	35	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7.	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	poin	102,40	102,40	102,40	102,40	102,40	102,40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	poin	76.56	76.73	76.91	77.08	77.25	77.42	Dinas Lingkungan Hidup
9.	Indeks kemahalan konstruksi	poin							Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Kepadatan Penduduk	jiwa/km <sup>2</sup>							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	PDRB Per Kapita	Rp, Juta	18,67	18,92	19,25	19,56	19,97	20,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	5.7	6.9	8.1	8.5	8.8	9.1	Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
3	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	4,4	5,5	6,6	7,7	8,8	9,9	Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
4	Tingkat Kemiskinan	%	27,45	26,15	24,31	22,42	20,01	18,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,50	4,90	5,02	5,45	5,66	6,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Indeks Gini		0,3283 - 0,3218	0,3247- 0,3211	0,3211- 0,3204	0,3175- 0,3197	0,3140- 0,3190	0,3104- 0,3183	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00 - 3,50	3,60 - 3,10	3,20 - 2,80	2,90 - 2,40	2,40 - 1,90	2,00 - 1,50	Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
8	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	61,72	63,81	65,93	67,99	68,71	70,20	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Proporsi jumlah IKM pada Level Kabupaten	%	0,97	0,45	0,55	0,66	0,77	0,87	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10	Inklusi Keuangan (%)	%	64,01	64,21	64,41	64,61	64,81	65,01	Badan Keuangan Daerah
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	63	63,5	63,9	64	64,2	64,5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,471	0,458	0,445	0,432	0,419	0,406	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	indeks							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	Poin	56,3	56,84	57,36	57,89	58,27	58,86	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
15	Indeks Perlindungan anak	indeks	52,80	52,90	53,00	53,10	53,20	53,30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

M

4.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
16	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Level Kabupaten (%)	%						Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
17	Proporsi jumlah Industri kecil dan Menengah (%)	%	0.97	0.45	0.55	0.66	0.87	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
19	Rasio Koperasi Produktif (%)	%	43.51	44.16	44.81	45.45	46.75	Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
20	Tingkat Digitalisasi Koperasi	%	41.56	42.21	42.86	43.51	44.16	Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
21	Persentase Koperasi Aktif dan Berkinerja Baik (%)	%	43.51	44.16	44.81	45.45	46.75	Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
23	Nilai Tukar Petani (NTP)	indeks						Dinas Pertanian dan Pangan	
25	Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	32.7	31.6	30.4	29.1	28.1	28	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	tahun	7,05	7,28	7,98	8,35	8,99	9,21	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
27	Harapan Lama Sekolah (tahun)	tahun	13,35	13,95	14,21	14,97	15,15	15,65	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
28	Skor Kemampuan Literasi	%							Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	- SD		53.52	56.02	58.52	61.02	63.52	53.52	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	- SMP		60.48	61.58	62.68	63.78	64.88	60.48	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
29	Skor Kemampuan Numerasi	%							Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	- SD		51.35	54.25	57.15	60.05	62.95	51.35	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	- SMP		57.93	59.43	60.93	62.43	63.93	57.93	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
31	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	%	10.38	16.62	22.56	28.65	34.48	40.46	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
32	Indeks Kerukunan Umat Beragama	point							Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
33	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	point							Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
35	Angka Kematian Ibu	per 100,000 KH	217.5	216	215.8	214	213	212	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36	Angka Kematian Bayi	per 1,000 KH	28.5	28	27.8	27.5	26	25.8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	rata-rata anak	3.15	3.14	3.13	3.12	3.1	3.05	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
38	Cakupan Penemuan Kasus TBC ((Notifikasi Kasus TBC)	%	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
39	Kapasitas air baku	m <sup>3</sup> /detik	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
III	ASPEK DAYA SAING								
1	Rasio PDRB Industry Pengolahan	%	1,65	1,72	1,81	1,93	1,95	2,01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	14,90	16,90	18,90	20,90	22,90	24,90	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	proporsi PDRB sektor pariwisata	%	1,32	1,82	2,32	2,82	3,32	3,82	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	Rasio Kewirausahaan daerah (%)	%							Dinas Perindustrian dan Perdagangan

M

A

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	78.89	79.67	80.79	81.59	82.23	83.39	Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
7	Indeks Inovasi Daerah	indeks	40	42.5	45	47.5	50	52.5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	%	67.1	67.31	67.53	67.7	67.91	68.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB	%	0,37	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49	Badan Keuangan Daerah
13	Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	point							Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Indeks Masyarakat Digital	point							Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Persentase desa mandiri	%	-	1,61	1,61	3,23	3,23	3,23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%							Badan Keuangan Daerah
18	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%							Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	3,32	3,41	3,47	3,5	3,58	3,69	Badan Keuangan Daerah
20	Tingkat Inflasi	%							Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Pembangunan)
21	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	%	12,74	12,94	13,14	13,34	13,54	13,34	Badan Keuangan Daerah
22	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	%							Badan Keuangan Daerah
23	Total Kredit/PDRB (%)	%	12,87	13,07	13,27	13,47	13,67	13,87	Badan Keuangan Daerah
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	point							Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
2	Persentase penegakan hukum peraturan daerah	point	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN							OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	2	2.05	2.1	2.15	2.2	2.25	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4	Indeks Pemerintah Digital	poin	2	2.05	2.1	2.15	2.2	2.25	Dinas Komunikasi dan Informatika	
5	Indeks Pelayanan Publik	poin							Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	
6	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	level	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Dinas Komunikasi dan Informatika	
7	Indeks integritas nasional	poin	70,00	70,10	70,20	70,30	70,40	70,50	Inspektorat Daerah	
8	Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	%							Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	
9	Indeks Demokrasi Indonesia	level	-	-	-	-	100	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
10	Proporsi penduduk merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya	%	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
11	Indeks Daya Saing Daerah	POIN							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95.5	96	96.5	97	97.5	98	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
13	Indeks Kapabilitas APIP	Level	1	2	2	3	3	4	Inspektorat Daerah	
14	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah	
15	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	75	80	82	85	87	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
16	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	%							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

M

ti

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	
18	Rasio Konektivitas	point	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
19	Indeks Pembangunan Olahraga	point						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
20	Indeks EPSS	Nilai	1.55	1.6	1.65	1.7	1.75	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	indeks keamanan informasi	level		0.05	0.06	0.07	0.08	Dinas Komunikasi dan Informatika
A	INDIKATOR KINERJA KUNCI Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
I	URUSAN PENDIDIKAN							
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	tahun	13,35	13,95	14,21	14,97	15,15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	tahun	7,05	7,28	7,98	8,35	8,99	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
6	iklim keamanan satuan pendidikan	%						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	- SD		74.59	75.49	76.39	77.29	78.19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	- SMP		73.88	75.38	76.88	78.38	79.88	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
7	iklim keberhinekaan	%						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	- SD		70.18	71.18	72.18	73.18	74.18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	- SMP		73.38	74.38	75.38	76.38	77.38	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
8	iklim Inklusivitas	%						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	- SD		59.82	62.32	64.82	67.32	69.82	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

M

ti

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
	- SMP		61.88	64.28	66.68	69.08	71.48	61.88	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
II	URUSAN KESEHATAN								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
I	Usia Harapan Hidup (UHH)		63	63.5	63.9	64	64.2	64.5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
I	Indeks Layanan Infrastruktur Ke-PU-an		39.18	44.13	48.17	52.24	56.32	60.36	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
IV	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
I	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	%	67.1	67.31	67.53	67.7	67.91	68.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
V	URUSAN KETENTERAMAN, KERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Indeks Resiko Bencana	Nilai	102,40	102,40	102,40	102,40	102,40	102,40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
VI	URUSAN SOSIAL								Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
I	Indeks Kesejahteraan Sosial	%	39,75	42,50	46,00	49,50	52,50	55,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2

M

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
B	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar								
I	URUSAN TENAGA KERJA							Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
1	persentase penanganan tenaga kerja AKAD dan AKAN yang bermasalah	%	100	100	100	100	100	Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
2	persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	%	100	100	100	100	100	Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	
II	URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.471	0.458	0.445	0.432	0.419	0.406	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,65	94,31	94,99	95,01	95,50	95,90	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	52,80	52,90	53,00	53,10	53,20	53,30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Cakupan Desa Kelurahan Layak Anak	%	56,72	71,64	86,57	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III	URUSAN PANGAN								Dinas Pertanian dan Pangan
1	Indeks Ketahanan Pangan	skor	58.33	57.71	58.61	58.5	59.07	59.19	Dinas Pertanian dan Pangan
IV	URUSAN PERTANAHAN								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan								Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

M

2

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
V	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	point	76.56	76.73	76.91	77.08	77.25	77.42	Dinas Lingkungan Hidup
VI	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	%	88,65	88,75	88,85	88,95	89,05	89,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
VII	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Indeks Desa	nilai	0,707	0,707-0,815	0,707-0,815	0,707-0,815	0,707-0,815	0,707-0,815	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
VIII	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	55.1	55.15	55.2	55.25	55.3	55.5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun/ age spesifik fertility rate)	kelahiran/1000 WUS	22	21.5	21	20.5	20.2	20	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
IX	URUSAN PERHUBUNGAN								Dinas Perhubungan
1	Rasio Konektivitas	point	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7	Dinas Perhubungan
X	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Badan Publik yang Informatif	%							Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Cakupan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

M



NO	i INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
4	Cakupan pengembangan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	%						Dinas Komunikasi dan Informatika	
5	Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital	Skor/Nilai	2	2.05	2.1	2.15	2.2	2.25	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Presentase OPD yang dilayani Akses Internet Terintegrasi oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
XI	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
1	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	5.7	6.9	8.1	8.5	8.8	9.1	Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
XII	URUSAN PENANAMAN MODAL								Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	realisasi Investasi		8.000	10.000	15.000	25.000	50.000	100.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
XIII	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	Indeks Pembangunan Pemuda	%	56.30	56.84	57.36	57.89	58.27	58,86	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	i Indeks Partisipasi Olahraga	%	59.54	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
XIV	URUSAN STATISTIK								Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Indeks EPSS	Nilai	1.55	1.6	1.65	1.7	1.75	1.8	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektor	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Tingkat Pemenuhan data sektoral	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

M

ti

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	
XV	URUSAN PERSANDIAN							Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Nilai Cyber Security Maturity (CSM)	Level	0	1	1	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
XVI	URUSAN KEBUDAYAAN							Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	2,8	2,85	2,90	2,95	3,05	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
XVII	URUSAN PERPUSTAKAAN							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	nilai	50	55	60	65	75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
XVIII	URUSAN KEARSIPAN							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	nilai	65	70	75	80	85	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C	Urusan Pilihan							
I	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							Dinas Kelautan dan Perikanan
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	100,97	101,27	101,57	101,87	102,17	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan NTPi)	%	105,56	105,89	106,16	106,46	107,60	Dinas Kelautan dan Perikanan
II	URUSAN PARIWISATA							Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1	Rasio PDREB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,32	1,82	2,32	2,82	3,32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	11,36	11,86	12,36	12,86	13,86	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	lama tinggal wisatawan	hari	3	3	3	3	3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

M

ti

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
4	Pertumbuhan pelaku ekraf	%	14,9	16,9	18,9	20,9	22,9	24,9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
III	URUSAN PERTANIAN								Dinas Pertanian dan Pangan
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	indeks							Dinas Pertanian dan Pangan
VI	URUSAN PERDAGANGAN								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	16,74	17,24	17,74	18,24	18,74	19,74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	persentase nilai ekspor non migas	%	7,34	8,54	9,45	10,07	10,46	10,65	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
VII	URUSAN PERINDUSTRIAN								Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	2,12	2,62	3,12	3,62	4,12	5,12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	persentase pelaku IKM yang mendapatkan fasilitas sertifikasi	%	5,31	5,76	6,21	6,66	7,11	7,56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
I	Unsur Sekretariat Daerah								Sekretariat Daerah
1	Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten	point	CC	B	B	BB	BB	BB	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	CC	B	B	BB	BB	BB	Sekretariat Daerah
II	Unsur Sekretariat DPRD								Sekretariat DPRD
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
III	Unsur Perencanaan								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	indeks	75	80	82	85	87	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
IV	Unsur Keuangan								Badan Keuangan Daerah
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah
2	persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah		3,32	3,41	3,47	3,5	3,58	3,69	Badan Keuangan Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB	
			2025	2026	2027	2028	2029		2030
V	Unsur Kepegawaian							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
I	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	74.13	76.13	78.13	80.13	82.13	84.13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
VIII	Unsur Pengawasan								Inspektorat Daerah
I	Indeks Kapabilitas APIP	Level	1	2	2	3	3	4	Inspektorat Daerah
IX	Unsur Pemerintahan Umum								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
I	Indeks Demokrasi Indonesia	Level	77.39	-	-	-	100	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8

## BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, sinkronisasi terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyesuaian dengan RPJMN 2025 – 2029 dan berbagai kebijakan pusat maupun tertib administrasi yang diatur dalam Inmendagri nomor 2 tahun 2025.

Dokumen RPJMD ini adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah (*top – down*) dan bawah-atas (*bottom – up*).

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua dalam periode 2025-2029 perlu memperhatikan beberapa kaidah yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya, sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

### BAB I5.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam hal RPJMD Kabupaten Sabu Raijua periode berikutnya belum disusun dan ditetapkan, demi menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten maka penyusunan RKPD tahun 2030 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sabu Raijua periode bersangkutan, serta berpedoman pula pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode bersangkutan guna menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Sabu Raijua dengan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. RKPD Tahun 2030 disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya. Selanjutnya, RKPD Tahun 2030 sebagai masa transisi akan menjadi tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

### BAB II5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 – 2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati dan Wakil Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua 2025–2029 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025–2029 kepada masyarakat.
3. Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2025–2029 bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dunia usaha serta masyarakat.

4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
5. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sabu Raijua mulai Tahun 2025 sampai dengan 2030.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025-2029.

### BAB III.5.2 PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Memperhatikan program/kegiatan yang mempunyai prioritas tinggi, namun Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam kemampuan penganggaran seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan:

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya serta kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta (*public-private partnership*) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik serta pembangunan kapasitas yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social and Environmental Responsibility/CSR and CER*) diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Koordinasi dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta perubahan perilaku yang lebih baik bagi masyarakat.
4. Kemitraan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Swasta, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, TNI, Polri, Lembaga Internasional dan pemerintah desa dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan IPM, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
5. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sabu Raijua harus mempertimbangkan kondisi bauran geografi-biologi-ekonomi-politik-sosial-budaya (geobioekopolsosbud) sebagai daerah kepulauan dan daerah perbatasan dengan memanfaatkan semua mitra potensi untuk kepentingan nasional dan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
6. Indikator-indikator kinerja utama pembangunan 2018-2023 merupakan sebuah rancangan masa depan Sabu Raijua yang harus dicapai bersama dan sebagai tantangan besar bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan masa depan masyarakat yang bermartabat.

7. Kunci pembangunan terletak pada inovasi yang berbasis pada iptek dengan langkah-langkah terobosan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan mengutamakan nilai-nilai moralitas, hukum, partisipasi, *M* efektivitas, efisiensi, adil (inklusif), transparan, dan akuntabel. *v*



BUPATI SABU RAIJUA, *f*

*Krisman B. Riwu Kore*  
KRISMAN B. RIWU KORE